



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Bontang.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II RKPD

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS Daerah sebagai dasar penyusunan rancangan APBD Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2025 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. prioritas pembangunan Daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Tahun 2025 berpedoman pada rencana kerja pemerintah Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.
- (3) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD Tahun 2025 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (4) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. BAB VII : Penutup.
- (5) Rincian RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

BAB IV PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan/subkegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Wali Kota dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penambahan kegiatan/subkegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



[Signature]
Andi Kurnawansah, SH, MH
NIP. 196907152003122009

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 5 Juli 2024
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 5 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2024 NOMOR 16

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

RKPD TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... I

DAFTAR TABEL..... II

DAFTAR GAMBAR V

BAB I PENDAHULUAN..... - 1 -

1.1 Latar Belakang..... - 1 -

1.2 Dasar Hukum Penyusunan - 2 -

1.3 Hubungan Antar Dokumen - 3 -

1.4 Maksud dan Tujuan - 5 -

1.5 Sistematika Dokumen RKPD - 5 -

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH - 6 -

2.1 Kondisi Umum Daerah..... - 6 -

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi - 6 -

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... - 18 -

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum - 34 -

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah..... - 103 -

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2021-2026 Tahun Ke-2..... - 112 -

2.2.1 Evaluasi hasil RKPD Triwulan 1 tahun 2024 - 112 -

2.2.2 Evaluasi pelaksanaan program RPJMD Kota Bontang sampai dengan tahun 2023 - 197 -

2.2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah..... - 203 -

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH - 204 -

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... - 204 -

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional dalam RKP 2025..... - 204 -

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 209 -

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi pada RKPD Kota Bontang Tahun 2024 - 210 -

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 - 211 -

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah - 212 -

3.2.1 Pendapatan Daerah - 212 -

3.2.2 Belanja Wajib dan Mengikat Daerah..... - 217 -

3.2.3. Belanja Daerah..... - 218 -

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah - 220 -

3.2.4 Proyeksi Kapasitas Fiskal Tahun 2024 - 222 -

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH - 224 -

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan - 224 -

4.1.1 Tujuan dan Sasaran RKPD Kota Bontang Tahun 2025 - 224 -

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025..... - 225 -

4.2.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) - 225 -

4.2.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalimantan Timur Tahun 2025 - 228 -

4.2.3 Pokok-pokok pikiran DPRD - 229 -

4.2.4 Prioritas Pembangunan Kota Bontang Tahun 2024 - 232 -

4.2.5. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Bontang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional - 250 -

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN - 252 -

5.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah - 252 -

5.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah - 253 -

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH - 678 -

6.1 Indikator Kinerja Pembangunan - 678 -

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) - 679 -

6.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - 680 -

BAB VII PENUTUP - 693 -

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah RT dan Luas Kelurahan Kota Bontang - 7 -

Tabel 2. 2 Luas Tutupan dan Penggunaan Lahan Kota Bontang Tahun 2021 - 12 -

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan Tahun 2023 - 16 -

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Kota Bontang Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2023..... - 17 -

Tabel 2. 5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023 - 20 -

Tabel 2. 6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023 - 20 -

Tabel 2. 7 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023..... - 21 -

Tabel 2. 8 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Bontang 2019-2023..... - 22 -

Tabel 2. 9 Statistik kemiskinan Kota Bontang tahun 2018-2023..... - 25 -

Tabel 2. 10 Perbandingan Persentase penduduk miskin Kota Bontang dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota - 26 -

Tabel 2. 11 Data P3KE Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2023..... - 27 -

Tabel 2. 12 Jumlah tindak kriminal menonjol (crime indeks) menurut jenis kejahatan di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023..... - 28 -

Tabel 2. 13 Dimensi Pembentuk IPM - 29 -

Tabel 2. 14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang Menurut Gender - 30 -

Tabel 2. 15 TPAK, TPT, dan TKK Kota Bontang Tahun 2019-2023..... - 33 -

Tabel 2. 16 Kondisi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2019-2023 - 34 -

Tabel 2. 17 Kondisi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2019-2023 - 34 -

Tabel 2. 18 indikator pada Jenjang TK/RA Kota Bontang Tahun 2021-2023 - 35 -

Tabel 2. 19 indikator Pendidikan Dasar Kota Bontang Tahun 2019-2023..... - 35 -

Tabel 2. 20 SDG's Urusan Pendidikan Kota Bontang Tahun 2019-2023 - 38 -

Tabel 2. 21 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pendidikan Tahun 2022-2023 . - 38 -

Tabel 2. 22 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan..... - 40 -

Tabel 2. 23 Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 - 42 -

Tabel 2. 24 Kesesuaian Terhadap RTRW..... - 48 -

Tabel 2. 25 Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - 49 -

Tabel 2. 26 Pencapaian Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 - 50 -

Tabel 2. 27 Realisasi Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023 - 53 -

Tabel 2. 28 Pencapaian Indikator SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman - 54 -

Tabel 2. 29 Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023 - 55 -

Tabel 2. 30 Pencapaian Indikator SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2023 - 56 -

Tabel 2. 31 Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2019-2023 - 57 -

Tabel 2. 32 Pencapaian Indikator TPB - 57 -

Tabel 2. 33 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Sosial..... - 58 -

Tabel 2. 34 Perkembangan Penempatan Kerja Tahun 2019-2023..... - 59 -

Tabel 2. 35 Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kota Bontang Tahun 2023 .. - 60 -

Tabel 2. 36 Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023..... - 62 -

Tabel 2. 37 Pencapaian Indikator TPB Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023	- 62 -
Tabel 2. 38 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pangan Tahun 2019-2023	- 63 -
Tabel 2. 39 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2019 – 2023.....	- 64 -
Tabel 2. 40 Jumlah Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan dan Jenis Hak Atas Tanah di Kota Bontang	- 66 -
Tabel 2. 41 Jumlah Sertifikat Menurut Kecamatan dan Permohonan Pendaftaran Tanah di Kota Bontang.....	- 66 -
Tabel 2. 42 Tabel Indeks Kualitas Air	- 67 -
Tabel 2. 43 Hasil Uji Kualitas Udara Ambien Tahun 2023.....	- 68 -
Tabel 2. 44 Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2023.....	- 68 -
Tabel 2. 45 Tabel data Indeks Kualitas Lahan Kota Bontang	- 69 -
Tabel 2. 46 Tabel Hasil perhitungan Indeks Kualitas Lahan	- 69 -
Tabel 2. 47 Tabel Perhitungan IKLH Kota Bontang Tahun 2023	- 70 -
Tabel 2. 48 Data Persampahan Kota Bontang.....	- 72 -
Tabel 2. 49 Persentase Penduduk ber-NIK di Kota Bontang.....	- 73 -
Tabel 2. 50 Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Bontang.....	- 74 -
Tabel 2. 51 Penerbitan Akta Kematian di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023.....	- 74 -
Tabel 2. 52 Penerbitan Akta Nikah di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023	- 75 -
Tabel 2. 53 Kinerja Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.....	- 75 -
Tabel 2. 54 Kinerja Daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa Tahun 2019-2023	- 76 -
Tabel 2. 55 Realisasi Kinerja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2022	- 77 -
Tabel 2. 56 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 -2023	- 77 -
Tabel 2. 57 Jumlah Kendaraan Menurut Rute Angkutan Pelayanan Umum di Kota Bontang Tahun 2019 - 2023.....	- 78 -
Tabel 2. 58 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kota Bontang Tahun 2020-2022	- 79 -
Tabel 2. 59 Jumlah Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Bontang Tahun 2020 – 2023	- 79 -
Tabel 2. 60 Jumlah Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor di Kota Bontang Tahun 2022	- 80 -
Tabel 2. 61 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021	- 83 -
Tabel 2. 62 Jumlah BTS menurut Kecamatan di Kota Bontang (unit) Tahun 2016 - 2020	- 83 -
Tabel 2. 63 Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi di Kota Bontang Tahun 2022 – 2023	- 84 -
Tabel 2. 64 Aspek Pelayanan Umum Bidang Koperasi, Usaha Mikro Dan Menengah Tahun 2028-2023	- 85 -
Tabel 2. 65 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal Tahun 2019-2023	- 86 -
Tabel 2. 66 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olah Raga Tahun 2018-2023	- 86 -
Tabel 2. 67 Capaian Kinerja Urusan Statistik di Kota Bontang Tahun 2021 – 2023 ..	- 87 -
Tabel 2. 68 Akses Rumah Tangga terhadap Perangkat TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di Kota Bontang	- 88 -
Tabel 2. 69 Capaian Kinerja Urusan Persandian di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023	- 89 -
Tabel 2. 70 Jumlah Pengamanan Website/Aplikasi Kota Bontang.....	- 89 -
Tabel 2. 71 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan.....	- 89 -
Tabel 2. 72 Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Perpustakaan	- 90 -
Tabel 2. 73 Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Kearsipan Tahun 2021-2023.....	- 90 -
Tabel 2. 74 Produksi Perikanan Tahun 2019-2023.....	- 91 -
Tabel 2. 75 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Tahun 2018-2023.....	- 92 -
Tabel 2.76 Ekonomi Kreatif Kota Bontang Tahun 2023.....	- 93 -
Tabel 2. 77 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian Tahun 2019-2023.....	- 93 -
Tabel 2. 78 Aspek Pelayanan Umum Bidang Perdagangan Tahun 2018-2023	- 94 -
Tabel 2. 79 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian	- 95 -
Tabel 2. 80 Kinerja Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2019-2023.....	- 97 -
Tabel 2. 81 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keuangan Tahun 2021-2023.....	- 99 -

Tabel 2. 82 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021-2023	- 99 -
Tabel 2. 83 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Tahun 2019- 2023....	- 101 -
Tabel 2. 84 Capaian SAKIP, Indek Reformasi Birokrasi dan SKM Kota Bontang Tahun 2020-2023	- 102 -
Tabel 2. 85 Hasil Keputusan dari Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Jenis Keputusan di Kota Bontang, 2018-2023	- 102 -
Tabel 2. 86 Panjang Jalan di Kota Bontang tahun 2023	- 103 -
Tabel 2. 87 Luas Genangan Banjir Tiap Kelurahan Tahun 2023	- 105 -
Tabel 2. 88 Aspek Daya Saing dalam Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	- 106 -
Tabel 2. 89 Distribusi Air Pada Instalasi Pengolah Air (IPA)	- 108 -
Tabel 2. 90 Jumlah Pelanggan, Pemakaian Air dan Penjualan Air Perumdam Tirta Taman Tahun 2019-2023	- 108 -
Tabel 2. 91 Jumlah Hotel Menurut Kecamatan dan Klasifikasi di Kota Bontang Tahun 2022	- 109 -
Tabel 2. 92 Perkembangan Jumlah Industri Tahun 2018 – 2023	- 109 -
Tabel 2. 93 Perkembangan Jumlah Pasar Kota Bontang dari tahun 2018-2023.....	- 109 -
Tabel 2. 94 Perkembangan Lama Proses Ijin di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023..	- 110 -
Tabel 2. 95 Perkembangan Fasilitas Pendidikan Di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023	- 110 -
Tabel 2. 96 Perkembangan Fasilitas Kesehatan Di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023.....	- 111 -
Tabel 2. 97 Status Capaian Indikator terhadap target RKPD	- 112 -
Tabel 2. 98 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD dan APBD Triwulan 1 Tahun 2024	- 113 -
Tabel 2. 99 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan 1 Tahun 2024	- 115 -
Tabel 2. 100 Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan 1 Tahun 2024 Berdasarkan Urusan.....	- 117 -
Tabel 2. 101 Capaian Indikator Sasaran 1 Tahun 2023	- 198 -
Tabel 2. 102 Capaian Indikator Sasaran 2 Tahun 2023	- 199 -
Tabel 2. 103 Capaian Indikator Sasaran 3 Tahun 2023	- 200 -
Tabel 2. 104 Capaian Indikator Sasaran 4 Tahun 2023	- 200 -
Tabel 2. 105 Capaian Indikator Sasaran 5 Tahun 2023	- 201 -
Tabel 2. 106 Capaian Indikator Sasaran 5 Tahun 2023	- 201 -
Tabel 2. 107 Capaian Indikator Sasaran 9 Tahun 2023	- 202 -
Tabel 2. 108 Capaian Indikator Sasaran 9 Tahun 2023	- 203 -
Tabel 3. 1 Sasaran Ekonomi Makro tahun 2025	- 206 -
Tabel 3. 2 Realisasi, Penetapan dan Proporsi Pendapatan Kota Bontang Tahun 2021-2024	- 215 -
Tabel 3. 3 Proyeksi dan Proporsi Pendapatan RKPD Tahun 2025	- 216 -
Tabel 3. 4 Pengeluaran Wajib dan Mengikak5 Kota Bontang Tahun 2024	- 217 -
Tabel 3. 5 Realisasi, Penetapan dan Proporsi Belanja Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021-2024.....	- 219 -
Tabel 3. 6 Proyeksi dan Proporsi Belanja pada RKPD Kota Bontang Tahun 2025....	- 220 -
Tabel 3. 7 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2023 dan Penetapan Pembiayaan Tahun 2024	- 221 -
Tabel 3. 8 Proyeksi Pembiayaan dalam RKPD Tahun 2025.....	- 222 -
Tabel 3. 9 Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah Tahun 2025	- 223 -
Tabel 4. 1 Tujuan dan sasaran RKPD Kota Bontang Tahun 2025.....	- 224 -
TABEL 4. 2 SASARAN PEMBANGUNAN RKP 2025.....	- 228 -
TABEL 4. 3 JUMLAH USULAN ASPIRASI BERDASARKAN ANGGOTA DPRD	- 230 -
Tabel 4. 4 Status Input Aspirasi Berdasarkan Perangkat Daerah Pelaksana	- 230 -
Tabel 4. 5 Fokus Kebijakan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Bontang Tahun 2025	- 231 -
Tabel 4. 6 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan dan Arah Kebijakan pada RKPD Kota Bontang Tahun 2025.....	- 234 -
Tabel 4. 7 Program Prioritas Pembangunan dalam RKPD Kota Bontang Tahun 2025	- 236 -
Tabel 4. 8 Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Bontang Tahun 2025	- 250 -
Tabel 4. 9 Keselarasan Prioritas Pembangunan pada RKPD Kota Bontang Tahun 2025, dengan Prioritas Pembangunan pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Nasional RKP Tahun 2025	- 250 -
Tabel 5. 1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025	- 250 -
Tabel 5. 2 Program Kerja Perangkat Daerah Kota Bontang Tahun 2025.....	- 250 -

Tabel 6. 1 Target Indikator Makro Pembangunan Kota Bontang Tahun 2025	678 -
Tabel 6. 2 Kinerja Utama Kota Bontang Tahun 2025	679 -
Tabel 6. 3 Indikator Kinerja penyelenggaraan Kota Bontang Tahun 2025	680 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kota Bontang	6 -
Gambar 2. 2 Peta Orientasi Lokasi Kota Bontang	8 -
Gambar 2. 3 Topografi Kota Bontang.....	8 -
Gambar 2. 4 Peta Formasi Geologi Kota Bontang.....	9 -
Gambar 2. 5 Tingkat Kelembaban di Kota Bontang.....	10 -
Gambar 2. 6 Rata-rata Curah Hujan Bulanan Kota Bontang.....	10 -
Gambar 2. 7 Peta Daerah Aliran Sungai Kota Bontang	11 -
Gambar 2. 8 Peta Tutupan dan Penggunaan Lahan Tahun 2021	13 -
Gambar 2. 9 Peta Lokasi dan Pengembangan Pariwisata Kota Bontang	14 -
Gambar 2. 10 Indeks Rawan Bencana Indonesia Kota Bontang.....	15 -
Gambar 2. 11 Diagram Dinamika Penduduk Kota Bontang Menurut Kecamatan Tahun 2023.....	17 -
Gambar 2. 12 Piramida Penduduk Kota Bontang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023	18 -
Gambar 2. 13 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional tahun 2019 sd 2023.....	19 -
Gambar 2. 14 Laju Pertumbuhan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Kota Bontang 2018-2022	23 -
Gambar 2. 15 Rasio Gini Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Bontang Tahun 2019 – 2023.....	24 -
Gambar 2. 16 Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda Tahun 2019 - 2023.....	25 -
Gambar 2. 17 Sebaran Data Kemiskinan Ekstrem Kota Bontang Tahun 2023.....	27 -
Gambar 2. 18 IPM Kota Bontang,Kalimantan Timur dan Nasional	29 -
Gambar 2. 19 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)Kota Bontang	31 -
Gambar 2. 20 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	32 -
Gambar 2. 21 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya di Kota Bontang Tahun 2019-2023.....	32 -
Gambar 2. 22 Kuantitas Penyediaan Air Baku.....	44 -
Gambar 2. 23 Kontinuitas Distribusi Air Bersih	44 -
Gambar 2. 24 Capaian Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik).....	45 -
Gambar 2. 25 Panjang Jalan Kondisi Mantap	46 -
Gambar 2. 26 Kondisi Jalan Kota Bontang	46 -
Gambar 2. 27 Kapasitas Aliran Sungai.....	47 -
Gambar 2. 28 Daya Tampung Waduk Kanaan	47 -
Gambar 2. 29 Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Bontang	48 -
Gambar 2. 30 Kondisi Rumah di Kota Bontang Tahun 2020 – 2023.....	51 -
Gambar 2. 31 Keterisian Rusunawa dan Rumah Khusus Nelayan.....	52 -
Gambar 2. 32 Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Kota Bontang.....	52 -
Gambar 2. 33 Sisa Luasan Kumuh Berdasarkan Kawasan Kumuh di Kota Bontang.....	53 -
Gambar 2. 34 Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Tahun 2019-2023	60 -
Gambar 2. 35 Capaian IKA Kota Bontang 2019-2023	67 -
Gambar 2. 36 Capaian IKU Kota Bontang Tahun 2019-2023	69 -
Gambar 2. 37 Indeks Kualitas Lahan Kota Bontang Tahun 2021-2023	70 -
Gambar 2. 38 Perhitungan IKLH Kota Bontang Tahun 2020-2023	70 -
Gambar 2. 39 Pelaporan Aksi Iklim Kota Bontang Tahun 2023	71 -
Gambar 2. 40 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang menerima Penghargaan Green Leadership Capaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023	72 -
Gambar 2. 41 Jumlah Kunjungan Kapal dari Dalam Negeri dan Luar Negeri di Pelabuhan Bontang.....	81 -
Gambar 2. 42 Jumlah Volume Kapal dari Dalam Negeri dan Luar Negeri di Pelabuhan Bontang.....	81 -
Gambar 2. 43 Jumlah Penumpang Yang Diangkut Kapal Laut Melalui Pelabuhan Bontang.....	82 -
Gambar 2. 44 jumlah jaringan telepon kabel	84 -
Gambar 2. 45 Distribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023	98 -
Gambar 2. 46 Luas Wilayah Genangan Banjir	105 -
Gambar 2. 47 Peta Area Genangan Banjir Kota Bontang Tahun 2023	106 -

Gambar 3. 1 Tema dan Penekanan RKP Tahun 2025..... - 205 -
Gambar 3. 2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 - 206 -

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan tahunan Kota Bontang yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 akan menjadi panduan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025. Selanjutnya dalam rangka penyusunan APBD, dokumen RKPD akan menjadi pedoman untuk proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengacu pada RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026 dengan visi Terwujudnya Kota yang Bontang Lebih Hebat dan Beradab, penyusunan RKPD tahun 2025 merupakan penjabaran tahunan ke-empat yang mengusung tema “Penguatan Daya Saing Investasi, Pariwisata, dan UMKM”. Rancangan tema pembangunan ini akan menjadi arahan kebijakan utama penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2025.

Sebagai bagian integral perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penyusunan RKPD harus menjamin adanya sinergitas dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan nasional. Untuk memastikan adanya sinergitas perencanaan pembangunan, pendekatan penyusunan RKPD dilaksanakan berdasarkan pada pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, *top down* dan *bottom up*. Selanjutnya sejalan dengan orientasi kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2019-2024, Penyusunan RKPD memuat kebijakan perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.

Pada aspek tahapan penyusunan, Dokumen RKPD sepenuhnya mengacu pada tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal RKPD, Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan Penetapan RKPD. Sejalan dengan kewajiban penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI), penyusunan program dan kegiatan dalam dokumen RKPD sepenuhnya dilakukan melalui jaringan secara *online*. Demikian pula dengan rangkaian tahapan penyusunan mulai Musrenbang Kelurahan, Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD, Musrenbang RKPD di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan Penetapan RKPD dilaksanakan dengan fasilitas jaringan SIPD.

Melalui pelaksanaan keseluruhan tahapan dan proses penyusunan di atas, dokumen RKPD menjadi dokumen perencanaan yang telah memuat program dan kegiatan dan kerangka pendanaannya dengan secara komprehensif telah diselaraskan dengan kerangka kebijakan pembangunan RPJMD, mengakomodasi isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dan secara integratif telah memperhatikan dan mengacu pada kebijakan dan prioritas pembangunan

dalam RKP dan menselaraskan dengan kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kota Bontang tahun 2025 dilaksanakan dengan sepenuhnya memperhatikan berbagai ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan-perundangan terkait baik dalam lingkup nasional maupun daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245: Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
19. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019–2039;
21. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 57);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021 – 2026;

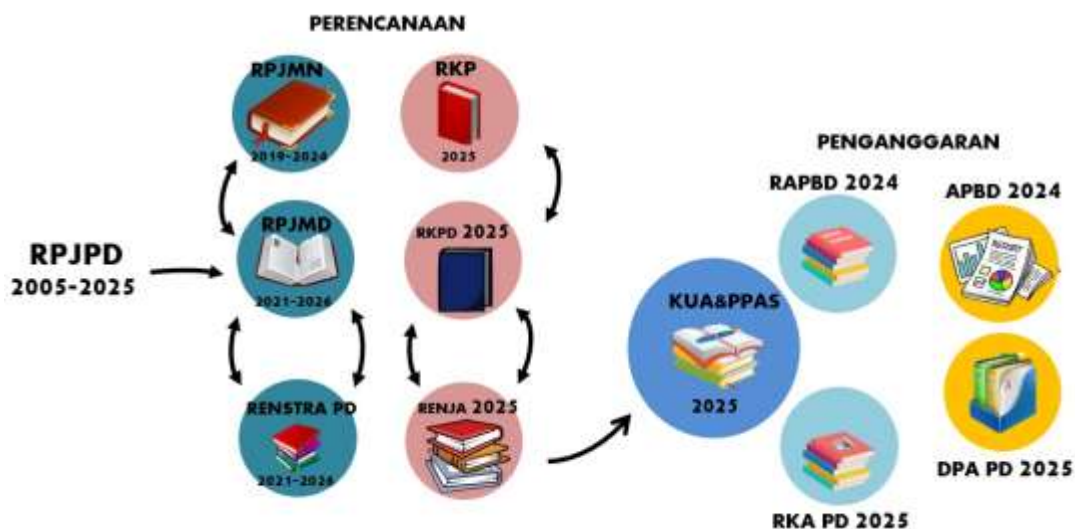
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perancangan perencanaan pembangunan tahunan dalam RKPD tahun 2025 menjadi bagian dalam rangka penjabaran kebijakan perencanaan yang secara hirarki lebih tinggi dan lebih makro yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana

Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJPD merupakan dokumen perencanaan yang secara umum memuat arah kebijakan pembangunan dengan penetapan visi, misi, arah dan sasaran pembangunan untuk kurun waktu 20 tahun. Perencanaan Jangka Panjang ini selanjutnya menjadi acuan dan dijabarkan dalam perumusan visi dan misi pembangunan lima tahunan RPJMD. Dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan pembangunan daerah, maka tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD yang dalam proses penyusunannya dilakukan penyelarasan dengan prioritas dan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP. Dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang disusun dalam RKPD diimplementasikan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) harus mengacu pada RKPD. Sebagai tahapan penghubung antara proses perencanaan dan proses penganggaran, Kesepakatan KUA-PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan RKA-PD dan menjadi bahan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bontang tahun 2025.

Berdasarkan keseluruhan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai sistem penyelenggaraan pembangunan daerah, penyusunan RKPD sangat diperlukan sebagai salah satu instrumen untuk memastikan terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu Undang-undang Nomo 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengatur bagaimana relevansi dan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut ditunjukkan Gambar 1.1 Keterkaitan antar dokumen perencanaan



Gambar 1. 1 Keterkaitan antar dokumen perencanaan

Adanya keterkaitan dan konsistensi yang jelas antar dokumen perencanaan merupakan bagian penting dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kota Bontang telah sepenuhnya menggunakan aplikasi SIPD yang telah mengintegrasikan keseluruhan tahapan perencanaan dan penganggaran hingga penetapan APBD

1.4 Maksud dan Tujuan

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan, penyusunan RKPD Kota Bontang tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan daerah dan acuan dalam upaya mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Bontang Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut tujuan penyusunan RKPD Kota Bontang Tahun 2025 adalah untuk:

1. Menyediakan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025;
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 yang berpedoman pada dokumen RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2021-2026;
3. Tersedianya acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bontang Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bontang Tahun 2025;
4. Tersedianya acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025; dan
5. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kota Bontang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD Tahun 2023 dan permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi hingga tahun berjalan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2023 dan perkiraan tahun 2025, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta penyajian aspirasi dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Jauh sebelum menjadi daerah Otonom, Bontang berstatus sebagai kecamatan di Kabupaten Kutai. Sejak tahun 1976, Bontang mengalami pertumbuhan dan perkembangan daerah yang sangat pesat akibat dijadikannya Bontang sebagai daerah industri. Hal ini melatarbelakangi munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989 yang menjadikan Bontang sebagai pusat pemerintahan pembantu Bupati Tingkat II Kutai Wilayah Pantai.

Seiring dengan pertumbuhan Kecamatan Bontang, Bontang diusulkan oleh Gubernur Kalimantan Timur untuk menjadi kota administratif. Usulan ini mendapat persetujuan pemerintah pusat pada tahun 1990 dan dilakukan peresmian pada tanggal 16 Mei 1990 dengan ditunjuknya Drs. H. Ishak Karim sebagai Wali Kota Administratif Bontang.

Pada 12 Oktober 1999, Kota Administratif Bontang disahkan dengan UU No.47 Tahun 1999 dan tanggal 16 November 1999 diresmikan bersamaan dengan pelantikan pejabat Wali Kota Bontang Drs. H. Fahmurniddin.

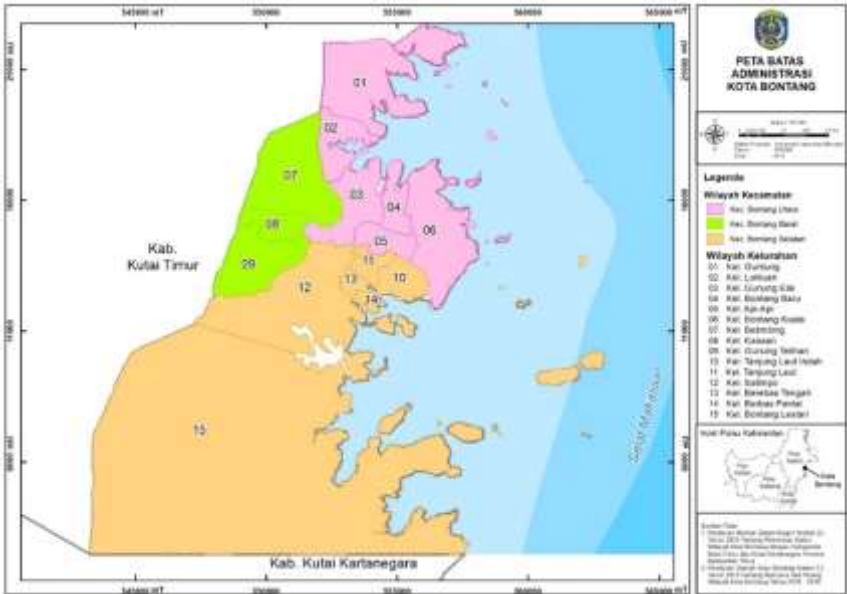
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Kondisi Geografis

Kota Bontang merupakan kota dengan luas wilayah paling statusnya ditingkatkan menjadi daerah otonomi yaitu Kota Bontang yang

kecil di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah darat ± 16.188 ha, adapun batas wilayah Kota Bontang meliputi:

- Sebelah utara : Kabupaten Kutai Timur
- Sebelah timur : Selat Makassar
- Sebelah selatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sebelah barat : Kabupaten Kutai Timur



Sumber: Permendagri Nomor 25, Tahun 2005

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kota Bontang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17 tahun 2002, Kota Bontang terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat. Ketiga kecamatan ini meliputi 15 (lima belas) kelurahan dan 499 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 2.1 Jumlah RT dan Luas Kelurahan Kota Bontang

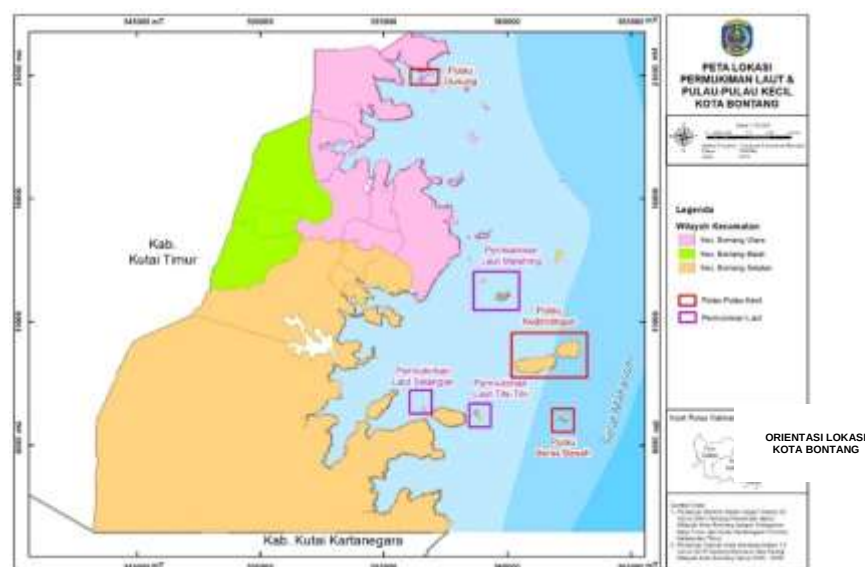
WILAYAH	JUMLAH RT	LUAS (HEKTAR)
Kec. Bontang Utara	205	3.303
<i>Kel. Guntung</i>	18	1.135
<i>Kel. Loktuan</i>	52	335
<i>Kel. Gunung Elai</i>	45	502
<i>Kel. Bontang Baru</i>	28	222
<i>Kel. Api-Api</i>	42	215
<i>Kel. Bontang Kuala</i>	20	894
Kec. Bontang Barat	93	1.794
<i>Kel. Belimbing</i>	51	959
<i>Kel. Kanaan</i>	12	605
<i>Kel. Gunung Telihan</i>	30	229
Kec. Bontang Selatan	201	11.091
<i>Kel. Tanjung Laut Indah</i>	33	252
<i>Kel. Tanjung Laut</i>	38	143
<i>Kel. Satimpo</i>	25	1.771
<i>Kel. Berebas Tengah</i>	62	85
<i>Kel. Berbas Pantai</i>	24	57
<i>Kel. Bontang Lestari</i>	19	8.782
TOTAL	499	16.188

Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 – 2039

A. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Bontang secara geografis terletak di antara 0°01’ Lintang Utara - 0°12’ Lintang Utara dan 117°23’ Bujur Timur - 117°38’ Bujur Timur. Kota Bontang berada pada lokasi yang strategis, dilewati oleh jalan poros trans-kalimantan, berbatasan langsung dengan Selat Makassar yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. PT. Badak NGL dan PT. Pupuk Kalimantan Timur dibangun di Kota Bontang karena faktor lokasi tersebut dan menjadi salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan dan perkembangan Kota Bontang.

Kota Bontang juga memiliki beberapa pulau-pulau kecil, seperti Pulau Beras Basah yang menjadi salah satu objek daya tarik wisata, Pulau Kedindingan, Pulau Gusung yang terdapat permukiman di atasnya, dan pulau-pulau mangrove yang tersebar dari utara hingga Selatan. Selain itu, terdapat pula permukiman di atas laut seperti Melahing, Selangan, dan Tihi-Tihi.



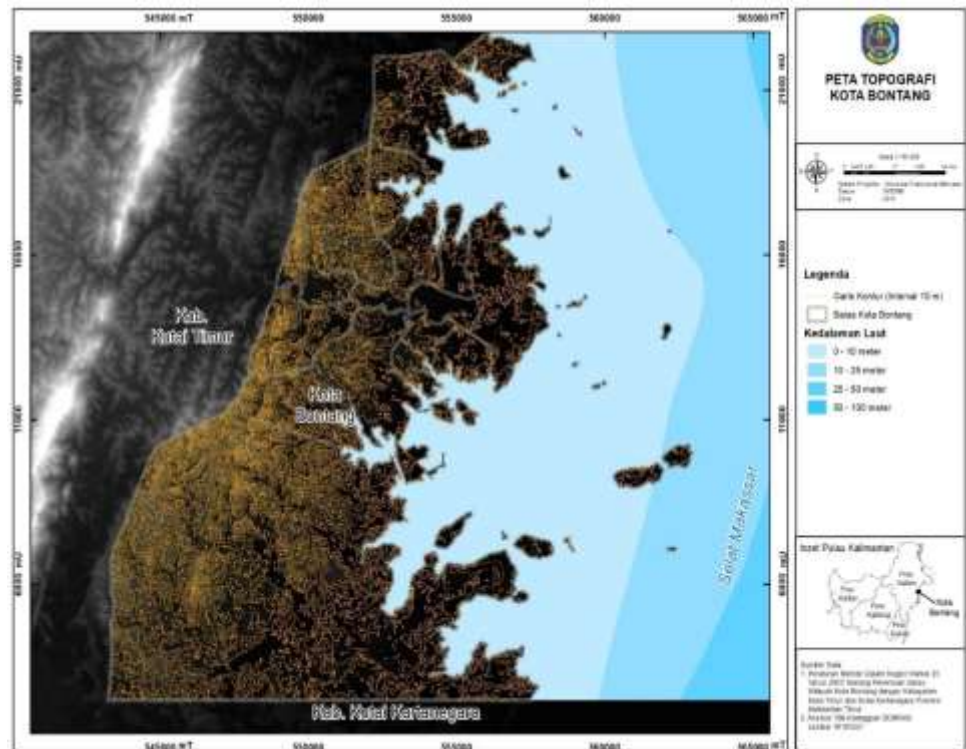
Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039

Gambar 2. 2 Peta Orientasi Lokasi Kota Bontang

B. Topografi

Secara topografis, Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah yang datar, landai, dan sedikit berbukit dengan ketinggian antara 0 – 125 m di atas permukaan laut. Mayoritas wilayah (64%) menempati kawasan pinggir pantai yang relatif datar sehingga relief Kota Bontang terlihat mendatar, khususnya di wilayah pantai dan bergerak membukit hingga bergelombang dari bagian selatan ke barat.

Daerah barat merupakan daerah tertinggi, berbukit, dan perlahan melandai ke arah timur yang merupakan daerah pesisir. Kawasan perbukitan di daerah barat ini pula yang memiliki kelerengan relatif curam dibanding daerah timur. Karena itu pula, daerah barat memiliki keterbatasan sehingga idealnya menjadi kawasan yang perlu dijaga dan dihindarkan di mana menjadi penyangga bagi wilayah perkotaan.



Sumber: Analisis Titik Ketinggian dari DEMNAS Lembar 19161221

Gambar 2. 3 Topografi Kota Bontang

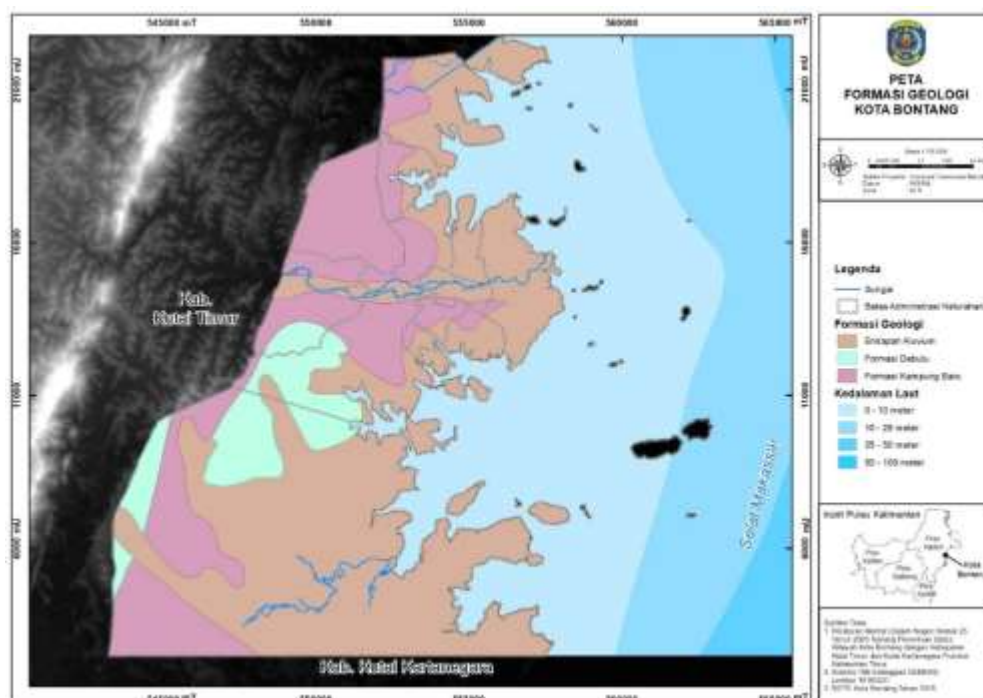
C. Struktur Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, Kota Bontang termasuk dalam sub bagian cekungan Kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah barat perbukitan Gunung Lobang Batik dan sebelah utara Sungai Temputek.

Dari aspek litologi, formasi batuan di Kota Bontang terdiri dari tiga formasi batuan, yaitu:

- 1) Endapan Alluvium, yang tersusun oleh kerakal, kerikil, lempung, dan lumpur sebagai endapan sungai, rawa, pantai, dan delta.
- 2) Formasi Kampungbaru, yang tersusun atas batu pasir kuarsa dengan sisipan lempung, lanau, dan serpih dengan sifat lunak dan mudah hancur. Formasi ini memiliki akuifer potensial di daerah Bontang dengan jenis batuan yang bertindak sebagai akuifer berupa kerikil, pasir kuarsa yang bersifat lepas, batu pasir dan pasir lempung. Formasi ini menindih selaras dan setempat tidak selaras terhadap Formasi Balikpapan.
- 3) Formasi Debulu. Merupakan formasi batuan terkecil di Kawasan Pesisir Bontang yang tersusun atas batu gamping dengan sisipan lempung lanauan dan sedikit napal.

Jenis tanah didominasi oleh podsolik merah kuning, aluvial dan kompleks latosol. Jenis tanah ini memiliki lapisan kuning (*top soil*) yang tipis, peka erosi dan miskin unsur hara. Untuk pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan dibutuhkan pengolahan awal berupa perbaikan tanah (*soil stabilization*) dan pengamanan hutan sehingga kestabilan tanah dan persediaan air tanah tetap terjaga.



Sumber: RDTR Kota Bontang, Tahun 2015

Gambar 2. 4 Peta Formasi Geologi Kota Bontang

D. Kondisi Klimatologi

Proses pergantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfer dalam jangka waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim. Iklim merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfer yang meliputi panas, kelembaban, dan gerakan udara. Kota Bontang berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis sehingga mengalami dua musim, yaitu: musim kemarau dan musim penghujan. Kedua musim ini dipengaruhi oleh angin muson, yaitu: angin

Muson Barat pada bulan November-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober.

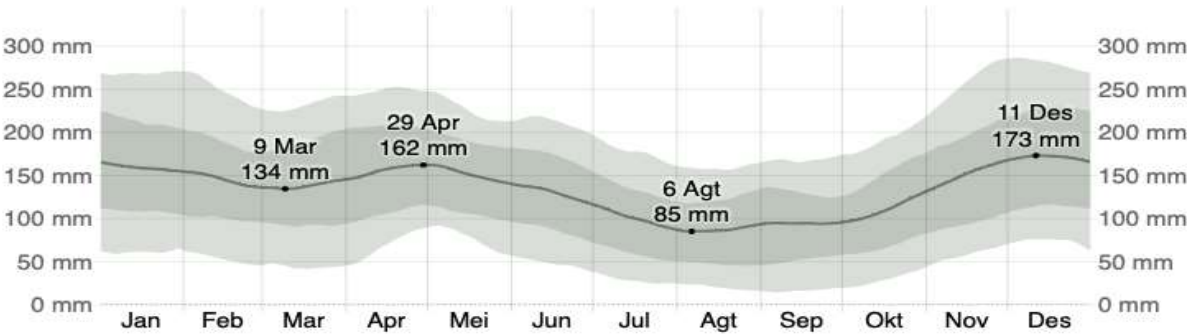
Suhu udara rata-rata tertinggi di Kota Bontang sebesar 27,52°C pada bulan Februari dan terendahnya 24,36°C pada bulan November. Kelembaban udara tertinggi 100% pada bulan Juni, terendahnya 63,75% pada bulan September.



Sumber: id.weatherspark.com, 2024

Gambar 2. 5 Tingkat Kelembaban di Kota Bontang

Terdapat empat stasiun pengamatan cuaca di Bontang, yaitu Stasiun Pengamatan Bontang Lestari, Tanjung Laut, Gunung Elai, dan Gunung Telihan. Bulan Desember merupakan bulan dengan rata-rata curat hujam terbanyak yaitu 173 milimeter. Sedangkan bulan Agustus merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan paling sedikit, yaitu 86 milimeter.



Sumber : id.weatherspark.com, 2024

Gambar 2. 6 Rata-rata Curah Hujan Bulanan Kota Bontang

E. Hidrologi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2015 Tahun 2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, wilayah Kota Bontang terdiri atas 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu:

1. DAS Tanjung
DAS Tanjung seluas ± 415 hektar terletak di wilayah utara Kelurahan Guntung. DAS ini dilewati oleh Sungai Guntung sepanjang ± 4 km dengan lebar antara 2 – 10 meter dan kedalaman rata-rata 1 – 2 meter. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah ± 1 meter, sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah ± 3,5 meter
2. DAS Lempake
DAS Lempake seluas ± 2.726 hektar terletak di sebagian Kelurahan Guntung, Kelurahan Loktuan, Kelurahan Belimbing, Kelurahan

Gunung Elai, Kelurahan Bontang Baru, dan sebagian Kelurahan Bontang Kuala. DAS ini dilewati oleh Sungai Kanibungan sepanjang ± 2 km dan sebagian kecil dari Sungai Guntung. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah ± 1 meter, sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah $\pm 3,5$ meter.

3. DAS Bontang

DAS Bontang seluas ± 2.284 hektar terletak di wilayah tengah Kota Bontang yang mencakup 6 (enam) kelurahan, yaitu: sebagian kecil Kelurahan Belimbing, Kelurahan Kanaan, sebagian Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Api-Api, sebagian Kelurahan Bontang Kuala, dan sebagian Kelurahan Tanjung Laut Indah. DAS ini dilewati oleh aliran Sungai Bontang yang membentang sepanjang ± 18 km dan lebar antara 4 – 10 meter dengan kedalaman rata-rata 1 – 2,5 meter. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah 1 meter, sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah 3,5 meter.

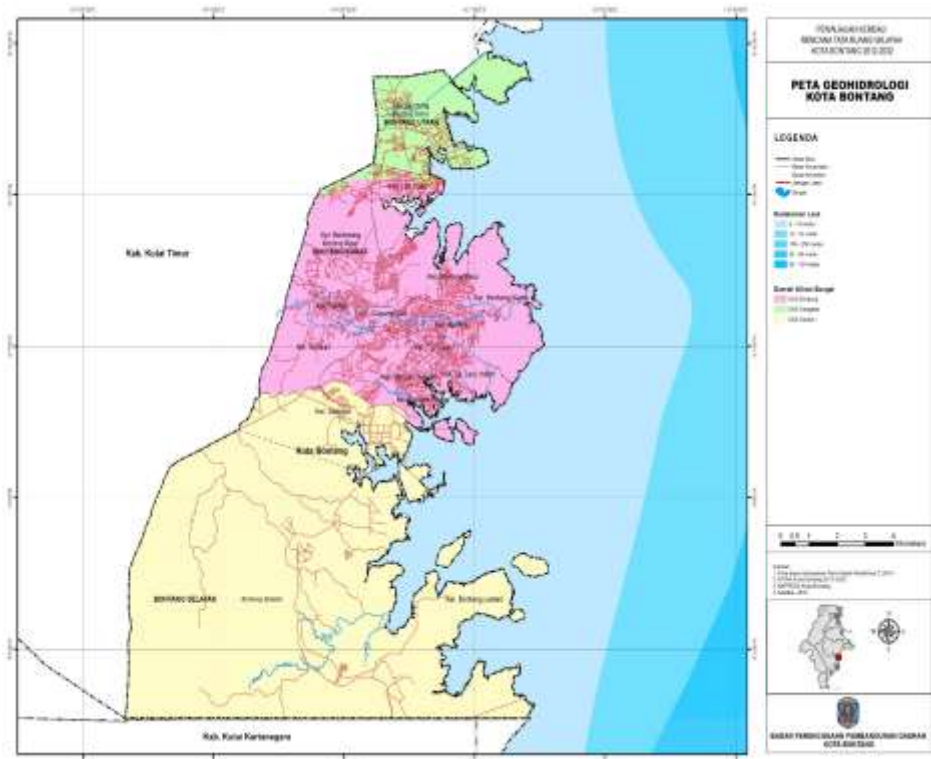
4. DAS Nyerakat

DAS Nyerakat seluas ± 8.051 hektar terletak di bawah DAS Bontang yang meliputi 6 (enam) kelurahan, yaitu: sebagian Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Berbas Pantai, Kelurahan Berebas Tengah, Kelurahan Satimpo, dan Kelurahan Bontang Lestari. Pada DAS ini terdapat Sungai Nyerakat dengan panjang aliran ± 17 km dan lebar sungai antara 3 – 10 meter dengan kedalaman rata-rata 1 – 2 meter.

5. DAS Santan

DAS Santan seluas 2.471 hektar terletak di bawah DAS Nyerakat yang meliputi sebagian Kelurahan Bontang Lestari.

Kelima DAS di atas merupakan bagian dari Wilayah Sungai Karangan yang semuanya bermuara di Selat Makassar. Sungai-sungai tersebut juga mengalirkan air yang berasal dari mata air, terutama air yang keluar dari batuan pasir halus, pasir kasar, dan lempung pasiran yang berasal dari formasi Balikpapan.



Sumber: Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2015, Tahun 2015

Gambar 2. 7 Peta Daerah Aliran Sungai Kota Bontang

Ditinjau dari aspek geohidrologi, cekungan air tanah Kota Bontang termasuk dalam sub bagian cekungan Kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah barat Gunung Lobang Batik dan sebelah utara Sungai Temputuk.

Bagian barat Bontang ke arah perbukitan Gunung Lobang Batik merupakan daerah utama untuk peresapan air tanah tertekan. Air hujan di daerah ini meresap pada batuan formasi Kampungbaru yang didominasi oleh pasir, di bagian paling barat berbatasan dengan formasi Balikpapan, yang terletak memanjang dari utara ke selatan sejajar dengan penyebaran batuan formasi Balikpapan yang menempati sayap antiklin bagian timur, untuk itu perlu untuk menjaga daerah tersebut demi keberlanjutan air tanah dalam yang menjadi air baku utama dan satu-satunya di Kota Bontang.

Secara umum aliran air tanah mengikuti kemiringan lapisan batuan dengan keadaan kemiringan yang lebih tua dari formasi Kampungbaru serta kemiringannya yang lebih terjal (dapat mencapai 400 makin dekat ke arah sumbu antiklin) tidak dapat memberikan imbuhan kepada batuan Formasi Kampungbaru, karena di samping mengalir air pada bidang sendiri juga ada bidang pemisah yaitu *unconformity* (ketidakselarasan). Bidang kontak tersebut dapat dijumpai sekitar jalur pemipaan PT. Pupuk Kaltim. Maka sebagai batas bawah (lantai dasar) cekungan potensial Bontang adalah dialasi oleh Formasi batuan Balikpapan.

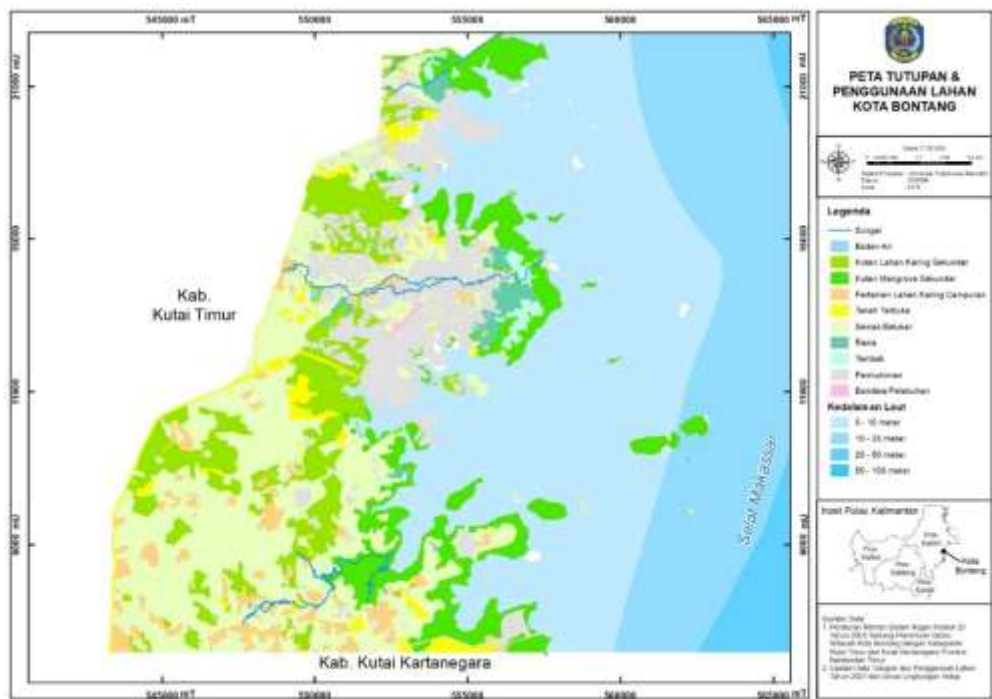
F. Penggunaan Lahan

Secara umum, tutupan lahan dan penggunaan lahan di Kota Bontang pada tahun 2021 didominasi oleh lima jenis, yaitu: semak/belukar (37,70%), permukiman (17,66%), hutan mangrove sekunder (16,11%), hutan lahan kering sekunder (14,79%), dan pertanian lahan kering campuran (6,21%). Penggunaan lahan di Kota Bontang didominasi oleh kawasan non-terbangun yang mencapai sekitar 82,19%. Hal tersebut menunjukkan potensi bontang untuk berkembang masih sangat tinggi, tentunya dengan memperhatikan keberadaan kawasan kehutanan.

Tabel 2. 2 Luas Tutupan dan Penggunaan Lahan Kota Bontang Tahun 2021

JENIS TUTUPAN LAHAN/ PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (HEKTAR)	PERSENTASE (%)
Kawasan Non-Terbangun	13.305	82,19
<i>Badan Air</i>	64	0,40
<i>Hutan Lahan Kering Sekunder</i>	2.395	14,79
<i>Hutan Mangrove Sekunder</i>	2.608	16,11
<i>Pertanian Lahan Kering Campuran</i>	1.006	6,21
<i>Tanah Terbuka</i>	615	3,80
<i>Semak/Belukar</i>	6.103	37,70
<i>Rawa</i>	322	1,99
<i>Tambak</i>	192	1,19
Kawasan Terbangun	2.883	17,81
<i>Permukiman</i>	2.859	17,66
<i>Bandara/Pelabuhan</i>	23	0,14
TOTAL	16.188	100

Sumber : Data Penggunaan Lahan Kota Bontang, Tahun 2021



Sumber: Update Data Tutupan dan Penggunaan Lahan Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2021

Gambar 2. 8 Peta Tutupan dan Penggunaan Lahan Tahun 2021

G. Potensi Pengembangan Wilayah

Perkembangan Kota Bontang jika dilihat dari aspek fisik khususnya kawasan terbangun, relatif lebih berkembang dan terkonsentrasi di wilayah utara. Untuk itu, salah satu kebijakan Pemerintah Kota Bontang adalah mengupayakan akselerasi pembangunan di wilayah selatan. Percepatan pembangunan di wilayah selatan juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan, salah satu kebijakannya adalah dengan membangun akses/ jaringan yang memadai dan memindahkan pusat pemerintahan ke Kelurahan Bontang Lestari. Selain itu, pengembangan kawasan industri baru seluas ± 1.200 hektar diharapkan dapat menjadi magnet pertumbuhan di wilayah selatan.

Potensi utama Kota Bontang memang berada di sektor industri terutama industri migas dan pengolahan, namun seiring penurunan sektor industri saat ini, Pemerintah Kota Bontang berupaya menggali potensi di sektor lainnya. Salah satu yang diupayakan saat ini adalah sektor pariwisata.

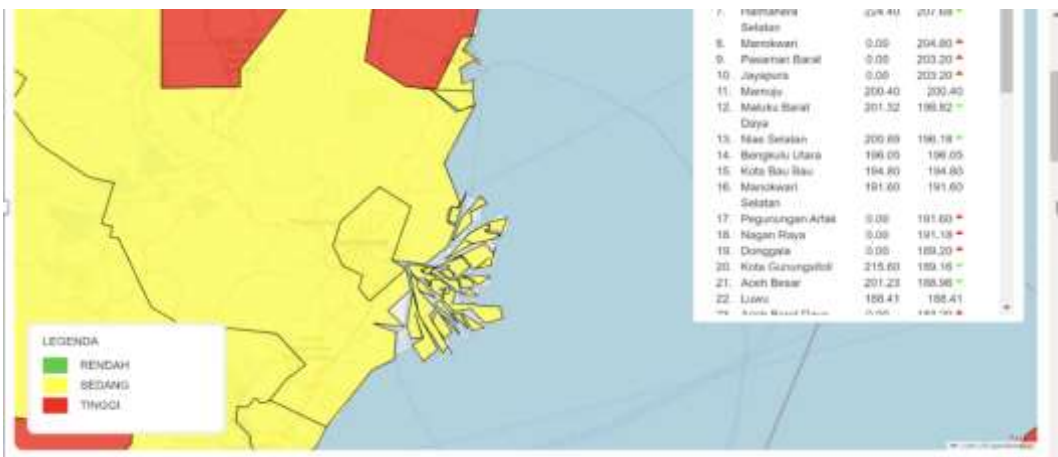
H. Kawasan Strategis Ekonomi

Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan di Kelurahan Bontang Lestari. Pada kawasan tersebut terdapat kawasan pengembangan industri baru yang diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota dan berpotensi ekspor dengan didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.

Kelurahan Bontang Lestari diarahkan sesuai dengan kriteria pengembangan kota berbasis industri dan peningkatan fungsi kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kota Bontang berkedudukan di lokasi strategis dalam lingkup regional, yaitu antara kota Samarinda/ Balikpapan dan kota Sangatta – Bengalon dan memiliki akses langsung ke Selat Makassar. Kondisi strategis ini diperkuat dengan adanya sistem

merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. IRBI dikembangkan atas konsep analisis riwayat kebencanaan yang terjadi dan memberikan kerugian signifikan pada suatu wilayah hingga tingkat kota.

IRBI menunjukkan secara umum Kota Bontang merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana sedang. Klasifikasi potensi sedang ini disebabkan karena Kota Bontang memiliki kerawanan bencana yang cukup kompleks. Potensi bencana di Kota Bontang dapat terjadi secara alami maupun akibat adanya pengaruh manusia, selain itu penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh yang melibatkan seluruh aspek.



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tahun 2023

Gambar 2. 10 Indeks Rawan Bencana Indonesia Kota Bontang

Berdasarkan hasil analisis dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang, setidaknya terdapat 8 (delapan) resiko bencana yang dapat terjadi di Kota Bontang yaitu:

1. Resiko bencana angin;
2. Resiko bencana banjir;
3. Resiko epidemi penyakit;
4. Resiko bencana gempa bumi;
5. Resiko bencana kebakaran;
6. Resiko bencana longsor;
7. Resiko bencana tsunami;
8. Resiko bencana kegagalan teknologi.

Dalam aspek manajemen bencana, jumlah kejadian bencana di Kota Bontang fluktuatif sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Kejadian kebakaran hutan/lahan/rumah masih mendominasi jenis bencana pada 5 tahun terakhir, di mana sempat turun pada tahun 2020 (68 kasus) dan 2021 (36 kasus), namun kembali naik pada tahun 2022 (53 kasus) dan 2023 (72 kasus).

Untuk kejadian banjir di Kota Bontang, ada kecenderungan menurun dari tahun 2019 – 2023, baik secara jumlah, durasi, maupun luasan area terdampak. Hal ini disebabkan oleh berbagai upaya perbaikan drainase, pembangunan turap, dan normalisasi sungai di Kota Bontang. Pada tahun 2023, banjir di Kota Bontang tercatat seluas 190,79 hektar.

2.1.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2023 adalah sebesar 189.968 jiwa, yang terdiri atas 98.746 jiwa perempuan dan 98.222 jiwa

laki-laki. Penduduk Kota Bontang tersebar di 3 (tiga) kecamatan, yakni di Kecamatan Bontang Selatan sebesar 71.040 jiwa (37%), Kecamatan Bontang Utara sebesar 87.692 jiwa (46%) dan Kecamatan Bontang Barat sebesar 31.236 jiwa (16%). Tabel di bawah ini menunjukkan data kependudukan Kota Bontang menurut kelurahan.

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan Tahun 2023

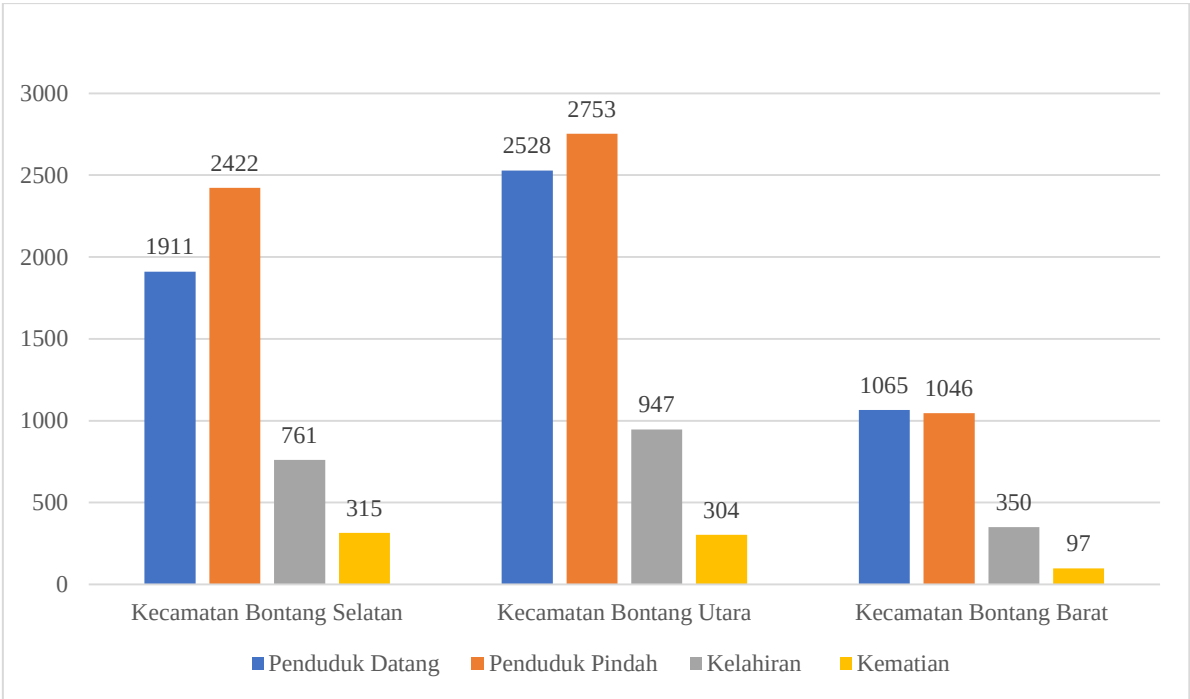
No	Kecamatan/ Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Kepadatan (jiwa/Ha)
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Bontang Selatan	11.090,78	36.764	34.276	6,41
	- Bontang Lestari	8.782,41	3.941	3.397	0,84
	- Satimpo	1.770,69	3.517	3.352	3,88
	- Berebas Pantai	57,20	5.137	4.726	172,43
	- Berebas Tengah	85,23	7.487	7.120	171,38
	- Tanjung Laut	143,45	8.699	8.201	117,81
	- Tanjung Laut Indah	251,79	7.983	7.480	61,41
2	Bontang Utara	3.303,34	45.317	42.375	26,55
	- Bontang Kuala	893,92	3.835	3.623	8,34
	- Bontang Baru	222,02	6.458	6.261	57,29
	- Api-Api	215,30	9.258	8.734	83,57
	- Gunung Lai	501,89	8.018	7.463	30,85
	- Lok Tuan	335,07	12.594	11.481	71,85
	- Guntung	1.135,14	5.154	4.813	8,78
3	Bontang Barat	1.793,54	16.141	15.095	17,42
	- Kanaan	604,91	2.651	2.426	8,39
	- Gunung Telihan	229,47	7.480	6.960	62,93
	- Belimbing	959,16	6.010	5.709	12,22
	Total	16.187,67	98.222	91.746	217,87

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, 2023

Kecamatan Bontang Selatan merupakan kecamatan terluas di Kota Bontang, dengan kontribusi sebesar 69% terhadap total luasan Kota Bontang. Salah satu kelurahan di kecamatan ini, yaitu Kelurahan Bontang Lestari merupakan yang terluas dari seluruh kelurahan yang ada di Kota Bontang. Sementara itu, Kecamatan Bontang Utara memberikan kontribusi sebesar 20% terhadap total luasan Kota Bontang dan Kecamatan Bontang Barat sebesar 11% dari total luasan Kota Bontang.

Apabila ditinjau dari kepadatan penduduk, kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Bontang Utara dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Bontang Selatan. Sementara itu, kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kelurahan Berbas Pantai dan kelurahan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kelurahan Bontang Lestari.

Apabila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kota Bontang lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini berdampak pada nilai rasio jenis kelamin. Nilai rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin pada tahun 2023 adalah sebesar 107,06 yang berarti bahwa di antara 100 orang penduduk perempuan di Kota Bontang pada tahun 2023 terdapat 107-108 orang penduduk laki-laki. Sementara itu, dinamika penduduk Kota Bontang meliputi penduduk datang, penduduk pindah, lahir dan meninggal dunia dapat dilihat pada diagram berikut.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, 2023

Gambar 2. 11 Diagram Dinamika Penduduk Kota Bontang Menurut Kecamatan Tahun 2023

Secara keseluruhan, jumlah penduduk datang di Kota Bontang adalah sebanyak 5.504 jiwa, penduduk pindah sebanyak 6.221 jiwa, penduduk lahir sebanyak 2.058 jiwa dan penduduk meninggal dunia sebanyak 716 jiwa. Diagram di atas menunjukkan bahwa dinamika penduduk di Kecamatan Bontang Utara adalah yang tertinggi.

Selain itu, karakteristik kependudukan Kota Bontang juga dapat dilihat dari komposisi penduduknya. Komposisi penduduk tidak hanya dapat dilihat dari jenis kelamin, namun juga kelompok umur. Komposisi penduduk Kota Bontang terdiri atas berbagai kelompok umur, dimulai dari kelompok umur 0 - 4 tahun sampai dengan kelompok umur > 75 tahun. Berikut adalah jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2023 menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Kota Bontang Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2023

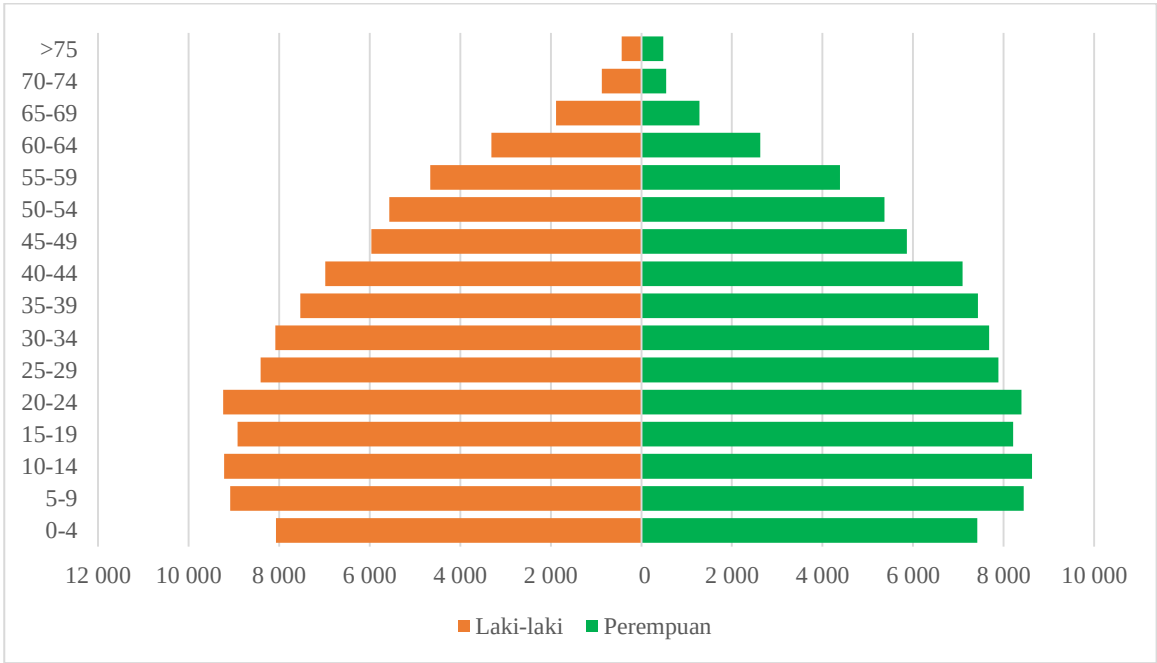
Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	8.072	7.415	15.487
5 – 9	9.077	8.445	17.522
10 – 14	9.213	8.630	17.843
15 – 19	8.917	8.213	17.130
20 – 24	9.238	8.394	17.632
25 – 29	8.410	7.883	16.293
30 – 34	8.083	7.681	15.764
35 – 39	7.533	7.432	14.965
40 – 44	6.979	7.094	14.073
45 – 49	5.962	5.866	11.828
50 – 54	5.570	5.371	10.941
55 – 59	4.660	4.385	9.045
60 – 64	3.314	2.624	5.938

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
65 – 69	1.881	1.283	3.164
70 – 74	875	546	1.421
> 75	438	484	922
Total	98.222	91.746	189.968

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Bontang didominasi oleh kelompok umur muda. Apabila diilustrasikan ke dalam sebuah piramida penduduk, maka komposisi penduduk Kota Bontang akan menghasilkan piramida penduduk muda atau piramida penduduk ekspansif. Piramida penduduk ini menunjukkan bahwa angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian.

Piramida penduduk ekspansif Kota Bontang mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk Kota Bontang sangat pesat. Piramida penduduk Kota Bontang dapat dilihat pada gambar berikut, di mana bentuk piramida penduduk memiliki alas melebar dengan puncak meruncing yang mengindikasikan tingginya angka penduduk muda di Kota Bontang dibandingkan dengan jumlah penduduk tua. Di satu sisi, Kota Bontang akan memiliki banyak jumlah tenaga kerja di masa depan. Di sisi lain, hal tersebut harus diantisipasi dengan perkembangan lapangan kerja yang memadai untuk mencegah tingginya tingkat pengangguran. Di sisi lain Kota Bontang juga harus melakukan pengendalian penduduk agar terjadi pemerataan sumber daya dan pembangunan.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, 2023

Gambar 2. 12 Piramida Penduduk Kota Bontang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

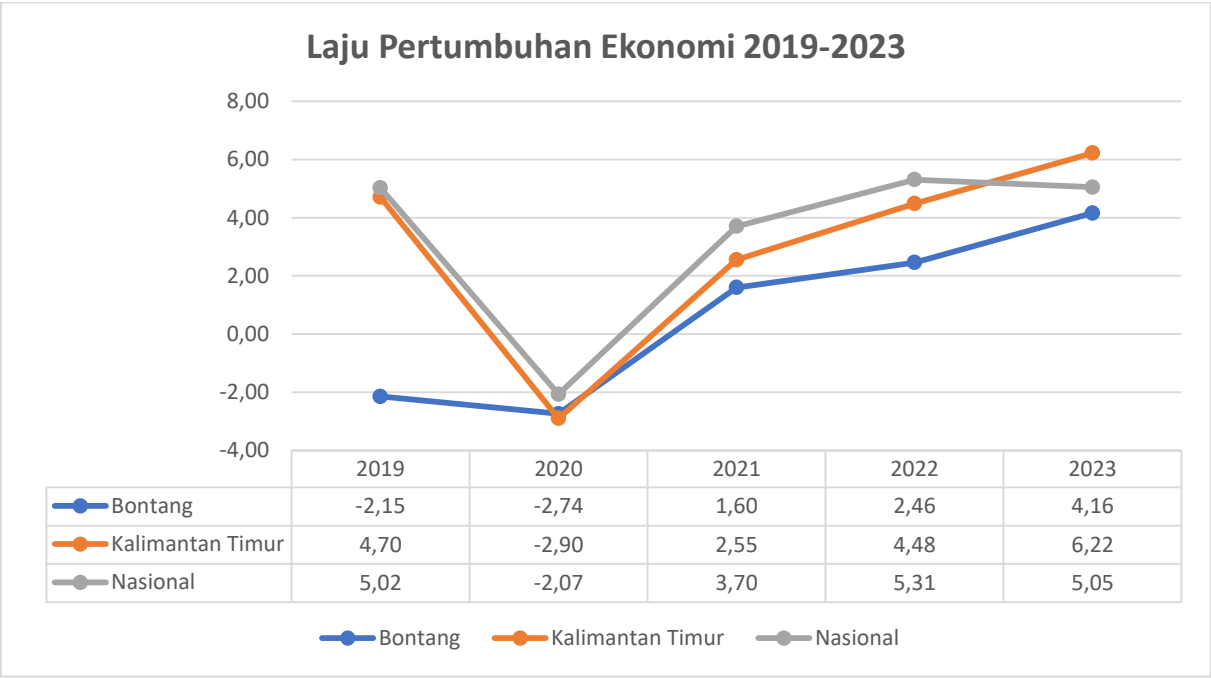
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi

yang dicerminkan dari perubahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dalam suatu daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan juga meningkat, dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan yang semakin menurun.

Kondisi ekonomi makro di tahun 2023 ini menunjukkan kinerja yang semakin membaik, dengan laju pertumbuhan ekonomi kota Bontang tumbuh positif sebesar 4,16 persen. Tren pertumbuhan ekonomi positif tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang bertahan di angka 5 persen.



Sumber: Diolah dari berbagai sumber data

Gambar 2. 13 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional tahun 2019 sd 2023

Pertumbuhan yang positif menunjukkan terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya penurunan produksi barang dan jasa. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Nilai PDRB Kota Bontang atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 68,10 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 5 triliun rupiah atau 7,9% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 63,1 triliun rupiah. Sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi paling signifikan terhadap pertumbuhan PDRB ADHB di Kota Bontang sebesar 53,37 triliun rupiah atau 78,37% dari keseluruhan sektor.

Tabel 2. 5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023

NO	Kategori/ Sub Kategori	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2019-2023 (Juta Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	667.480,56	693.143,44	713.425,63	735.505,66	774.776,93
B	Pertambangan dan Penggalian	348.454,50	268.006,99	294.564,21	320.472,28	252.916,43
C	Industri Pengolahan	46.771.537,09	44.129.947,78	46.021.835,21	49.683.265,74	53.372.246,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19.102,65	21.504,58	21.065,69	22.615,11	27.219,89
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.249,44	15.003,98	15.659,76	16.444,52	17.269,52
F	Konstruksi	3.699.697,62	3.723.659,03	3.762.701,46	4.445.210,06	5.022.561,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.782.473,09	1.889.947,91	1.912.156,21	2.094.679,21	2.311.398,44
H	Transportasi dan Pergudangan	830.659,92	881.392,55	959.689,19	1.137.657,72	1.260.951,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	330.325,43	325.886,03	331.274,87	367.243,95	420.058,74
J	Informasi dan Komunikasi	450.961,64	477.333,97	506.000,67	534.154,11	582.627,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	443.834,06	461.190,70	486.688,81	583.385,71	666.907,45
L	Real Estate	263.489,32	280.035,57	288.932,13	298.963,58	316.257,05
M	Jasa Perusahaan	268.054,89	276.015,14	287.917,38	333.000,87	377.997,64
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	830.219,36	806.422,40	815.604,51	865.901,83	888.466,58
O	Jasa Pendidikan	623.530,00	673.237,42	699.089,93	777.730,72	838.671,77
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	432.486,40	510.303,02	594.834,36	634.472,76	687.678,77
Q	Jasa Lainnya	230.100,58	231.009,10	236.686,31	257.173,55	287.666,16
TOTAL PDRB ADHB		58.006.656,54	55.664.039,60	57.948.126,32	63.107.877,37	68.105.672,86

Sumber : BPS, Kota Bontang Dalam Angka tahun 2024

Ditinjau dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tabel 2.6, dapat diketahui bahwa ekonomi Kota Bontang tahun 2023 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2022. Nilai PDRB ADHK Kota Bontang tahun 2023 sebesar 42,6 triliun sementara pada tahun 2022 sebesar 40,9 triliun. Berdasarkan informasi tersebut, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang meningkat sebesar 4,16% dari tahun 2022.

Tabel 2. 6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023

NO	Kategori/ Sub Kategori	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2019-2023 (Juta Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	427.340,22	442.293,95	452.335,36	462.671,18	469.919,59
B	Pertambangan dan Penggalian	308.738,09	275.498,01	247.055,38	219.370,75	206.361,61
C	Industri Pengolahan	32.950.291,24	31.707.982,17	32.223.729,92	32.753.472,22	34.021.677,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.741,54	17.680,78	17.301,79	17.974,43	21.103,74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.210,98	10.401,11	10.854,78	11.392,87	11.950,27
F	Konstruksi	2.295.667,36	2.296.270,93	2.298.938,66	2.486.265,78	2.653.201,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1.189.121,30	1.233.421,94	1.241.404,67	1.313.584,66	1.386.013,40

NO	Kategori/ Sub Kategori	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2019-2023 (Juta Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	614.958,12	634.261,67	655.218,22	713.646,28	740.946,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	205.776,59	202.885,20	205.942,08	222.928,02	243.586,50
J	Informasi dan Komunikasi	391.085,80	412.998,63	437.456,37	460.982,55	490.108,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	306.960,63	317.553,07	325.286,25	358.210,41	394.707,89
L	Real Estate	204.572,70	212.919,34	213.390,30	216.280,66	222.362,89
M	Jasa Perusahaan	204.810,24	201.281,92	204.603,46	215.303,46	228.298,26
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	485.417,22	469.990,27	474.714,78	503.786,96	516.536,70
O	Jasa Pendidikan	409.699,55	431.320,65	440.998,02	451.217,82	473.982,20
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	269.499,73	317.070,41	361.981,27	377.276,15	397.963,86
Q	Jasa Lainnya	137.808,43	136.400,78	137.867,46	146.617,66	154.907,31
TOTAL PDRB ADHK		40.427.699,74	39.320.230,84	39.949.078,76	40.930.981,85	42.633.628,07

Sumber : BPS, Kota Bontang Dalam Angka tahun 2024

Berdasarkan distribusi PDRB, sektor Industri Pengolahan masih menjadi lapangan usaha utama di dalam aktivitas perekonomian Kota Bontang dengan porsi 78,37% dan diikuti dengan sektor Konstruksi (7,37%) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (3,39%).

Tabel 2. 7 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023

NO	Kategori/ Sub Kategori	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2019-2023 (Persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,15	1,25	1,23	1,17	1,14
B	Pertambangan dan Penggalian	0,60	0,48	0,51	0,51	0,37
C	Industri Pengolahan	80,63	79,28	79,42	78,73	78,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	6,38	6,69	6,49	7,04	7,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,07	3,40	3,30	3,32	3,39
H	Transportasi dan Pergudangan	1,43	1,58	1,66	1,80	1,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,57	0,59	0,57	0,58	0,62
J	Informasi dan Komunikasi	0,78	0,86	0,87	0,85	0,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,77	0,83	0,84	0,92	0,98
L	Real Estate	0,45	0,50	0,50	0,47	0,46
M	Jasa Perusahaan	0,46	0,50	0,50	0,53	0,56
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,43	1,45	1,41	1,37	1,30
O	Jasa Pendidikan	1,07	1,21	1,21	1,23	1,23
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,75	0,92	1,03	1,01	1,01
Q	Jasa Lainnya	0,40	0,42	0,41	0,41	0,42
TOTAL DISTRIBUSI PDRB ADHB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kota Bontang Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan table 2.6 dan table 2.7 walaupun distribusi industri pengolahan tertinggi dalam PDRB Kota Bontang, tetapi cenderung mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir hal ini disebabkan oleh meningkatnya distribusi sektor lain di luar industri pengolahan. Industri pengolahan Kota Bontang didominasi dari industri pengolahan migas dan petrokimia. Berkurangnya pasokan gas dari ladang-ladang gas di Muara Badak, turut mempengaruhi penurunan produksi pengolahan gas alam yang dihasilkan.

B. PDRB Per Kapita

Indikator PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB suatu wilayah pada suatu periode tertentu dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di wilayah itu. Angka PDRB per kapita biasanya diturunkan dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku, sehingga nilainya menunjukkan rata-rata pendapatan bruto yang dihasilkan per satu orang penduduk selama periode tersebut. Nilai PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai indikator awal untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara/wilayah. Namun hal tersebut tidak berlaku mutlak karena di dalam nilai PDRB per kapita masih terkandung nilai penyusutan dan pajak, serta nilai keuntungan usaha yang belum tentu seluruhnya dinikmati oleh penduduk negara/wilayah bersangkutan. Hal itu dapat terjadi apabila barang modal yang terlibat di dalam proses produksi bukanlah milik penduduk setempat. Dengan kata lain, pemilik modal adalah penduduk dari luar negeri/luar wilayah, sehingga keuntungan usaha pun akan mengalir ke luar negeri/luar wilayah tersebut.

Pada tahun 2023, dengan jumlah penduduk sekitar 189 ribu jiwa, PDRB per kapita Kota Bontang Atas Dasar Harga Berlaku mencapai nilai 366,46 juta rupiah. Dengan kata lain, rata-rata setiap satu orang penduduk Kota Bontang pada tahun 2023 mampu menghasilkan produk domestik sebesar 366,46 juta per tahun. Nilai PDRB per kapita Kota Bontang Atas Dasar Harga Berlaku selama periode 2019-2023 ditunjukkan oleh Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Bontang 2019-2023

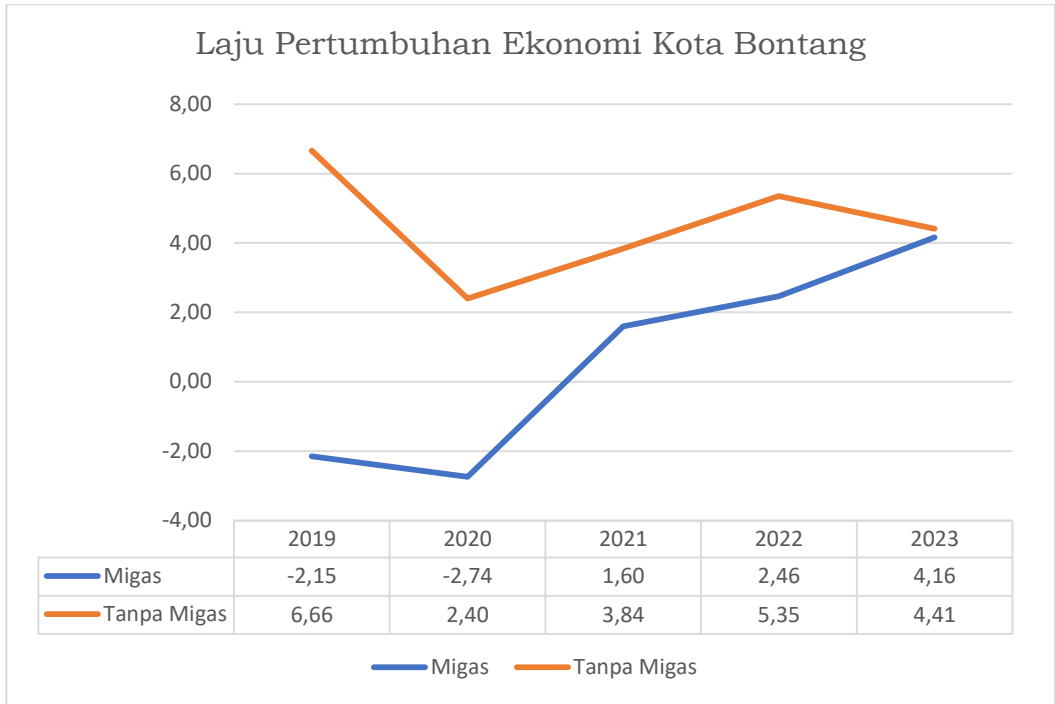
Tahun	PDRB Per Kapita (ADHB)	
	Nilai (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2019	327.061,56	-3,08
2020	311.880,05	-4,64
2021	320.304,04	2,70
2022	344.148,45	7,44
2023	366.462,95	6,48

Sumber: BPS, Kota Bontang Dalam Angka Tahun 2023

C. Laju Pertumbuhan PDRB dengan dan tanpa Migas

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha baik dengan migas maupun tanpa migas mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2023. Seiring perbaikan ekonomi, baik skala nasional maupun regional yang mengalami peningkatan positif hal ini berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB Kota Bontang. Ditahun 2023, laju pertumbuhan PDRB dengan migas mencatatkan

pertumbuhan sebesar 4,41 persen. Begitu pula dengan laju pertumbuhan PDRB tanpa migas, laju pertumbuhan tercatat sebesar 4,41 persen.



Sumber: BPS, Kota Bontang Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2. 14 Laju Pertumbuhan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Kota Bontang 2018-2022

Jika memperhatikan gambar di atas, maka dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi non migas lebih tinggi 0,35 % dibandingkan dengan laju pertumbuhan migas. Hal ini menjadi hal yang menggembirakan karena artinya, geliat perekonomian di Kota Bontang semakin meningkat dan diharapkan akan terus meningkat ke depannya.

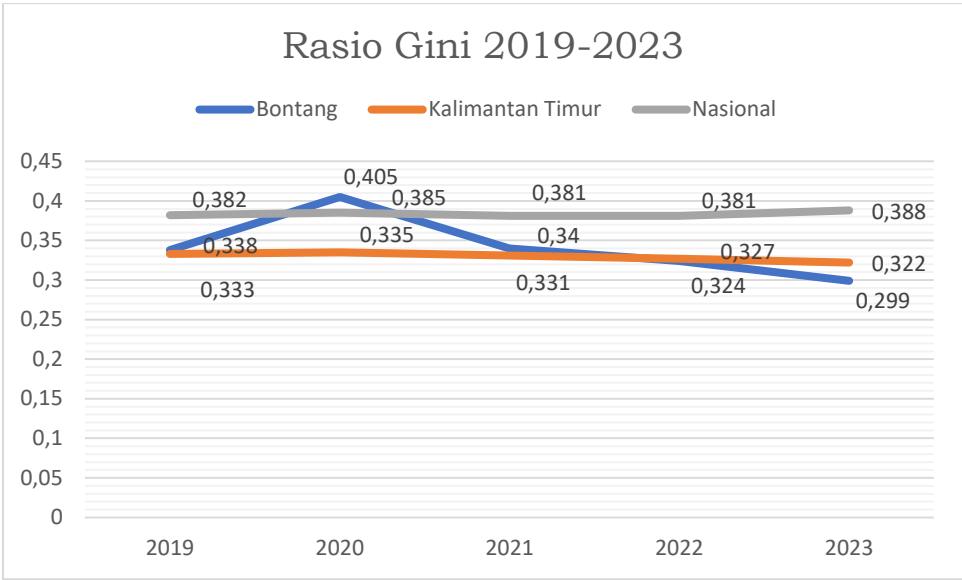
D. Rasio Gini (Gini Ratio)

Koefisien gini (rasio gini) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Peningkatan pengeluaran per kapita sebagai indikator semakin sejahtera masyarakat, belum tentu terdapat pemerataan pendapatan di dalam suatu wilayah. Semakin besar angka rasio gini maka semakin tidak ratanya distribusi pendapatan.

Capaian rasio gini pada tahun 2023 adalah sebesar 0,299 dimana mengalami penurunan 0,025 poin dari tahun 2022. Rasio gini Kota Bontang sedikit lebih rendah dari capaian Kalimantan Timur dan juga secara Nasional. Jika dibandingkan dengan target RKPD 2023 yaitu sebesar 0,32 rasio gini pada tahun 2023 telah melebihi target. Rasio gini yang terus menurun menunjukkan bahwa semakin baik pemerataan distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi masyarakat Kota Bontang.

Fluktuasi rasio gini Kota Bontang, Kalimantan Timur dan Nasional dapat dilihat pada gambar 2.16 sebagai berikut:



Sumber : Website BPS Kaltim,2024

Gambar 2. 15 Rasio Gini Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Bontang Tahun 2019 – 2023

D. Laju Inflasi

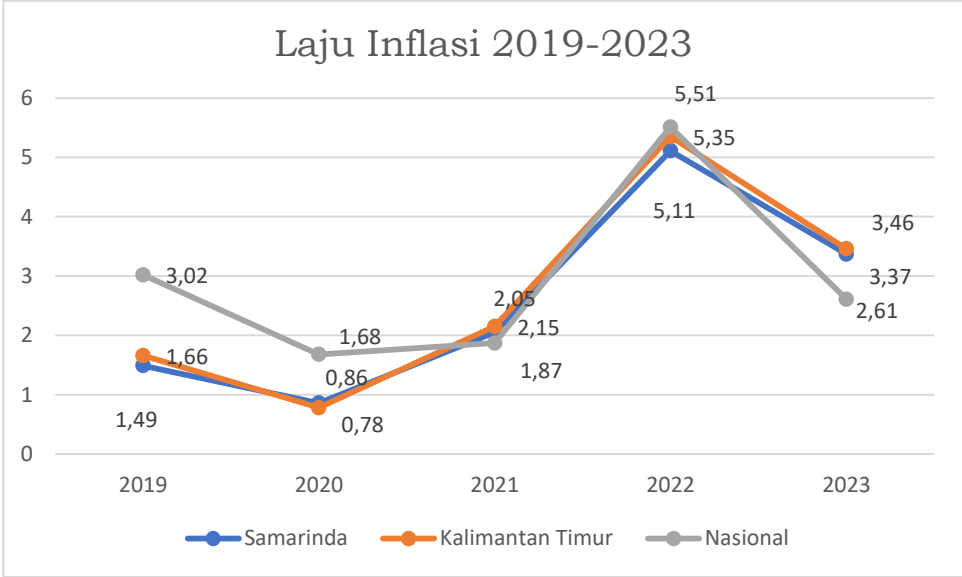
Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Karena tidak dilakukan perhitungan tingkat inflasi secara khusus untuk wilayah Kota Bontang, maka tingkat inflasi merujuk pada hasil perhitungan nilai inflasi Kota Samarinda, sebagai daerah yang memiliki keterkaitan aktivitas ekonomi terdekat maupun inflasi Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan data BPS Kalimantan Timur, secara nasional inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2023 tercatat menjadi 0,41 persen sehingga inflasi IHK 2023 menjadi 2,61 persen (yoy) nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan IHK 2022 sebesar 2,9 persen. Pencapaian inflasi Indonesia tahun 2023 terjaga stabil dan terkendali pada rentang target sasaran 3%±1. Lebih lanjut, di luar periode terdampak pandemi (2020-2021), realisasi inflasi tersebut merupakan yang terendah sejak tahun 2000.

Sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Timur, tercatat inflasi IHK pada tahun 2023 sebesar 3,46 persen (yoy) mengalami penurunan sebesar 1,89 persen dari tahun 2022. Sedangkan Kota Samarinda inflasi pada tahun 2023 ini tercatat sebesar 3,37 persen (yoy) masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi secara nasional dan mempengaruhi inflasi di berbagai daerah termasuk di Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur.

Naik turunnya nilai inflasi akan mempengaruhi kesejahteraan dan stabilitas ekonomi di Kota Bontang. Peningkatan nilai inflasi, akan mempengaruhi harga barang di pasar secara keseluruhan. Peningkatan nilai inflasi akan meningkatkan harga barang, yang menunjukkan terjadinya kelangkaan barang atau terjadinya kendala dalam distribusi barang. Hal ini akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Semakin tinggi nilai inflasi, maka semakin rendah daya beli masyarakat dan semakin rendah nilai inflasi maka daya beli masyarakat akan meningkat.

Adapun fluktuasi inflasi Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 2.16 sebagai berikut:



Gambar 2. 16 Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda Tahun 2019 - 2023

E. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen pertama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni menurunkan kemiskinan dan kelaparan. Tersedianya angka kemiskinan yang akurat di setiap wilayah merupakan syarat mutlak dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Indikator kemiskinan ini menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat kesejahteraan. Berdasarkan garis kemiskinan pada tahun 2023 sebesar Rp.763.611,- per kapita per bulan, maka sekitar 4,11 persen penduduk Bontang terkategori miskin pada tahun 2023. Angka tersebut mengalami penurunan 0,43 dari tahun 2022 berada sekitar 4,54 persen, atau pada tahun 2022 Bontang memiliki warga miskin sebanyak 8.390 orang, sedangkan di tahun 2023 Bontang memiliki 7.710 warga miskin.

Tabel 2. 9 Statistik kemiskinan Kota Bontang tahun 2018-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	582.188	636.491	665.572	697.326	763.611
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	7,47	7,91	8,41	8,39	7,71
Angka Kemiskinan (%)	4,22	4,38	4,62	4,54	4,11
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (persen)	0,42	0,54	0,47	0,37	0,39

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (persen)	0,08	0,09	0,08	0,05	0,05

Sumber: BPS Kota Bontang 2023

Jika diperhatikan dari table di atas maka, angka kemiskinan jumlah penduduk miskin dan kedalaman kemiskinan selama 2019-2023 tahun terakhir, relatif mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Bontang menunjukkan keberhasilan. Berkaitan dengan keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan bahwa semakin besar angka kedalaman kemiskinan maka semakin kondisi kemiskinan masyarakat semakin beragam. Pada tahun 2023 angka P2 Kota Bontang yaitu sebesar 0,05 masih sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi penduduk miskin Kota Bontang semakin tidak beragam.

Dalam lingkup regional Provinsi Kalimantan Timur, tingkat kemiskinan di Bontang merupakan yang terendah kedua, setelah kota Balikpapan pada tahun 2023. Walaupun tingkat kemiskinan Kota Bontang relatif rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Kalimantan Timur, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan di dalam RKPD maupun RPJMD 2023 yaitu 4,03. Dengan demikian maka diperlukan strategi untuk menurunkan angka kemiskinan ini agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 10 Perbandingan Persentase penduduk miskin Kota Bontang dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (P0) menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Paser	8.95	9.23	9.73	9.43	9,11
Kutai Barat	9.09	9.29	10.24	10.20	9,72
Kutai Kartanegara	7.20	7.31	7.99	7.96	7,61
Kutai Timur	9.48	9.55	9.81	9.28	9,06
Berau	5.04	5.19	5.88	5.65	5,54
Penajam Paser Utara	7.18	7.36	7.61	7.25	6,97
Mahakam Ulu	11.25	11.44	11.90	11.55	11,38
Balikpapan	2.42	2.57	2.89	2.45	2,31
Samarinda	4.59	4.76	4.99	4.85	4,81
Bontang	4.22	4.38	4.62	4.54	4,11
Kalimantan Timur	5.94	6.10	6.54	6.31	6,11

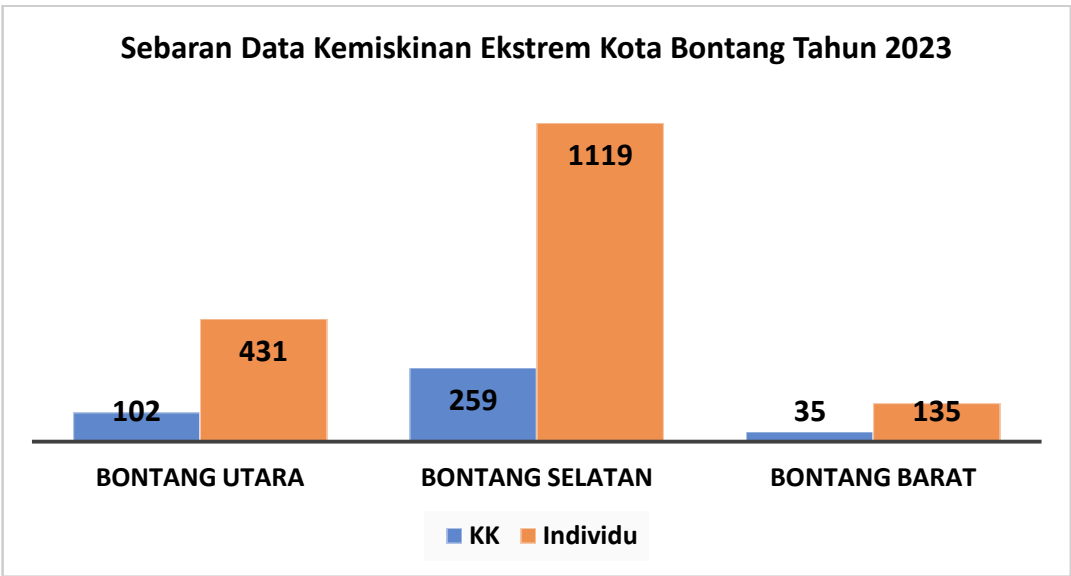
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur 2023

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi di lapangan data kemiskinan ekstrem Kota Bontang berjumlah 1.685 jiwa atau 396 KK. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, serta akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Seseorang dikatakan masuk dalam kemiskinan ekstrem nasional jika pengeluarannya tidak lebih dari Rp10.739 per hari atau Rp322.170 per bulan. Dibandingkan dengan data kemiskinan ekstrem Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur maka Kota Bontang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem yang paling rendah.

Tabel 2. 11 Data P3KE Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2023

Kab/Kota	KK	Individu
Paser	24.392	104.005
Kutai Kartanegara	81.108	350.309
Berau	18.609	80.665
Kutai Barat	12.592	54.134
Kutai Timur	28.536	122.834
Penajam Paser Utara	19.541	83.021
Mahakam Ulu	2.463	11.099
Balikpapan	47.417	205.177
Samarinda	70.966	296.305
Bontang	396	1.685

Sumber : Kemenko PMK 2023 dan Kota Bontang 2023



Sumber : Data P3KE, tahun 2023

Gambar 2. 17 Sebaran Data Kemiskinan Ekstrem Kota Bontang Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, sebaran penduduk miskin terbesar berada di Kecamatan Bontang Selatan. Kecamatan Bontang Selatan merupakan kecamatan pesisir dimana banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan atau pedagang.

F. Angka Kriminalitas

Kriminalitas atau tindak kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam Masyarakat. Faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang mendasari seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, biasanya para pelaku tindak kejahatan adalah mereka yang berpenghasilan rendah, berstatus pengangguran ataupun penduduk miskin. Kebutuhan dasar sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan tidak terpenuhi dengan penghasilan yang terbilang rendah atau tidak mencukupi. Sedangkan kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin meningkat, dan jumlah tanggungan keluarga yang tidak sedikit.

Kemajemukan masyarakat perkembangan Kota Bontang akan berdampak pada suatu perubahan-perubahan sosial. Beberapa faktor penyebab terjadinya kriminalitas adalah : pertentangan dan persaingan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan kekayaan dan pendapatan dan mentalitas yang labil.

Pemerintah masih memerlukan kerja keras untuk menurunkan tingkat kriminalitas. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman.

Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya menyebabkan angkatan kerja yang harus diserap oleh lapangan pekerjaan semakin tinggi pula. Apabila lapangan pekerjaan yang ada tidak mampu menampung angkatan kerja, maka tingkat pengangguran akan semakin bertambah. Pengangguran yang berimbas pada kemiskinan menjadi masalah sosial yang belum terselesaikan dan juga menyebabkan masalah sosial lainnya seperti tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas pariwisata maupun aktivitas ekonomi. Selama 5 (lima) tahun dari tahun 2019-2023, jumlah tindak pidana menonjol (*crime indeks*) menurut jenis adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 12 Jumlah tindak kriminal menonjol (*crime indeks*) menurut jenis kejahatan di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023

No.	Jenis Kriminal	Kriminalitas				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kasus Pencurian	86	67	73	89	58
2	Kasus Penganiayaan	11	15	18	18	26
3	Kasus Pembunuhan	0	1	2	0	0
4	Kasus Perkosaan	0	0	3	2	3
5	Kasus Uang palsu	0	1	1	0	0
6	Kasus Narkotika	63	58	50	56	98
Jumlah		151	160	142	147	185

Sumber : BPS, Bontang Dalam Angka Tahun 2023

Dalam kurun tahun 2019-2023 jumlah angka kriminalitas di Kota Bontang mempunyai kecenderungan meningkat. Jumlah tindak pidana pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan data dari 147 kasus pada tahun 2022 menjadi 185 kasus. Peningkatan ini dapat diindikasikan sebagai dampak dari peningkatan permasalahan sosial akibat minimnya lapangan pekerjaan yang berakibat pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan jenis kasus tindak pidana, kasus penganiayaan merupakan yang tertinggi selama tahun 2019-2023. Dan yang perlu dijadikan perhatian bahwa tindak pidana terkait penyalahgunaan narkotika menunjukkan tren yang meningkat.

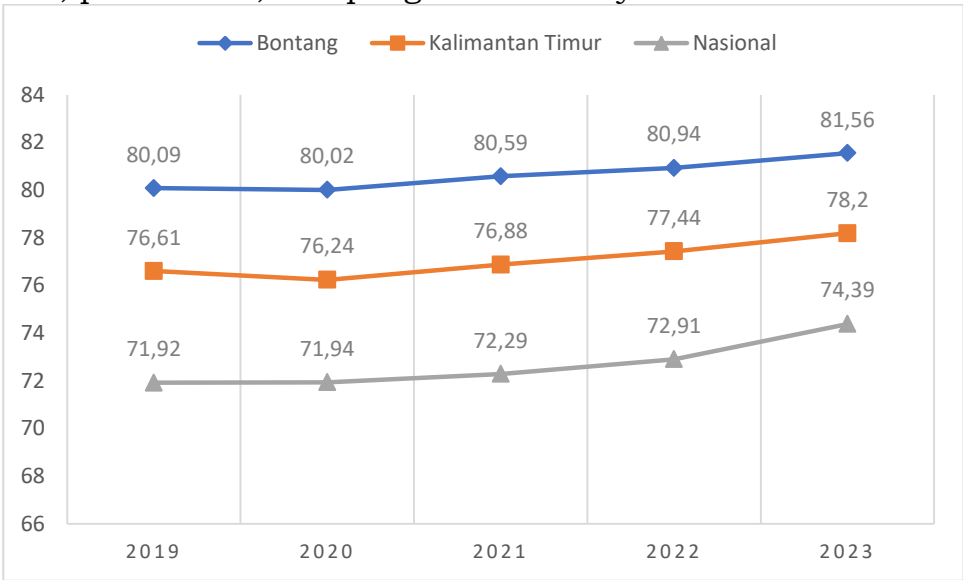
Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika memerlukan perhatian khusus dari pemerintah Kota Bontang mengingat dampaknya yang sangat merusak bagi kalangan generasi muda. Kasus-kasus penyalahgunaan narkotika dikarenakan kebutuhan dalam pergaulan lingkungan yang buruk dan berdampak sosial pada lingkungan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan intervensi dari perangkat daerah terkait melalui penguatan partisipasi dan peran masyarakat dalam skala lingkungan untuk giat pencegahan penyalahgunaan serta peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara pendidikan agama dan akhlak,

kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, mengetahui kebutuhan anak serta memberikan pengawasan aktif dan bijaksana dan memberikan dorongan untuk mencapai prestasi bagi anak.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM sendiri dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Secara umum, pada tahun 2023 IPM Kota Bontang mengalami kenaikan 0,62 dari tahun sebelumnya menjadi 81,56. Pencapaian IPM Kota Bontang dalam 5 tahun terakhir masuk ke dalam kategori Sangat Tinggi dengan angka capaian ≥ 80 . Realisasi IPM Kota Bontang tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi dan IPM Nasional. Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dari masing-masing dimensi pembentuk IPM yang dipengaruhi oleh peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran masyarakat.



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Gambar 2. 18 IPM Kota Bontang,Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2019 – 2023

Adapun data dimensi pembentuk IPM Kota Bontang pada tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 13 Dimensi Pembentuk IPM

Dimensi Pembentuk IPM	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (tahun)	74,28	74,55	74,57	74,81
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,79	10,8	10,81	10,92
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,03	13,17	13,18	13,43
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/kapita/tahun)	16.278	16.765	17.327	17.659

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur melalui Umur Harapan Hidup saat bayi di Kota Bontang yang lahir pada tahun 2023

memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,81 tahun, lebih lama 0,24 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk. Meningkatnya pelayanan kesehatan, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Dengan demikian Keberhasilan program kesehatan terutama dalam pencapaian indeks kesehatan dan usia harapan hidup bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat.

Pada dimensi pendidikan, pada tahun 2023 anak-anak di Kota Bontang yang berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 13,43 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,25 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,18 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,11 tahun, dari 10,81 tahun menjadi 10,92 tahun di tahun 2023.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan). Pada tahun 2023 rata-rata pengeluaran riil per kapita di Kota Bontang sebesar 17.659 juta Rupiah, meningkat 332 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Semakin tingginya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian suatu daerah yang berarti semakin tinggi pula kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa.

Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat Bontang sebagai dampak dari semakin membaiknya perekonomian di Kota Bontang.

B. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian laki-laki dan perempuan yang ditinjau dari tiga aspek dasar seperti IPM yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dimensi standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Data IPG dapat membantu pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat mengurangi kesenjangan atau disparitas antar daerah. Koordinasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat hingga daerah menjadi kunci utama untuk menjawab berbagai permasalahan terkait kesenjangan gender. IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki. Nilai IPG dikatakan ideal apabila mendekati 100. Semakin dekat angka IPG ke 100 maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya semakin jauh angka IPG dari 100 maka semakin besar kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

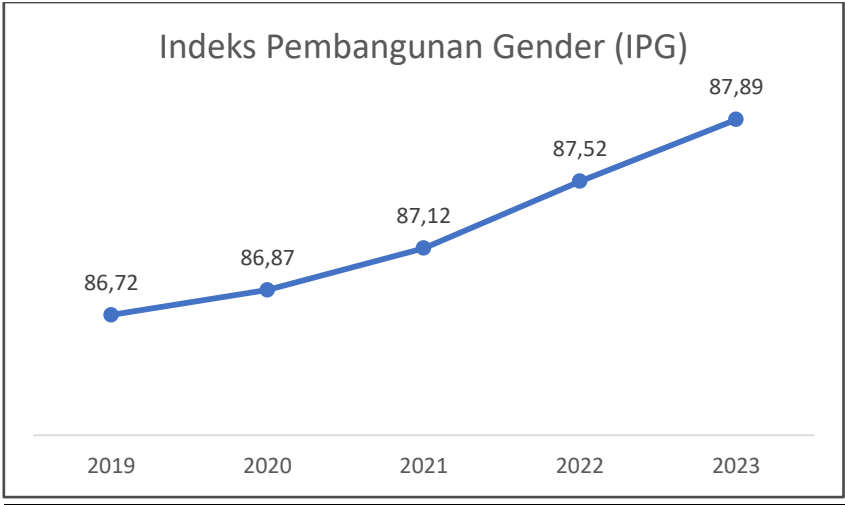
Tabel 2. 14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang Menurut Gender

Gender	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Gender				
	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-laki	84,96	85,15	84,92	85,33	85,57
Perempuan	73,58	73,84	73,77	74,34	74,89

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022

Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahwa IPM laki-laki di Kota Bontang lebih tinggi dari IPM perempuan. Pada tahun 2020 IPM laki-laki mengalami penurunan 0,23 poin karena sebagai dampak dari terjadinya Pandemi Covid-19.

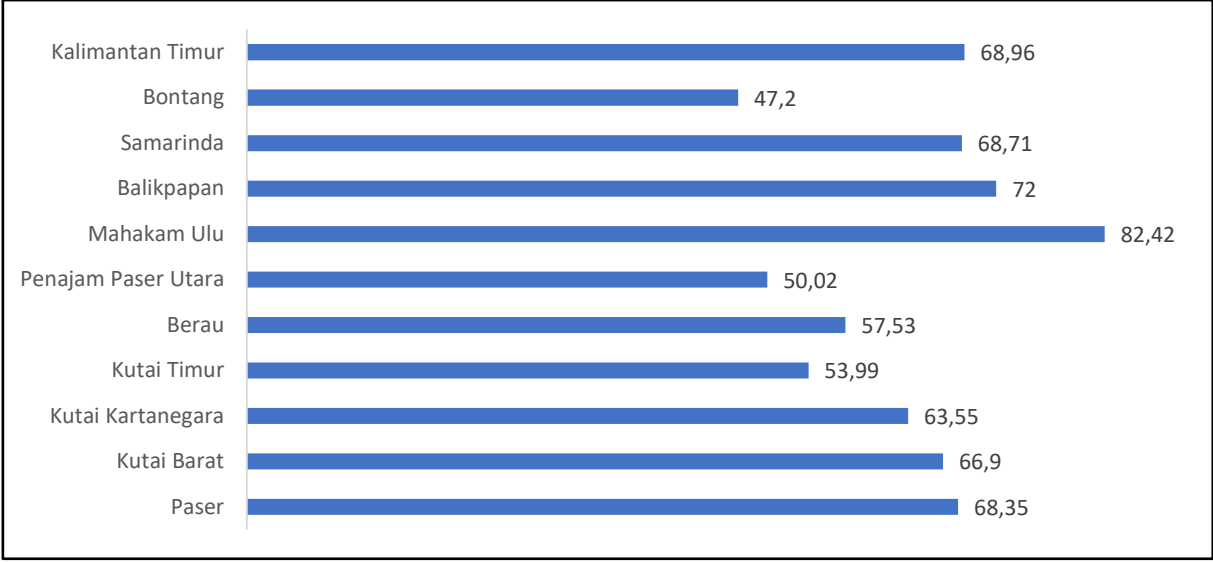
Sementara itu perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Bontang dari tahun 2019-2023 terus mengalami kenaikan. Tren kenaikan IPG yang semakin mendekati 100 setiap tahunnya merupakan hal yang sangat baik. Apabila tren positif tersebut terus berkesinambungan, maka harapan agar di tahun selanjutnya disparitas/kesenjangan gender di Kota Bontang akan semakin rendah.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 2024

Gambar 2. 19 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bontang

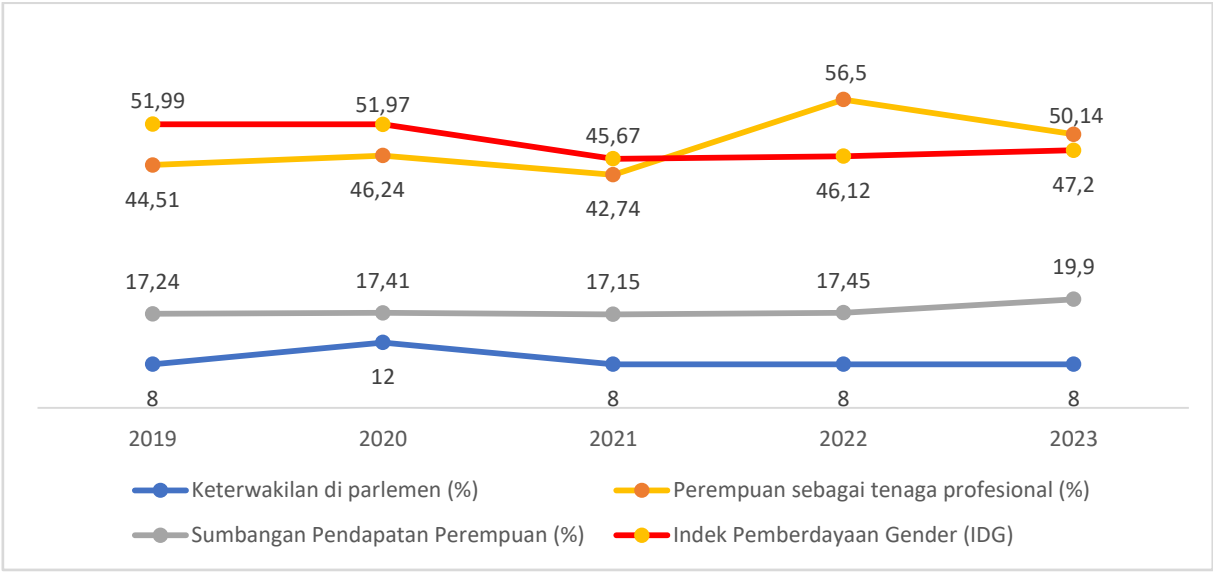
Berkebalikan dengan IPG, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG diukur melalui tiga dimensi antara lain: keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Dimensi Keterwakilan perempuan di parlemen diukur dengan indikator proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen. Dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan non pertanian. Berdasarkan arahan dari BPS, status pencapaian Indeks pemberdayaan gender dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu: rendah ($IDG < 50$), sedang ($50 \leq IDG < 60$), tinggi ($60 \leq IDG \leq 80$) dan sangat tinggi ($IDG > 80$).



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur; 2024

Gambar 2. 20 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat, bahwa IDG Kota Bontang merupakan yang terendah diantara Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dan lebih rendah dari IDG Provinsi Kalimantan Timur. Perkembangan IDG Kota Bontang pada tahun 2019-2023 dan komponen pembentuknya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur; 2024

Gambar 2. 21 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya di Kota Bontang Tahun 2019-2023

Berdasarkan table di atas maka dapat dilihat, bahwa sejak tahun 2019-2023 IDG Kota Bontang mengalami tren penurunan, dari kategori sedang di tahun 2019-2020 menjadi kategori rendah di tahun 2021-2023. Walaupun tren perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan mengalami tren peningkatan dari tahun 2019-2023 tetapi belum mendorong peningkatan nilai IDG secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh masih relatif kecilnya persentase keterwakilan perempuan di parlemen, sumbangan pendapatan perempuan, dan perempuan sebagai tenaga profesional dibandingkan dengan laki-laki. Untuk itu pemerintah perlu melakukan strategi

pengarusutamaan gender untuk meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

C. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan Angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Oleh karena itu kemampuan suatu daerah mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, dan pertumbuhan tersebut dapat terjadi secara inklusif akan sangat mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pada gilirannya dapat menurunkan angka pengangguran. Untuk itu kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK).

Indikator TPAK merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi (bekerja dan atau mencari pekerjaan) dengan seluruh penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan jumlah penduduk yang potensial untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Makin besar nilai TPAK menunjukkan makin besar jumlah penduduk yang terlibat dan berusaha terlibat di dalam kegiatan produksi barang dan jasa pada suatu waktu tertentu. Kondisi TPAK, TPT dan TKK Kota Bontang tahun 2019-2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2. 15 TPAK, TPT, dan TKK Kota Bontang Tahun 2019-2023

Rincian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angkatan Kerja	88.679	91.932	90.071	99.150	94.923
A. Bekerja	80.677	83.232	81.136	91,408	87.575
B. Pengangguran	8.002	8.700	8.935	7.742	7.348
Bukan Angkatan Kerja	41.609	40.834	45.101	38.409	43.955
A. Sekolah	10.559	9.166	10.585	10.703	11.356
B. Mengurus Rumah Tangga	27.946	27.290	29.347	23.705	28.411
C. Lainnya	3.104	4.378	5.169	4.001	4.188
Jumlah Usia Kerja	130.288	132.766	135172	137.559	138.878
TPAK	68,06	69,24	66,63	72,08	68,35
TPT	9,02	9,46	9,92	7,81	7,74
TKK	90,98	90.54	90,08	92,19	92,26

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan Tabel 2.16, dapat dilihat jumlah angkatan kerja dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Jumlah penduduk yang bekerja cenderung meningkat dan jumlah pengangguran juga menurun pada tahun 2019-2023. Terjadinya penurunan pengangguran sejak tahun 2022 dapat disebabkan oleh adanya pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 yang sangat memengaruhi aspek ketenagakerjaan seperti lapangan usaha dan sebagainya. Indikator untuk melihat angka pengangguran adalah TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yaitu proporsi penduduk yang menganggur dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Sejak tahun 2022 angka TPT juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan TPT tidak terlepas dari indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Tercatat TKK di Kota Bontang selama 5 tahun terakhir terus mengalami kenaikan, yang menandakan bahwa Bontang memiliki kesempatan kerja yang baik, dan menjadi salah satu faktor turunnya angka TPT.

Tabel 2. 16 Kondisi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2019-2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (SD, SMP, SMA, D1/D2/D3, S1/D4/S2/S3)	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (jiwa)				
	2023	2022	2021	2020	2019
Sampai dengan SD	14919	16717	16770	18418	16272
SMP/Sederajat	7670	9234	8518	10128	10939
SMA/Sederajat	45844	46672	34875	36506	37399
Diploma I, II, III	4063	4299	5522	4438	4078
Diploma IV/Universitas	15079	14486	15451	13742	11989
Jumlah	87575	91408	81136	83232	80677

Sumber : BPS, 2024

Dari tabel di atas, maka di ketahui bahwa, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja didominasi oleh pekerja dengan jenjang pendidikan terakhir SMA/ sederajat. Ini menunjukkan bahwa rata-rata tenaga kerja belum memiliki keterampilan yang cukup dalam bekerja.

Tabel 2. 17 Kondisi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2019-2023

Status Pekerjaan Utama	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama				
	2023	2022	2021	2020	2019
Berusaha sendiri	15347	14812	10961	13247	13100
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	5310	8206	7245	8363	7761
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	4658	3595	3495	3180	3409
Buruh/Karyawan/Pegawai	55669	55748	49879	48439	50699
Pekerja bebas	650	1914	1336	824	1376
Pekerja keluarga/tak dibayar	5941	7133	8220	9179	4332
Jumlah	87575	91408	81136	83232	80677

Sumber : BPS, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja mayoritas bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Tempat kedua adalah pekerja yang berusaha sendiri.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Palayanan Dasar

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia dan menjadi dimensi pembentuk serta penentu kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, maka berpeluang akan semakin baik kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas

pendidikan dapat berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dari sisi aksesibilitas maupun pembiayaan dan kebutuhan pendidikan yang berkualitas, merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bontang. Secara rinci gambaran capaian indikator urusan pendidikan disajikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jumlah siswa pada jenjang TK/RA dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terjadi karena keberhasilan sosialisasi penting nya PAUD pra SD berhasil meningkatkan pemahaman orang tua penting nya PAUD pra SD. Berdasarkan data APK PAUD usia 3-6 tahun pada tahun 2023 mengalami kenaikan jumlah siswa sebesar 59,74 % dari tahun 2022. Adapun jumlah pendidik tingkat PAUD mengalami penurunan dari tahun 2022 hal ini disebabkan karena beberapa PTK PAUD diterima menjadi PPPK dan pindah ke instansi lain. Jumlah sekolah RA pada tahun 2023 bertambah 1 sekolah yaitu RA Baitul Quran di Kelurahan Satimpo.

Tabel 2. 18 indikator pada Jenjang TK/RA Kota Bontang Tahun 2021-2023

No.	Indikator	Realisasi		
		2021	2022	2023
1	Jumlah Siswa pada Jenjang TK/RA Kota Bontang	4794	4536	7592
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	49,69	59,68	63,1
3	Jumlah Pendidik tingkat PAUD	350	298	316
4	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%) Jenjang PAUD		85,24	66,46
5	Jumlah sekolah			
	- TK	55	55	55
	- RA	11	11	12
6	Data APK 4-6 tahun	54%	62%	63%

Sumber : Disdikbud Kota Bontang, 2024

2. Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar Sembilan tahun terdiri dari dua jenjang pendidikan yaitu SD/MI dan SMP/MTs atau sederajat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan Pendidikan Dasar. Adapun indikator untuk Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 19 indikator Pendidikan Dasar Kota Bontang Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,89	12,98	13,17	13,18	13,43
a.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,72	10,79	10,8	10,81	10,92
2	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
a.	SD/MI Paket A (persen)	102,99	103,41	103,45	102,3	89,31
b.	SMP/MTs / Paket B (persen)	106,93	102,26	102,26	106,6	80,62
3	Angka Pendidikan yang ditamatkan					
a.	SD/MI Paket A (persen)	1,8	1,72	1,76	1,69	1,7

No.	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
b.	SMP/MTs / Paket B (persen)	1,79	1,67	1,63	1,57	1,61
c.	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)			89,44	100,35	99,97
4	Angka Partisipasi Murni (APM)					
a.	SD/MI Paket A (persen)	91,04	93,02	93,03	95	83,1
b.	SMP/MTs / Paket B (persen)	75,68	80,27	82,47	81,2	70,53
5	Angka Putus Sekolah (APS)					
a.	SD/MI	0	0	0	2	0
b.	SMP/MTs	0	0	0	0	0
6.	Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
	7-12 tahun	99,74	99,85	99,55	99,74	99,85
	13-15 tahun	98,96	99,7	99,36	98,96	99,71
	16-18 tahun	82,91	83,67	83,47	82,91	83,67
	19-23 tahun	-	-	-	-	-
7.	Pendidikan Sekolah Dasar					
a.	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	30,78	28,2	28,14	39,14	31,65
b.	Rasio Guru terhadap murid	505,45	522	556,41	571,49	616,74
c.	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata - rata	50,54	49,2	55,64	78,35	61,67
d.	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%) jenjang SD	N/A	N/A	93,04	98,32	89,41
8	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
a.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (persen)	38,49	34,35	33,28	32,71	27,60
b.	Rasio guru terhadap murid	630,74	680,66	695,34	571,84	616,83
c.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata - rata	63,07	64,44	69,53	57,18	61,68
d.	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,36	99,36	99,36	98,94	99,18
e.	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%) jenjang SMP	N/A	N/A	96,88	9627	90,55
9	Fasilitas Pendidikan					
a	Sekolah / Pendidikan SD /MI Kondisi Bangunan Baik	91,8	91,8	67,21	94,74	98,11
b.	Sekolah / Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	82,35	84,85	78,79	92,59	98,44

Sumber : Disdikbud Kota Bontang, 2024

Angka Partisipasi Kasar (APK) dapat di definisikan sebagai Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu. Capaian APK SD/MI dan APK SMP/Mts mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 89,31 persen dibanding tahun sebelumnya tahun 2022 yang mencapai 102,3 persen. Hal ini menunjukkan partisipasi sekolah pada jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/Mts menurun.

Angka Partisipasi Murni (APM) dapat di definisikan sebagai proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan SMP/MTs juga mengalami penurunan dari tahun 2022. Penurunan APM di Kota Bontang

menunjukkan belum seluruhnya jumlah penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas Pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya baik di tingkat SD dan SMP, atau dengan kata lain masih terdapat penduduk usia 7-15 tahun yang belum sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Bontang menunjukkan fluktuasi dari tahun 2019-2023. APS merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang Pendidikan dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Untuk penduduk usia 7-15 tahun APS >99 persen dari tahun 2019-2013. Artinya, pembangunan Pendidikan dasar (SD dan SMP) sudah cukup berhasil. Hal ini ditunjang dengan berbagai program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat di Kota Bontang, seperti gratis biaya sekolah, pemberian seragam dan perlengkapan sekolah serta beasiswa bagi pelajar. Akan tetapi untuk penduduk usia 16-18 tahun menunjukkan capaian <90%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk jenjang pendidikan menengah perlu peningkatan partisipasi bagi penduduk agar dapat bersekolah dan memenuhi wajib belajar 12 sebagaimana yang diamanahkan di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Angka Putus Sekolah pada tahun 2023 pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs adalah 0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya anak yang berhenti sekolah sebelum menamatkan pendidikannya pada jenjang tersebut.

Persentase pendidik SD/MI berkualifikasi S1/D4 sebesar 89,41 persen tahun 2023 turun dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 98,32 persen. Persentase Pendidik SMP/MTS berkualifikasi S1/D4 sebesar 96,27 persen pada tahun 2022 menurun dibandingkan dengan keadaan tahun 2023 yang sebesar 90,55 persen. Hal ini d

Jika merujuk pada data HLS dan RLS di atas, maka dapat dilihat walaupun Harapan Lama Sekolah anak-anak usia sekolah di Kota Bontang sudah mencapai pendidikan Diploma 1, akan tetapi rata-rata anak-anak usia sekolah hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SLTA. Hal ini salah satunya disebabkan oleh banyak industri yang berdiri di Kota Bontang sehingga mendorong anak-anak usia sekolah untuk segera bekerja membantu kehidupan orang tuanya. Masyarakat di daerah pesisir yang berdasarkan data kemiskinan sebagian besar adalah merupakan masyarakat berpenghasilan rendah juga ikut menjadi faktor pendukung masih rendahnya kualitas pendidikan di Kota Bontang. Masyarakat di pesisir lebih senang anaknya ikut pergi ke laut mencari ikan daripada bersekolah, agar mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.

Pendidikan non formal menjadi penting dan strategis dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan non formal berupa pendidikan kesetaraan memiliki peran membantu peningkatan APK dan APM pada jenjang pendidikan masing-masing. Selain itu dengan diselenggarakannya Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan membantu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penduduk putus sekolah atau tidak sekolah.

Dalam rangka mendukung pencapaian SDG's pendidikan sepanjang hayat dan inklusi, Kota Bontang sudah mengembangkan kelembagaan PKBM yang berakreditasi minimal B (4 lembaga). Lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 20 SDG’s Urusan Pendidikan Kota Bontang Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian		
		2021	2022	2023
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (Tujuan 4 Target 1)	93,03	95	83,1
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/ sederajat (Tujuan 4 Target 1)	82,47	81,2	70,53
3	SD/MI terakreditasi B (Tujuan 4 Target 1)	21,31	20,63	23,21
4	SD/MI terakreditasi A (Tujuan 4 Target 1)	67,21	63,49	66,07
5	SMP/MTS terakreditasi B (Tujuan 4 Target 1)	48,48	45,45	41,38
6	SMP/MTS terakreditasi A (Tujuan 4 Target 1)	45,45	51,52	51,72
7	APK SD/MI (persen) (Tujuan 4 Target 1)	94,27	102,3	89,31
8	APK SMP/MTs (persen) (Tujuan 4 Target 1)	102,26	106,6	80.62
9	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) (Tujuan 4 Target 1)	10,8	10,81	10,92
10	APK PAUD 3 – 6 Tahun (Tujuan 4 Target 2)	45,32	40	54,88
11	Rasio APM P/L SD/MI (persen)(Tujuan 4 Target 5)	N/A	95	83,1
12	Rasio APM P/L SMP/MTs Rasio APM P/L SMP / MTs Rasio (persen) (Tujuan 4 Target 5)	N/A	81,2	70,53
13	Persentase Guru TK Bersertifikasi (Tujuan 4 Target c)	43,22	29,38	51,6
14	Persentase Guru SD Bersertifikasi (Tujuan 4 Target c)	49,82	51,96	89,45
15	Persentase Guru SMP Bersertifikasi (Tujuan 4 Target c)	48,77	59,77	92,05

Adapun pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada Urusan Pendidikan pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 21 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pendidikan Tahun 2022-2023

No.	Indikator SPM	Rumus	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD :	$\frac{Jumlah\ Peserta\ Didik\ Usia\ 5-6\ Tahun}{Jumlah\ Penduduk\ Usia\ 5-6\ Tahun} \times 100\%$	100,00%	63,10%
	Jumlah Peserta Didik Usia 5-6 Tahun		4536	4421
	JumlahPenduduk Usia 5-6 Tahun		4536	7006
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI-SMP/MTs)	$\frac{Jumlah\ Peserta\ Didik\ Usia\ 7-15\ Tahun}{Jumlah\ Penduduk\ Usia\ 7-15\ Tahun} \times 100\%$	100%	82.70%
	Jumlah Peserta Didik Usia 7-15 Th		24396	26127
	Jumlah Penduduk Usia 7-15 Th		24396	31591
3	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{Jumlah\ Peserta\ Didik\ Usia\ 7-18\ Tahun}{Jumlah\ Penduduk\ Usia\ 7-18\ Tahun} \times 100\%$	100%	100%
	Jumlah Peserta Didik Kesetaraan Usia 7-18 tahun		565	566
	Jumlah penduduk Usia 7-18 th yang blm menyelesaikan Pend Dasar dan atau Menengah		565	566

Dari data di atas, untuk ketiga indikator SPM Bidang pendidikan kewenangan Kab/Kota, terlihat sudah tercapai target SPMnya 100 persen pada tahun 2023, hal ini berarti bahwa pada tahun 2023 jumlah anak siswa pendidikan dasar, Pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan sudah terpenuhi pelayanan Pendidikannya dibanding dengan jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan oleh Pemerintah Kota Bontang.

B. Urusan Kesehatan

Capaian indikator Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup tahun 2023 mengalami penurunan dari target rasio 200 menjadi 0 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bontang dari jumlah 3.042 kelahiran hidup tidak terdapat kasus kematian ibu.

Capaian indikator angka kematian bayi (AKB) mengalami peningkatan. Jumlah kasus tahun 2023 sebanyak 41 kasus kematian atau rasio 13,48/1000 kelahiran hidup (dari target rasio 11/1000 kelahiran hidup) dengan perhitungan $41 \text{ kasus kematian bayi} \div 3.042 \text{ angka kelahiran hidup} \times 1000$. Adapun yang menjadi **penyebab kematian** adalah Kasus Neonatal : 10 dengan kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), 3 kasus lahir prematur, 10 Kelainan Kongenital, 2 Aspiksia, 3 Infeksi dan lain-lain berjumlah 8 kasus (Pulmonari Bleeding, Keluarga Tidak Tahu Penyebab meninggalnya/lahir dirumah, Meconium Aspiration Syndrome, gagal Nafas, Hyper Glikemia terdapat cairan di paru, Hyaline Membrane Disease grade 2, RDS). Kasus Post Neonatal disebabkan oleh 1 kasus pneumonia, 1 kasus kelainan kongenital dan lain-lain sebanyak 3 kasus (demam, aspirasi, tidak tahu penyebab kematiannya/meninggal dirumah). Faktor utama dari penyebab masih tingginya angka kematian bayi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan TW1, belum semua ibu hamil dipemeriksaan TW 1 mendapatkan pelayanan 10T di Faskes (Timbang, Tensi, TFU, Temu Wicara, TTD, LILA, Temukan Persentase Janin, TT, Tes Lab, Tatalaksana kasus), obat untuk penanganan BBLR tidak disediakan oleh RS karena harganya mahal, masa expired pendek dan penggunaannya terbatas (R/Surfactan). Tingkat Pengetahuan SDM beberapa RS Swasta terkait penanganan BBLR perlu ditingkatkan.

Terkait tingginya angka kasus kematian pada bayi ini telah dilakukan monitoring kesehatan ibu hamil berupa Pelayanan K1 (Kontak pertama bumil dengan pemeriksaan USG), pelayanan K6 (Pemantauan minimal 6 kali selama kehamilan/sesuai trimester kehamilan + pemeriksaan dokter 1 kali trimester 1 dan 1 kali trimester 3). Penyediaan Prasarana Pely.Kesehatan (Menyediakan NIKSET, Penyediaan Oxy-meter Neonatal, menyediakan partus set yang lengkap) dan pemantauan terpadu Balita Sakit dan Pemantauan Terpadu Bayi Muda.

Capaian indikator prevalensi balita stunting tahun 2023 mengalami peningkatan dari target 18% menjadi 27,4 persen berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2023. Angka ini meningkat 5,8 persen dari tahun 2022. Beberapa penyebab terjadinya peningkatan angka stunting adalah faktor ekonomi, polah asuh yang belum maksimal akibat minimnya pengetahuan ibu hamil ataupun menyusui, selain itu masih kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga pengetahuan akan pentingnya memantau pertumbuhan balita secara rutin diperlukan baik untuk orang tua maupun masyarakat sekitar sehingga balita yang memiliki permasalahan gizi dapat ditemukan sedini mungkin dan segera ditangani permasalahan gizinya. Adapun upaya

untuk menurunkan angka stunting pada baduta di Kota Bontang adalah dengan melakukan penyuluhan, melakukan aksi konvergensi, operasi timbang, pemberian makanan tambahan, pelatihan PMBA bagi Nakes dan Kader, kelas konseling, kelas balita, kelas ibu hamil, aksi Hunting The Sun melalui dana CSR, pemeriksaan HB remaja putri, pemberian Tablet Tambah Darah, tes kebugaran, kelas catin dan bekerja sama dengan lintas sektor baik pemerintah maupun swasta.

Capaian indikator Insiden Rate (IR) DBD pada tahun 2023 mengalami peningkatan, rasio 244/100.000 penduduk dari target rasio 230/100.000 penduduk (total penduduk sebanyak 188.101 jiwa) dengan perhitungan $459 \text{ kasus} / 188.101 \times 100.000$. Pada tahun 2023 Terdapat 2 kasus kematian dengan DBD di Kota Bontang. Penyebab masih tingginya angka kasus demam berdarah karena minimnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3Mplus (Menguras tempat penampungan air, Menutup tempat penampungan air, Mengubur kaleng-kaleng bekas dan tempat-tempat yang berpotensi menjadi pengembang biakan nyamuk dan Menggunakan lotion anti nyamuk), masyarakat masih menganggap *fogging* sebagai solusi utama dalam pengendalian Demam Berdarah. Bontang merupakan daerah endemis DBD karena iklim yang cocok untuk berkembang biaknya nyamuk aedes aegypti. Berbagai upaya yang terus dilakukan dalam menurunkan angka kasus demam berdarah yaitu melakukan sosialisasi terkait 3Mplus, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang prosedur penggunaan fogging dan bahayanya, pengadaan abatesasi, membuat surat edaran kewaspadaan penyakit DBD. Tahun 2023 tepatnya pada bulan Oktober 2023 di launching program inovasi pengendalian DBD dengan Program pengembang biakan nyamuk Wolbachia yang merupakan pilot project bekerjasama dengan Kemenkes. Dengan teknologi Wolbachia diharapkan angka insidensi DBD dapat diturunkan dalam kurun waktu minimal 2 tahun kedepan. Adapun langkah pemantauan yang disusun pada tahun 2023 - 2024 adalah pemantauan proses peletakan nyamuk dengan ember berwolbachia dengan pemberdayaan kader untuk menilai proporsi nyamuk ades aegypti yang berlowachia (target 60% dalam kurun waktu 6 bulan setelah peletakan ember perdana).

Tabel 2. 22 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan
Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka kematian ibu per 100000 kelahiran hidup	78,8	102,93	467	119	0
Angka Kematian neo natal per	0,79	1,03	1,44	8	36/3042 kelahiran
Angka Kematian Bayi / 100.000 Kelahiran Hidup	11,3	13,6	14,39	11	13,48
Prevalensi balita gizi kurang	7,4	10,6	7,03	8,1	8,03
Prevalensi Baduta Pendek (Stunting)/(TB/U)				23,6	16,22
Prevalensi Balita Gizi Kurus (BB Kurang/Underweight)/(BB/U)				15,13	15,67
Insiden Rate DBD / 100000 penduduk	11,3	13,6	321,69	316	244

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa aspek pelayanan kesehatan ibu sudah optimal dengan melihat tidak adanya kasus

kematian ibu melahirkan. Namun demikian kegiatan berkelanjutan tetap perlu ditingkatkan dengan melakukan metode pengendalian diantaranya melakukan pembentukan screening layak hamil dan evaluasinya, melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) supaya kasus yang pernah ada tidak terulang, bimbingan penyuluhan calon pengantin, peningkatan edukasi ibu hamil melalui kelas ibu hamil, pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin.

Aspek penanganan kesehatan bayi baru lahir belum optimal dan masih perlu perhatian khusus, hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan TW1, belum semua ibu hamil dipemeriksaan TW 1 mendapatkan pelayanan 10T di Faskes (Timbang, Tensi, TFU, Temu Wicara, TTD, LILA, Temukan Persentase Janin, Vaksin TT, Tes Lab, Tatalaksana kasus), selain itu obat untuk penanganan BBLSR (Berat Badan Lahir Sangat Rendah) tidak disediakan oleh RS karena harganya mahal, masa expired pendek dan penggunaannya terbatas (R/Surfactan). Untuk menurunkan angka kematian bayi telah dilakukan metode pengendalian dengan melaksanakan monitoring kesehatan ibu hamil, penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan (mis : USG), peningkatan pengetahuan SDM yang merata terkait penanganan BBLR di semua Faskes karena beberapa tenaga kesehatan yang menangani persalinan dan pertolongan bayi baru lahir di faskes swasta belum terpapar bimtek atau pelatihan penanganan BBLR.

Demikian juga aspek peningkatan status gizi pada anak perlu mendapat perhatian khusus dan kerjasama dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya penyuluhan yang masif, melakukan aksi konvergensi, pemberian makanan tambahan, pelatihan PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) bagi tenaga kesehatan dan Kader, kelas konseling, kelas balita, kelas ibu hamil, aksi *Hunting The Sun* melalui dana CSR, pemeriksaan HB remaja putri, pemberian Tablet Tambah Darah, tes kebugaran, kelas catin.

Berdasarkan aspek kinerja daerah urusan kesehatan, pada tahun 2023 capaian rasio Puskesmas/Poliklinik/Puskesmas Pembantu adalah 1 : 4374 mengalami peningkatan (satu faskes per 4374) dari target 1 : 16.000 (satu faskes per 16.000 penduduk). Dengan bertambahnya jumlah faskes diharapkan ketersediaan pelayanan kesehatan tidak hanya terpenuhi secara kuantitas tapi juga kualitas layanan perlu diperhatikan. Pemerintah Kota Bontang telah memenuhi komitmen dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakatnya melalui program Universal Health Coverage dengan Cakupan Kepesertaan JKN 102,78 % yang terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD = 55.688, PBI APBN = 28.151, Bukan Pekerja (BP) = 1.535, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)= 15.337, Pekerja Penerima Upah (PPU) terdiri dari PPU BU (Badan Usaha)=70.512, PPUPN (Penyelenggara Negara/PNS) = 20.097.

Berdasarkan Kepmenkes Nomor 81/Menkes/SK/I/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi atau Kab.Kota dan Rumah Sakit, adalah rasio dokter 96/100.000 penduduk (atau 1 dokter melayani 96 pasien). Di Kota Bontang jumlah dokter atau tenaga medis sebanyak 151 dengan jumlah penduduk 181.101 atau sama dengan $151/188.101 \times 100.000 = 80/100.000$. Artinya Ketersediaan tenaga dokter di Kota Bontang sudah terpenuhi dengan rasio 80/100.000 (1 dokter melayani 80 penduduk). Permasalahannya karena Bontang memiliki wilayah pesisir yang tidak disediakan fasilitas kesehatan utama sehingga keterpenuhan pelayanan kesehatan masyarakat pesisir belum terpenuhi secara maksimal.

Ditinjau dari pencapaian target SPM bidang Kesehatan pada tahun 2023, beberapa indikator tidak mencapai target sebagaimana yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan untuk merealisasikan sasaran SPM dimaksud seperti di bawah ini.

Tabel 2. 23 Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

NO	Layanan	Kegiatan Capaian (persen)	PERMASALAHAN/ HAMBATAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	47,9	Adanya perubahan Defenisi operasional terkait screening kehamilan berupa penambahan layanan pemeriksaan K1 memeriksakan kehamilan dengan mendapatkan layanan lengkap pemeriksaan 10T dan tidak semua faskes punya pemeriksaan lab. Kegiatan survei layak hamil melalui aplikasi kadang terkendala di jaringan krn data yang diisi tidak terekam/terkirim. Belum semua RS melakukan Audit Maternal Perinatal Internal, Belum semua catin mendapatkan bimbingan perkawinan di lembaga agama, kesadaran ibu hamil dalam mengikuti kelas ibu hamil yang disediakan masih rendah.
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	88,6	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan TW1, belum semua ibu hamil dipemeriksaan TW 1 mendapatkan pelayanan 10T di Faskes (Timbang, Tensi, TFU, Temu Wicara, TTD, LILA, Temukan Persentase Janin, TT, Tes Lab, Tatalaksana kasus). obat untuk penanganan BBLSR tidak disediakan oleh RS karena harganya mahal, masa expired pendek dan penggunaanya terbatas (R/Surfactan). Tingkat Pengetahuan SDM beberapa RS Swasta terkait penanganan BBLR perlu ditingkatkan (harga Bimtek 15 juta/orang)
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	87,1	Cakupan pemeriksaan bayi baru lahir adalah 3 kali pemeriksaan, sedangkan yang terjadi dilapangan sebagian ibu hanya membawa bayinya diperiksa 2 kali dan selanjutnya sudah tidak datang karena sudah tidak ada keluhan.
4	Pelayanan Kesehatan Balita	74,8	Balita harus ditimbang minimal 8 kali, Pemberian Vit A dua kali, DDTKA MTBM dan MTBS saat sakit, Imunisasi Lengkap (Pemeriksaan lengkap baru dihitung satu capaian) dan banyak yang tidak lengkap/ada indikator pemeriksaan yang ketinggalan sehingga tidak terhitung sebagai capaian pelayanan.
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	73,6	Pelayanan kesehatan anak usia dasar dilakukan pada tahun ajaran 2023/2024. Tidak tercapai 100% karena pemeriksaan secara berkala dilaksanakan sesuai dengan tahun berjalan. Untuk tahun 2023 – 2024 pemeriksaan akan rampung di bulan Mei 2024.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	58,8	Tidak semua masyarakat usia produktif mau dilakukan pemeriksaan screening yang datang ke Posbindu orangnya itu-itu saja, MCU RS belum optimal memberikan data ke layanan faskes dan data yang dikirim banyak yang tidak lengkap (hanya identitas jenis kelamin tanpa menyertakan umur atau tanggal lahir)
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	90	Tidak ada kendala
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	46.4	Screening belum optimal menyasar penduduk usia 15 tahun ke atas karena kesadaran masih kurang dan yang datang ke Posbindu orangnya itu-itu saja kecuali yang MCU rutin (Perusahaan dan orang yang sudah berobat rutin/pengendalian)

NO	Layanan	Kegiatan Capaian (persen)	PERMASALAHAN/ HAMBATAN
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	70,6	Banyak masyarakat yang sudah terindikasi DM atau susp. DM tidak peduli dengan kesehatannya, tidak merubah gaya hidup dengan pengaturan jenis dan pola makan dengan perilaku hidup sehat.
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	92.8	Sudah tercapai maksimal, Hanya kadang pada faskes daerah perbatasan jumlah sasaran dan yang berobat kadang tidak sesuai karena bukan warga Bontang.
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	119.1	Kekurangan BHP/reagen (karena distribusi Provinsi terbatas dan Dinkes tidak menganggarkan pengadaan BHP Pemeriksaan TB di APBD).
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	101,5	Kesadaran diri yang masih kurang dalam pemeriksaan melaksanakan mandiri.

Sumber, Dinas Kesehatan Kota Bontang tahun 2023

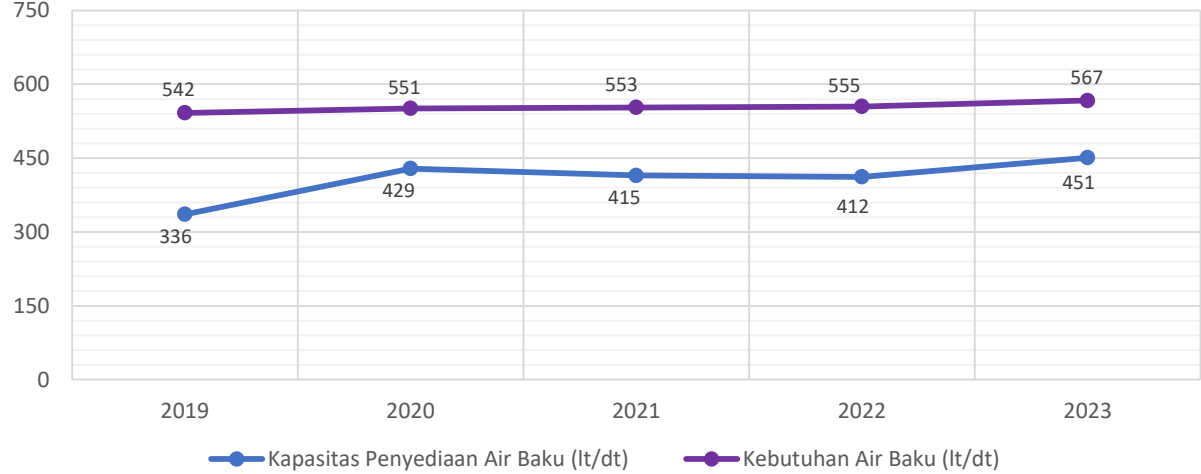
C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dititikberatkan pada peningkatan akses sanitasi dan air minum, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah serta penguatan dalam upaya penanggulangan banjir.

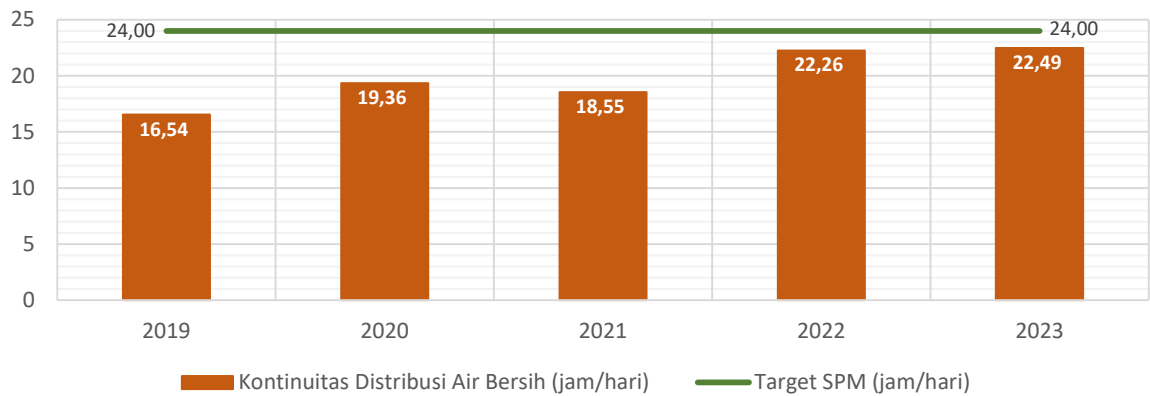
Untuk meningkatkan kinerja pelayanan air minum dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas dalam penyediaan air minum, dan ketersediaan air baku menjadi sangat penting untuk meningkatkan layanan tersebut. Pada tahun 2023, air baku yang dihasilkan dari intake sebesar 451 liter/detik. Meskipun sudah meningkat dari tahun sebelumnya, namun kapasitas tersebut masih belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan yaitu sebesar 567 liter/detik atau masih mengalami defisit sebesar 116 liter/detik. Selain itu pemenuhan air baku Kota Bontang masih sangat bergantung pada air bawah tanah yang diambil melalui sumur-sumur dalam dimana saat ini sudah mulai dibatasi penggunaannya, sehingga sumber air baku alternatif atau sumber air baku permukaan sangat diperlukan untuk Kota Bontang baik dari sumber air permukaan yang berada di wilayah Kota Bontang maupun sumber air yang berada diluar Kota Bontang melalui penyelenggaraan SPAM Regional.

Persentase penduduk yang telah berakses air minum layak juga mengalami peningkatan dari 85,40% pada tahun 2022 meningkat menjadi 85,72% pada tahun 2023. Sebanyak 162.838 jiwa penduduk di Kota Bontang telah mendapatkan layanan air minum perpipaan baik yang dilakukan oleh PDAM maupun Non PDAM. Meskipun capaian kinerja mengalami peningkatan, namun kualitas dan kontinuitas penyediaan air masih perlu diperbaiki. Berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Perumdam Tirta Taman Tahun 2022 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, kepastian kualitas air belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Kualitas air belum memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Permenkes No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum disebabkan karena desain Instalasi Pengolah Air (IPA) yang dimiliki hanya mampu memproduksi air baku menjadi air bersih. Perumdam Tirta Taman belum mampu memberikan layanan air siap minum dengan menerapkan Zona Air Minum Prima (ZAMP) dan belum menerapkan Smart Grid Water Management (SGWM). Sedangkan untuk kontinuitas distribusi air bersih belum dapat dilakukan selama 24 jam dan baru dapat dilakukan selama 22,49 jam per hari karena produksi air beberapa

IPA yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat dan disebagian IPA produksi air dikondisikan bekerja diatas kapasitas terpasang sehingga untuk menjaga kinerja IPA jam operasi tidak dimaksimalkan 24 jam.



Sumber : Perumdam Tirta Taman, 2024 dan Analisis Bapelitbang, 2024
Gambar 2. 22 Kuantitas Penyediaan Air Baku

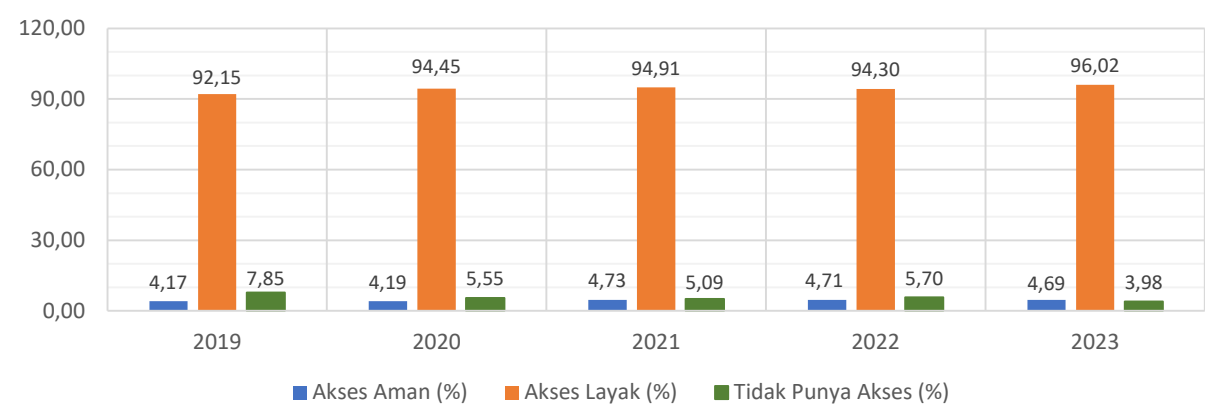


Sumber : Perumdam Tirta Taman, 2024
Gambar 2. 23 Kontinuitas Distribusi Air Bersih

Peningkatan akses sanitasi dilakukan dengan mengembangkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem komunal maupun individual. Pengembangan sistem komunal dilakukan dengan penambahan sambungan rumah dengan memanfaatkan idle capacity dari unit pengolah, dan untuk wilayah yang belum memiliki unit pengolah komunal dilakukan dengan pembangunan sistem individual.

Di Kota Bontang masih terdapat rumah yang belum memiliki akses untuk air limbah domestik. Data Dinas Kesehatan masih terdapat 2.123 rumah yang masih melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) karena tidak memiliki unit pengolah air limbah domestik. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2023 telah dilakukan penanganan BABS dengan melakukan penambahan sambungan rumah pada IPAL eksisting maupun pembangunan septictank individual dengan Teknologi Tepat Guna (TTG). Penambahan sambungan rumah dilakukan di Kelurahan Loktuan sebanyak 144 SR, Kelurahan Bontang Kuala sebanyak 111 SR, dan Kelurahan Tanjung Laut sebanyak 10 SR. Untuk pembangunan septictank individual dengan TTG dilakukan di Kelurahan Tanjung Laut indah sebanyak 20 unit, Kelurahan Berbas Pantai sebanyak 20 unit, dan Kelurahan Gunung Elai sebanyak 37 unit. Sampai dengan akhir tahun 2023 rumah tangga yang telah mempunyai akses sanitasi (air limbah domestik) sebesar 96,02% atau 49.322 rumah tangga, meningkat sebesar 1,72% dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 94,30%.

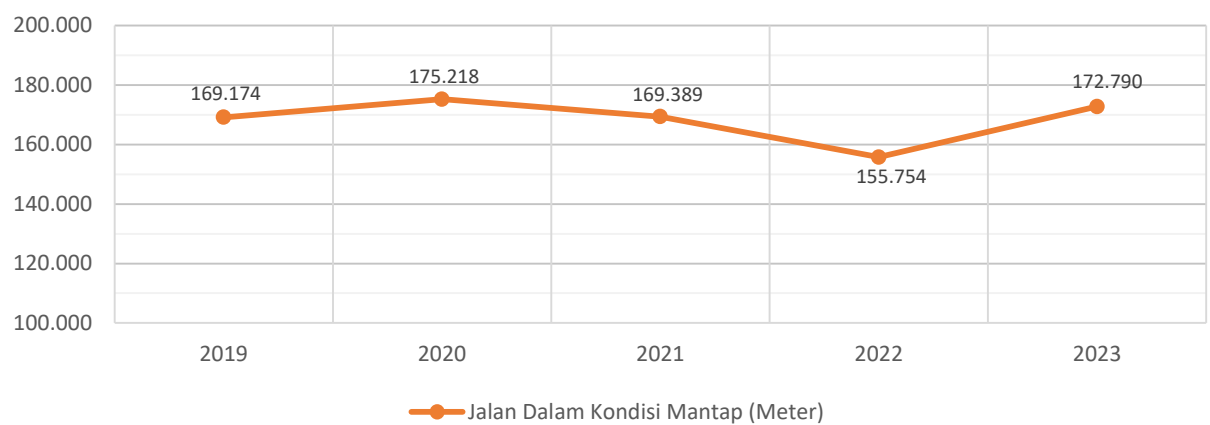
Dari 96,02% penduduk yang telah mempunyai akses sanitasi tersebut, sebanyak 4,69% merupakan penduduk yang telah memiliki akses sanitasi aman.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, 2024
Gambar 2. 24 Capaian Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik)

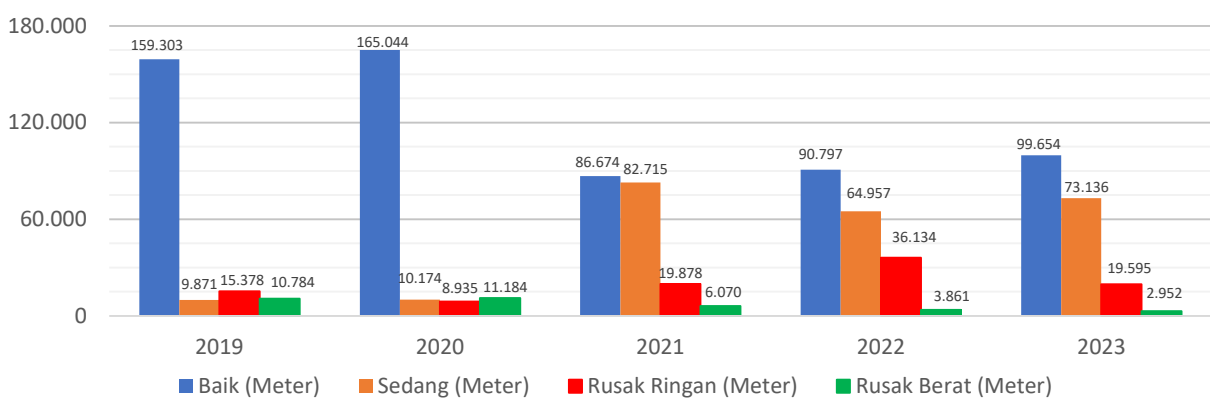
Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas jalan dilakukan dengan peningkatan kualitas jalan dan pengembangan sistem jaringan jalan. Pada tahun 2023, persentase jalan dalam kondisi mantap sebesar 88,46% di mana sepanjang 172.790 meter jalan dari total panjang jalan sepanjang 195.337 meter kondisi jalannya sudah dalam keadaan baik dan sedang. Nilai ini meningkat sebesar 8,89% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 di mana persentase panjang jalan dalam kondisi mantapnya sebesar 79,57%. Selama lima tahun terakhir panjang jalan dalam kondisi mantap di Kota Bontang cenderung mengalami peningkatan dan penurunan. Hal tersebut diakibatkan karena beberapa ruas jalan mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan secara berkala sehingga perlu upaya untuk terus meningkatkan kualitas jalan melalui perbaikan dan pemeliharaan.

Kondisi jalan di Kota Bontang memiliki kondisi yang bervariasi. Terdapat jalan dalam kondisi baik, sedang, rusak ringan sampai dengan rusak berat. Jalan yang mengalami kerusakan berat terutama jalan menuju kawasan industri Bontang Lestari yaitu ruas Jalan Soekarno-Hatta - Jalan M. Roem – Jalan Urip Soemoharjo di mana frekuensi kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan bermassa besar yang membuat struktur jalan mengalami penurunan, bahkan di beberapa bagian terdapat lubang yang membahayakan pengendara. Pada tahun 2022 - 2023, peningkatan kualitas ruas jalan Jalan Soekarno-Hatta - Jalan M. Roem - Jalan Urip Soemoharjo mulai dilakukan dengan melakukan rekonstruksi jalan dengan pendanaan APBD Kota Bontang, Bantuan Keuangan Provinsi maupun APBN. Adapun kondisi jalan Kota Bontang pada tahun 2023 terdiri atas 99.654 meter dengan kondisi baik, 73.136 meter dengan kondisi sedang, 19.595 meter dengan kondisi rusak ringan dan 2.952 meter dengan kondisi rusak berat.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, 2024

Gambar 2. 25 Panjang Jalan Kondisi Mantap



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, 2024

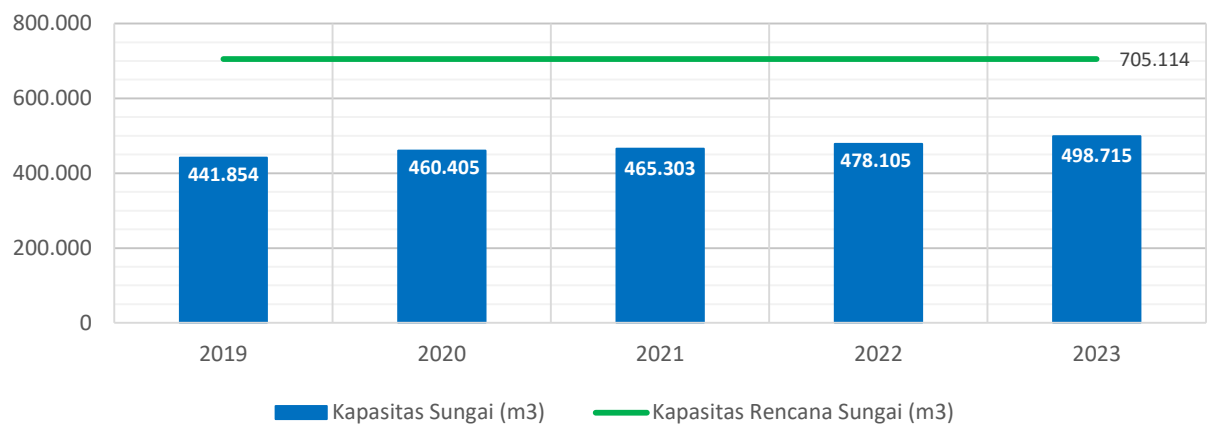
Gambar 2. 26 Kondisi Jalan Kota Bontang

Dalam rangka penguatan penanggulangan banjir dilakukan dengan perbaikan dan pengembangan sistem jaringan drainase dan penataan aliran sungai. Pembangunan drainase, rehabilitasi drainase, penurapan sungai, dan normalisasi drainase, sungai dan waduk dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki aliran air menjadi lebih baik dan meningkatkan daya tampung drainase perkotaan, sungai dan waduk.

Panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik pada tahun 2023 mencapai 35.434 meter dari total keseluruhan panjang drainase perkotaan sepanjang 36.187 meter atau sebesar 97,92%. Sedangkan panjang drainase jalan di Kota Bontang sebesar 94,11% di mana panjang drainase jalan dalam kondisi baik adalah 275.780 meter dari keseluruhan panjang drainase jalan sepanjang 293.029 meter. Hal tersebut menandakan bahwa pengelolaan drainase di Kota Bontang semakin membaik dari tahun ke tahun.

Selain melalui pembangunan, peningkatan maupun rehabilitasi drainase, dalam pengelolaan sumber daya air juga perlu meningkatkan kapasitas sungai dan waduk. Hal ini dilakukan guna menambah daya tampung sungai dan waduk, sehingga semakin optimal digunakan dalam rangka menanggulangi banjir. Peningkatan kapasitas sungai dilakukan dengan pembangunan dan peningkatan turap sungai serta melakukan normalisasi sungai. Kapasitas aliran sungai di Kota Bontang pada tahun 2023 adalah 498.715 m³, meningkat sebesar 20.610 m³ dari tahun sebelumnya. Meskipun begitu, jumlah tersebut masih belum bisa mencapai kapasitas rencana sungai yang direncanakan sebesar 705.114 m³, sehingga masih terdapat gap sebesar 206.399 m³ yang perlu dituntaskan. Adanya gap ini menandakan bahwa masih perlu upaya terus

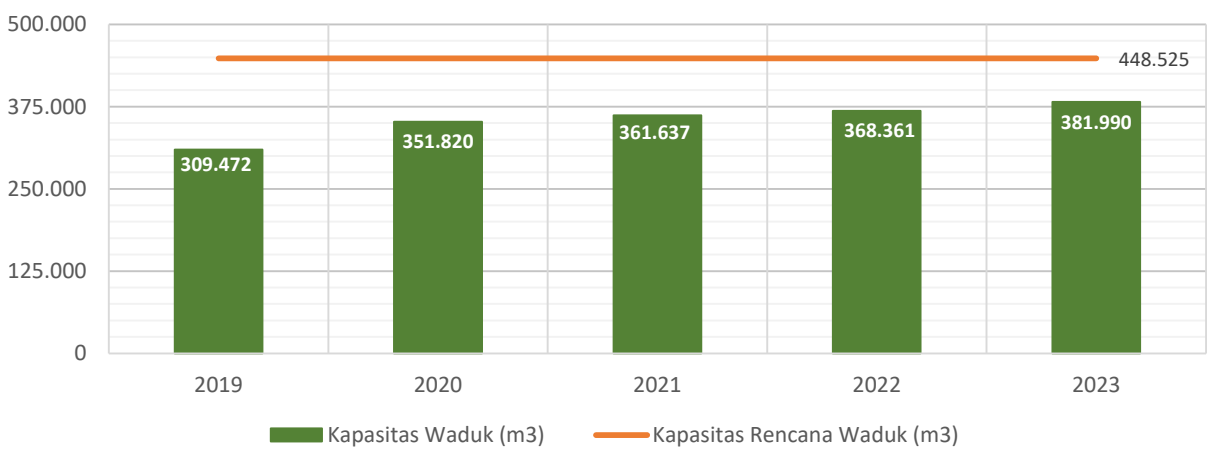
untuk meningkatkan kapasitas sungai dengan penurapan dan normalisasi sungai, sehingga kapasitas sungai bisa bertambah dan semakin banyak volume air yang bisa dialirkan.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, 2024

Gambar 2. 27 Kapasitas Aliran Sungai

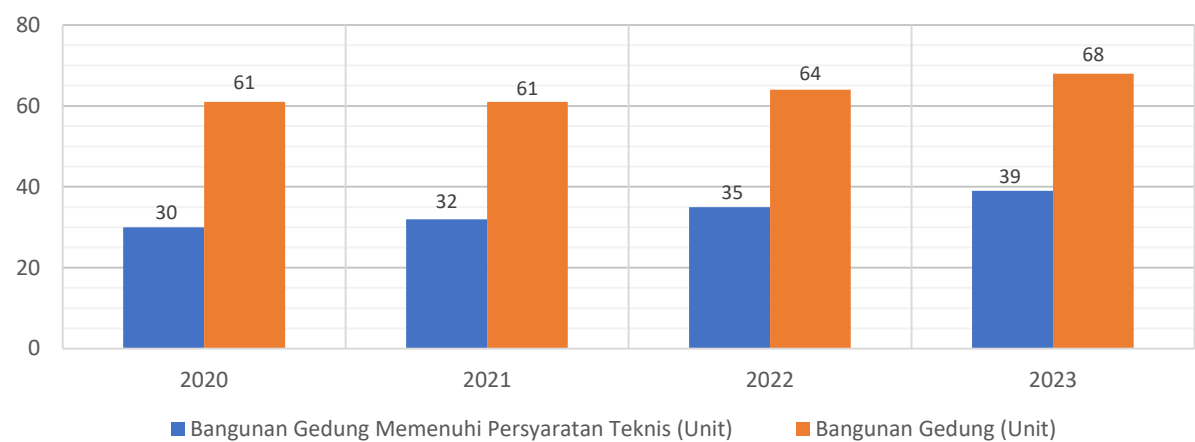
Dalam rangka menanggulangi banjir di Kota Bontang, hal lain yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas waduk yang dalam hal ini adalah Waduk Kanaan. Pada tahun 2023 telah dilakukan normalisasi waduk sebesar 13.629 m³ sehingga kapasitas Waduk Kanaan saat ini mencapai 381.990 m³. Adapun kapasitas rencana Waduk Kanaan adalah sebesar 448.525 m³, sehingga masih diperlukan upaya normalisasi waduk sebesar 66.535 m³ untuk lebih mengoptimalkan fungsi waduk.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, 2024

Gambar 2. 28 Daya Tampung Waduk Kanaan

Pelaksanaan penataan bangunan gedung dilakukan dengan pembangunan maupun merehabilitasi bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan teknis bangunan. Sampai dengan tahun 2023 persentase bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis sebesar 57,35% atau 39 bangunan gedung dari 68 bangunan gedung milik pemerintah Kota Bontang. Terdapat 4 bangunan gedung yang dibangun pada tahun 2023 yaitu Kantor Kelurahan Berbas Tengah, Kantor Kelurahan Satimpo, BPU Kelurahan Tanjung Laut Indah dan Masjid Stadion Lang-Lang.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, 2024

Gambar 2. 29 Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Bontang

Sedangkan dalam penyelenggaraan penataan ruang, kesesuaian penggunaan ruang terhadap rencana peruntukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebesar 94,17% yaitu dari luas wilayah 16.188 hektar yang sudah sesuai dengan peruntukan ruang dalam RTRW seluas 15.245 hektar.

Tabel 2. 24 Kesesuaian Terhadap RTRW

No	Peruntukan Ruang	Luas (Ha)	Kesesuaian Terhadap RTRW (Ha)	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Kawasan Hutan Lindung	4.609,08	4.149,42	459,66
2.	Kawasan Hutan Produksi Konversi	62,06	0,00	62,06
3.	Kawasan Industri	190,45	189,8	0,65
4.	Kawasan Kepolisian	8,35	8,35	0,00
5.	Kawasan Kesehatan	30,62	20,68	9,94
6.	Kawasan Ekosistem Mangrove	736,32	721,39	14,93
7.	Kawasan Militer	45,25	45,25	0,00
8.	Kawasan Olahraga	183,64	163,34	20,3
9.	Kawasan Pelestarian Alam	648,16	623,15	25,01
10.	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	57,50	54,87	2,63
11.	Kawasan Pendidikan	76,49	76,32	0,17
12.	Kawasan Pengelolaan Air Limbah	4,82	0,00	4,82
13.	Kawasan Perdagangan dan Jasa	949,59	946,73	2,86
14.	Kawasan Peribadatan	25,06	16,87	8,19
15.	Kawasan Perikanan Budidaya	123,98	123,8	0,18
16.	Kawasan Perkantoran	81,62	81,62	0,00
17.	Kawasan Persampahan	23,03	23,03	0,00
18.	Kawasan Perumahan	3.519,42	3497,84	21,58
19.	Kawasan Peruntukan Industri	2.520,14	2.512,01	8,13
20.	Kawasan Prasarana Penunjang Perikanan	3,25	1,04	2,21
21.	Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	2,42	1,45	0,97
22.	Kawasan Sekitar Danau	7,20	7,20	0,00
23.	Kawasan Sempadan Pantai	225,91	217,03	8,88

No	Peruntukan Ruang	Luas (Ha)	Kesesuaian Terhadap RTRW (Ha)	
			Sesuai	Tidak Sesuai
24.	Kawasan Sempadan Sungai	68,80	53,12	15,68
25.	Kawasan Sumber Daya Air	117,46	112,78	4,68
26.	Kawasan Tanaman Pangan	12,68	12,68	0,00
27.	Kawasan Transportasi	134,45	122,17	12,28
28.	Ruang Terbuka Hijau Privat	543,86	481,41	62,45
29.	Pariwisata	2,37	2,37	0,00
30.	Ruang Terbuka Hijau Publik	1.173,69	978,89	194,8
	Jumlah	16.187,7	15.244,6	943,1

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, 2024

Adapun perkembangan kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada periode 2019-2023 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2. 25 Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase penduduk berakses air minum layak (%)	77,42	79,57	83,53	85,40	85,72
2	Persentase penduduk berakses sanitasi (%)	92,15	94,45	94,91	94,30	96,02
3	Persentase kapasitas unit air tanah/air baku (%)	62,03	77,83	75,01	74,20	79,56
4	Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS (%)	n/a	58,80	56,25	50,00	58,13
5	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	86,61	89,98	86,72	79,57	88,46
6	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (m)	146.353	146.514	146.514	146.986	148.950
7	Panjang jalan dilalui Roda 4 (km)	195.337	195.337	195.337	195.337	195.337
8	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik (%)	n/a	91,56	92,05	92,70	94,01
9	Persentase kapasitas aliran sungai (%)	62,66	65,30	65,99	67,81	70,73
10	Persentase daya tampung danau / folder / kolam retensi (%)	69,00	78,44	80,63	82,13	85,17
11	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik (%)	79,79	86,73	91,57	93,61	97,92
12	Persentase penataan sempadan sungai (%)	n/a	0	0	15,61	15,61
13	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,52	0,52	0,51	0,50	0,48
14	Persentase bangunan gedung yg	n/a	49,18	52,46	54,69	57,35

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	memenuhi persyaratan teknis (%)					
15	Persentase kesesuaian tata ruang (%)	n/a	88,00	94,17	94,17	94,17
16	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat (%)	n/a	70	70	77,08	80,42

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, 2024

Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 26 Pencapaian Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian Tahun 2023
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	85,72%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	96,02%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, 2024

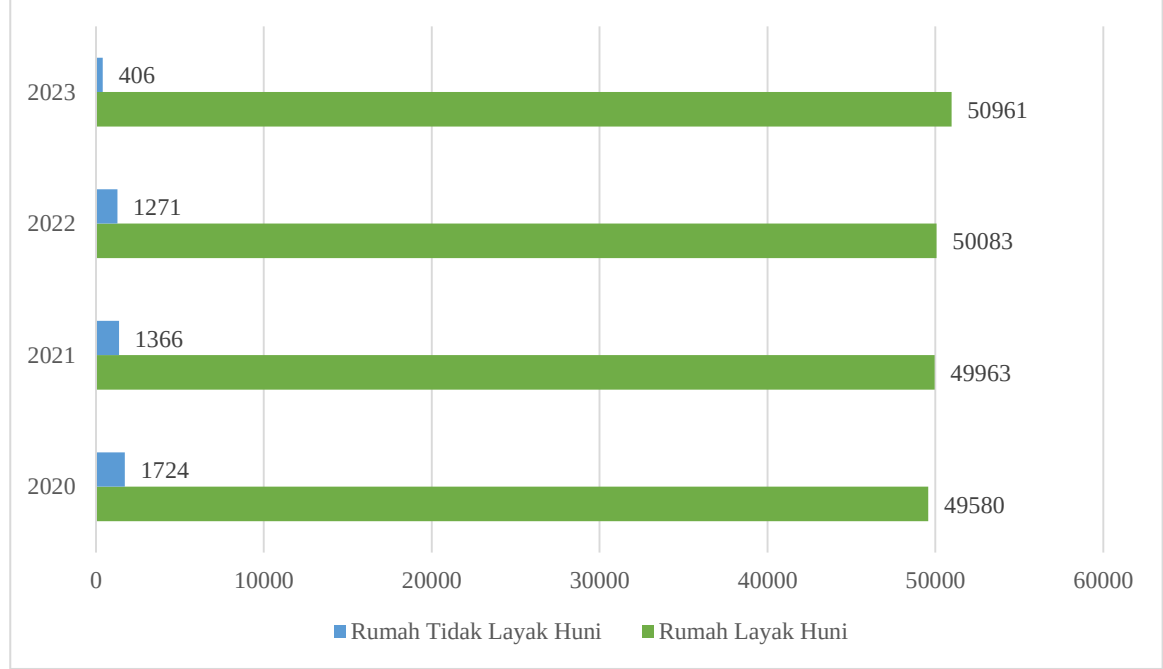
Capaian penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Belum tercapainya target 100% penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dikarenakan terbatasnya sumber air baku untuk air minum dan belum seluruh wilayah dapat dijangkau jaringan perpipaan Perumdam Tirta Taman terutama untuk didaerah pesisir dan pulau-pulau. Sedangkan untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik masih terkendala dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk mengelola air limbah domestiknya terutama untuk daerah pesisir sehingga masih melakukan BABS yang langsung dibuang ke laut sehingga kegiatan pemecuan harus terus dilakukan secara masif dan terus menerus.

D. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat dari peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai salah satu upaya mengatasi kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Oleh karena itu, penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman dan terjangkau menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

Selama empat tahun terakhir, jumlah Rumah Layak Huni (RLH) di Kota Bontang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, jumlah

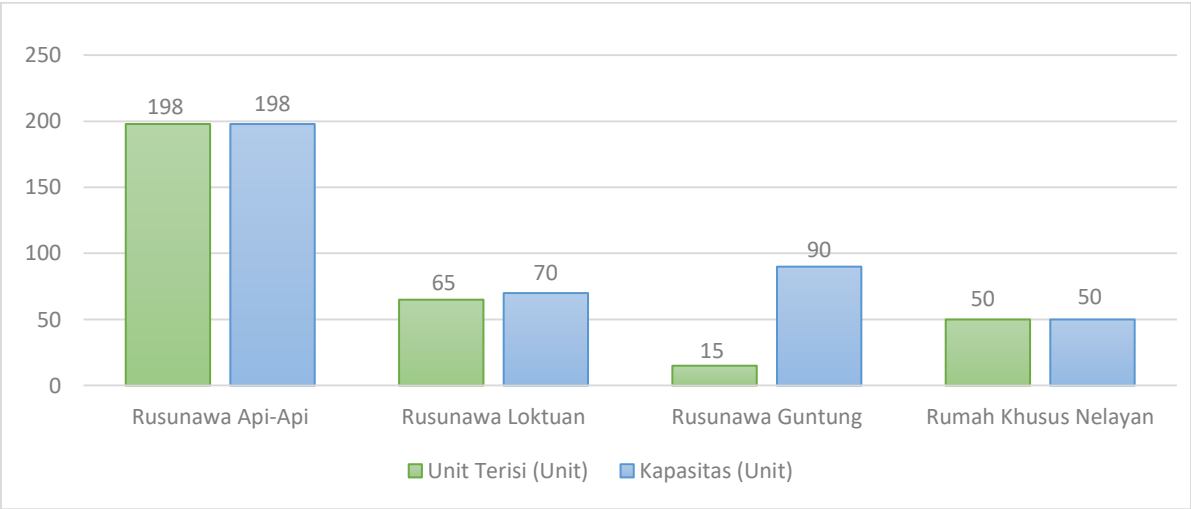
RLH di Kota Bontang mencapai 50.961 unit, meningkat sebesar 878 unit dari tahun 2022 yang berjumlah 50.083 unit. Hal tersebut mengartikan bahwa persentase rumah layak huni di Kota Bontang mencapai 99,2% dan sisanya, yaitu sebesar 0,8% merupakan Rumah Tidak Layak Huni. Adapun jumlah RTLH di Kota Bontang terus mengalami penurunan. Pada tahun 2023, jumlah RTLH adalah sebanyak 406 unit, menurun dari tahun 2022 yang sebelumnya berjumlah 1.271 unit. Penurunan ini mencapai angka 68% di tahun 2023. Gambar berikut menunjukkan perkembangan jumlah RLH dan RTLH di Kota Bontang selama empat tahun terakhir.



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2023

Gambar 2. 30 Kondisi Rumah di Kota Bontang Tahun 2020 – 2023

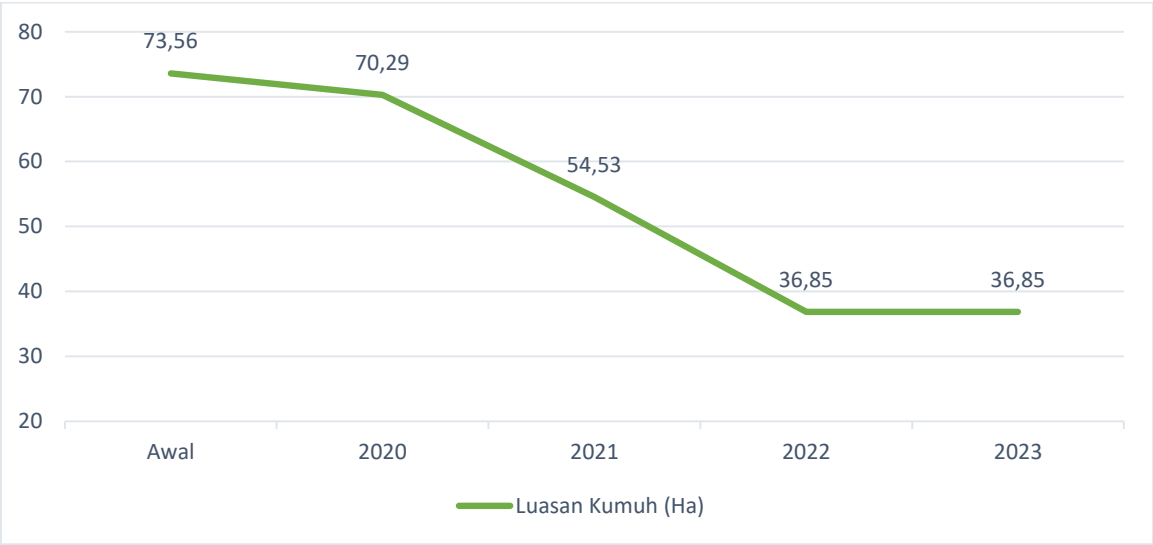
Penyediaan akses perumahan layak huni dan terjangkau yang telah dilakukan adalah dengan penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan rumah khusus nelayan. Sampai dengan saat ini terdapat 3 rusunawa yang telah dibangun di Kota Bontang yaitu Rusunawa Api-Api, Rusunawa Loktuan, dan Rusunawa Guntung dengan total unit sebanyak 358 unit. Adapun rumah khusus nelayan yang telah dibangun berada di Kelurahan Bontang Lestari sejumlah 50 unit.



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2023

Gambar 2. 31 Keterisian Rusunawa dan Rumah Khusus Nelayan

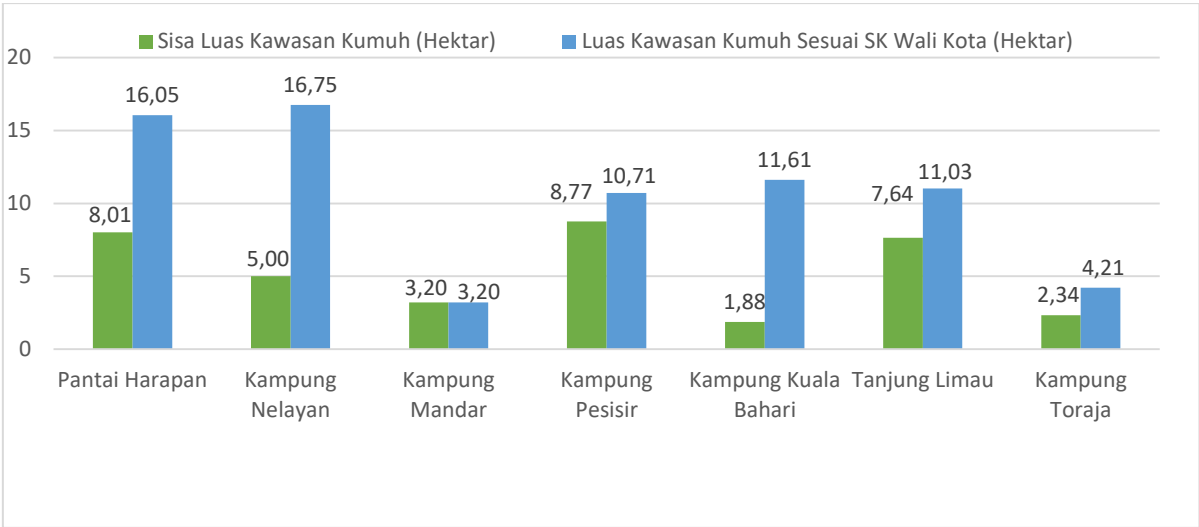
Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan di kawasan kumuh yang telah ditetapkan dalam SK Walikota Bontang Nomor 188.45/509/DPKP2/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bontang, yang telah menetapkan 7 kawasan kumuh di Kota Bontang seluas 73,56 hektar. Tujuh kawasan kumuh tersebut meliputi Pantai Harapan seluas 16,05 hektar; Kampung Nelayan seluas 16,75 hektar; Kampung Mandar seluas 3,20 hektar; Kampung Pesisir seluas 10,71 hektar; Kampung Kuala Bahari seluas 11,61 hektar, Tanjung Limau seluas 11,03 hektar; dan Kampung Toraja seluas 4,21 hektar. Selama tahun 2023, telah dilakukan penanganan, sehingga luasan kumuh di Kota Bontang dapat berkurang menjadi 36,84 hektar.



Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2024

Gambar 2. 32 Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Kota Bontang

Kekumuhan awal Kota Bontang adalah seluas 73,56 hektar. Pada tahun 2020 terjadi pengurangan luasan kumuh sebesar 3,27 hektar sehingga luasan kumuh Kota Bontang pada tahun 2020 menjadi sebesar 70,29 hektar. Pada tahun 2021 terjadi pengurangan luasan kumuh sebesar 15,76 hektar dan menghasilkan sisa luasan kumuh seluas 54,53 hektar. Pada tahun 2022, terjadi pengurangan luasan kumuh sebesar 17,68 hektar, sehingga sisa luasan kumuh Kota Bontang pada tahun 2022 menjadi sebesar 36,85 hektar. Apabila luasan kumuh 2022 dibandingkan dengan luasan kumuh awal, yakni sesuai penetapan SK Walikota Bontang Nomor 188.45/509/DPKP2/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bontang, maka diperoleh diagram seperti berikut:



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024

Gambar 2. 33 Sisa Luasan Kumuh Berdasarkan Kawasan Kumuh di Kota Bontang

Berdasarkan data di atas, beberapa kawasan kumuh di Kota Bontang masih memerlukan penanganan, terutama menyasar pada indikator kumuh yang masih bermasalah. Pada tahun 2023, kegiatan penanganan kumuh pada lokasi kumuh di atas telah dilakukan, namun luasan kumuh belum berkurang, meskipun tingkat skor indikator kekumuhan di lokasi tersebut berkurang. Salah satu contohnya adalah kawasan kumuh Tanjung Limau di Kelurahan Gunung Elai. Pada tahun 2022, RT 1 dan RT 2 di Gunung Elai memiliki skor kekumuhan 21 dan 18, namun pada tahun 2023 skor kekumuhannya berkurang menjadi 19 dan 16. Hal ini disebabkan karena indikator jalan lingkungan yang sebelumnya menjadi salah satu masalah di kawasan tersebut dapat ditangani pada tahun 2023 melalui pembangunan/peningkatan jalan lingkungan.

Adapun perkembangan pembangunan pelayanan umum urusan perumahan dan kawasan permukiman pada periode 2019 – 2023 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2. 27 Realisasi Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh	n/a	2,85	2,71	2,47	0,79
2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh	0,10	0,42	0,34	0,23	0,23
3	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (rumah tangga)	28.120	29.408	31.130	32.005	...
4	Rumah tangga pengguna listrik (%)	n/a	89,92	92,47	94,76	...
5	Persentase rumah layak huni	n/a	96,64	97,34	97,53	99,21
6	Persentase fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	n/a	0	100	100	100
7	Persentase fasilitasi penyediaan	n/a	0	1,00	10,00	44,44

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah					
8	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	n/a	0	0	25,24	68,42
9	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	n/a	91,96	92,01	92,47	94,76
10	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	n/a	90,93	91,43	91,83	93,48
11	Persentase ketersediaan sarana prasarana TPU	n/a	48,00	48,00	54,00	60
12	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	111,10	109,20	108,84	108,40	106,22

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2023

Selain melalui peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta penyediaan hunian layak dan terjangkau melalui pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan rumah khusus nelayan, kinerja pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman juga dapat dilihat pada pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jenis pelayanan dasar dalam pencapaian indikator SPM untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Bontang adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Adapun terkait dengan pemenuhan pelayanan dasar di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pencapaian indikator SPM di Kota Bontang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 28 Pencapaian Indikator SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian Tahun 2022
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah	100%	44,44%

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2023

Pada tahun 2023, capaian penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota sudah memenuhi target, yaitu 100%. Artinya adalah pada tahun 2023, penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana sudah dilaksanakan secara penuh. Adapun capaian fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat

yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota mencapai 44,44%. Pada tahun 2023, terdapat kegiatan penataan permukiman kumuh di bantaran sungai. Dari 9 rumah yang terdampak oleh relokasi program pemerintah tersebut, sebanyak 4 unit rumah sudah mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah dari program CSR dan 5 rumah lainnya akan dialokasikan pada tahun 2024 oleh pemerintah. 4 rumah yang telah direlokasi ini merupakan rumah yang berada di atas Sungai Guntung, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu aliran Sungai Guntung, hal ini sekaligus juga sebagai upaya untuk penanganan banjir yang sering melanda di sekitar aliran Sungai Guntung.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat meliputi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Manajemen Bencana, serta Pelayanan Pemadam Kebakaran. Kinerja dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan mayarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 29 Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	Tahun 2021	2022	2023
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	5,5	5,46	6,95	6,93	6,8
2	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	NA	NA	NA	25	25
3	Rasio Penegakan PERDA	87,5	91,6	54,5	86,6	100
4	Cakupan patroli petugas Satpol PP	3	3	3	3	3
5	Tingkat waktu tanggap (response time rate / 15 Menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	78,67	64,44	94,59	92,11	93,33

Sumber: Satpol PP, 2024

Secara umum waktu tanggap (response time rate /15 menit setelah pengaduan) dua tahun terakhir membaik dengan persentase diatas 92%. Namun tetap perlu untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana seperti pembangunan pos pemadam permanen dimana tempat masyarakat untuk melaporkan bencana kebakaran yang ada sehingga bencana ini langsung bisa teratasi dan tidak menimbulkan banyak kerugian di wilayah padat penduduk seperti wilayah Berbas, Loktuan dan Bontang Barat. Selain itu juga diperlukan pembinaan serta peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dengan memperhatikan standarisasi kualifikasi aparatur pemadam kebakaran serta demi meningkatkan kesadaran masyarakat salah satunya melalui pembentukan relawan pemadam kebakaran di setiap kelurahan.

Dalam penerapannya, SPM (Standar Pelayanan Minimum) harus menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu, sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan

Pemerintah Daerah khususnya pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan Masyarakat.

Sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar maka Manajemen Bencana harus memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai berikut: (1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, capaian kinerja 100% baik di tahun 2022 maupun tahun 2023; (2) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, capaian kinerja 100% di tahun 2023; (3) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, capaian kinerja 100% pada tahun 2022 dan 2023. Secara umum dalam pemenuhan pelayanan dasar dibidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 30 Pencapaian Indikator SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2021	2022	2023
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	100%	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%

Sumber: BPBD, 2024

F. Urusan Sosial

Penyelenggaraan pada Urusan Sosial merupakan urusan wajib pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian masyarakat serta tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, indikator persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial mencapai 100%. Berdasarkan data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dari 22.327 PMKS yang ada di Kota Bontang terdapat 22.327 PMKS yang memperoleh bantuan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, indikator Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani mencapai 100%. Pada tahun 2023, ada 15.773 orang korban bencana alam/sosial dan semuanya terlayani dengan baik. Hal tersebut menunjukkan komitmen dan peran Pemerintah Kota

Bontang melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan urusan soial melalui peningkatan jaminan dan rehabilitasi sosial kepada masyarakat Kota Bontang.

Beberapa indikator kinerja dalam Urusan Sosial disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 31 Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2019-2023

No	Indikator kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	95,48%	81,92%	100%	100%	100%
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)	N/A	N/A	100%	100%	100%
5	Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2023

Urusan Sosial memiliki Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diarahkan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Beberapa indikator TPB dalam Urusan Sosial, dapat dirincikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 32 Pencapaian Indikator TPB

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	4,22	4,38	4,62	4,54	4,11
2	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	100	100	100	100	100
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	5.245	4.864	4.295	2.557	1.972
4	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	55	226	57	79	31
5	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	15	61	23	17	78

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan BPS, 2023

Berdasarkan data BPS (Daerah Dalam Angka tahun, 2023) persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Kota Bontang pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,43% dari tahun sebelumnya menjadi 4,11%. Dari total 187.446 penduduk di Kota Bontang, terdapat 7.710 orang penduduk yang miskin. Beberapa hal yang

menjadi permasalahan kemiskinan di Kota Bontang antara lain: penanggulangan kemiskinan belum terintegrasi dengan baik, ketidakmauan warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk keluar dari garis kemiskinan serta adanya *mindset* warga Bontang yang menganggap mata pencaharian hanya dari sektor formal dan kurangnya kompetensi untuk berwirausaha.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Berdasarkan Data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) oleh satgas P3KE, data P3KE Kota Bontang tahun 2023 yaitu 14.307 KK. Selanjutnya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) melakukan pemadanan/penyandingan data P3KE dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan penyandingan tersebut ditemukan 8.090 KK yang tidak masuk dalam DTKS. Selanjutnya, dari 8.090 KK kemudian dipadankan dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terdapat 5.450 KK yang masih aktif berdomisili di Kota Bontang. Kemudian DSPM melakukan verifikasi dan validasi ke lapangan terhadap data 5.450 KK sehingga terdapat data dari desil 1-4 sejumlah 396 KK yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim dan pada desil I terdapat 47 KK (241 jiwa). Dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), sasaran utama dalam pengentasan Kemiskinan Ekstrem yaitu pada desil I. Dengan demikian, Pemerintah Kota Bontang akan melakukan berbagai strategi pengentasan kemiskinan ekstrem dengan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan penurunan jumlah kantong kemiskinan.

Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Sosial, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2023 mencapai 100% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 33 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Sosial Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi tahun 2023
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2023

Capaian indikator rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti tahun 2023 mencapai 100%. Berdasarkan data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2023, dari 71 anak terlantar di Kota Bontang terdapat 71 anak terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti. Sejalan dengan hal tersebut, indicator perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota mencapai 100%. Pada tahun 2023, jumlah warga Bontang korban bencana terdiri dari 15.773 orang dan semuanya memperoleh perlindungan serta jaminan sosial. Pemenuhan pelayanan dasar dalam pencapaian indikator SPM pada Urusan Sosial Tahun 2023 rata-rata mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan kolaborasi OPD terkait dalam pemenuhan layanan dasar untuk peningkatan kualitas hidup penduduk Kota Bontang.

2.1.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

Keberhasilan kinerja urusan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang ditandai dengan penurunan angka TPT sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel 2.16. Menurunnya angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun dan meningkatnya persentase pencari kerja yang ditempatkan. Angka sengketa pengusaha-pekerja pada tahun 2023 mencapai angka 20 di mana terdapat 20 kasus sengketa pengusaha-pekerja yang disampaikan, dari 860 perusahaan yang ada di Kota Bontang. Jumlah kasus dari tahun 2022 hingga 2023 mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 terdapat 14 kasus, dan naik menjadi 20 kasus di tahun 2023. Karena tahun 2023 proyek selesai, kebiasaan pekerja/buruh akan menuntut hak ketika sudah tidak ada hubungan kerja lagi dalam masalah ini Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, Bidang Hubungan Industrial selalu melakukan pembinaan tanpa lelah terus menerus.

Sedangkan persentase pencari kerja yang ditempatkan adalah Persentase jumlah pencari kerja yang tercatat dan diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya. Berdasarkan tabel 2.34, dapat dilihat jumlah pencari kerja terdaftar dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan, dengan kondisi jumlah lowongan kerja yang terdaftar juga mengalami peningkatan. Terjadinya peningkatan pencari kerja terdaftar dan lowongan kerja terdaftar dipengaruhi oleh kesadaran pencari kerja untuk membuat kartu AK/I atau kartu kuning ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang serta pemberi kerja yang semakin patuh untuk melaksanakan pelaporan lowongan kerja ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja. Diharapkan di tahun mendatang dengan kebijakan penerimaan berkas lamaran satu pintu dan sosialisasi yang lebih gencar tentang Perda Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018, akan semakin tinggi ketaatan dari pencari kerja dan juga pemberi kerja untuk melapor ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang.

Tabel 2. 34 Perkembangan Penempatan Kerja Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pencari Kerja terdaftar (orang)	8.756	6.699	6.898	8.407	8544
Lowongan kerja terdaftar	1.910	1.439	1.462	2.921	3181

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(orang)					
Penempatan tenaga kerja terdaftar (orang)	1.415	1.252	1.510	2.232	2422
Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	16,16	18,69	21,89	26,55	28,35

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, 2023



Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, 2023

Gambar 2. 34 Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Tahun 2019-2023 di Kota Bontang

Dalam pelaksanaan urusan bidang ketenagakerjaan, pada tahun 2023 telah dilakukan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kepada 1.612 orang, Hal ini meningkat dibandingkan di tahun sebelumnya. Peningkatan kompetensi bagi pencari kerja melalui program pelatihan dan pemagangan adalah dalam rangka agar para pencari kerja mampu berdaya saing baik di dunia kerja maupun di dunia usaha. Kedepannya melalui kolaborasi yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang dengan perusahaan/ pemberi kerja diharapkan semakin banyak pencari kerja yang dapat dilatih dan mengikuti pemagangan dalam rangka peningkatan kompetensi pencari kerja tersebut.

Tabel 2. 35 Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kota Bontang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja (Permendagri Hal 215)	Satuan	2022	2023
1	Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi	orang	569	1612
2	Persentase pelatihan yang bersertifikat	%	5,25	7,37
3	%perselisihan pengusaha dan pekerja yang diselesaikan	%	100	85
4	Persentase peserta BPJS ketenagakerjaan	%	38,37	38,37

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, 2023

Berdasarkan tabel 2.36, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi. Peningkatan kompetensi bagi calon tenaga kerja merupakan salah satu prioritas yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang untuk menurunkan angka TPT yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing SDM di Kota

Bontang. Pelatihan yang diberikan kepada calon tenaga kerja adalah jenis pelatihan keterampilan seperti barista, moulding, dan lain-lain. Sedangkan untuk pelatihan sertifikasi utamanya dilakukan untuk mendukung kebutuhan pasar kerja di bidang industri.

Angka perselisihan tenaga kerja yang dapat diselesaikan pada tahun 2023 menurun 15 persen dibandingkan tahun 2022. Hal ini karena dari 20 pencatatan perselisihan, 3 pemohon pencatatan perselisihan masuk di tanggal 27 Desember 2023 sehingga dari 3 pemohon ini proses penyelesaiannya akan dilakukan di bulan Januari tahun 2024. Sedangkan untuk total kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 yaitu 21.392 orang dari jumlah tenaga kerja sejumlah 55.748 orang sehingga persentase peserta BPJS ketenagakerjaan tahun 2023 masih sebesar 38,37%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena masih rendahnya pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu fokus layanan urusan wajib pemerintah non pelayanan dasar yang bertujuan untuk mewujudkan melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan buruk lainnya melalui penguatan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan.

Capaian indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 10,07% dari tahun sebelumnya menjadi 53,71%. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Bontang tahun 2023, dari sejumlah 5.472 pekerja perempuan di Kota Bontang terdapat 2.939 pekerja perempuan di lembaga pemerintah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan peran perempuan di lembaga pemerintah melalui peningkatan pendidikan, wawasan, keterampilan, pengembangan karakter dan kepercayaan diri serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.

Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga mencapai 89,74%. Pada tahun 2023 tercatat dari 39 layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) terdapat 35 layanan Puspaga yang dimediasi. PUSPAGA merupakan layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak yang dilakukan oleh tenaga profesi/psikolog untuk memberikan solusi bagi orang tua, anak dan keluarga dalam menghadapi permasalahan pada langkah awal pencegahan, berupa layanan konseling, konsultasi dan mendapatkan informasi terkait pengetahuan dan keterampilan menjadi orang tua sesuai dengan hak anak.

Pada tahun 2023 Kota Bontang mendapatkan predikat Kota Layak Anak kategori Nindya. Hal tersebut menunjukkan komitmen dan keberhasilan Pemerintah Kota Bontang melalui kolaborasi Perangkat Daerah yang tergabung dalam gugus tugas Kota Layak Anak (DPPKB, Dinas LH, Bapelitbang dan OPD lainnya serta Perusahaan) dalam menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan melalui Penyusunan dan pengintegrasian berbagai program dan kegiatan yang responsif terhadap anak.

Beberapa indikator kinerja daerah dalam Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, disajikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2. 36 Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	42,95	56,35	42,27	43,64	53,71
	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	n/a	0,375	0,375	0,411	0,034
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	46,19	11,21	11,21	n/a	17,93
3	Rasio KDRT	0,02	0,04	0,04	0,02	0,05
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	64,72	51,77	51,77	56,28	37,38
5	perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100
6	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga	n/a	n/a	80%	79,17	89,74
7	Cakupan data gender dan anak terpadu	100%	100%	100%	100%	100
8	Predikat Kota Layak Anak	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya
9	Persentase Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : DPPKB, 2023

Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, meningkatkan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak, menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurunkan pekerja anak, dan mencegah perkawinan usia anak. Beberapa indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 37 Pencapaian Indikator TPB Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	4	1	2	1	1

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0,37	0,0013	0,0014	0,013	0,14
3	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0,0024	0,0042	0,0066	0,0051	0,05
4	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0,37	0,0013	0,0014	0,0007	0,14
5	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	100,00	100,00	100,00	100,00	100
6	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	17,24	18,52	16,23	16,23	16,23

Sumber : DPPKB, 2023

Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100%. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB (DPPKB) Kota Bontang tahun 2023, dari 48 korban kekerasan terhadap perempuan terdapat 48 korban kekerasan yang mendapatkan layanan. Pemerintah melalui DPPKB berkomitmen dalam melakukan pendampingan dan memberikan layanan komprehensif kepada masyarakat Kota Bontang khususnya korban kekerasan terhadap perempuan.

C. Urusan Pangan

Berdasarkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Bontang yang stagnan di sekitar angka 90 pada 4 tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa konsumsi komposisi kelompok pangan utama belum memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi. Pemerintah Kota Bontang terus mendorong perbaikan pola konsumsi dengan rutin melakukan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).

Tabel 2. 38 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pangan Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	86,8	89,4	89,76	90,5	89,8
Cakupan Daerah Rentan Pangan	%	0	0	0	5	0
Tingkat Keamanan Pangan	%	55,5	65	100	100	100

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Regulasi Ketahanan Pangan	regulasi	1	1	1	1	2
Ketersediaan Pangan Utama	ton	22.722	19.204	15.321	15.902	15.464
Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita	Poin	2.766,95	2.951,56	2.972,86	2.486,48	Energi:2486,48 Protein:99,62

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang Tahun 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kecenderungan angka Pola Pangan Harapan Kota Bontang mengalami peningkatan. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. PPH ini juga digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan di wilayah tertentu baik secara nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota. Semakin tinggi nilai PPH, maka semakin baik pola konsumsi pangan masyarakat.

D. Urusan Pertanahan

Kinerja pembangunan urusan pertanahan dapat dilihat pada capaian penyelesaian kasus-kasus pertanahan di Kota Bontang. Ukuran kinerja urusan pertanahan pada tahun 2023 ditentukan oleh indikator persentase penanganan sengketa tanah garapan, persentase penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah, persentase tanah kosong yang dimanfaatkan, persentase penerbitan izin membuka tanah, dan persentase penatagunaan tanah. Tabel di bawah ini menunjukkan capaian kinerja fokus urusan wajib non pelayanan dasar untuk urusan pertanahan tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 2. 39 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	Persen	100	100	100	100	50
	a. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	Target 5	Target 12	Target 8	Target 8	Target 8
			Realisasi 5	Realisasi 12	Realisasi 8	Realisasi 8	Realisasi 6
	b. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	Target 5	Target 12	Target 8	Target 8	Target 8
			Realisasi 5	Realisasi 12	Realisasi 8	Realisasi 8	Realisasi 4
2	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah	Persen	100	100	100	100	100
	a. Koordinasi dan Kronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	Target 0	Target 0	Target 0	Target 0	Target 1
			Realisasi 0	Realisasi 0	Realisasi 0	Realisasi 0	Realisasi 1
3	Persentase Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	Persen	0	0	0	22,4	24,72
	a. Koordinasi dan Kronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hektar	Target 0	Target 0	Target 0	Target 88,32	Target 111,02
			Realisasi 0	Realisasi 0	Realisasi 0	Realisasi 19,88	Realisasi 27,45

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
4	Persentase Penerbitan n Membuka Tanah	Persen	100	100	100	100	100
	a. Koordinasi dan kronisasi Pemberian Izin Membuka ah	Lokasi	Target 0	Target 0	Target 0	Target 0	Target 3
			Realisasi 0	Realisasi 0	Realisasi 0	Realisasi 0	Realisasi 3
5	Persentase natagunaan Tanah	Persen	0	0	0	0	100
	a. Koordinasi Pemetaan a Nilai Tanah Kewenangan pupaten/ Kota	Kelurahan	Target 0	Target 0	Target 0	Target 0	Target 15
			Realisasi 0	Realisasi 0	Realisasi 0	Realisasi 0	Realisasi 15

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2024

Penanganan sengketa tanah garapan meliputi kegiatan inventarisasi dan mediasi. Pada tahun 2023, persentase penanganan sengketa tanah garapan mencapai baru mencapai 50%, dimana dari 8 kasus yang masuk, proses inventarisasi terlaksana pada 6 kasus sementara proses mediasi dilakukan pada 4 kasus yang menghasilkan 4 Berita Acara. Jumlah kasus tersebut tidak mencerminkan semua permasalahan sengketa tanah garapan di Kota Bontang, melainkan hanya berdasarkan permintaan pemilik lahan yang terlibat sengketa untuk dimediasi oleh Pemerintah Kota. Sebagian besar penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dilakukan oleh kelurahan. Dikarenakan keterbatasan SDM di Pemerintah Kota, hingga saat ini belum pernah dilakukan pendataan terhadap keseluruhan sengketa tanah yang terjadi di Kota Bontang. Karena ketiadaan data tersebut, capaian kinerja urusan pertanahan di bidang penanganan sengketa tanah belum bisa diukur dengan tepat dan tidak bisa terlaksana secara optimal. Untuk itu, ke depannya diperlukan pendataan keseluruhan kasus sengketa tanah yang pernah tercatat di 15 (lima belas) kelurahan Kota Bontang melalui kajian yang dapat melibatkan pihak ketiga.

Untuk penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah pada tahun 2023, terdapat 1 kasus ganti kerugian yang dilaksanakan. Dalam hal ini, ganti kerugian dari Pemerintah Kota Bontang dilakukan berdasarkan hasil putusan pengadilan untuk mengganti lahan masyarakat yang dijadikan akses jalan di antara lahan Pemerintah Kota.

Tanah kosong adalah semua tanah yang dikuasai oleh Pemerintah atau Negara dan belum ada pengelolaan di dalamnya. Munculnya tanah kosong di Kota Bontang umumnya disebabkan perubahan status hukum dari lahan hutan menjadi APL (Area Penggunaan Lain). Penambahan luasan tanah kosong yang teridentifikasi adalah 22,70 hektar, dari semula 88,32 hektar di tahun 2022 menjadi 111,02 hektar di tahun 2023. Dari 111,02 hektar tanah kosong yang teridentifikasi di Kota Bontang pada tahun 2023, baru 27,45 hektar yang terselesaikan sehingga capaian kinerjanya adalah 24,72%. Masalah tanah kosong di Kota Bontang belum bisa terselesaikan secara keseluruhan karena prosedur pengurusan hak atas tanah memerlukan waktu yang relatif panjang.

Untuk penerbitan izin membuka tanah di tahun 2023, capaian kinerja telah mencapai 100%, dimana dari 3 lokasi yang diajukan, kesemuanya telah terbit izin untuk membuka tanah.

Kegiatan penatagunaan tanah melalui pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) baru dilakukan pada tahun 2023 dan telah selesai 100% pada 15 (lima belas) kelurahan. Data ZNT diperlukan sebagai dasar perhitungan: (a) NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang terkait dengan pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Bapenda dimana Penilaian ulang NJOP akan berpengaruh untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Bontang dan (b) PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari jasa balik nama sertifikat yang tidak lagi mengacu dari nominal penjualan,

melainkan dari perhitungan ZNT. Perhitungan ZNT didasari oleh data aksesibilitas dan kelas jalan, pusat ekonomi, RTRW Kota Bontang Tahun 2019 – 2039, tingkat kerawanan bencana, serta survei harga tanah kepada Masyarakat dan ketua RT melalui metode *sampling*.

Selain indikator di atas, ukuran kinerja urusan pertanahan juga dapat dilihat dari jumlah sertifikat jenis hak atas tanah yang dikeluarkan, jumlah sertifikat permohonan pendaftaran tanah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 40 Jumlah Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan dan Jenis Hak Atas Tanah di Kota Bontang

No	Kecamatan	Hak Milik	Hak Guna Bangunan	Hak Guna Usaha	Hak Pakai	Hak Pengelolaan
1	Bontang Selatan	491	194	-	37	-
2	Bontang Utara	778	157	-	30	-
3	Bontang Barat	426	20	-	-	-
Total		1.695	371	-	67	-

Sumber: Bontang Dalam Angka, Tahun 2022

Pada tahun 2022, sebanyak 1.695 sertifikat hak milik, 371 hak guna bangunan dan 67 hak pakai dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bontang, sehingga jumlah seluruh sertifikat menurut jenis hak atas tanah yang dikeluarkan adalah sejumlah 2.133 sertifikat. Dari 2.133 sertifikat menurut jenis hak atas tanah, sebanyak 722 sertifikat tersebar di Kecamatan Bontang Selatan, 965 sertifikat tersebar di Kecamatan Bontang Utara dan 446 sertifikat tersebar di Kecamatan Bontang Barat.

Tabel 2. 41 Jumlah Sertifikat Menurut Kecamatan dan Permohonan Pendaftaran Tanah di Kota Bontang

No	Kecamatan	Jual Beli	Hibah	Pemidahan	Akte Pemberian Hak Tanggungan
1	Bontang Selatan	32	6	-	146
2	Bontang Utara	114	8	10	319
3	Bontang Barat	32	1	-	88
Total		178	15	10	553

Sumber: Bontang Dalam Angka, 2023

Pada tahun 2022, sebanyak 178 sertifikat jual beli, 15 hibah, 10 sertifikat pemisahan, dan 553 akte pemberian hak tanggungan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bontang, sehingga jumlah seluruh permohonan pendaftaran tanah yang dikeluarkan adalah sejumlah 756 sertifikat. Dari 756 permohonan pendaftaran tanah, sebanyak 184 sertifikat tersebar di Kecamatan Bontang Selatan, 451 sertifikat tersebar di Kecamatan Bontang Utara dan 121 sertifikat tersebar di Kecamatan Bontang Barat.

E. Urusan Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan secara umum dapat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai dari komposit dari Indeks Kualitas Air, Kualitas Udara dan Kualitas Lahan.

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

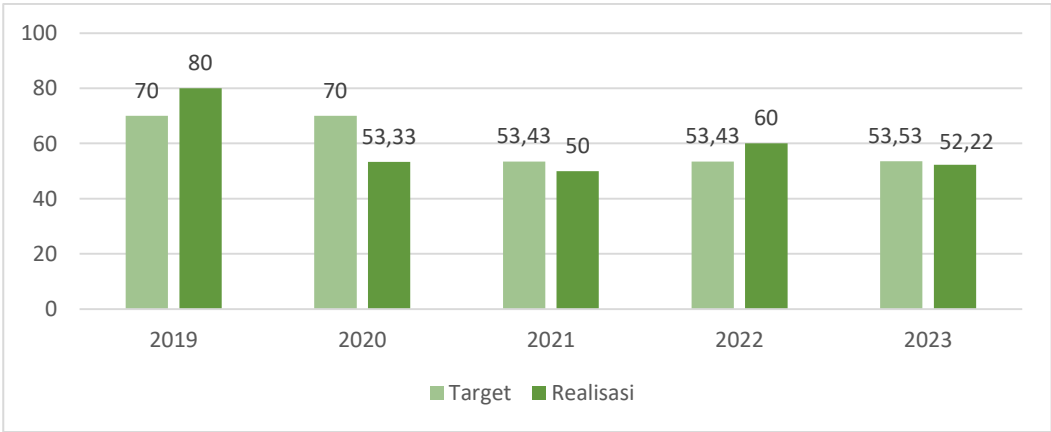
IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air di 9 titik/lokasi yang tersebar di Sungai Bontang, Sungai Guntung dan Sungai Nyerakat. Pemantauan dilakukan 2 kali dalam setahun yang mewakili musim kemarau dan hujan.

Tabel 2. 42 Tabel Indeks Kualitas Air

Nilai Bobot	Status	Titik sampel	IKA
70	Memenuhi	2	7.78
50	Ringan	16	44.44
30	Sedang	0	0.00
10	Berat	0	0.00
Total		18	52.22

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 2023

Dari tabel diatas terlihat sebagian besar (88,89%) kualitas air di Kota Bontang berada pada status tercemar ringan, hal tersebut mengindikasikan adanya pencemaran walaupun masih di tahap ringan namun perlu program dan tindakan untuk mencegah pencemaran semakin tinggi dan lebih berdampak terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan nilai IKA Kota Bontang Tahun 2023 adalah 52,22 dan menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 60,00.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 2023

Gambar 2. 35 Capaian IKA Kota Bontang 2019-2023

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Penyusunan dan perhitungan indeks kualitas udara difungsikan sebagai pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara ambien.

Pengukuran kualitas udara ambien di Kota Bontang dilakukan pada 12 lokasi/titik yang mewakili wilayah industri, pemukiman,

transportasi dan perkantoran/komersil dengan menggunakan metode passive sampler.

Tabel 2. 43 Hasil Uji Kualitas Udara Ambien Tahun 2023

No	Lokasi Sampling	Peruntukan Pengukuran	Tahap 1		Tahap 2	
			NO ₂ (µg/m ³)	SO ₂ (µg/m ³)	NO ₂ (µg/m ³)	SO ₂ (µg/m ³)
1	Lapangan Apel Polres	Transportasi	14.17	17.55	3.7	8.48
2	Monumen Pupuk Kaltim	Industri	13.16	12.34	8.78	11.48
3	Perumahan BSD	Permukiman	8.54	10.24	2.57	5.9
4	Gedung Graha Taman Praja	Perkantoran	7.29	8.41	4.25	3.71
5	Halaman Ruko PT. Badak NGL (samping Knowledge House)	Transportasi	17.18	11.89	5.34	2.57
6	Kawasan PT. BBRI	Industri	12.51	13.55	7.96	10.92
7	Perumahan Mulawarman Residence	Permukiman	10.3	9.99	2.57	5.93
8	Halaman Kantor DPMPSTSP	Perkantoran	12.76	14.3	6.3	7.17
9	Halaman Gd. Aini Rasifa	Transportasi	0.41	11.59	2.96	8.35
10	Area Taman PT. GPK	Industri	6.72	7.86	5.64	5.22
11	Jl. Pontianak, Telihan	Permukiman	10.65	12.29	7.64	5.36
12	Halaman Kantor Kebersihan	Perkantoran	11.82	10.61	4.51	3.01

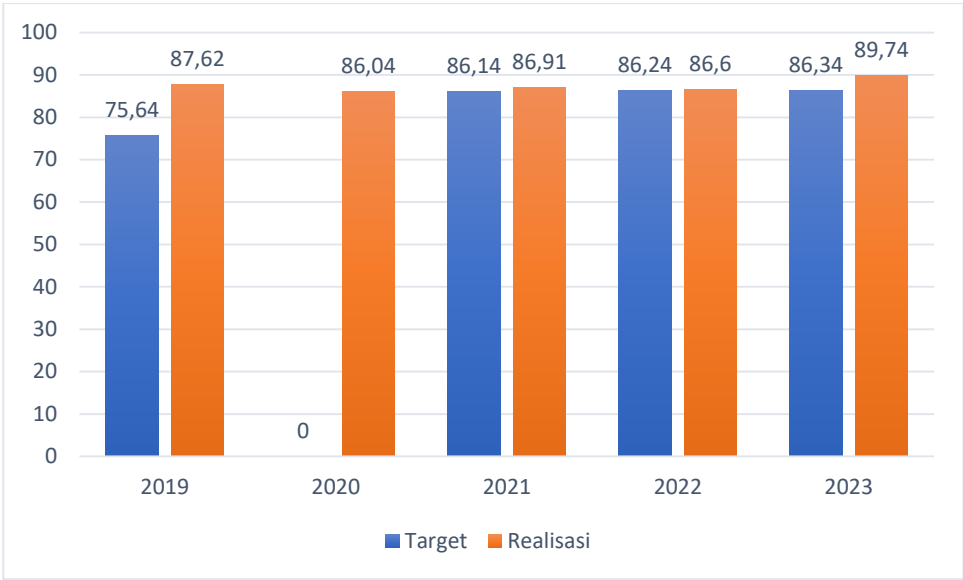
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 2023

Tabel 2. 44 Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2023

NO ₂ Kota (µg/m ³)	SO ₂ Kota (µg/m ³)	Indeks Udara NO ₂	Indeks Udara SO ₂	Indeks Udara	IKU 2023	Klasifikasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11,08875	5,84666667	0,277	0,292	0,285	89,74	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 2023

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai IKU Kota Bontang Tahun 2023 adalah 89,74 yang masuk dalam klasifikasi kategori baik. Penurunan kualitas udara dapat terjadi seiring dengan perkembangan industri dan meningkatnya penggunaan kendaraan sebagai sarana transportasi. Gas NO₂ dan SO₂ merupakan gas yang dominan yang dihasilkan dari aktivitas pabrik dan emisi gas buang kendaraan bermotor. Langkah-langkah pengendalian pencemaran udara tetap harus dilakukan diantaranya penataan emisi gas buang bagi industri, melakukan uji emisi kendaraan bermotor, himbauan untuk menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, penggunaan transportasi publik, dan penghijauan termasuk kewajiban menanam pohon bagi calon pengantin, ASN dan kegiatan lainnya.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 2023
Gambar 2. 36 Capaian IKU Kota Bontang Tahun 2019-2023

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Karena tidak ada ekosistem gambut di Kota Bontang, maka IKL dihitung berdasarkan data Indeks Kualitas Tutupan Lahan berupa tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.

Pengambilan data tutupan lahan dilakukan melalui citra satelit dan foto udara. Kewenangan Kabupaten/Kota terkait Data IKL pada Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sementara data luas hutan, luas belukar, kegiatan rehabilitasi merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat.

Tabel 2. 45 Tabel data Indeks Kualitas Lahan Kota Bontang

Luas Wilayah (Ha)	Luas Hutan (Ha)	Luas Belukar dalam kawasan (Ha)	Luas Belukar pada fungsi lindung (Ha)	RTH dan Tutupan Vegetasi relevan lainnya (Ha)	RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN) (Ha)
16.080,99	2.296,77	49,92	134,6	3.832,35	31,81

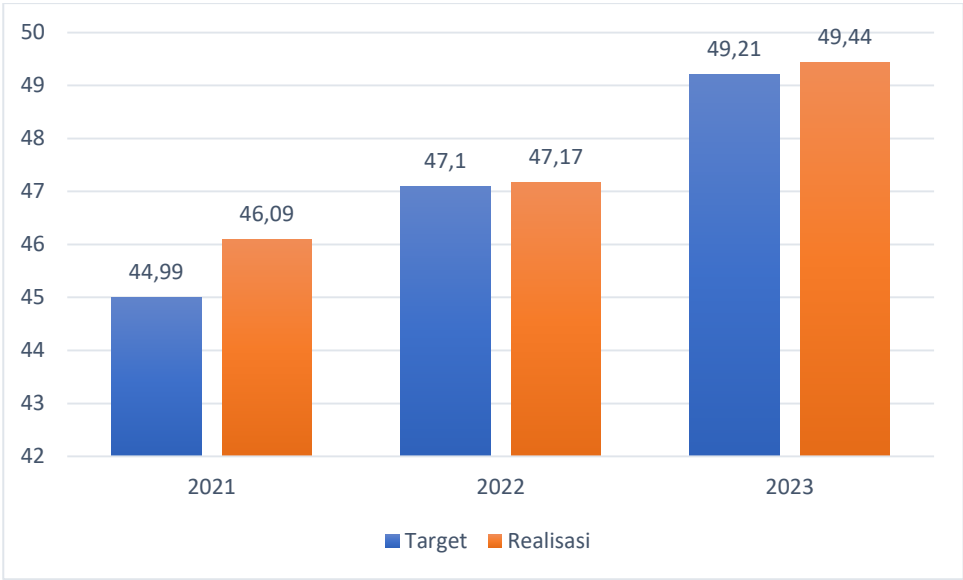
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang tahun 2023

Tabel 2. 46 Tabel Hasil perhitungan Indeks Kualitas Lahan

TL	IKTL	IKL
0.29	49,44	49,44

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai IKL Kota Bontang pada tahun 2023 adalah 49,44. Selama tiga tahun terakhir IKL memiliki tren positif namun tentunya masih dapat dioptimalkan.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang tahun 2023

Gambar 2. 37 Indeks Kualitas Lahan Kota Bontang Tahun 2021-2023

Berdasarkan grafik di atas, maka dapat dilihat bahwa selama 3 tahun terakhir, Kinerja Indeks Tutupan Lahan di Kota Bontang terus meningkat dan dapat melampaui target yang ditetapkan. Hal ini merupakan dampak dari beberapa kebijakan daerah untuk melakukan penanaman pohon bagi Calon Pengantin dan ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

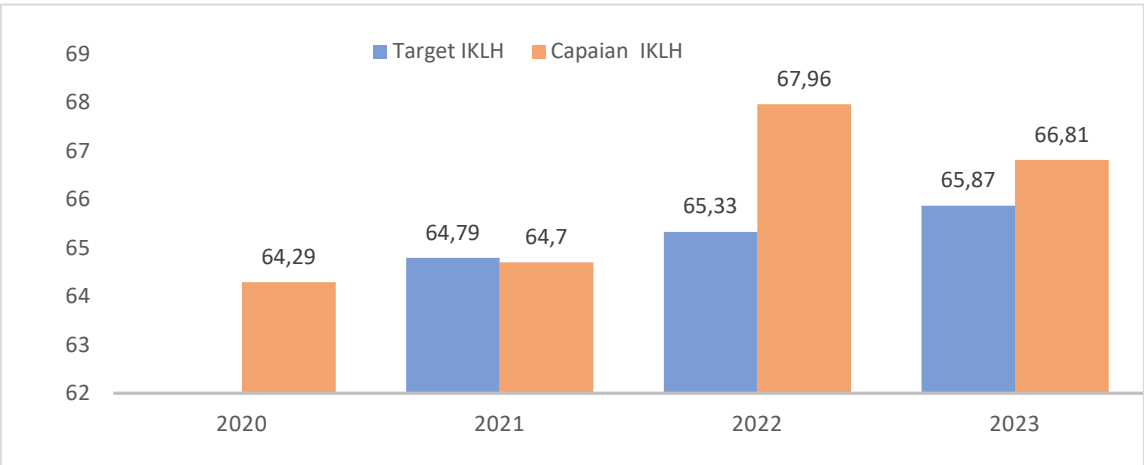
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Capaian IKLH diperoleh dari gabungan komponen IKA, IKU dan IKL. Berdasarkan perhitungan didapatkan IKLH Kota Bontang tahun 2023 adalah 66,81 dan masuk dalam klasifikasi kategori sedang.

Tabel 2. 47 Tabel Perhitungan IKLH Kota Bontang Tahun 2023

Indeks	Target	Capaian
Indeks Kualitas Air (IKA)	53,53	52,22
Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,34	89,74
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	49,21	49,44
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,87	66,81

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang Tahun 2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang Tahun 2023

Gambar 2. 38 Perhitungan IKLH Kota Bontang Tahun 2020-2023

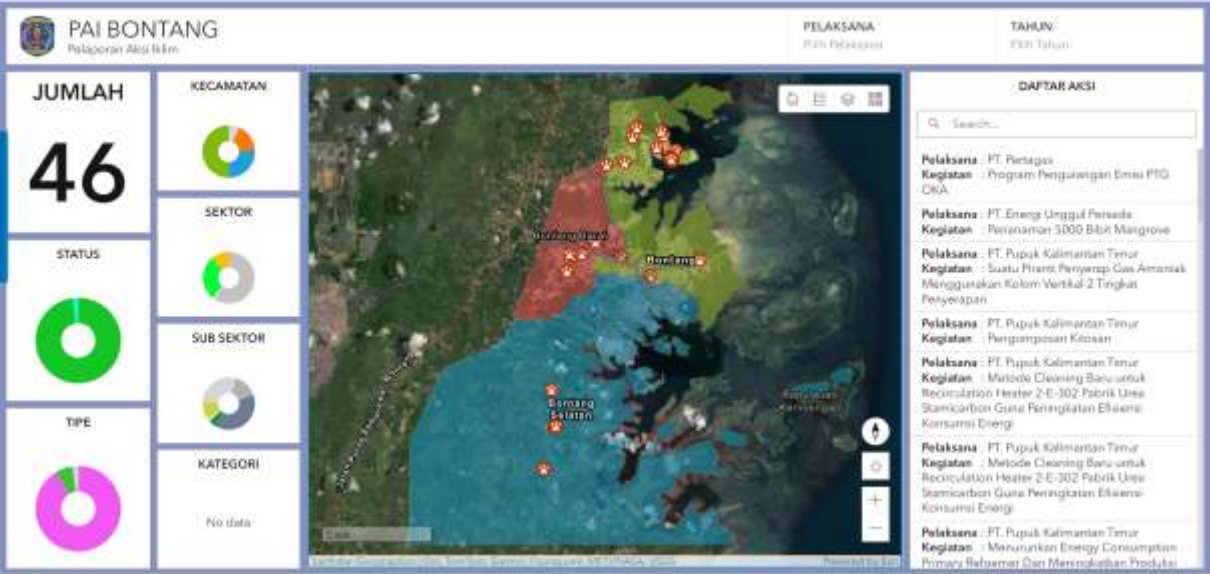
Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa komponen dari IKLH adalah IKA, IKU dan IKL. Dapat dilihat sejak tahun 2020-2021 kinerja IKLH mengalami kenaikan dan turun pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh capaian IKA yang menurun akibat pencemaran air yang terjadi sebagai dampak dari limbah rumah tangga dan limbah industri kecil yang ada disekitar bantaran sungai. Walaupun secara umum kinerja ILKH fluktuatif tetapi masih dalam kategori sedang. Untuk itu, diperlukan upaya lebih untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Bontang menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan salah satu misi Pemerintah Kota Bontang yaitu menciptakan Kota Bontang yang Berkelanjutan Yang Layak huni, Cerdas dan Berwawasan Lingkungan Melalui Pemantapan Ekonomi, Sosial Budaya & Infrastruktur Serta Pelestarian Lingkungan Hidup.

5. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kota Bontang ikut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan upaya dan dukungan aksi untuk mengurangi kerentanan terhadap dampak negatif perubahan iklim, salah satunya di tingkat tapak berbasis komunitas melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) yang merupakan bagian dari program KLHK.

Sebagai kota industri, sektor penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di Kota Bontang adalah sektor energi. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi emisi bersih (emisi eksisting dikurangi dengan serapan karbon) memiliki kecenderungan menurun, tetapi tetap perlu dioptimalisasi melalui aksi mitigasi dan adaptasi pengurangan GRK. Perusahaan pun sudah memiliki aksi-aksi mitigasi dan telah dilaporkan ke Pemerintah Kota Bontang.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang Tahun 2023

Gambar 2. 39 Pelaporan Aksi Iklim Kota Bontang Tahun 2023



Gambar 2. 40 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang menerima Penghargaan Green Leadership Capaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023

Salah satu pencapaian Kota Bontang di tahun 2023 adalah mendapatkan penghargaan Green Leadership atas Capaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup peringkat Pertama terbaik Se-Indonesia untuk Kabupaten/Kota melalui Indeks Respon terhadap pengelolaan lingkungan hidup atas kinerja dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bontang. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin.

6. Persampahan

Produksi timbulan sampah Kota Bontang tahun 2023 adalah 38.313,96 ton/tahun atau sekitar 105 ton/hari. Terjadi peningkatan timbulan sampah dari tahun sebelumnya seiring peningkatan jumlah penduduk, tentunya diseimbangkan dengan peningkatan upaya pengurangan sampah. Lebih rinci terkait data penanganan dan pengelolaan persampahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 48 Data Persampahan Kota Bontang

Uraian	2020	2021	2022	2023
Timbulan Sampah (ton/tahun)	37.769,85	37.894,33	38.046,40	38.313,96
Pengurangan Sampah (ton/tahun)	19,72persen 7.446,62	20,30persen 7.691,11	26,77persen 10.185,68	26,73persen 10.241,65
Penanganan Sampah (ton/tahun)	77.15persen 29.139,48	79.35persen 30.069,06	72.89persen 27.731,42	72.97persen 27.958,89
Sampah Terkelola (ton/tahun)	96.87persen 36.586,10	99,65persen 37.760,17	99,66persen 37.917,10	99,70 38.200,54

Uraian	2020	2021	2022	2023
Sampah Tak Terkelola (ton/tahun)	3.13persen	0,35persen	0,34persen	0,30persen
	1.183,75	134,16	129.30	125.30

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang Tahun 2023

Salah satu upaya optimalisasi pengelolaan sampah adalah peningkatan pengurangan sampah, salah satunya melalui bank sampah. Bank sampah dapat membantu mereduksi jumlah sampah yang masuk ke TPA, memberi nilai ekonomi, dan membantu merubah perilaku masyarakat. Terdapat sekitar 27 bank sampah di Kota Bontang yang terdiri dari bank sampah induk dan bank sampah pembantu yang berada di setiap kelurahan.

Idealnya setiap kelurahan memiliki TPS3R sehingga semakin mengoptimalkan upaya pengurangan sampah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah daya tampung landfill TPA semakin terbatas dan perlu segera membangun landfill yang baru.

Dari sisi pelayanan pengangkutan sampah, perlu ditingkatkan pembinaan kepada Masyarakat terkait pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di lingkungan masing-masing untuk pengangkutan sampah sebagai salah satu bentuk kesadaran dan peran serta dalam pengelolaan sampah.

F. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa setiap penduduk wajib memiliki identitas diri termasuk akta kelahiran dan KTP nasional. Beberapa indikator kinerja dalam mengukur Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain yaitu rasio kepemilikan KTP nasional berbasis NIK, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan berakta nikah dan cakupan kepemilikan akta perceraian. Rasio kepemilikan KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk di atas usia 17 tahun atau telah menikah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga pada tahun 2022 mencatat kepemilikan KTP-el sebanyak 99,00 persen. Angka tersebut sebanding pada capaian tahun 2023 yaitu 99,00 persen.

1. Persentase Penduduk ber-NIK

Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Dalam lima tahun terakhir (tahun 2019-2023), semua penduduk di Kota Bontang telah memiliki NIK sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.45 berikut.

Tabel 2. 49 Persentase Penduduk ber-NIK di Kota Bontang Tahun 2019 - 2023

Tahun	Persentase Penduduk ber-NIK
2019	100
2020	100
2021	100

Tahun	Persentase Penduduk ber-NIK
2022	100
2023	100

Sumber : Disdukcapil Kota Bontang, 2023

2. Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran

Sebagai salah satu syarat identitas diri bagi penduduk yang telah dilahirkan, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan akta kelahiran bagi penduduknya. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk ditunjukkan dengan membandingkan jumlah akta kelahiran dan jumlah penduduk dalam seribu penduduk. Dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, Kepemilikan akta kelahiran di Kota Bontang mengalami peningkatan. Semula sebanyak 65.418 per 1.000 penduduk di tahun 2019, menjadi 74.070 per 1.000 penduduk di tahun 2023. Secara lengkap, data kepemilikan akta kelahiran di Kota Bontang tahun 2019 sampai dengan 2023 disajikan dalam Tabel 2.46 berikut.

Tabel 2. 50 Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023

Tahun	Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk
2019	65.418
2020	67.974
2021	69.283
2022	71.589
2023	74.070

Sumber : Disdukcapil Kota Bontang, 2023

3. Penerbitan Akta kematian

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Dalam lima tahun terakhir, penerbitan akta kematian terus meningkat. Pada tahun 2019 telah diterbitkan sebanyak 667 akta dan pada tahun 2023 diterbitkan sebanyak 716 akta atau 100% penerbitan akta untuk semua kematian yang tercatat sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.47 berikut.

Tabel 2. 51 Penerbitan Akta Kematian di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Akta Kematian
2019	667
2020	788
2021	908
2022	767
2023	716

Sumber : Disdukcapil Kota Bontang, 2023

4. Persentase Penduduk Berakta Perkawinan

Pencatatan Perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa perkawinan. Sepanjang lima tahun terakhir, persentase kepemilikan akta perkawinan di Kota Bontang terus mengalami peningkatan sebagaimana yang tersaji dalam tabel 2.48 berikut.

Tabel 2. 52 Penerbitan Akta Nikah di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023

Tahun	Persentase Penduduk Berakta Perkawinan
2019	60
2020	63
2021	66
2022	69
2023	70

Sumber : Disdukcapil Kota Bontang, 2023

Secara umum capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil Kota Bontang tahun 2023 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana yang tersaji dalam tabel 2.49, adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan ini, diantaranya adalah menciptakan inovasi, melakukan Pelayanan Jemput Bola, Pelayanan Bus Keliling, pemanfaatan fasilitas digital melalui Dukcapil Go Digital, melaksanakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) Kependudukan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait lainnya antara lain Rumah Sakit, Klinik umum, Rumah Bersalin, Departemen Agama, Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan sampai dengan RT.

Tabel 2. 53 Kinerja Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Ratio	0,96	1	1	0,99	0,99
2	Rasio Bayi berakta kelahiran	Ratio	0,94	1	1	0,99	0,99
3	Rasio pasangan berakta nikah	Ratio	0,65	0,61	0,66	0,69	0,70
4	Cakupan kepemilikan akta perceraian	Persen	-	-	-	79	80
5	Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	Persen	96,48	98	97,7	-	99
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	94,42	65,96	100	-	99,82

Sumber: Disdukcapil, 2023

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat merupakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan partisipasi dan keberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat. Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat melalui partisipasi aktif masyarakat dan lembaga masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Beberapa upaya yang dilakukan dalam urusan pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan, pemenuhan sarana serta prasarana Lembaga Kemasyarakatan

Kelurahan, fasilitasi kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat dan fasilitasi dalam hal pemanfaatan teknologi tepat guna.

Beberapa indikator kinerja dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 54 Kinerja Daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah LPM	15	15	15	16	16
2	PKK aktif (%)	100	100	100	100	100
3	Jumlah kelompok binaan PKK	16	16	16	1.482	1.455
4	Persentase posyandu aktif	100	100	100	100	99,17
5	Jumlah Posyandu Mandiri	119	119	119	27	68
6	Jumlah Posyantek yang aktif/berfungsi	3	3	3	12	14

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaam Masyarakat, 2023

Pada tahun 2023, indikator PKK aktif mencapai 100%. Berdasarkan data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2023 dari 19 PKK yang ada di Kota Bontang, terdapat 19 PKK yang aktif. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah Posyantek tahun 2023 yang aktif/berfungsi mengalami peningkatan sebanyak 2 Posyantek menjadi 4 Posyantek dan seluruh Posyantek berperan aktif/berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan di Kota Bontang.

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu Fokus Layanan Urusan wajib pemerintah non pelayanan dasar yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui peningkatan kesehatan reproduksi masyarakat dan peningkatan kualitas layanan terhadap keluarga berencana.

Capaian indikator rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami penurunan 0,06 dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 0,97. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Bontang, dari sejumlah 60.936 keluarga hanya terdapat 59.177 anak di Kota Bontang. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB dalam mengendalikan jumlah penduduk dan melakukan pembinaan Keluarga Berencana.

Indikator Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 5,47% dari tahun sebelumnya menjadi 13,91%. Hal tersebut menunjukkan semakin baiknya pemenuhan layanan KB serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana.

Sementara persentase pemberdayaan kelompok kegiatan bangsa kencana tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 21,02% dari tahun sebelumnya menjadi 100%. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Bontang, dari 155 Kelompok kegiatan (Poktan) yang ada di Kota Bontang, seluruh Poktan tersebut aktif. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Bontang dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat serta meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kelompok kegiatan (Poktan) di masyarakat.

Beberapa indikator kinerja dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2019-2023 secara rinci disajikan dalam tabel berikut :

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Beberapa capaian indikator TPB dalam Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 55 Realisasi Kinerja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,03	1,04	1,66	1,03	0,97
2	Rasio akseptor KB	77,11	77,8	71,9	66,60	67,37
3	Cakupan peserta KB aktif	68,82	71,75	71,87	66,58	67,37
4	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,02	1,95	2,15	1,28	1,28
5	Total Fertility Rate (TFR)	14,8	2,3	2,3	2,15	2,13
6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	18,17	15,61	15,37	19,38	13,91
7	Persentase pemberdayaan kelompok kegiatan bangga kencana	N/a	51	91,5	78,98	100

Sumber : DPPKB, 2023

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Beberapa indikator TPB/SDGs dalam Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 56 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	18.635	18.429	25.641	23,33	23,0
2	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	68.82	71.74	51,2	66,58	67,37
3	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	32.46	35.25	36,1	39,69	33,80
4	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	0,85	0,41	4,65	8,5	21,9
5	Total Fertility Rate (TFR).	14,8	2,3	2,3	2,15	2,13
6	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	23,7 tahun	24,5	24,7	26,6	24,5
7	<i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	18,17	15,61	15,37	19,38	13,91

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
8	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	68,82	71,75	79,2	66,58	67,16

Sumber: DPPKB, 2023

Capaian indikator angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin mengalami peningkatan sebesar 0,79% dari tahun sebelumnya menjadi 67,37%. Pada tahun 2022 tercatat dari 28.283 Pasangan Usia Subur (PUS), terdapat 19.053 peserta KB aktif modern. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bontang terus berupaya dalam peningkatan edukasi dan sosialisasi terkait penggunaan metode kontrasepsi atau KB dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat Kota Bontang.

I. Urusan Perhubungan

Gambaran umum mengenai pelayanan perhubungan menunjukkan tingkat akses dan kualitas transportasi di suatu daerah. Bidang urusan ini memiliki fungsi utama untuk memperlancar konektivitas antar wilayah sehingga mempercepat arus mobilisasi orang/barang/jasa di suatu wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan layanan perhubungan dibagi atas beberapa aspek yaitu transportasi darat, laut, sungai/danau/penyeberangan dan udara. Akan tetapi tidak semua aspek tersebut diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tergantung kondisi masing-masing daerah dan disesuaikan dengan pembagian kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Angkutan umum merupakan salah satu sarana transportasi darat moda angkutan masal yang tepat dan populer untuk melayani kebutuhan masyarakat, karena kemampuannya yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar. Ketersediaan angkutan umum sangat diperlukan dalam mendukung mobilitas penduduk dan barang antar wilayah. Angkutan umum yang melayani trayek dalam kota di Kota Bontang pada tahun 2022 tercatat sebanyak 152 kendaraan sama seperti tahun 2021.

Tabel 2. 57 Jumlah Kendaraan Menurut Rute Angkutan Pelayanan Umum di Kota Bontang Tahun 2019 - 2023

Trayek	Jumlah Kendaraan			Cara Pemberangkatan
	2020	2021	2022	
Terminal Induk - Kampung Baru - Berbas (PP)	40	66	66	Tidak Berjadwal
Terminal Induk - Berbas - Kampung Baru (PP)	44	69	69	Tidak Berjadwal
Terminal Induk - Komplek PKT - Loktuan (PP)	4	14	14	Tidak Berjadwal
Terminal – Guntung (PP)	0	0	0	Tidak Berjadwal
Jumlah	88	149	149	

Sumber: Statistik Transportasi Kota Bontang, 2022

Salah satu sarana penting dari sub sektor angkutan darat adalah kendaraan bermotor. Perkembangan yang terjadi pada jumlah kendaraan bermotor secara langsung memberikan gambaran mengenai kondisi sub

sektor angkutan darat. Jumlah kendaraan bermotor yang cenderung meningkat, merupakan indikator semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang memadai sejalan dengan mobilitas penduduk yang semakin tinggi. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Bontang tahun 2022 menurun dari tahun sebelumnya dimana jumlah kendaraan terdaftar pada tahun 2021 sebanyak 185.190 unit dan pada tahun 2022 menjadi 151.322 unit. Begitupun juga dengan kendaraan bermotor baru mengalami penurunan sebanyak 1.180 unit dari 5.244 unit ditahun 2021 berkurang menjadi 4.044 unit ditahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas penumpang atau barang di Kota Bontang juga ikut menurun. Tabel 2.59 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kota Bontang Tahun 2020-2021

Tabel 2. 58 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kota Bontang Tahun 2020-2022

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan			
	2020	2021	2022	202
Kendaraan Bermotor Terdaftar	139.703	185.190	151.322	159.779
a. Sepeda motor	113.128	117.525	122.287	129.397
b. Sedan	1.500	1.503	1.522	1.532
c. Jeep	1.927	1.996	2.106	2.183
d. Mini bus	15.952	16.692	17.595	18.549
e. Mikro bus	367	372	387	380
f. Bus	174	173	173	184
g. Pickup	4.677	44.924	5.187	5.404
h. Truk	1.978	2.005	2.065	2.150
Kendaraan Bermotor Baru	4.598	5.224	4.044	8.058
a. Sepeda motor	3.776	4.313	3.158	6.801
b. Sedan	1	3	10	871
c. Jeep	24	1	69	-
d. Mini bus	517	637	588	10
e. Mikro bus	13	3	13	8
f. Bus	6	1	2	-
g. Pickup	220	238	175	365
h. Truk	41	28	29	3

Sumber: Kota Bontang Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Penyediaan prasarana dan perlengkapan jalan berupa rambu dan marka akan sangat mendukung kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas. Secara umum jumlah prasarana dan perlengkapan jalan di Kota Bontang semakin bertambah, akan tetapi persentase prasarana dan perlengkapan tersebut yang berfungsi laik masih di bawah 90% sehingga perlu terus ditingkatkan, terutama marka delineator yang kondisinya masih banyak yang kurang layak.

Tabel 2. 59 Jumlah Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Bontang Tahun 2020 – 2023

Jenis	Jumlah Yang Tersedia				Jumlah Yang Berfungsi			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Rambu lalu lintas	899	1.025	1.025		899	1.025	1.025	
Traffic Light	15	15	15		15	15	15	
Warning Light	10	11	11		9	10	10	
Pelican Crossing	2	2	2		2	2	2	

Jenis	Jumlah Yang Tersedia				Jumlah Yang Berfungsi			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
VMS (Running Text)	2	0	0		0	0	0	
RPPJ	30	30	30		30	30	30	
Cermin tikungan	6	12	12		6	12	12	
Pagar pengaman jalan	3	4	5		3	4	5	
Delineator	315	315	315		80	50	50	
Paku marka	900	900	1.158		900	900	1.158	
Jumlah	2.182	2.314	2.573		1.944	2.048	2.307	
Persentase	-	-	-		89,10	88,50	89,70	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bontang, 2023

Salah satu pelayanan urusan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. Pelaksanaan pelayanan uji kendaraan bermotor di Kota Bontang pada tahun 2022 hanya mencapai 43,26% dari jumlah kendaraan wajib uji.

Tabel 2. 60 Jumlah Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor di Kota Bontang Tahun 2022

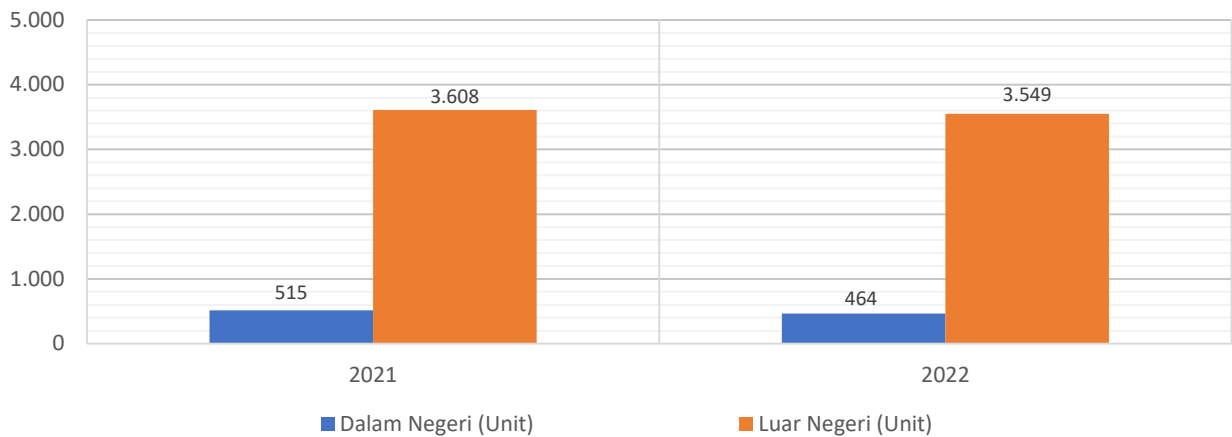
Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji	Jumlah Kendaraan Taat Uji	Persentase Taat Uji
Pick-up	3.110	1.175	37,78
Truck	665	361	54,28
Bus	285	189	66,31
Angkutan Kota	79	66	83,54
Jumlah	4.139	1.791	43,27

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bontang, 2023

Begitu pula dengan dengan pelayanan perparkiran. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Bontang, jumlah fasilitas tempat parkir yang memiliki retribusi hanya berjumlah 9 lokasi, jumlah yang sama sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2022, fasilitas parkir retribusi ini ditambah dengan lokasi parkir tepi jalan umum sejumlah 17 titik di 14 ruas jalan dalam Kota Bontang.

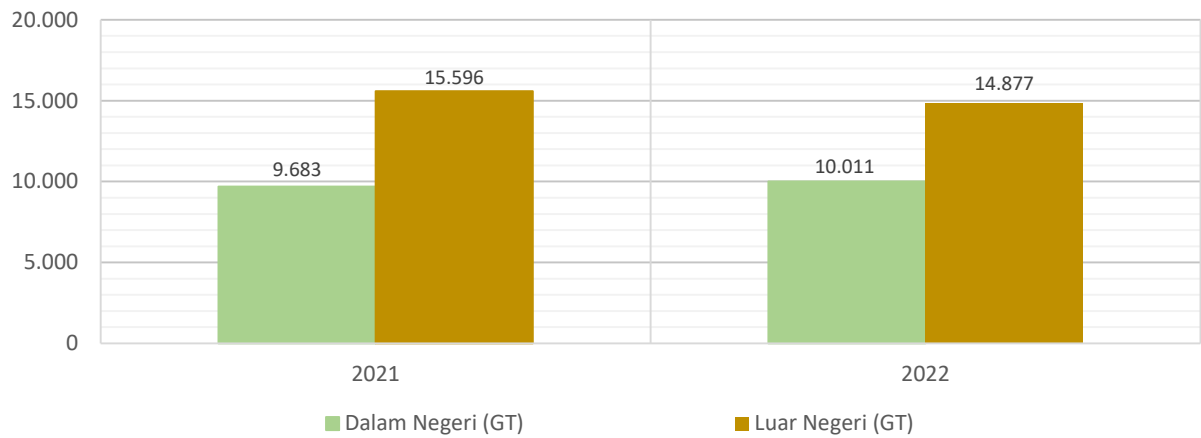
Transportasi laut erat kaitannya dengan kegiatan pelabuhan. Segala aktivitas dalam transportasi laut dicatat melalui pelabuhan. Selaras dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang melalui jalur laut juga dilakukan di pelabuhan, sehingga pelabuhan mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional maupun daerah.

Selama tahun 2022, banyaknya kunjungan kapal dalam negeri di Pelabuhan Bontang sebesar 3.549 unit. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kunjungan kapal dari luar negeri yaitu sebesar 464 unit. Namun kunjungan kapal dari luar negeri memiliki volume 1,48 lebih besar dibandingkan dengan kapal dari dalam negeri. Kapal dari luar negeri memiliki volume total sebesar 14.877 ribu GT dengan rata-rata volume kapal mencapai 32.062 GT. Disamping itu kapal dari dalam negeri memiliki volume total sebesar 10.011 ribu GT dengan rata-rata volume kapal 2.821 GT.



Sumber : Statistik Transportasi Kota Bontang, 2021, 2022

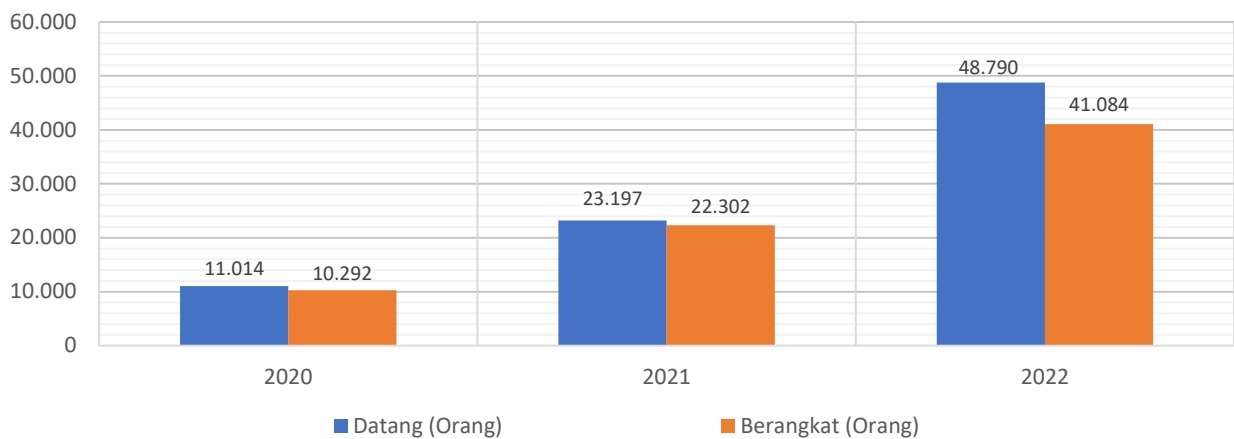
Gambar 2. 41 Jumlah Kunjungan Kapal dari Dalam Negeri dan Luar Negeri di Pelabuhan Bontang



Sumber : Statistik Transportasi Kota Bontang, 2021, 2022

Gambar 2. 42 Jumlah Volume Kapal dari Dalam Negeri dan Luar Negeri di Pelabuhan Bontang

Sepanjang tahun 2022, jumlah penumpang kapal laut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah penumpang yang diangkut kapal laut melalui pelabuhan di Bontang sebanyak 48.790 orang yang datang dan 41.084 orang yang berangkat meningkat jauh dibandingkan pada tahun 2021 yaitu 23.197 orang yang datang dan 22.302 orang yang berangkat. Peningkatan ini menandakan bahwa angkutan laut semakin digemari masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perjalanan.



Sumber : Statistik Transportasi Kota Bontang, 2021, 2022

Gambar 2. 43 Jumlah Penumpang Yang Diangkut Kapal Laut Melalui Pelabuhan Bontang

Transportasi udara mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai unsur penunjang dan unsur pendorong. Peran sebagai unsur penunjang yaitu kemampuan menyediakan jasa transportasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sektor lain dan sekaligus berperan dalam menggerakkan dinamika pembangunan. Sedangkan peran sebagai unsur pendorong yaitu kemampuan menjadi jasa transportasi yang efektif untuk membuka daerah terisolasi dan juga melayani daerah-daerah dan pulau-pulau terpencil.

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Sedangkan informatika adalah menggunakan kekuatan teknologi digital untuk mengubah suatu data dan informasi menjadi sebuah pengetahuan yang dapat digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pelayanan telekomunikasi dan informatika mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan daerah dan mendukung kegiatan perekonomian suatu wilayah.

Kinerja capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam bidang Komunikasi dan Informatika untuk mendukung 2 (dua) target yakni: Target 9.c, dan Target 17.6. Target 9.c: Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020 mempunyai 2 indikator, yaitu (1) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam mengalami penurunan dari 95,76 persen pada tahun 2021 menjadi 93,70 persen di tahun 2022, dan (2) Proporsi individu yang menggunakan internet mengalami peningkatan cukup signifikan dari 85,77 persen pada tahun 2021 menjadi 88,28 persen di tahun 2022. Adapun Target 17.6: Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat PBB dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global dengan indikator Proporsi penduduk yang terlayani mobile broad hanya terdapat data di tahun 2020 yakni sebesar 91,80 persen.

Tabel 2. 61 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021

Indikator TPB	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target 9.c: Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020							
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Persen	75,95	75,47	92,91	92,91	95,76	93,70
Proporsi individu yang menggunakan internet	Persen	57,40	62,82	72,79	72,1	85,77	88,28
Target 17.6: Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat PBB dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global							
Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband		-	-	-	91,80	-	-

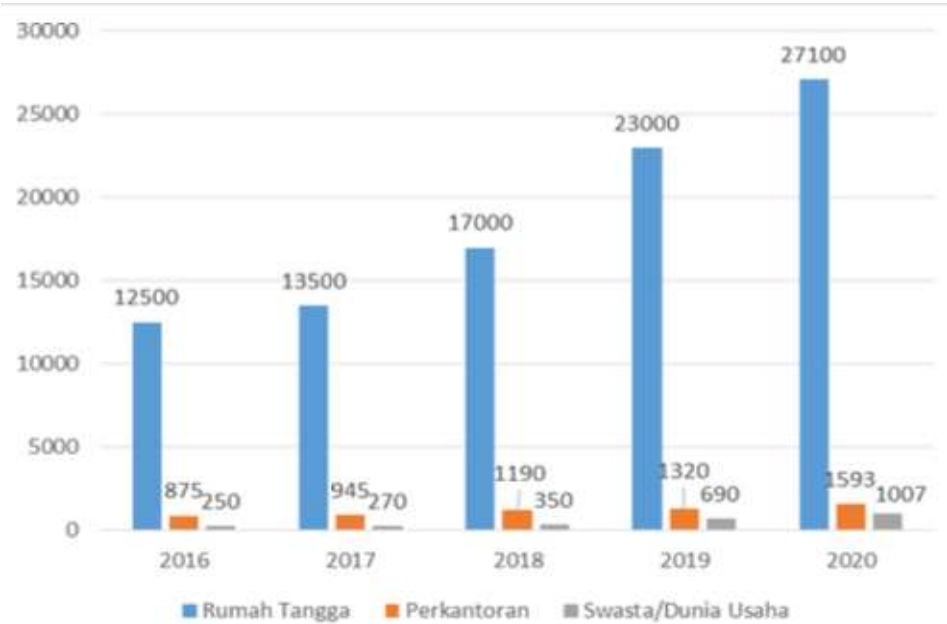
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2022

Tabel 2. 62 Jumlah BTS menurut Kecamatan di Kota Bontang (unit) Tahun 2016 - 2020

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bontang Utara	46	46	48	52	53
Bontang Selatan	27	28	42	57	58
Bontang Barat	19	19	19	22	22
Jumlah	92	93	109	131	133

Sumber: Dinas PUPR Kota Bontang, 2021

Telepon kabel juga mengalami perkembangan di Kota Bontang. Jumlah jaringan telepon kabel yang tersedia di Kota Bontang sudah berjumlah 19 jaringan pada tahun 2020. Jumlah ini lebih sudah meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun 2016 yang baru berjumlah 5 jaringan. Jumlah jaringan telepon kabel juga terus meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 jumlah jaringan telepon kabel meningkat sebanyak 16.075 jaringan. Jaringan telepon kabel di Kota Bontang terpasang untuk sambungan rumah tangga, perkantoran, dan swasta/dunia usaha. Rumah tangga mendominasi pemasangan telepon kabel di Kota Bontang sekitar 91 persen dari total pemasangan.



Sumber: Telkom Kota Bontang, 2021

Gambar 2. 44 jumlah jaringan telepon kabel

Tabel 2. 63 Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi di Kota Bontang Tahun 2022 – 2023

Karakteristik	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel atau Komputer (PC/Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet)		Menggunakan Internet (termasuk Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Whatsapp, dll)	
	2022	2023	2022	2023
Tahun	2022	2023	2022	2023
Jenis Kelamin KRT				
Laki-laki	93,98	95,17	88,53	90,19
Perempuan	91,11	94,57	85,92	85,74
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	90,25	92,82	82,66	84,55
40 Persen Tengah	95,42	96,82	89,83	92,35
20 Persen Teratas	97,06	96,23	96,22	95,31
Pendidikan Tertinggi KRT				
SD ke bawah	89,26	87,06	77,28	76,91
SMP ke atas	94,97	99,46	91,42	96,87
Kota Bontang	93,70	95,13	88,28	89,90

Sumber: : Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2023

Berdasarkan tabel dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tersebut di atas, terlihat peningkatan persentase rumah tangga yang menggunakan teknologi informasi. Penggunaan telepon seluler atau komputer telah meningkat dari 93,70% di tahun 2022 menjadi 95,13% di tahun 2023 sementara untuk penggunaan internet telah meningkat dari 88,28% di tahun 2022 menjadi 89,90% di tahun 2023. Dari tabel yang sama terlihat pula kecenderungan Kepala Rumah Tangga laki-laki lebih banyak menggunakan telepon atau komputer dan internet daripada perempuan. Tingkat pengeluaran dan pendidikan terakhir Kepala Rumah Tangga juga turut berperan, dimana semakin tinggi tingkat pengeluaran dan pendidikan terakhir, maka semakin besar pula persentase penggunaan telepon atau komputer dan internet.

Meskipun penggunaan teknologi informasi dalam rumah tangga di Kota Bontang terus meningkat, terlihat bahwa persentase kenaikan pertahunnya masih relatif kecil. Penggunaan telepon atau komputer belum

optimal, baru mencapai 95% sementara penggunaan internet bahkan masih kurang, di bawah 90%. Bila melihat bahwa jenis kelamin, tingkat pengeluaran, dan pendidikan terakhir turut memiliki peranan dalam penggunaan telepon atau komputer dan internet, maka upaya peningkatan penggunaan teknologi informasi tidak cukup dari pembangunan infrastruktur saja, melainkan juga perlu mengedukasi masyarakat tentang cara penggunaan dan manfaat dari penggunaan telepon, komputer, dan internet sebagai alat komunikasi dan pertukaran informasi.

K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator persentase Koperasi aktif pada tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 tercatat sebesar 94,87 persen dengan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2023 mengalami tingkat penurunan menjadi 81,17 persen. Terdapat 18,83% koperasi tidak aktif di Kota Bontang. Penurunan kinerja ini disebabkan terdapat beberapa koperasi yang sudah tidak melaksanakan kegiatan transaksi, Rapat Anggota Tahunan. Koperasi tidak aktif tersebut sedang dalam proses pengajuan pembubaran ke Kementerian Koperasi dan UKM.

Tabel 2. 64 Aspek Pelayanan Umum Bidang Koperasi, Usaha Mikro Dan Menengah Tahun 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Koperasi Aktif	62,4	63,4	94,9	84	85,5	81,2
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	96,5	99,6	99,6	100	100	100

Sumber : DKUKMP tahun 2024

Sektor UMKM memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB), serta sumber ekspor nonmigas. Persentase Usaha Mikro dan Kecil terus mengalami peningkatan sehingga Pada tahun 2021, 2022 dan 2023 tercatat sebesar 100 persen. Namun Data UMKM ini perlu diverifikasi Kembali mengingat pada tahun 2021 dengan adanya bantuan langsung tunai dari Pemerintah pusat ,masyarakat banyak yang tertarik untuk memperoleh perizinan NIB dengan usaha yang tidak berlangsung lama.

L. Urusan Penanaman Modal

Kegiatan Penanaman Modal yang didorong dengan iklim yang kondusif tentu akan mendorong berbagai kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya ada dua dampak positif yang bisa dirasakan oleh daerah, ketika penanaman modal berkembang dengan massif. Pertama, penanaman modal tersebut akan diikuti oleh aktivitas ekonomi yang bisa membuka lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja baru tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong untuk terwujudnya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Kedua, penanaman modal juga memberikan peluang bagi sumber daya ekonomi potensial untuk diolah menjadi kekuatan ekonomi riil yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal

yang pada akhirnya akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan urusan penanaman modal dapat dilihat dari jumlah investor dan jumlah nilai investasi PMDN/PMA pada tabel 2.60. Jumlah investor PMDN dan PMA tahun 2023 mengalami peningkatan 560 investor jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya pengusaha lokal yang mendirikan perusahaan. Peningkatan jumlah investor tentu juga mempengaruhi adanya peningkatan jumlah nilai investasi PMDN dan PMA tahun 2023 di Kota Bontang

Adapun permasalahan urusan penanaman modal yaitu belum tersedianya peta peluang investasi yang mengakomodasi potensi investasi unggulan Kota Bontang. Peta ini berfungsi untuk mempermudah para calon investor untuk memahami sektor potensial investasi yang ada di Kota Bontang.

Tabel 2. 65 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah investor berskala nasional (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN)	10	129	256	55	2.305
Jumlah investor berskala nasional (Penanaman Modal Asing/PMA)	15	12	13	0	1
Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Juta Rp)	541.894	881.443	910.229	1.243.154	8.001.159
Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMA) (Juta US \$)	280.755.500	55.613.300	65.331.300	8.000	61,99

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023, Press Release Triwulan IV Tahun 2019-2022

M. Urusan Pemuda dan Olah Raga

Pemuda dan olahraga merupakan bagian dari urusan pembangunan yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Urusan pemuda dan olahraga memiliki indikator yang dapat mengukur keberhasilan dalam upaya pemberdayaan pemuda. Para pemuda sangat menentukan laju sebuah perubahan dalam dunia yang dinamis. Berikut merupakan indikator yang mengukur tingkat capaian urusan pemuda dan olahraga Kota Bontang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2. 66 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olah Raga Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pemuda berprestasi	28	155	11	55	65	110
Jumlah atlit berprestasi	1135	547	99	180	496	155
Jumlah Organisasi Kepemudaan	34	35	35	36	82	12
Jumlah Organisasi Olahraga	4	4	4	5	6	6

Uraian		Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kegiatan Kepemudaan		5	6	3	4	10	23
Jumlah Kegiatan Keolahragaan		12	12	10	5	21	46

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Tahun 2024

Kinerja urusan pemuda dan olahraga tergambar dari indikator jumlah pemuda berprestasi dan jumlah atlet berprestasi. Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah 45 pemuda berprestasi di tahun 2023 menjadi 110 pemuda disebabkan adanya peningkatan even-even perlombaan tingkat daerah maupun nasional, hal inilah yang menyebabkan kembali meningkatnya minat pemuda untuk mengikuti even tersebut. Hal tersebut juga menyebabkan adanya peningkatan jumlah kegiatan kepemudaan dan keolahragaan tahun 2023.

Sedangkan penurunan jumlah atlet berprestasi di tahun 2023 sebanyak 341 atlet disebabkan terbatasnya jumlah partisipan dalam event olahraga. Tahun 2023 hanya terdapat 1 multi event, sedangkan rata-rata sisanya merupakan single event yang jumlah pesertanya terbatas serta hanya tersedia jenis cabang olah raga tertentu.

Adapun jumlah organisasi kepemudaan mengalami penurunan 70 organisasi dari tahun sebelumnya menjadi hanya 12 organisasi kepemudaan di tahun 2023. Hal ini disebabkan hanya 12 organisasi yang masih aktif kepengurusannya serta SK yang sudah di perbaharui.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan permasalahan urusan Pemuda dan Olahraga yaitu menurunnya jumlah event olahraga serta jumlah organisasi olahraga aktif yang dibina oleh pemerintah.

N. Urusan Statistik

Urusan Statistik yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Kabupaten/Kota. Kinerja pelayanan urusan statistik di Kota Bontang diukur dengan Indeks Pembangunan Statistik, persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, dan persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah serta persentase keterisian data statistik Perangkat Daerah pada portal Satu Data. Pada tahun 2023, persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 100%.

Tabel 2. 67 Capaian Kinerja Urusan Statistik di Kota Bontang Tahun 2021 – 2023

Kinerja	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Statistik	N/A	N/A	1,26
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%
Persentase Organisasi Perangkat	100%	100%	100%

Kinerja	2021	2022	2023
Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Pada tahun 2023, telah dilakukan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) di Kota Bontang yang menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik Kota Bontang bernilai 1,26 dengan predikat Kurang. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Kota Bontang belum mempedomani domain prinsip Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, dan Statistik Nasional.

Untuk indikator persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan indikator persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah adalah sebesar 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh OPD di Kota Bontang telah menggunakan data statistik untuk perencanaan pembangunan daerah, baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan evaluasi.

Untuk memperoleh kemajuan akses penggunaan media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui data akses TIK berbasis Rumah Tangga, dilakukan survei terhadap 300 responden rumah tangga yang dipilih secara acak dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 2. 68 Akses Rumah Tangga terhadap Perangkat TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di Kota Bontang

No	Indikator Akses	Capaian
1.	Akses terhadap komputer	63,33%
2.	Akses terhadap internet	99,33%
3.	Akses terhadap Handphone	100%
4.	Akses terhadap telepon kabel	5,33%
5.	Akses terhadap televisi	81,33%
6.	Akses terhadap radio	68,33%

Sumber: Monograf Penggunaan Media TIK, 2023

Berdasarkan tabel di atas, meskipun akses terhadap handphone telah mencapai 100%, masih terdapat 0,67% Rumah Tangga belum memiliki akses terhadap internet di Kota Bontang. Terhadap Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap internet tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang memperoleh informasi bahwa rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap internet disebabkan oleh biaya layanan yang tinggi, biaya perangkat yang tinggi, dan tidak sesuai dengan kebutuhan.

O. Urusan Persandian

Urusan Persandian yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Kinerja program penyelenggaraan urusan persandian Kota Bontang untuk pengamanan informasi diukur

dengan capaian tingkat keamanan informasi. Tabel berikut menunjukkan capaian kinerja urusan persandian di Kota Bontang pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2. 69 Capaian Kinerja Urusan Persandian di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023

Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat keamanan informasi Pemerintah	-	-	37	36,90	62,02

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Pada tahun 2023, tingkat keamanan informasi Kota Bontang adalah sebesar 62,02. Nilai ini diakibatkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk keamanan informasi dan belum tersedianya ruangan untuk SOC (Security Operation Center) yang sesuai dengan standar dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi.

Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Kota Bontang juga dilakukan melalui pengamanan seluruh website/aplikasi Pemerintah Kota Bontang. Buku Data Pembangunan Kota Bontang Tahun 2023 menjelaskan bahwa 100% website/aplikasi Pemerintah Kota Bontang telah diamankan dengan SSL (Secure Socket Layer).

Tabel 2. 70 Jumlah Pengamanan Website/Aplikasi Kota Bontang

No	Urusan	Jumlah
1.	Jumlah website/aplikasi dengan SSL	44
2.	Jumlah website/aplikasi	44

Sumber: Buku Data Pembangunan Kota Bontang, 2023

P. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan diarahkan untuk memelihara budaya lokal di Kota Bontang melalui berbagai penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Bontang. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Bontang pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022. Pada tahun 2022 pelaksanaan festival seni dan budaya berkolaborasi dengan aktivitas masyarakat yang dilakukan di dalam dan luar kota Bontang, seperti Bontang City Carnaval (BCC), Erau, Pesta Laut, Tari Jepen, Festival Benda Pusaka, Festival Budaya Makassar, Festival Klaten Wayang, Pecut Samandiman, Barang Sewu Kediri, Banyuwangi Etno Carnival, Muhibah Budaya Banyuwangi, International Bitung Choir Fest, Hari Jadi Bone, Apeksi Makassar, Pasang Giri Sukabumi, Tifaf Tenggarong Fest, Pekan Kebudayaan Daerah Balikpapan, Pemilihan Duta Tari Kaltim di Balikpapan dan Pemilihan Duta Budaya di Paser.

Tabel 2. 71 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	17	1	0	8	19

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang Tahun 2022

Q. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan berperan berperan penting dalam meningkatkan kualitas manusia dan keberadaan bangsa untuk mendorong daya saing dan kemajuan literasi Indonesia. Selain untuk mencapai pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan juga berfungsi sebagai wahana publik sebagai pusat informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi. Penyelenggaraan kinerja urusan perpustakaan diukur melalui 3(tiga) indikator, yaitu: 1) jumlah perpustakaan; 2) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan 3) jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.

Berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang untuk indiator jumlah perpustakaan (daerah, sekolah, swasta) pada tahun 2022 berjumlah 239 perpustakaan dan pada tahun 2023 yaitu sebesar 239 perpustakaan.

Pada tahun 2023 Jumlah pemustaka perpustakaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 79.462 pemustaka. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah minat baca pengunjung setelah pembatasan pengunjung saat terjadinya penyebaran virus Covid-19.

Untuk mendukung minat baca masyarakat maka perpustakaan daerah harus menyediakan koleksi buku dengan jumlah yang memadai. Pada tahun 2022 jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 94.495 buku. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk melayani masyarakat Kota Bontang untuk meningkatkan minat baca.

Tabel 2. 72 Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Perpustakaan Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	2021	2022	2023
1	Jumlah perpustakaan (Daerah, Sekolah, swasta)	unit	240	239	239
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	6.240	51.037	79.462
3	Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buah	37.941	93.656	94.495

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang 2024

R. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan pelayanan urusan kearsipan di Kota Bontang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang. Kinerja pembangunan Urusan Kearsipan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian target pembangunan dengan indikator: 1) persentase perangkat daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik; 2) peningkatan SDM pengelola kearsipan; 3) persentase perlindungan dan penyelamatan arsip.

Tabel 2. 73 Aspek Pelayanan Umum dalam Urusan Kearsipan Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	2021	2022	2023
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan	Persen	55	73,33	76,67

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	2021	2022	2023
	pengelolaan arsip secara baik				
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kegiatan	1	31	60
3	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	persen	9	13	16,67

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang 2024

Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari 73,33 persen menjadi 76,67 persen. Sebanyak 31 Perangkat Daerah di Kota Bontang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik. Hal ini disebabkan karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah berupaya untuk meningkatkan kualitas arsiparis di masing-masing Perangkat Daerah dengan melakukan kegiatan Bimtek dan pendampingan pengelola arsip serta mengadakan lomba terkait pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2023 di kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kota Bontang mencapai 60 kegiatan. Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan menjadi 16,67 persen, meningkat 23 persen dari tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya akuisisi arsip dimana DPK mengakuisisi berkas arsip statis dari Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah menyerahkan arsip agar arsip diselamatkan tidak mengalami kerusakan serta menambah khazanah arsip kota Bontang.

2.1.3.3 Fokus Urusan Pilihan

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan tangkap di Kota Bontang sempat terpengaruh pada tahun 2020 karena dampak pandemi COVID-19. Namun sejak masa pemulihan dari tahun 2021 hingga tahun 2023 produksi perikanan tangkap dapat meningkat dan dapat konsisten sekitar 21,9 ton per tahun.

Di sisi lain produksi perikanan budidaya dalam 5 tahun terakhir masih dalam tren menurun. Permasalahan perikanan budidaya selain pada terbatasnya potensi budidaya di darat, permasalahan pada tahun 2022 karena ada penurunan jumlah pelaku pembudidaya masih berdampak pada produksi tahun 2023. Pada tahun 2023 DKP3 intens melakukan pendampingan kepada pelaku pembudidaya yang masih baru. Dalam proses pendampingan tersebut juga ditemukan adanya kebutuhan sarana dan sarana budidaya yang tinggi bagi pelaku pembudidaya tersebut.

Tabel 2. 74 Produksi Perikanan Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Perikanan Tangkap	ton	21.137,50	20.336,00	21.711,30	21.916,00	21.915,80
Produksi perikanan Budidaya	ton	5.629,90	4.189,30	4.485,04	3.471,45	3.562,23
Produktivitas Pengolahan usaha Perikanan	ton	NA	NA	NA	483,3	507,4

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang Tahun 2023

B. Urusan Pariwisata

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata selama periode 2018 - 2023 dapat dilihat melalui indikator jumlah wisatawan dan jumlah objek wisata yang dikelola pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 75 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					2023
	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Kunjungan Wisata	409.319	472.205	215.029	169.853	271.617	287.234
Jumlah Destinasi Pariwisata	33	33	56	61	57	61
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB dengan Migas	0,46	0,51	0,52	0,52	0,54	0,68
Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	5,4	6,03	4,55	4,8	6,9	9

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Tahun 2023*dihitung berdasarkan kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dalam PDRB

Secara umum jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bontang mengalami fluktuasi, namun cenderung mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2023 meningkat 15.617 kunjungan menjadi 287.234 kunjungan. Hal ini merupakan salah satu dampak positif dari bertambahnya 4 jumlah destinasi pariwisata atau Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Kota Bontang pada tahun 2023 yang juga berdampak pada meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan migas dan meningkatnya PAD sektor pariwisata.

Realisasi ini tentu selaras dengan perumusan prioritas daerah 3 yaitu Peningkatan Daya Saing Investasi, Pariwisata dan UMKM. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengembangkan pariwisata di Kota Bontang yaitu penataan objek-objek pariwisata, penyelenggaraan 77 festival seni dan budaya, pengembangan kawasan seni dan budaya, peningkatan promosi pariwisata, serta peningkatan aksesibilitas pariwisata. Hal ini juga berpengaruh terhadap naiknya pendapatan asli daerah di tahun 2023 untuk sektor pariwisata.

Terdapat beberapa permasalahan pada sektor pariwisata di Kota Bontang yaitu:

- Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata dan penambahan destinasi wisata baru;
- Terkendalanya pengelolaan wisata bahari karena pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau merupakan kewenangan Provinsi Kaltim;
- Event pariwisata yang dilaksanakan belum mampu meningkatkan daya tarik wisata secara signifikan dan pendapatan sektor pariwisata secara berkelanjutan;
- Pengembangan sektor ekonomi kreatif belum maksimal dan distribusi pelaku ekraf masih berfokus pada sub sektor kuliner.

Salah satu pilar perekonomian masa depan yang juga sedang di tingkatkan di Kota Bontang yaitu ekonomi kreatif atau ekraf. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Tahun 2023 dari 17 subsektor ekonomi kreatif, subsektor kuliner adalah bidang yang paling banyak diminati yaitu sebesar 44 dari 144 ekraft, disusul dengan bidang musik sebesar 24 ekraft dan fashion

sebesar 9 ekraf. Sedangkan, terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) hanya terdapat 43 ekraft yang sudah terlindungi secara hukum.

Adapun data terkait omzet ekonomi kreatif Kota Bontang dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. 76 Ekonomi Kreatif Kota Bontang Tahun 2023

Rata-rata Omzet	2023	
	%	Jumlah
Dibawah 5 Jt Rupiah/bulan	62,5	90
5 – 10 Jt Rupiah	20,14	29
11 – 20 Jt Rupiah	9,03	13
21 – 30 Jt Rupiah	4,17	6
Diatas 30 Jt Rupiah	4,17	6
Jumlah Ekonomi Kreatif		144

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan usaha ekonomi kreatif di Kota Bontang belum terlalu menggembirakan, baik dari sisi omzet maupun jumlah pelaku ekraf yang ada. Hal ini disebabkan karena distribusi sektor ekraf masih berfokus pada sub sektor kuliner, sedangkan sektor lainnya belum ada atau belum berkembang dan kemampuan atau keterampilan masyarakat untuk mengembangkan sektor ekraf masih sangat terbatas.

C. Urusan Pertanian

Indikator pengukuran pada aspek pelayanan umum bidang pertanian mengalami penyesuaian indikator pada tahun 2022 selaras dengan indikator Renstra DKP3 sebagai pengampu urusan pertanian.

Produksi dan produktifitas usaha pertanian di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 189 ton. Namun capaian tersebut masih jauh di bawah target sebesar 289 ton. Dengan terbatasnya lahan pertanian di Kota Bontang, maka perlu rencana pengembangan melalui intensifikasi dan diversifikasi pertanian agar dapat meningkatkan produksi yang ada. Selaras dengan upaya peningkatan produksi maka kelompok tani perlu pendampingan rutin dalam usaha pertanian dan pemanfaatan sarana pertanian.

Di sisi lain, produksi dan produktifitas usaha peternakan mengalami kenaikan dari sejumlah 2.112 ekor pada tahun 2022 menjadi 2.301 ekor pada tahun 2023. Perkembangan produksi dan produktifitas usaha peternakan ini perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan usaha produk turunan peternakan untuk dapat meningkatkan tingkat ekonomi peternak di Bontang.

Tabel 2. 77 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Produksi dan produktifitas usaha pertanian	ton	NA	NA	NA	186	189
Produktifitas usaha peternakan	ekor	NA	NA	NA	2.112	2.301

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per (ton)	ton	161	204	214		
Intensifikasi budidaya tanaman pangan dan hortikultura	ton	200	200	332		
Intensifikasi budidaya peternakan, Produksi peternakan	ton	1.332	1.450	1.480		

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang Tahun 2024

D. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bontang. Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta dukungan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor perdagangan seperti pasar modern , pasar tradisional dan lainnya.

Sektor perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perkembangan perdagangan luar negeri dapat dilihat dari kegiatan kegiatan ekspor dan impor. Pada Tahun 2023 nilai ekspor bersih perdagangan Kota Bontang sebesar 2,530 dengan tujuan terbesar adalah negara negara ASEAN didominasi sektor migas, melalui PT. Badak NGL dengan ekspor gasnya, selain ekspor migas, nilai ekspor non migas seperti UREA, Amoniak, metanol dan alumunium nitrat, yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Kaltim Methanol Industri, PT. Kaltim Parna Industri dan PT. Kaltim Nitrate Indonesia .

Untuk Perdagangan Dalam negeri dilakukan upaya pengendalian harga dan stok Bapokting, Penyelenggaraan Promosi dagang, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan, penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang.

Pembinaan kapasitas kelompok pedagang, pemerintah memberikan pelatihan dan manajemen usaha. Rata-rata cakupan pembinaan kelompok pedagang sebesar 670 pertahun, namun di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1585, yang menjadi permasalahan dalam urusan perdagangan di Kota Bontang ini adalah belum optimalnya pengelolaan pasar tradisional. Hal ini terlihat dari Kios -kios di lantai 1 banyak dihuni pedagang, sementara lantai 2 dan 3 masih kosong, banyaknya keluhan pedagang dilantai 2 dan 3 yang kurangnya minat pembeli di semua pasar milik pemerintah.

Tabel 2. 78 Aspek Pelayanan Umum Bidang Perdagangan Tahun 2018-2023

Tahun	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Ekspor Bersih Perdagangan	2,257	2,098	2,725	3,048	2,530
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	670	670	670	670	1585
Kontribusi Sektor Perdagangan	3,04	3,02	3,31	3,31	3,39

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang 2022

E. Urusan Perindustrian

Kontribusi sektor industri memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Kota Bontang baik dengan migas maupun tanpa migas. Sejak berdirinya Kota Bontang pada tahun 1977, Bontang disiapkan sebagai kawasan industri, yaitu PT Badak dan PT Pupuk Kaltim. Setelah kedua industri ini berdiri, industri-industri lain juga mulai tumbuh dan berkembang, utamanya adalah industri pengolahan migas dan petrokimia yang berada di Kawasan Industri KIE. Tahun 1999 didirikan *pabrik crude palm oil (CPO)* yang memberikan warna baru dalam industri Bontang di luar industri pengolahan migas.

Adapun capaian aspek layanan umum Bidang Perindustrian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 79 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian
Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pertumbuhan IKM	1,83	0	1,31	2,62	0,01
Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB dengan Migas	80,63	79,28	79,60	78,73	78,37

Sumber : Kota Bontang Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan IKM di Kota Bontang mengalami fluktuasi. Terjadi pertumbuhan sebesar 12,8 persen pada tahun 2018 kondisi ini kemudian menurun secara signifikan menjadi 1,83 persen. Penurunan ini dipicu oleh berkurangnya industri pengolahan terutama industri kayu dan batako, dimana pasokan bahan baku kayu dan tanah liat sulit untuk didapatkan dan tidak berkelanjutan, faktor lain adalah bahwa industri kecil khususnya industri pengolahan (pangan olahan) dengan nilai investasi kurang dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ada yang berhenti produksi ataupun tutup permanen termasuk di dalamnya adalah industri pengolahan es batu untuk kebutuhan nelayan.

Tahun 2020 di masa Pandemi Covid 19 tidak terdapat penambah jumlah unit usaha industri, sementara di tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebanyak 1,31 % dan 2,62 % di tahun 2022. Hal ini disebabkan karena tumbuhnya industri kreatif berbasis pangan olahan dan kerajinan termasuk didalamnya adalah industri pakaian jadi sebagai dampak dari program pemakaian baju batik daerah, disamping itu hilirisasi dari industri agro khususnya dengan keberadaan industri minyak sawit juga memacu tumbuhnya industri baru. Pada tahun 2023 pertumbuhan IKM menurun menjadi 1,01 %.

Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih menjadi lapangan usaha utama di dalam aktivitas perekonomian Kota Bontang, dimana peranan lapangan usaha ini membentuk PDRB Kota Bontang sebesar 79,41 persen di tahun 2022. Pada tahun 2021, Lapangan Usaha Industri Pengolahan memiliki laju pertumbuhan positif sebesar 1,62 dimana Kota Bontang mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif pula yaitu sekitar 1,60 persen. Pada tahun 2021 terdapat 546 industri logam, mesin, elektronika dan aneka industri kecil di tahun 2022 dengan rincian 31 industri formal dan 515 industri non formal. Total investasi industri ini di tahun 2021 sebesar 12.433,57 juta rupiah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 942 orang. Sedangkan untuk industri kimia, agro, dan hasil hutan, terdapat 900 unit usaha di tahun 2021 dengan total

investasi sebesar 40.088.296 juta rupiah dan tenaga kerja sejumlah 1.331 orang.

Dari sisi serapan tenaga kerja, sektor industri menempati tempat ke-2 setelah perdagangan dengan serapan tenaga kerja 11,54% dari total tenaga kerja. Dengan demikian sektor industri masih menjadi minat bagi pencari kerja di Kota Bontang.

2.1.3.4 Fokus Fungsi Penunjang

A. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021, yang telah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai bagian integral pemerintah Kota Bontang berkewajiban untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sasaran RPJMD yang terkait langsung dengan indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Kinerja urusan perencanaan diukur dengan ketepatan dalam penyusunan dokumen perencanaan, yaitu ketepatan dalam penjabaran program RPJMD dalam RKPD dan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan Pembangunan.

Pada tahun 2022, ketepatan dalam penyusunan dokumen perencanaan diukur dengan indikator Persentase tingkat ketercapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Bontang. Namun demikian, Sesuai dengan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayaguan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1175/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022, perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 dan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang oleh Inspektorat Daerah Kota Bontang Nomor 700.1.2.7/1850/ITDA tanggal 21 Juni 2023, menyebutkan bahwa salah satu rekomendasinya "meninjau ulang indikator kinerja sasaran pada renstra Presentasi tingkat ketercapaian indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kota Bontang agar bisa diukur tahunan".

Dengan demikian indikator persentase tingkat ketercapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Bontang diganti dengan persentase penjabaran program RPJMD dalam RKPD, adapun formulasi dapat dijelaskan sebagai berikut Jumlah Program RKPD tahun rencana dibagi jumlah program RPJMD pada tahun yang berkenaan dikali 100 persen.

Data capaian selama tahun 2019 – 2022 tersaji dalam Tabel 2.72 Kinerja Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2019-2023

Pada urusan penelitian, salah satu indikatornya adalah persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan yang menghitung jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dibandingkan

dengan jumlah hasil kelitbangan dalam 5 tahun terakhir. Indikator ini disusun untuk memastikan kegiatan kelitbangan yang dilakukan memang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Adapun pencapaian Pada tahun 2022, 76,47persen hasil kelitbangan dari tahun 2018 dapat dimanfaatkan dalam pembangunan.

Dalam rangka pelayanan teknis dan administrative untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta peningkatan nilai Reformasi Birokrasi, maka telah ditetapkan Sasaran ketiga yaitu Meningkatnya pelayanan Teknis dan administratif untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Birokrasi Bapelitbang, dengan indikator nya Indek kualitas layanan kesekretariatan. Indikator ini sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan dengan formulasi perhitungan Survey kepuasan pengguna layanan

Selama tahun 2019-2023, kinerja Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 80 Kinerja Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	73,37	105,88	100	106,63	100,95
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	80,00	73,18	80,00	81,82	82,35
Indek kualitas layanan kesekretariatan	N/A	N/A	N/A	3,43 dari 4	3,54 dari 4

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan, 2023

B. Urusan Keuangan

Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, yang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis terlaksananya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatnya kepatuhan pajak.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat dihasilkan. Pengelolaan Barang Milik Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Lebih lanjut, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Bontang dan mempertahankan

opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hingga tahun 2024, Pemerintah Kota Bontang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama sepuluh kali berturut-turut atas pemeriksaan laporan keuangan.

Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ Tanggal 13 Desember 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah. Diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemkot Bontang menyambut baik hal tersebut dengan menyusun peraturan peta jalan ETPD yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bontang Nomor 188.45/309/Bapenda/2021 Tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bontang. Penerapan ETPD diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sisi belanja daerah.

Terkait pendapatan daerah (PAD) Kota Bontang tahun 2023 terdiri dari empat jenis pendapatan, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang berhasil mencapai realisasi sebesar Rp263.059.915.620,61, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp208.097.914.195,00. Akibatnya, terjadi surplus Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp54.962.001.425,61, dengan persentase surplus mencapai 125,41%. Berikut adalah rincian persentase Pendapatan Asli Daerah:



Sumber : Bapenda, 2024

Gambar 2. 45 Distribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Indikator kinerja pemerintah Kota Bontang terhadap laporan keuangan sampai dengan tahun 2023 mendapatkan opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bontang dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Indikator Tertib administrasi baik dalam lingkup pengguna barang maupun pengelola barang menunjukkan bahwa menunjukkan BPKAD selaku Perangkat Daerah konsisten dalam membina seluruh Perangkat Daerah di Kota Bontang terkait pengguna dan pengelola barang daerah.

Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan menjadi Rp118.499.618.923,31 atau menurun sebanyak 49 persen di mana realisasi di tahun 2022 adalah sebesar Rp Rp 231.351.605.844,18. Hal ini disebabkan karena adanya mata obyek pajak yang mengalami penurunan nilai. Adapun penyebab penurunan nilai dari beberapa obyek pajak disebabkan oleh Pajak penerangan jalan untuk industry ditiadakan dari Mahkamah Konstitusi, pada Retribusi Perijinan Tertentu (IMB) terdapat perubahan regulasi menjadi PBG sehingga menyebabkan PAD menurun karena aturan semakin rumit terkait gambar saat pengajuan IMB sehingga membuat para pemohon IMB berkurang secara drastis, Pelayanan Pelabuhan dimana sebelumnya dinaungi oleh Pelindo dialihkan ke Perusda sehingga menyebabkan penerimaan pajak menjadi turun drastis serta masih banyaknya Piutang Pajak yang belum tertagihkan.

Tabel 2. 81 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keuangan Tahun 2021-2023

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP
Tertib administrasi baik dalam lingkup pengguna barang maupun pengelola barang	30 OPD	30 OPD	30 OPD
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23,08	-5,93	-49

Sumber : Badan Pendapatan Kota Bontang Tahun 2020
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang Tahun 2020

C. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya profesionalitas ASN Kota Bontang dengan capaian indikator Indeks Sistem Merit. Capaian Indeks Sistem Merit tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 82 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Indeks Sistem Merit	0,59	0,65	0,67

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023

Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 10/KEP.KASN/C/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 Tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang bahwa Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang ditetapkan dengan nilai 265 dan Indeks 0,65 pada Kategori III, dengan predikat Baik. Hal ini berarti bahwa dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dapat disetujui untuk dikecualikan dari ketentuan

pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif, apabila Pemerintah Kota Bontang telah memiliki dan/atau telah melakukan penyempurnaan terhadap talent pool, rencana suksesi, dan telah memiliki kebijakan pola karier instansi yang mengatur tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui talent pool dan rencana suksesi serta berkoordinasi dengan KASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Bontang Tahun 2022 yang dinilai dari komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai hasil evaluasi tahun 2022 mendapatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi 65,38 yang hanya meningkat sebesar 0,14 poin dari tahun sebelumnya. Salah satu komponen penilaian hasil antara Reformasi Birokrasi yaitu nilai ASN Profesional dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 71,74 menjadi 36,07 dalam skala 1-100.

Berdasarkan hasil rekomendasi Kementerian PANRB Nomor: B/1104/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022, BKPSDM Kota Bontang untuk melaksanakan assessment kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi dan memaksimalkan aplikasi SIMPEG dalam manajemen ASN. Selanjutnya menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen ASN.

Dalam pengukuran Indeks Profesional ASN (IPASN) diantaranya melalui indikator peningkatan kualifikasi Pendidikan ASN baik melalui tugas belajar maupun tugas belajar mandiri. Pemerintah Kota Bontang mendorong peningkatan kualifikasi Pendidikan ASN yang dilakukan secara mandiri sesuai dengan amana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mewajibkan ASN untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Hasil dari pengembangan kompetensi ASN tersebut harus disampaikan kepada BKPSDM Kota Bontang agar nilai pengembangan kompetensi pada IPASN dapat memenuhi 20 JP pada masing-masing ASN.

D. Urusan Pengawasan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjalankan unsur pengawasan urusan pemerintahan adalah Inspektorat dengan tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan. Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan meliputi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui Pengawasan umum dan teknis yang dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara komprehensif dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Bontang Tahun 2023 pada urusan pengawasan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 83 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Tahun 2019- 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Bontang	3,82	3,75	3,76	3,6	3,94
3	Tingkat Maturitas SPIP Kota Bontang	3,07	3	3	3	3
4	Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	3	3	3	3	3

Sumber: Inspektorat Daerah, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Tingkat kematangan SPIP Kota Bontang dari tahun 2019 sampai 2023 terus meningkat, diawali dari level 3 dengan catatan sampai dengan level 3 penuh, tingkat kematangan SPIP Kota Bontang banyak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam uraian Indikator Karakteristik Pengendalian dan pengoptimalan penerapan SPIP.

Penguatan APIP juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan, dimana ada 3 (tiga) area penguatan pengawasan APIP Inspektorat Kota Bontang yaitu: Aspek kelembagaan untuk memperkuat independensi para APIP; Aspek Sumber Daya (Sumber daya anggaran untuk menjamin kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan Sumber daya manusia baik jumlah maupun kompetensi teknis) dan Aspek Tata Kelola (Pelaporan pengawasan berindikasi KKN, Standar Pengawasan, dan Penjaminan Mutu).

Adapun Kota Bontang dalam 5 (lima) tahun terakhir ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah. Tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut mengindikasikan efektifnya pelaksanaan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Bontang.

Indikator lainnya juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu hasil survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tahun 2022 berada pada nilai 3,6 dan meningkat di tahun 2023 sebesar 3,94 dan termasuk dalam kategori Bersih dari Korupsi, hal ini mengindikasikan bahwa layanan publik Pemerintah Kota Bontang dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.

Pencapaian kinerja unsur penunjang pengawasan pada tahun 2023 secara keseluruhan tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan, dimana semuanya masuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi.

E. Urusan Pendukung

Unsur Pendukung diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Kinerja dalam penyelenggaraan unsur pendukung Pemerintahan Daerah terlihat dari capaian SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi dan Survey Kepuasan Masyarakat serta penilaian LPPD sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 84 Capaian SAKIP, Indek Reformasi Birokrasi dan SKM Kota Bontang Tahun 2020-2023

Kriteria	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
SAKIP	B (67,84)	B (68,51)	B (68,65)	B (68,04)
IRB	B (66,20)	B (65,24)	B(68,68)	
SKM	B (82,72)	B (84,39)	B (86,14)	B(87,13)
LPPD	Tinggi (3,8607)	Sedang (3,08)	Sedang (3,379)	

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Bontang, 2024

Kedudukan Sekretariat Daerah sebagai unsur pendukung sangat penting dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah dan penyusunan regulasi kebijakan daerah. Merujuk surat Deputy Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/507/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023, Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bontang menunjukkan bahwa nilai sebesar 68,04 dengan predikat B. hal tersebut menunjukkan bahwa implemtasi akuntabilitas kinerja “baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Pemerintah daerah dan Sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Menurut hasil evaluasi tersebut diatas ada penurunan nilai AKIP pada Tahun 2022 yaitu 68,65 menjadi 68,04 pada Tahun 2023. Perlu adanya evaluasi dari sisi perencanaan kinerja Pemerintah Kota Bontang di mana pohon kinerja dan cascading belum spesifik menggambarkan bagaimana pola *crosscutting* kinerja anta bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja dari organisasi. Dari sisi pengukuran kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bontang perlu disempurnakan dikarenakan ada perhitungan capaian kinerja yang tidak akurat dan indeks dalam rumusan IKU tidak sesuai dengan formulasi perhitungan indeks. Dari hasil pelaporan kinerja, belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja pada level nasional dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, hasil evaluasi SAKIP internal belum dapat memberikan rekomendasi perbaikan secara langsung terhadap akar masalah yang dialami oleh Perangkat Daerah sehingga belum terlihat peningkatan implementasi SAKIP yang signifikan serta belum ada nya kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi yang dapat mendorong secara signifikan peningkatan implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjalankan Fungsi Pendukung dalam rangka pelaksanaan tugas legislatif yaitu penetapan peraturan daerah. Berikut adalah data Keputusan DPRD Kota Bontang tahun 2018-2023.

Tabel 2. 85 Hasil Keputusan dari Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Jenis Keputusan di Kota Bontang, 2018-2023

Hasil Rapat	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peraturan Daerah	17	11	-	3	13

Keputusan DPRD	6	39	44	43	48
Peraturan DPRD	1	3	-	-	-
Pernyataan Pendapat	-	-	-	-	-
Raperda Inisiatif	6	7	7	7	6
Prolegda	17	18	24	20	14
Keputusan pimpinan DPRD	6	1	11	9	3
Keputusan badan musyawarah	11	-	12	-	-
Memorandum (MOU)	-	-	8	-	4
Badan anggaran	-	-	-	-	-
Berita acara	17	6	5	11	8
Jumlah/Total	97	135	99	93	96

Sumber, Bontang dalam angka 2024

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
A. Aksesibilitas Daerah

Kinerja aspek daya saing daerah dengan fokus infrastruktur/fasilitas wilayah salah satunya dilihat dari aksesibilitas daerah. Aksesibilitas daerah Kota Bontang merupakan ukuran ketercapaian atau keterjangkauan dengan memperhatikan beberapa komponen seperti sarana jalan, ketersediaan pelabuhan, ketersediaan pelabuhan udara (bandara), ketersediaan terminal bus, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang (RTR), luas area genangan banjir, ketersediaan bank dan cabangnya, serta ketersediaan sarana penginapan atau perhotelan.

1. Sarana Jalan

Akses darat dari dan ke Kota Bontang adalah melalui jalan Trans Kalimantan yang saat ini kondisinya relatif cukup baik. Jarak Kota Bontang dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kota Samarinda ±125 km dapat ditempuh dengan perjalanan darat ±2,5 jam. Untuk jalan kota, kemantapan jalan Kota Bontang saat ini sebesar 88,46%.

Pada tahun 2023, jumlah total kendaraan di Kota Bontang mencapai 167.837 unit sebagaimana tampak pada tabel 2.60. Berdasarkan data tersebut, diperoleh rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah sebesar 0,821. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 1 km panjang jalan di Bontang, digunakan oleh 2 kendaraan.

Tabel 2. 86 Panjang Jalan di Kota Bontang tahun 2023

Kecamatan	Jalan (km)			Jumlah (km)
	Negara	Provinsi	Kota	
Bontang Selatan	-	20.960	81.674	102.634
Bontang Utara	4.452	2.209	55.349	62.010
Bontang Barat	4.621	3.500	31.645	39.766
Jumlah	9.073	26.669	168.668	204.410

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, 2024

2. Pelabuhan

Secara umum, transportasi laut erat kaitannya dengan kegiatan pelabuhan. Aktivitas perekonomian yang melalui jalur laut juga dilakukan di pelabuhan, sehingga pelabuhan mempunyai peran penting dalam perekonomian daerah. Adapun aksesibilitas transportasi laut di Kota Bontang mencakup Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Perikanan, dan Terminal Khusus / Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).

Pelabuhan Pengumpul di Kota Bontang yaitu Pelabuhan Umum Loktuan dan Pelabuhan Umum Tanjung Laut. Pelabuhan pengumpul memiliki fungsi pokok melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Pelabuhan Perikanan berupa pangkalan pendaratan ikan terletak di Tanjung Limau Kelurahan Bontang Baru. Sedangkan untuk terminal khusus, terdapat terminal khusus milik perusahaan, antara lain:

- a. Terminal Khusus/TUSK PT. Badak LNG berada di Kelurahan Satimpo yang berfungsi sebagai terminal Khusus untuk kegiatan/aktifitas pengolahan minyak bumi dan gas alam;
- b. Terminal Khusus/TUKS PT. Pupuk Kalimantan Timur berada di Kelurahan Guntung yang berfungsi sebagai terminal khusus untuk kegiatan/aktifitas industri petrokimia;
- c. Terminal Khusus/TUKS PT. Indominco Mandiri berada di Kelurahan Bontang Lestari yang berfungsi sebagai terminal khusus untuk kegiatan/aktifitas pertambangan (batu bara);
- d. Terminal khusus / TUKS PT. Graha Power Kaltim berada di Kelurahan Bontang Lestari yang berfungsi sebagai terminal khusus untuk kegiatan/aktifitas pembangkitan tenaga listrik;
- e. Terminal khusus / TUKS PT. Karya Wiraputra Bontang berada di Kelurahan Tanjung Laut Indah yang berfungsi sebagai terminal khusus untuk kegiatan/aktifitas penumpukan material/bahan bangunan;
- f. Terminal khusus / TUKS PT. Energi Unggul Persada berada di Kelurahan Bontang Lestari yang berfungsi sebagai terminal khusus untuk kegiatan/aktifitas industri (Crude Palm Oil);

3. Pelabuhan udara

Pelabuhan udara di Kota Bontang merupakan Bandar Udara Khusus milik Bandara PT. Badak LNG berada di Kelurahan Satimpo yang berfungsi untuk menunjang pengembangan kegiatan industri.

4. Terminal bus

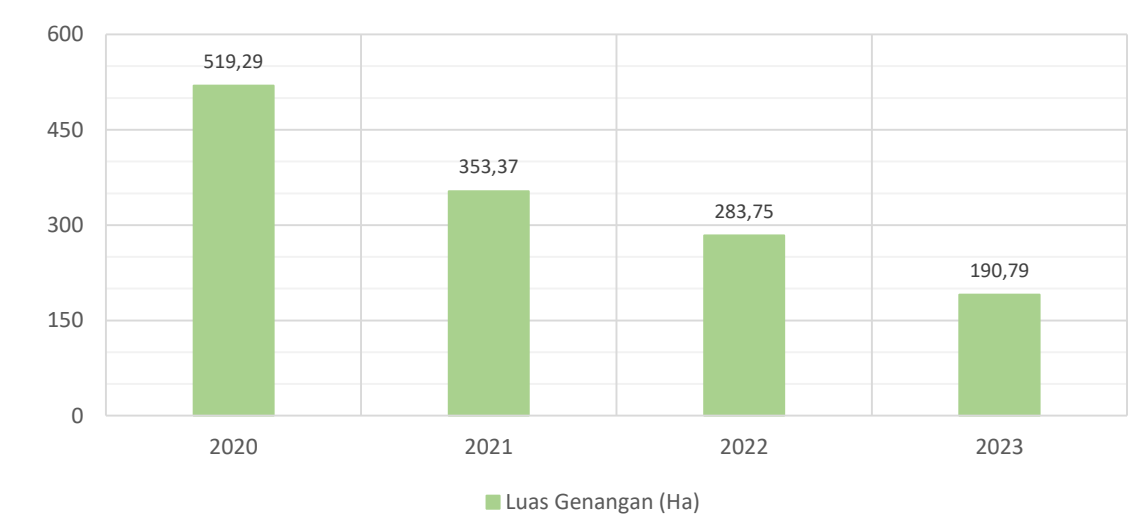
Terminal bus di Kota Bontang merupakan terminal penumpang tipe B yang terletak di Kelurahan Gunung Telihan. Terminal ini melayani arus penumpang dan barang ke Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Timur.

5. Kesesuaian tata ruang

Kesesuaian tata ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Pada tahun 2023, realisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang mencapai 15.245 ha dari total rencana peruntukan seluas 16.188 ha. Berdasarkan data tersebut, diperoleh persentase kesesuaian terhadap RTRW adalah sebesar 94,17%. Adapun luas wilayah peruntukan industri adalah sebesar 2.849 hektar.

6. Banjir

Banjir di Kota Bontang terdiri dari 3 jenis yaitu banjir lokal, banjir kiriman dan banjir rob. Luas wilayah banjir di Kota Bontang semakin tahun Banjir di Kota Bontang terdiri dari 3 jenis yaitu banjir lokal, banjir kiriman dan banjir rob. Luas wilayah banjir di Kota Bontang semakin tahun sudah semakin berkurang. Luas wilayah terdampak banjir pada tahun 2023 adalah seluas 190,79 hektar terletak di 12 kelurahan yaitu Kelurahan Api-Api, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Guntung, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Loktuan, Kelurahan Gunung Telihan, Kelurahan Kanaan, Kelurahan Satimpo, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut Indah, dan Kelurahan Bontang Lestari.



Sumber : Bapelitbang, 2024

Gambar 2. 46 Luas Wilayah Genangan Banjir

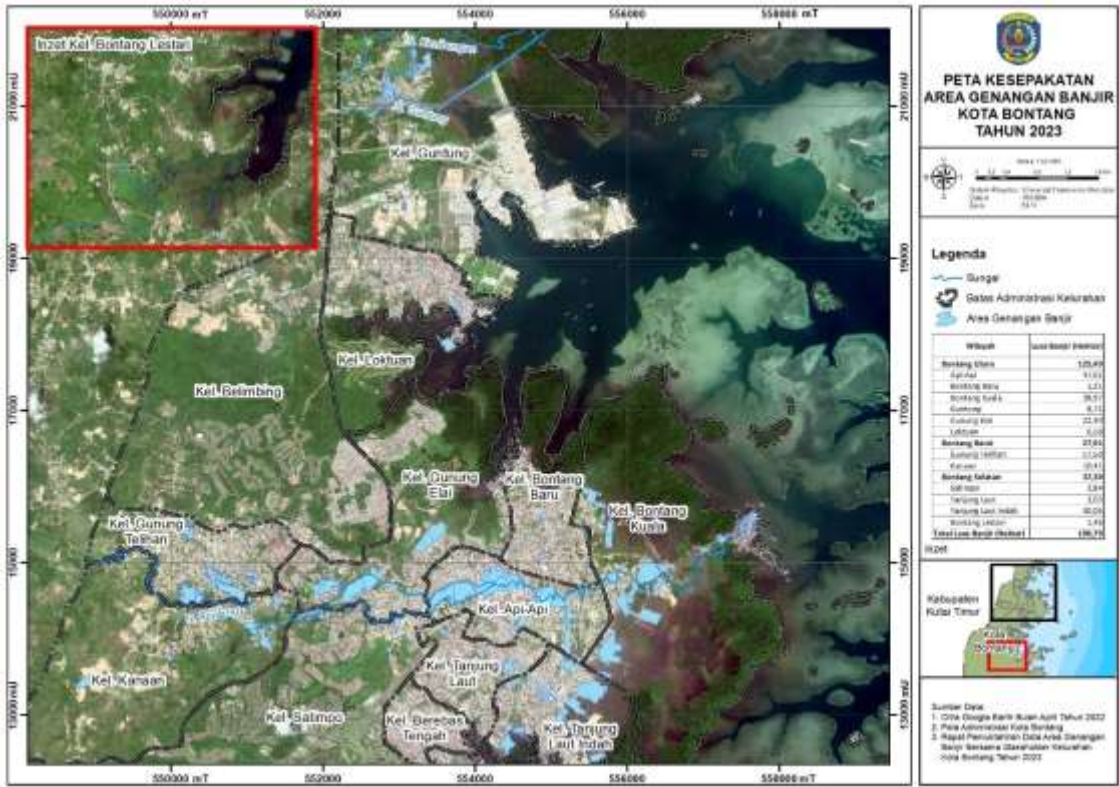
Berdasarkan grafik di atas, terjadi penurunan luas genangan banjir di Kota Bontang sejak tahun 2020 sampai tahun 2023. Penurunan luas genangan banjir ini merupakan hasil dari kerja Pemerintah Kota Bontang dalam penanganan bencana banjir. Ada pun beberapa upaya yang telah dilakukan adalah normalisasi sungai, pembangunan perkuatan tebing sungao, perbaikan system drainase, dan relokasi bangunan di bantaran sungai.

Tabel 2. 87 Luas Genangan Banjir Tiap Kelurahan Tahun 2023

No	Wilayah (Kecamatan / Kelurahan)	Luas Wilayah Kebanjiran (Hektar)
	Kecamatan Bontang Utara	125,49
1	Kelurahan Api-Api	47.61
2	Kelurahan Bontang Baru	1.21
3	Kelurahan Bontang Kuala	38.97
4	Kelurahan Guntung	8.71
5	Kelurahan Gunung Elai	22.40
6	Kelurahan Loktuan	6.58
	Kecamatan Bontang Barat	27.91
7	Kelurahan Gunung Telihan	17.50
8	Kelurahan Kanaan	10.41
	Kecamatan Bontang Selatan	37.39
9	Kelurahan Satimpo	2.84

No	Wilayah (Kecamatan / Kelurahan)	Luas Wilayah Kebanjiran (Hektar)
10	Kelurahan Tanjung Laut	3.03
11	Kelurahan Tanjung Laut Indah	30.06
12	Kelurahan Bontang Lestari	1.46
	Total	190.79

Sumber : Bapelitbang, 2024



Sumber : Bapelitbang, 2024

Gambar 2. 47 Peta Area Genangan Banjir Kota Bontang Tahun 2023

7. Bank

Menurut jenisnya, bank di Kota Bontang terdiri atas bank persero yang terdiri dari 3 unit kantor cabang dan 15 kantor cabang pembantu; Bank Pembangunan Daerah yang terdiri dari 1 kantor cabang, 10 kantor cabang pembantu, dan 10 kantor kas; bank swasta nasional meliputi 4 kantor cabang pembantu; bank swasta nasional syariah yang terdiri dari 1 kantor cabang dan 2 kantor cabang pembantu; serta Bank Perkreditan Rakyat konvensional yang terdiri dari 3 kantor pusat, 1 kantor cabang dan 4 kantor kas.

8. Penginapan/perhotelan

Kota Bontang terdapat 27 hotel yang terdiri dari 3 hotel berbintang dan 24 hotel non-bintang dengan total 765 kamar dan 1.135 tempat tidur. Menurut kecamatan, terdapat 8 hotel di Kecamatan Bontang Selatan, 14 hotel di Bontang Utara dan 5 hotel di Kecamatan Bontang Barat.

Tabel 2. 88 Aspek Daya Saing dalam Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	0,00242	0,00228	0,00103	0,00136	0,00136
2	Jumlah pelabuhan						
	- Pelabuhan umum	Unit	2	2	2	2	2
	- Terminal khusus/TUSK	Unit	5	5	6	6	6
3	Jumlah bandara						
	- Bandara umum	Unit	-	-	-	-	-
	- Bandara khusus	Unit	1	1	1	1	1
4	Jumlah terminal	Unit	1	1	1	1	1
5	Kesesuaian tata ruang	%	n/a	88,00	94,17	94,17	94,17
6	Luas wilayah industri	Ha	-	2.710	2.710	2.849	2.849
7	Luas wilayah banjir	Ha	519,29	-	353,37	283,75	190,79
8	Jumlah bank dan cabang	Unit	49	50	50	50	50
9	Jumlah penginapan/ hotel	Unit	30	30	29	27	27

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, 2024
Bapelitbang, 2024
Kota Bontang Dalam Angka

B. Penataan Wilayah

Berdasarkan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Jangka Pendek Kota Bontang Tahun 2025, terdapat 3 (tiga) program prioritas 1, yaitu:

- 1) percepatan infrastruktur pendidikan;
- 2) monitoring dan evaluasi RTRW; serta
- 3) peninjauan kembali RTRW Kota Bontang.

Program percepatan infrastruktur pendidikan akan difokuskan pada penambahan ruang kelas di sekolah tingkat dasar. Potensi permasalahan pada program ini adalah keterbatasan SDM di Disdikbud yang memahami teknis pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung. Untuk itu, perlu ada koordinasi antara Disdikbud dengan DPUPR yang memiliki kompetensi di bidang tersebut sejak periode perencanaan, monitoring selama proses pembangunan dan pemeliharaan, hingga evaluasi pasca pembangunan dan pemeliharaan.

Program monitoring dan evaluasi RTRW akan difokuskan pada kesesuaian antara peruntukan ruang di dalam dokumen RTRW Kota Bontang tahun 2019 – 2039 dengan aktual pemanfaatan ruang di lapangan. Potensi permasalahan pada program ini adalah adanya temuan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan. Dari temuan ini, maka perlu disusun rencana-rencana aksi terkait penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai.

Program peninjauan kembali RTRW Kota Bontang akan dimulai tahun 2024. Potensi permasalahan yang bisa muncul dari program ini adalah ketidaksinkronan antara dokumen Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kota Bontang Tahun 2019 – 2039 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bontang Tahun 2025 – 2045. Untuk itu, dokumen PK RTRW perlu disusun secara simultan dengan dokumen RPJPD sehingga visi-visi pembangunan 20 tahun ke depan dapat terwujud

melalui program-program di dalam PK RTRW yang sesuai dengan peruntukan kawasan.

C. Ketersediaan Air Minum

Pemerintah Kota Bontang saat ini terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan air minum bagi masyarakat Kota Bontang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota selaku Perangkat Daerah yang menangani air minum dan Perumdam Tirta Taman selaku operator penyediaan air minum. Sarana dan prasarana air minum di Kota Bontang terus ditingkatkan dan dikembangkan. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggan dan cakupan pelayanan meskipun masih terdapat permasalahan defisit air yang masih dialami Kota Bontang. Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dikelola Perumdam Tirta Taman hanya mampu mendistribusikan air sebesar 445 liter/detik dari kebutuhan air sebesar 567 liter/detik atau mengalami defisit sebesar 122 liter/detik.

Tabel 2. 89 Distribusi Air Pada Instalasi Pengolah Air (IPA)

No	Nama SPAM	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	SPAM Bontang Kota	liter/detik	231,55	283,07	288,39	284,22	254,38
2	SPAM Loktuan	liter/detik	61,76	67,53	67,00	71,50	101,16
3	SPAM Guntung	liter/detik	10,37	24,84	19,58	21,69	31,85
4	SPAM Bontang Lestari	liter/detik	11,64	16,98	33,95	32,31	57,61
	Jumlah	liter/detik	315,32	392,42	408,92	409,72	445,00

Sumber: Perumdam Tirta Taman, 2024

Tabel 2. 90 Jumlah Pelanggan, Pemakaian Air dan Penjualan Air Perumdam Tirta Taman Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pelanggan	SR	27.317	28.570	30.195	31.757	32.845
	- Pelanggan domestik	SR	22.664	27.714	29.283	30.815	31.830
	- Pelanggan non domestik	SR	4.653	856	912	942	1.015
2	Pemakaian air	m ³	8.911.938	9.847.100	10.036.835	10.177.423	10.869.637
3	Penjualan air (x1.000.000)	Rp.	41.639,13	47.556,45	51.537,64	52.204,34	56.353,83

Sumber: Perumdam Tirta Taman, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pelanggan Perumdam Tirta Taman Kota Bontang selalu meningkat setiap tahun dengan besaran pertumbuhan sebesar 4,36%. Pada tahun 2023, jumlah pelanggan meningkat sebesar 1.088 pelanggan dari tahun 2022. Selain itu, jumlah pemakaian air di Kota Bontang juga terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2023 mencapai 10.869.637 m³ meningkat sebesar 692.214 m³ dari tahun 2022, dengan besaran pertumbuhan mencapai 5,29%. Selain itu, total penjualan air di Kota Bontang juga terus mengalami peningkatan dimana pertumbuhannya sebesar 7,81%, dengan nilai penjualan pada tahun 2023 mencapai Rp. 56.353.834.250,- atau meningkat sebesar Rp. 4.149.490.625,- dari tahun 2022.

D. Fasilitas Perdagangan Barang dan Jasa

Jumlah hotel dan perkembangannya di Kota Bontang relatif stagnan dan tidak berkembang. Hanya terdapat 3 hotel berbintang dan 2 hotel diantaranya merupakan hotel yang dibangun sebagai pelayanan dari sektor industri.

Perkembangan hotel di Kota Bontang terbilang stagnan, dimana dari total 27 hotel, hanya 3 hotel yang masuk kategori hotel berbintang. Hal ini disebabkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bontang yang belum meningkat, pariwisata yang belum berkembang

Tabel 2. 91 Jumlah Hotel Menurut Kecamatan dan Klasifikasi di Kota Bontang Tahun 2022

Kecamatan	Hotel Berbintang					Hotel Non bintang & Akomodasi lainnya	Total
	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5		
Bontang Selatan						8	8
Bontang Utara		1	1			12	14
Bontang Barat			1			4	5
Bontang		1	2			24	27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang,2023

Tabel 2. 92 Perkembangan Jumlah Industri Tahun 2018 – 2023

Uraian	Jumlah Industri pada Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Makanan	525	525	429	508	531	535
Industri Minuman	283	283	269	272	274	277
Industri Kimia	42	42	45	44	55	46
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	17	17	19	22	22	22
Lainnya	43	43	48	600	612	618

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang,2023

Pada Tahun 2023 Perkembangan jumlah industri di Kota Bontang mengalami kenaikan. Baik itu industri makanan, minuman, hasil hutan dan perkebunan serta industri lainnya , namun untuk industri kimia mengalami penurunan dari 55 di tahun 2022 menjadi 46 di tahun 2023.

Tabel 2. 93 Perkembangan Jumlah Pasar Kota Bontang dari tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pasar Tradisional milik Pemerintah	3	3	3	3	3	3
Pasar Tradisional milik Swasta	2	2	2	2	2	2
Toko Swalayan / Supermarket /Minimarket	NA	NA	54	56	56	221
Toko / Kios	218	222	190	184	184	240
Pertokoan	2	2	2	2	2	2

Sumber : DKUKMP Kota Bontang,2024

Perkembangan jumlah pasar tradisional baik milik pemerintah dan milik swasta dan juga pasar swalayan di Kota Bontang sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 stagnan dan tidak ada penambahan ataupun

pengurangan. Untuk jumlah swalayan/minimarket mengalami penambahan sebanyak 165 unit di tahun 2023, sedangkan untuk toko/kios bertambah sebanyak 56 unit di tahun 2023. Sedangkan jumlah pertokoan Tahun 2023 masih tetap dari tahun sebelumnya sebanyak 2 komplek pertokoan.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Iklim Berinvestasi

Pemerintah mendorong tumbuh pesatnya investasi di Kota Bontang dengan kebijakan-kebijakan ramah investasi. Birokrasi pelayanan perijinan yang sederhana dan berbasis online sangat memudahkan dan mempercepat pengurusan perijinan bagi investor. Selain itu, Pemerintah Kota Bontang mengembangkan berbagai terobosan dan inovasi untuk mendukung percepatan perijinan dan investasi antara lain perijinan berbasis online, perijinan jemput bola, integrasi sistem perijinan dengan Perangkat Daerah dengan fungsi terkait, serta regulasi yang menetapkan lama proses ijin.

Tabel 2. 94 Perkembangan Lama Proses Ijin di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lama Proses Ijin (hari)	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bontang Tahun 2023

Satu hal yang menjadi permasalahan pada iklim berinvestasi adalah belum adanya perda yang memayungi insentif bagi investor. Penyusunan perda tersebut masih terhalang karena belum tersusunnya RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) dan Kajian Potensi Investasi di Kota Bontang yang menjadi syarat penetapan perda tersebut.

2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia yang unggul merupakan aset daerah yang merupakan kunci terciptanya daya saing suatu daerah. Oleh karena itu perhatian pemerintah terhadap SDM harus diprioritaskan secara terus menerus. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Fasilitas Pendidikan di Kota Bontang Tahun 2019 hingga 2023 tidak mengalami banyak perubahan. Adapun penambahan jumlah Sekolah Dasar (SD) swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta masing-masing bertambah sebanyak 2 sekolah. Sedangkan untuk fasilitas sekolah jenjang lainnya tidak mengalami perubahan jumlah. Selain itu, perkembangan fasilitas kesehatan di Kota Bontang juga tidak mengalami perubahan. Hanya pada jumlah puskesmas pembantu yaitu 0 karena di tahun 2023 puskesmas pembantu tersebut sudah tidak aktif, namun akan diaktifkan kembali di tahun 2024 untuk capaian integrasi layanan primer.

Tabel 2. 95 Perkembangan Fasilitas Pendidikan Di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PAUD (SPS)	33	36	36	36	35

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Negeri	-	-	-	-	-
Swasta	33	36	36	36	35
Jumlah Taman Kanak-kanak (TK)	50	55	55	55	55
Negeri	3	3	3	3	3
Swasta	47	52	52	52	52
Jumlah RA/BA	11	11	11	12	12
Jumlah Sekolah Dasar (SD)	56	56	56	56	58
Negeri	30	30	30	30	30
Swasta	26	26	26	26	28
Jumlah MI	5	5	5	5	6
Negeri	-	-	-	-	-
Swasta	5	5	5	5	6
Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP)	27	27	27	27	29
Negeri	9	9	9	9	9
Swasta	18	18	18	18	20
Jumlah MTs	6	6	6	6	6
Negeri	-	-	-	-	-
swasta	6	6	6	6	6
Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)	11	11	11	11	11
Negeri	3	3	3	3	3
Swasta	8	8	8	8	8
Jumlah MA	2	2	2	2	2
Negeri	1	1	1	1	1
Swasta	1	1	1	1	1
Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	14	14	14	14	14
Negeri	4	4	4	4	4
Swasta	10	10	10	10	10
Jumlah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	1	1	1	1	1
Negeri	1	1	1	1	1
Swasta	-	-	-	-	-
Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	18	18	18	18	18
Negeri	-	-	-	-	1
Swasta	18	18	18	18	17

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang Tahun 2024

Tabel 2. 96 Perkembangan Fasilitas Kesehatan Di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Sakit Swasta	4	4	4	4	4
Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1	1	1

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Sakit Umum Pusat	0	0	0	0	0
Rumah Sakit TNI / POLRI	0	0	0	0	0
Rumah Sakit Khusus, terdiri dari :					
Rumah Bersalin (RB) / BKIA	0	0	2	3	2
Puskesmas, terdiri dari :					
Puskesmas Perawatan	0	0	0	0	0
Puskesmas Non Perawatan	6	6	6	6	6
Puskesmas Pembantu	2	2	2	2	0
Posyandu yang ada	119	119	119	121	121
Dokter gigi swasta	2	4	3	8	32

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2024

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2021-2026 Tahun Ke-2

2.2.1 Evaluasi hasil RKPD Triwulan 1 tahun 2024

Dalam pelaksanaan RKPD tahun 2024, hasil evaluasi hingga triwulan I (satu) merupakan salah satu input penting yang menjadi dasar dan pertimbangan perlunya penyesuaian atau perubahan terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah juga bertujuan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian indikator digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 2. 97 Status Capaian Indikator terhadap target RKPD

Skala	Status Capaian Indikator
≥90%	Sangat Tinggi (ST)
90% - ≥75%	Tinggi (T)
75% - ≥65%	Sedang (S)
65% - ≥50%	Rendah (R)
≤50%	Sangat Rendah (SR)

Berdasarkan realisasi pelaksanaan program/kegiatan hasil pelaksanaan RKPD Kota Bontang triwulan1 tahun 2024 menurut per perangkat daerah terlihat bahwa realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan realisasi kinerja, yaitu realisasi keuangan sebesar Rp.325.096.417.219 atau 11,45 % dengan predikat sangat rendah dan realisasi kinerja 8,09 %dengan predikat sangat rendah. Secara ringkas capaian pelaksanaan hasil RKPD triwulan 1 tahun 2024 berdasarkan perurusan pemerintah sebagai berikut:

Tabel 2. 98 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD dan APBD Triwulan 1 Tahun 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Program				Program Yang Sama			Program Tidak Sama		Jumlah Kegiatan		Kegiatan Yang Sama	Kegiatan Tidak Sama	Jumlah Sub Kegiatan		Sub Kegiatan Yang Sama	Sub Kegiatan Tidak Sama	
		RPJMD	RKPD	Renja-PD	APBD	RPJMD & RKPD	RPJMD & APBD	RKPD & APBD	RPJMD & APBD	RPJMD & APBD	RKPD	APBD	RKPD & APBD	RKPD & APBD	RKPD	APBD	RKPD & APBD	RKPD & APBD	
(1)	(3)		(5)	(6)	(7)			(10)			(14)	(16)	(18)	(20)	(14)	(16)	(18)	(20)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	7		7	7	7	7	-		19	19	19	-	177	177	177	-	
2	Dinas Kesehatan	5	5		5	5	5	5	-		23	23	23	-	187	187	187	-	
3	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada	2	4		4	4	4	4	(2)		12	12	12	-	24	24	24	-	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	11	11		11	11	11	11	-		23	23	23	-	73	73	73	-	
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13	10		10	10	10	10	3		19	19	19	-	41	41	41	-	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2		2	2	2	2	-		9	9	9	-	27	27	27	-	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2		2	2	2	2	-		10	10	10	-	24	24	24	-	
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	2		2	2	2	2	-		11	11	11	-	30	30	30	-	
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	7	6		6	6	6	6	1		13	13	13	-	60	60	60	-	
10	Dinas Ketenagakerjaan	5	4		4	4	4	4	1		14	14	14	-	27	27	27	-	
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	10	10		10	10	10	10	-		24	24	24	-	66	66	66	-	
12	Dinas Lingkungan Hidup	9	9		9	9	9	9	-		16	16	16	-	48	48	48	-	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5		5	5	5	5	-		12	12	12	-	26	26	26	-	
14	Dinas Perhubungan	3	3		3	3	3	3	-		15	15	15	-	40	40	40	-	
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5		5	5	5	5	-		12	12	12	-	36	36	36	-	
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	18	14		14	14	14	14	4		26	26	26	-	51	51	51	-	
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6		6	6	6	6	-		12	12	12	-	30	30	30	-	

No. Urut	Perangkat Daerah	Program				Program Yang Sama			Program Tidak Sama		Jumlah Kegiatan		Kegiatan Yang Sama	Kegiatan Tidak Sama	Jumlah Sub Kegiatan		Sub Kegiatan Yang Sama	Sub Kegiatan Tidak Sama	
		RPJMD	RKPD	Renja-PD	APBD	RPJMD & RKPD	RPJMD & APBD	RKPD & APBD	RPJMD & APBD	RPJMD & APBD	RKPD	APBD	RKPD & APBD	RKPD & APBD	RKPD	APBD	RKPD & APBD	RKPD & APBD	
(1)	(3)		(5)	(6)	(7)			(10)			(14)	(16)	(18)	(20)	(14)	(16)	(18)	(20)	
18	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	8	8		8	8	8	8	-		19	19	19	-	43	43	43	-	
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	5		5	5	5	5	-		15	15	15	-	40	40	40	-	
20	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	12	12		12	12	12	12	-		27	27	27	-	47	47	47	-	
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	4	4		4	4	4	4	-		15	15	15	-	61	61	61	-	
22	Badan Pendapatan Daerah	2	2		2	2	2	2	-		8	8	8	-	33	33	33	-	
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3		3	3	3	3	-		14	14	14	-	83	83	83	-	
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3		3	3	3	3	-		13	13	13	-	38	38	38	-	
25	Inspektorat Daerah	3	3		3	3	3	3	-		10	10	10	-	29	29	29	-	
26	Sekretariat Daerah	3	3		3	3	3	3	-		19	19	19	-	53	53	53	-	
27	Sekretariat DPRD	2	2		2	2	2	2	-		17	17	17	-	62	62	62	-	
28	Kecamatan Bontang Utara	5	5		5	5	5	5	-		15	15	15	-	137	137	137	-	
29	Kecamatan Bontang Selatan	5	5		5	5	5	5	-		15	15	15	-	135	135	135	-	
30	Kecamatan Bontang Barat	5	5		5	5	5	5	-		14	14	14	-	78	78	78	-	
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6		6	6	6	6	-		12	12	12	-	24	24	24	-	
J U M L A H		178	171	-	171	171	171	171	7	-	483	483	483	-	1.830	1.830	1.830	-	

Tabel 2. 99 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan 1 Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah			Pagu Anggaran PD	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran PD			Status Predikat	
		Prog	Keg	Sub Keg		Realisasi	%	K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.01	URUSAN PENDIDIKAN	5	15	170	470.595.679.190	71.872.385.168,00	15,27	40,00	SR	S
1.02	URUSAN KESEHATAN	9	35	211	441.124.761.180	33.484.156.134,00	7,59	-	SR	SR
1.03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	23	73	599.558.753.403	3.817.316.194,00	0,64	4,75	SR	SR
1.04	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	5	14	35	99.102.349.186	6.243.006.297,00	6,30	-	SR	SR
1.05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6	30	81	67.388.440.257	16.060.015.817,00	23,83	5,10	SR	SR
1.06	URUSAN SOSIAL	5	12	54	22.745.447.523	3.444.016.123,00	15,14	-	SR	SR
	Jumlah	41	129	624	1.700.515.430.739	134.920.895.733	7,93	8,31	SR	SR
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.07	URUSAN TENAGA KERJA	4	14	27	27.666.123.193	4.267.284.258,00	15,42	5,00	SR	SR
2.08	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	16	26	17.357.813.640	2.739.041.587,00	15,78	37,50	SR	S
2.09	URUSAN PANGAN	4	12	24	29.276.749.246	4.767.352.319,00	16,28	20,00	SR	SR
2.10	URUSAN PERTANAHAN	5	5	6	1.418.076.599	76.899.378,00	5,42	-	SR	SR
2.11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	9	16	48	61.697.455.319	8.168.104.080,00	13,24	-	SR	SR
2.12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	12	26	16.733.787.016	3.505.268.911,00	20,95	66,67	SR	ST
2.13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	1	6	2.963.563.228	388.981.223,00	13,13	-	SR	SR
2.14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	8	40	7.063.704.418	1.019.440.474,00	14,43	0,17	SR	SR
2.15	URUSAN PERHUBUNGAN	3	15	40	39.218.139.396	6.706.997.387,00	17,10	-	SR	SR
2.16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	9	30	37.470.860.812	5.822.166.417,00	15,54	6,25	SR	SR
2.17	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6	15	32	48.050.276.569	8.225.490.753,00	17,12	-	SR	SR
2.18	URUSAN PENANAMAN MODAL	6	12	30	17.303.590.152	2.479.640.541,00	14,33	0,95	SR	SR
2.19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	14	33	66.614.594.963	6.411.632.200,00	9,62	-	SR	SR
2.20	URUSAN STATISTIK	1	2	4	395.417.566	56.380.220,00	14,26	8,33	SR	SR
2.21	PERSANDIAN	1	1	2	550.567.500	21.068.300,00	3,83	-	SR	SR
2.22	URUSAN KEBUDAYAAN	2	4	7	26.913.008.892	322.805.000,00	1,20	-	SR	SR
2.23	URUSAN PERPUSTAKAAN	2	8	28	22.612.596.350	4.067.852.570,00	17,99	-	SR	SR
2.24	URUSAN KEARSIPAN	3	7	12	2.083.872.639	66.614.000,00	3,20	-	SR	SR
	Jumlah	69	171	421	425.390.197.498	59.113.019.618	13,90	8,05	SR	SR
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.25	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	6	11	5.668.589.163	331.975.326,00	5,86	-	SR	SR
3.26	URUSAN PARIWISATA	4	5	10	20.469.453.099	1.401.732.625,00	6,85	-	SR	SR
3.27	URUSAN PERTANIAN	5	9	12	5.402.657.887	144.713.344,00	2,68	-	SR	SR
3.30	URUSAN PERDAGANGAN	5	8	11	5.348.972.374	-	-	-	SR	SR
3.31	URUSAN PERINDUSTRIAN	3	3	8	5.739.310.003	1.281.290.700,00	22,32	-	SR	SR
	Jumlah	20	31	52	42.628.982.526	3.159.711.995	7,41	-	SR	SR

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah			Pagu Anggaran PD	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran PD			Status Predikat	
		Prog	Keg	Sub Keg		Realisasi	%	K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	3	19	53	151.110.280.870	37.312.423.720,00	24,69	-	SR	SR
4.02	SEKRETARIAT DPRD	2	17	62	92.209.016.553	11.693.203.007,00	12,68	-	SR	SR
	Jumlah	5	36	115	243.319.297.423	49.005.626.727	20,14	-	SR	SR
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.01	PERENCANAAN	3	12	52	21.503.201.336	3.142.091.334,00	14,61	11,63	SR	SR
5.02	KEUANGAN	5	22	116	59.954.609.631	6.835.396.074,00	11,40	19,19	SR	SR
5.03	KEPEGAWAIAN	2	11	36	21.555.703.139	3.612.978.867,00	16,76	33,33	SR	R
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	2	2	5.247.652.051	1.236.010.076,00	23,55	9,99	SR	SR
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	3	9	3.301.430.117	19.650.960,00	0,60	19,64	SR	SR
	Jumlah	12	50	215	111.562.596.274	14.846.127.311	13,31	18,75	SR	SR
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	3	10	29	22.327.174.113	4.613.712.562,00	20,66	18,75	SR	SR
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN	15	44	346	252.296.429.228	48.033.761.496,00	19,04	10,86	SR	SR
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12	24	40.536.029.617	11.221.006.127,00	27,68	-	R	SR
J U M L A H		171	483	#####	2.838.576.137.418	324.913.861.569	11,45	8,09	SR	SR
Rata-rata Capaian Kinerja (%) dan Predikat Kinerja										

Tabel 2. 100 Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan 1 Tahun 2024 Berdasarkan Urusan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	211.894.860.569	100	%	54.975.575.338	100	%	54.975.575.338	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen	156.885.011.791	-	Dokumen	49.280.353.050	-	Dokumen	49.280.353.050,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				178.669.780	-	-	-	-		-	
1	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian		Laporan	9.891.289.733	-	Laporan	1.275.024.594	-	Laporan	1.275.024.594,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum		Laporan	17.834.493.751	-	Laporan	266.619.713	-	Laporan	266.619.713,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		Unit	10.882.449.600	-	Unit	1.550.800.000	-	Unit	1.550.800.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang		Laporan	14.428.258.091	-	Laporan	2.476.751.981	-	Laporan	2.476.751.981,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		Unit	1.794.687.823	-	Unit	126.026.000	-	Unit	126.026.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			%	228.595.482.594	100	%	13.117.240.090	100,00	%	13.117.240.090	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola		Sekolah	133.841.363.878	-	Sekolah	7.076.267.540	-	Sekolah	7.076.267.540,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1	01	02	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang dikelola		Sekolah	69.956.562.955	-	Sekolah	6.000.574.100	-	Sekolah	6.000.574.100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah satuan PAUD yang dikelola		Sekolah	21.859.493.358	-	Sekolah	-	-	Sekolah	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang dikelola		Sekolah	2.938.062.403	-	Sekolah	40.398.450	-	Sekolah	40.398.450,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	100	%	1.298.876.776	-	%	-	-	%	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	2.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				414.612.730	-	-	-	-		-	
1	01	03	2.02			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD PNF yang ditetapkan		Kurikulum	884.264.046	-	Kurikulum	-	-	Kurikulum	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid	78,54	Rasio	28.756.459.572	-	Rasio	-	-	Rasio	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	2.01			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Rasio guru/murid per kelas rata- rata		%	28.756.459.572	-	%	-	-	%	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidikan dasar, PAUD dan non formal yang memiliki ijin	100	%	49.999.679	-	%	-	-	%	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	2.02			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin Operasional Satuan PAUD PNF yang terbit	0	Dokumen	49.999.679	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-		-		-	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKP D Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKP D Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						-		-		-	
2	22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian budaya	100	%	23.287.214.065	-	%	322.805.000	-	%	322.805.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	2.01			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		0		3.743.981.698	-	-	9.680.000	-		9.680.000	
2	22	02	2.02			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan	0	Kesenian	3.616.990.787	-	Kesenian	216.000.000	-	Kesenian	216.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	2.03			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	0	Lembaga	15.926.241.580	-	Lembaga	97.125.000	-	Lembaga	97.125.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan kesenian	100	%	3.625.794.827	-	%	-	-	%	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	2.01			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah yang dibina	0	Kesenian	3.625.794.827	-	Kesenian	-	-	Kesenian	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-		-		-	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						-		-		-	
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (DINKES)	100	%	178.604.927.783	-	%	11.342.093.033	-	%	11.342.093.033	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan		dokumen	355.045.399	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Kesehatan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		laporan	155.059.365.539	-	laporan	9.329.178.915	-	laporan	9.329.178.915	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan	28.561.300	-	laporan	-	-	laporan	-	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		laporan	13.479.113	-	laporan	-	-	laporan	-	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian		laporan	3.103.809.813	-	laporan	196.671.621	-	laporan	196.671.621	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum		laporan	8.400.402.728	-	laporan	256.399.000	-	laporan	256.399.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah		laporan	1.046.357.000	-	laporan	-	-	laporan	-	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sumber daya air, listrik, komunikasi dan Tenaga Kontrak Daerah		bulan	9.053.242.486	-	bulan	1.390.914.047	-	bulan	1.390.914.047	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aset Barang Milik Daerah terpelihara		bulan	1.544.664.405	-	bulan	168.929.450	-	bulan	168.929.450	Dinas Kesehatan
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi	95	per 1000 Kelahiran Hidup	80.362.231.755	-	per 1000 Kelahiran Hidup	1.791.714.861	-	per 1000 Kelahiran Hidup	1.791.714.861	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP Sesuai standar		%	9.482.346.842	-	%	13.911.000	-	%	13.911.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kesembuhan TB		%	56.897.518.467	-	%	1.771.152.690	-	%	1.771.152.690	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Ketersediaan sistem informasi kesehatan terpadu/terintegrasi		%	2.055.197.725	-	%	-	-	%	-	Dinas Kesehatan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1	02	02	2.04			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan Rujukan (FKTL) Berizin		%	11.927.168.721	-	%	6.651.171	-	%	6.651.171	Dinas Kesehatan
1	02	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan berizin (Dinkes)	100	%	3.127.156.801	-	%	62.613.152	-	%	62.613.152	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.01			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang berijin			29.904.818	-	-	5.930.000	-		5.930.000	
1	02	03	2.02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan SDMK berdasarkan Rencana Kebutuhan Fasyankes		%	182.010.103	-	%	22.741.152	-	%	22.741.152	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.03			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan SDMK mendapatkan pengembangan kompetensi		%	2.915.241.880	-	%	33.942.000	-	%	33.942.000	Dinas Kesehatan
1	02	04				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Produksi Obat, Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Berizin	100	%	774.620.134	-	%	70.632.500	-	%	70.632.500	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.01			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana produksi dan distribusi obat berizin dan memenuhi standar		%	139.988.245	-	%	-	-	%	-	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.03			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana PIRT yang berizin yang memenuhi standar		%	442.085.389	-	%	-	-	%	-	Dinas Kesehatan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1	02	04	2.04			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan		%	120.334.000	-	%	16.670.000	-	%	16.670.000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.05			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan sesuai standar		%	72.212.500	-	%	53.962.500	-	%	53.962.500	Dinas Kesehatan
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	45	%	2.039.643.886	-	%	1.045.419.200	-	%	1.045.419.200	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.01			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pedoman/ regulasi/ rekomendasi penerapan kebijakan GERMAS		buah	1.191.644.000	-	buah	1.045.419.200	-	buah	1.045.419.200	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.02			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PHBS 5 Tatanan (Rumah tangga sekolah institusi kesehatan tempat kerja tempat umum)		%	349.787.000	-	%	-	-	%	-	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif		%	498.212.886	-	%	-	-	%	-	Dinas Kesehatan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKP D Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKP D Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								-		-	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								-		-	
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	39.382.511.367	-	%	18.504.154.590	-	%	18.504.154.590	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.220.643	-	-	-	-		-	
1	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Insentif Dokter Internship dan Uang Shift Pegawai		%	18.687.770.811	-	%	17.493.468.704	-	%	17.493.468.704	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	02	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		%	246.510.000	-	%	43.059.365	-	%	43.059.365	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum		%	7.144.523.179	-	%	52.935.964	-	%	52.935.964	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	02	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				699.428.390	-	-	-	-		-	
1	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sumber daya air, listrik, komunikasi dan Tenaga Kontrak Daerah		%	5.673.814.263	-	%	914.690.557	-	%	914.690.557	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aset Barang Milik Daerah terpelihara		%	6.929.244.081	-	%	-	-	%	-	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		84,8	per 1000 kelahiran hidup	134.781.991.952	-	per 1000 kelahiran hidup	-	-	per 1000 kelahiran hidup	-	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			%	53.935.190.917	-	%	-	-	%	-	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP Sesuai standar		%	80.846.801.035	-	%	-	-	%	-	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					-	-	-	-		-	
1	02	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan berizin	100	%	1.751.961.000	-	%	667.528.798	-	%	667.528.798	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	02	03	2.03			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			%	1.751.961.000	-	%	667.528.798	-	%	667.528.798	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	45	% b	299.716.502	-	%	-	-	%	-	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1	02	05	2.02			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Dokumen	299.716.502	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-		-		-	
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						-		-		-	
1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	30.899.033.239	-	%	4.662.662.396	-	%	4.662.662.396	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	21.792.231.814	-	%	3.817.316.194	-	%	3.817.316.194	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian		%	3.219.704.304	-	%	315.712.446	-	%	315.712.446	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang		%	2.764.146.575	-	%	191.962.985	-	%	191.962.985	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		%	606.796.355	-	%	-	-	%	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang		%	1.682.992.168	-	%	306.444.771	-	%	306.444.771	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		%	833.162.023	-	%	31.226.000	-	%	31.226.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kapasitas unit air tanah / air baku	87	%	213.987.330.957	-	%	#REF!	-	%	#REF!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1	03	02	2.01			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang turap dan tanggul yang telah dibangun/ panjang keseluruhan sungai		meter	213.800.788.746	-	meter	1.599.723.111	-	meter	1.599.723.111	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	02	2.02			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				186.542.211	-	-	-	-		-	
1	03	03				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase penduduk berakses air minum layak	84	%	33.408.257.526	-	%	56.910.480	-	%	56.910.480	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	03	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase rumah tangga berakses air bersih		%	33.408.257.526	-	%	56.910.480	-	%	56.910.480	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	04				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	62	%	1.754.560.000	-	%	-	-	%	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	04	2.01			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang terlayani persampahannya		Rumah Tangga	1.754.560.000	-	Rumah Tangga	-	-	Rumah Tangga	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	05				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	97	%	6.815.436.139	-	%	143.415.364	-	%	143.415.364	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	05	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah untuk rumah tangga		Rumah Tangga	6.815.436.139	-	Rumah Tangga	143.415.364	-	Rumah Tangga	143.415.364	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	06				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	93	%	27.035.744.550	-	%	-	-	%	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1	03	06	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara		Meter	27.035.744.550	-	Meter	-	-	Meter	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi persyaratan teknis	70	%	132.492.719.082	7,00	%	385.225.328	7,00	%	385.225.328	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	08	2.01			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Cakupan bangunan gedung daerah dan cakupan bangunan ber IMB		%	132.492.719.082	7,00	%	385.225.328	7,00	%	385.225.328	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	09				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase sempadan sungai yang tertata	15	%	198.259.000	-	%	-	-	%	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	09	2.01			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Sempadan Sungai yang tertata		kawasan	198.259.000	-	kawasan	-	-	kawasan	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Drainase Jalan Dalam Kondisi Mantap	90	%	146.097.515.944	-	%	188.406.707	-	%	188.406.707	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	10	2.01			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik		meter	146.097.515.944	-	meter	188.406.707	-	meter	188.406.707	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	82	%	4.669.986.982	50,00	%	643.300.016	50,00	%	643.300.016	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	11	2.01			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga kerja terampil konstruksi yang telah tersertifikasi		orang	3.952.947.183	50,00	orang	639.705.600	50	orang	639.705.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKP D Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1	03	11	2.02			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data dan Informasi SIPJAKI		%	285.931.919	-	%	-	-	%	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	11	2.03			Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah izin usaha			9.999.655	-	-	-	-		-	
1	03	11	2.04			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan		%	421.108.225	-	%	3.594.416	-	%	3.594.416	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang	89	%	2.199.909.984	-	%	80.416.973	-	%	80.416.973	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	12	2.01			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen tata ruang		%	1.776.728.167	-	%	37.331.502	-	%	37.331.502	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	12	2.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen tata ruang		%	86.030.934	-	%	-	-	%	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	12	2.03			Koordinasi dan Singkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang Diterbitkan		%	37.058.417	36,00	%	9.908.400	36,00	%	9.908.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	03	12	2.04			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pemanfaatan ruang		%	300.092.466	-	%	33.177.071	-	%	33.177.071	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								-		-	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								-		-	
1	04	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	18.124.837.848	-	%	4.642.923.422	-	%	4.642.923.422	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian
1	04	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		%	4.967.635	25,00	%	-	25,00	%	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah		%	10.104.487.304	14,28	%	2.141.820.730	14,28	%	2.141.820.730	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian		%	1.979.715.022	55,60	%	1.060.802.702	55,60	%	1.060.802.702	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan layanan administrasi umum yang disediakan		%	3.761.463.102	67,71	%	1.100.966.128	67,71	%	1.100.966.128	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		%	926.611.130	21,42	%	167.136.862	21,42	%	167.136.862	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		%	1.347.593.655	25,00	%	172.197.000	25,00	%	172.197.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Fasilitas Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	25	%	9.455.190.994	-	%	932.284.118	-	%	932.284.118	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1	04	02	2.01			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis data rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi rumah program pemerintah		dokumen	615.141.880	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	2.03			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah rehabilitasi korban bencana atau relokasi program pemerintah yang dibangun		unit	1.549.211.700	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	2.05			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah RT, KK & Jiwa penghuni rumah susun umum & rumah khusus yang dibina		jiwa	7.290.837.414	317,00	jiwa	932.284.118	317	jiwa	932.284.118	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yg ditangani	72	%	8.764.426.420	-	%	52.983.002	-	%	52.983.002	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	2.01			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan		dokumen	168.388.000	-	dokumen	7.676.752	-	dokumen	7.676.752	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	2.02			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha		dokumen	1.985.937.220	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	2.03			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani		Ha	6.610.101.200	-	Ha	45.306.250	-	Ha	45.306.250	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	04				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	3	%	731.100.000	-	%	-	-	%	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1	04	04	2.01			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		unit	731.100.000	-	unit	-	-	unit	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	05				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	93	%	1.857.671.000	-	%	614.815.755	-	%	614.815.755	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	05	2.01			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah sarana dan prasarana TPU		meter	1.857.671.000	-	meter	614.815.755	-	meter	614.815.755	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	04				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penangan sengketa tanah garapan	100	%	586.391.884	-	%	46.652.650	-		46.652.650	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								-		-	
2	10					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								-		-	
2	10	04	2.01			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penangan sengketa tanah garapan		dokumen	586.391.884	-	dokumen	46.652.650	-		46.652.650	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	05				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	75	%	156.165.900	-	%	6.422.276	-		6.422.276	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	10	05	2.01			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah		dokumen	156.165.900	-	dokumen	6.422.276	-		6.422.276	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	08				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	30	%	130.124.900	-	%	17.402.176	-		17.402.176	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	08	2.01			Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong		%	130.124.900	-	%	17.402.176	-		17.402.176	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	09				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase luas APL yang diberikan izin penguasaan	75	%	116.202.900	-	%	6.422.276	-		6.422.276	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	09	2.01			Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah fasilitasi penerbitan izin membuka tanah		lokasi	116.202.900	-	lokasi	6.422.276	-		6.422.276	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	10				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penyediaan tanah untuk fasilitas publik	10	%	60.598.313.939	-	%	-	-		-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	10	2.01			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Peta zona nilai tanah		dokumen	60.598.313.939	-	dokumen	-	-		-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-		-		-	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						-		-		-	
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (Satpol PP)	100	%	16.162.877.362	-	%	4.878.116.891	-	%	4.878.116.891	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	%	1.752.228	-	%	-	-	%	-	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	%	8.867.860.792	-	%	2.759.247.261	-	%	2.759.247.261	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	%	468.715.750	-	%	-	-	%	-	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi umum Perangkat Daerah	-	%	979.617.106	-	%	310.093.714	-	%	310.093.714	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	%	4.884.745.648	-	%	1.630.163.416	-	%	1.630.163.416	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	-	%	960.185.838	-	%	178.612.500	-	%	178.612.500	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	%	2.450.976.193	-	%	550.732.438	-	%	550.732.438	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanganan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Daerah	-	%	711.985.574	-	%	206.156.000	-	%	206.156.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1	05	02	2.02			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota	-	persen	1.650.480.619	-	persen	344.576.438	-	persen	344.576.438	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.03			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	persen	88.510.000	-	persen	-	0	persen	-	Satuan Polisi Pamong Praja
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-		-		-	
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						-		-		-	
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (BPBD)	100	%	10.921.749.178	-	%	2.540.787.986	-	%	2.540.787.986	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.588.293							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	%	8.119.262.920	0	%	2.298.709.872	0,13	%	2.298.709.872	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	%	220.700.918	-	%	-	-	%	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi umum Perangkat Daerah	100,00	%	1.092.750.197	-	%	-	-	%	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,00	%	53.478.587	-	%	-	-	%	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1	05	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100,00	%	424.323.384	0	%	115.370.114	0,02	%	115.370.114	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100,00	%	1.001.644.879	0	%	126.708.000	0,03	%	126.708.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase pemenuhan SPM bidang penanggulangan bencana	100	%	2.462.811.640	0	%	931.597.685	0,09	%	931.597.685	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.01			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00	%	805.936.431	0	%	15.280.500	0,03	%	15.280.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00	%	1.390.363.749	0	%	916.317.185	0,09	%	916.317.185	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	%	266.511.460	-	%	-	-	%	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-		-		-	
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						-		-		-	
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (DPKP)	100	%	31.177.647.985	19,39	%	6.044.358.791	19,39	%	6.044.358.791	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I							
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	
1	05	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah Kabupaten/Kota	#N/A	-	640.997	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	#N/A	%	20.089.545.347	19,69	%	3.956.094.177	19,69	%	3.956.094.177	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	#N/A		796.561.575	38,13	-	303.719.400	38,13		303.719.400	
1	05	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	#N/A	%	1.037.778.842	11,95	%	124.063.430	11,95	%	124.063.430	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	#N/A	%	249.640.700	-	%	-	-	%	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	#N/A	%	7.835.265.641	17,06	%	1.336.999.484	17,06	%	1.336.999.484	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	#N/A	%	1.168.214.883	27,69	%	323.482.300	27,69	%	323.482.300	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	04				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%	4.212.377.899	26,46	%	1.114.422.026	26,46	%	1.114.422.026	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	04	2.01			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan pemadaman kebakaran dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	#N/A	%	3.279.549.858	12,90	%	423.135.546	12,90	%	423.135.546	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	04	2.02			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase sarana & prasarana proteksi kebakaran yg dinilai sesuai standar	#N/A	%	41.399.261	-	%	-	-	%	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1	05	04	2.03			Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran yang Dinilai Sesuai Standar	#N/A		58.141.000	-	-	-	-		-	
1	05	04	2.04			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase layanan pemadaman kebakaran dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran	#N/A	%	833.287.780	82,96	%	691.286.480	82,96	%	691.286.480	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-		-		-	
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						-		-		-	
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	17.727.483.870	#REF!	%	#REF!	#REF!	%	#REF!	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	06	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan	#REF!	Jenis	11.250.282.833	#REF!	Jenis	1.903.227.706	#REF!	Jenis	1.903.227.706	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	06	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian	#REF!	Jenis	799.457.785	#REF!	Jenis	5.440.000	#REF!	Jenis	5.440.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	06	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum	#REF!	Jenis	1.762.536.597	#REF!	Jenis	127.692.519	#REF!	Jenis	127.692.519	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	06	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	#REF!	Jenis	3.315.104.972	#REF!	Jenis	498.344.971	#REF!	Jenis	498.344.971	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	06	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	#REF!	Jenis	600.101.683	#REF!	Jenis	92.593.500	#REF!	Jenis	92.593.500	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		100	Persen	224.021.888	#REF!	Persen	-	#REF!	Persen	-	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	06	02	2.02			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		#REF!	%	23.890.000	#REF!	%	-	#REF!	%	-	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1	06	02	2.03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	#REF!	Lembaga	200.131.888	#REF!	Lembaga	-	#REF!	Lembaga	-	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100	%	2.803.312.052	#REF!	%	373.355.178	#REF!	%	373.355.178	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	06	04	2.01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah pelayanan rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	#REF!	Jenis	2.486.293.025	#REF!	Jenis	372.955.178	#REF!	Jenis	372.955.178	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	06	04	2.02			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah pelayanan rehabilitasi sosial	#REF!	Jenis	317.019.027	#REF!	Jenis	400.000	#REF!	Jenis	400.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial; Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)	100	%	1.557.692.244	#REF!	%	433.102.423	#REF!	%	433.102.423	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	06	05	2.02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan data fakir miskin	#REF!	%	1.557.692.244	#REF!	%	433.102.423	#REF!	%	433.102.423	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam/ sosial yang terlayani	100	%	432.937.469	#REF!	%	10.259.826	#REF!	%	10.259.826	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	06	06	2.01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan perlindunga sosial korban bencana alam dan sosial	#REF!	Jenis	307.163.331	#REF!	Jenis	10.259.826	#REF!	Jenis	10.259.826	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1	06	06	2.02			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	50,00	Jenis	125.774.138	#REF!	Jenis	-	#REF!	Jenis	-	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								-		-	
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								-		-	
2	13	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKK dan LAK yang aktif	100	%	2.963.563.228	#REF!	%	388.981.223	#REF!	%	388.981.223	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2	13	05	2.01			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	-	Jenis	2.963.563.228		Jenis	388.981.223,00	-	Jenis	388.981.223	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-		-		-	
2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						-		-		-	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	13.821.556.344	25	%	3.488.755.458	25,00	%	3.488.755.458	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100,00		200.090.418	-	-	-	-		-	
2	07	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100,00	%	8.234.710.330	25	%	1.392.287.902	25,00	%	1.392.287.902	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100,00	%	1.698.629.165	25	%	1.352.196.698	25,00	%	1.352.196.698	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100,00	%	852.780.348	25	%	259.523.577	25,00	%	259.523.577	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100,00	%	747.452.271	25	%	160.300.000	25,00	%	160.300.000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100,00	%	1.817.732.348	25	%	286.182.981	25,00	%	286.182.981	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100,00	%	270.161.464	25	%	38.264.300	25,00	%	38.264.300	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase produktifitas tenaga kerja; Persentase pencari kerja yang dilatih	100	%	5.101.174.649	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	03	2.01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi pada tahun n	100,00	%	4.731.073.046	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	03	2.02			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	persentase terlaksananya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	100,00	%	295.120.210	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketenagakerjaan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	07	03	2.05			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase terlaksananya pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	100,00	%	74.981.393	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	21	%	349.002.480	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	04	2.01			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	persentase terpenuhinya pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	100,00	%	149.811.869	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	04	2.03			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	persentase data dan informasi pasar kerja yang dikelola	100,00	%	199.190.611	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	5	%	8.394.389.720	-	%	778.528.800	-	%	778.528.800	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	05	2.01			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan dan menyusun pendaftaran perjanjian kerjasama yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	100,00	%	79.560.194	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	05	2.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	persentase terpenuhinya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	100,00	%	8.314.829.526	25	%	778.528.800	25,00	%	778.528.800	Dinas Ketenagakerjaan
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-		-		-	
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						-		-		-	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKP D Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	08	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	13.401.577.118	-	%	2.194.166.295	-	%	2.194.166.295	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPPKB	100	%	1.971.285	25,00	%	-	25,00	%	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan	100,00	%	9.379.456.745	100,00	%	1.701.329.847	100,00	%	1.701.329.847	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	%	292.267.000	100,00	%	96.169.114	100,00	%	96.169.114	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Urusan Administrasi Perangkat Daerah	100,00	%	1.543.340.821	6,70	%	124.905.554	6,70	%	124.905.554	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan di DPPKB	100,00	%	1.306.805.688	25,00	%	180.225.980	25,00	%	180.225.980	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKP D Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	08	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Urusan Administrasi Perangkat Daerah	100,00	%	877.735.579	33,40	%	91.535.800	33,40	%	91.535.800	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	08	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	48	%	1.077.924.194	0,02	%	338.539.550	0,02	%	338.539.550	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	08	02	2.01			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100,00	%	1.077.924.194	25,00	%	338.539.550	25,00	%	338.539.550	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	100	%	1.019.650.329	100,00	%	24.571.469	100,00	%	24.571.469	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	08	03	2.01			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Tercapainya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	100,00	%	370.819.448	12,50	%	6.052.000	12,50	%	6.052.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	08	03	2.02			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	tersedianya layanan UPTD PPA	100,00	%	648.830.881	100,00	%	18.519.469	100,00	%	18.519.469	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKP D Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKP D Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	08	04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga	60	%	235.985.911	-	%	3.675.000	-	%	3.675.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	08	04	2.02			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Puspaga, SDM, Jejaring antar lembaga Penyedia Layanan	100,00	%	125.369.115	100,00	%	3.675.000	100,00	%	3.675.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	08	04	2.03			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)	100,00	%	110.616.796	26,67	%	-	26,67	%	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	08	05				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan data gender dan anak terpadu	100	%	55.797.846	100,00	%	-	100,00	%	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	08	05	2.01			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Data Gender Anak Terpadu	100,00	%	55.797.846	25,00	%	-	25,00	%	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	08	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat Kota Layak Anak	Nindya	%	406.490.086		%	27.773.010	-	%	27.773.010	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	08	06	2.01			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang telah mendapatkan Pelembagaan PHA	50,00	%	406.490.086	30,00	%	27.773.010	30,00	%	27.773.010	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		100	%	1.160.388.156	100,00	%	150.316.263	100,00	%	150.316.263	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	08	07	2.01			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananyaPencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	%	215.299.578	-	%	-	-	%	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	08	07	2.02			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus yang masuk	-	%	329.393.015	-	%	102.014.663	-	%	102.014.663	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	08	07	2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananyaPenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang	-	%	615.695.563	1,01	%	48.301.600	1,01	%	48.301.600	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								-		-	
2	14	02				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	%	1.335.482.371	0,67	%	395.945.696	0,67	%	395.945.696	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.01			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	tercapainya pengendalian kuantitas penduduk	50,00	%	621.299.113	-	%	256.496.180	-	%	256.496.180	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terpetakannya Perkiraan Pengendalian Penduduk	100,00	%	714.183.258	-	%	139.449.516	-	%	139.449.516	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	14	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase peserta KB aktif	71	%	3.572.753.115	-	%	408.420.678	-	%	408.420.678	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Harganas	100,00	%	1.708.116.795	-	%	75.971.778	-	%	75.971.778	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	14	03	2.02			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	%	145.733.000	-	%	-	-	%	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan terdistribusinya Alat, Obat Kontrasepsi dan Pelayanan KB	100,00	%	1.009.062.479	-	%	284.988.900	-	%	284.988.900	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.04			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	%	709.840.841	-	%	47.460.000	-	%	47.460.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	14	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pemberdayaan kelompok kegiatan bangga kencana	77	%	2.155.468.932	-	%	215.074.100	-	%	215.074.100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	100,00	%	738.196.855	-	%	5.272.000	-	%	5.272.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.02			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya kelompok Tribina dan UPPKS yang dibina dan dibentuk	95,00	%	1.417.272.077	-	%	209.802.100	-	%	209.802.100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-		-		-	
2	09					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						-		-		-	
2	09	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (DKP3)	100	%	27.126.712.558,00	100,00	%	4.677.579.926	100,00	%	4.677.579.926	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	09	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100,00	%	24.501.095,00	-	%	6.996.000	-	%	6.996.000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	09	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100,00	%	20.535.353.097,00	100,00	%	3.619.187.859	100,00	%	3.619.187.859	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	09	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00	%	1.045.627.200,00	-	%	134.973.008	-	%	134.973.008	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	09	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100,00	%	1.564.738.063,00	-	%	289.063.898	-	%	289.063.898	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	09	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	100,00	%	161.398.000,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	09	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100,00	%	2.842.480.736,00	-	%	474.282.661	-	%	474.282.661	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	09	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100,00	%	952.614.367,00	-	%	153.076.500	-	%	153.076.500	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi) ; Ketersediaan Energi dan Protein	89	Nilai	1.878.398.904,00	-	Nilai	89.772.393	-	Nilai	89.772.393	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	09	03	2.01			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	5,00	Dokumen	139.935.218,00	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	09	03	2.02			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	100,00	Ton	289.838.264,00	-	Ton	22.889.777	-	Ton	22.889.777	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	09	03	2.04			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Tingkat Konsumsi Energi (%TKE) dan Protein (%TKP) terhadap target 2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari WNPG tahun 2012	2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari	Kkal/kap/hari dan gram/kap/hari	1.448.625.422,00	-	Kkal/kap/hari dan gram/kap/hari	66.882.616	-	Kkal/kap/hari dan gram/kap/hari	66.882.616	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	09	04				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita	100	%	136.199.621,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	09	04	2.01			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	100,00	%	136.199.621,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	09	05				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	100	%	135.438.163,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	09	05	2.01			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fungsi Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	100,00	%	135.438.163,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								-		-	
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								-		-	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	20.905	Ton	2.133.917.805,00	-	Ton	277.916.375	-	Ton	277.916.375	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	25	03	2.02			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi perikanan tangkap	#####	Ton	1.558.381.314,00	-	Ton	260.504.000	-	Ton	260.504.000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	25	03	2.03			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terpenuhinya Pelayanan Penyelenggaraan TPI	100,00	Ton	575.536.491,00	-	Ton	17.412.375	-	Ton	17.412.375	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	25	04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	3.300	Ton	2.221.675.629,00	-	Ton	54.058.951	-	Ton	54.058.951	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	25	04	2.02			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Operasional Balai Benih Ikan	12,00	Ton	1.337.485.783,00	3,00	Ton	54.058.951	3,00	Ton	54.058.951	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	25	04	2.04			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang disediakan	17,00	Ton	884.189.846,00	-	Ton	-	-	Ton	-	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	29	%	1.312.995.729,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	25	06	2.02			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro dan kecil sektor perikanan	37,00	%	560.731.676,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	25	06	2.03			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	37,00	%	752.264.053,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								-		-	
3	27	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana pertanian	80	%	1.771.730.163,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketahanan Pangan,

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
																	Perikanan dan Pertanian
3	27	02	2.01			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100,00	%	939.052.898,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	27	02	2.05			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok	20,00	%	391.593.558,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	27	02	2.06			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penambahan jumlah populasi ternak di kelompok	500,00	%	441.083.707,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	27	03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan	100	%	584.145.854,00	-	%	12.421.450	-	%	12.421.450	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	27	03	2.02			Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian dan peternakan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100,00	%	584.145.854,00	-	%	12.421.450	-	%	12.421.450	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	27	04				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan wilayah pengendalian kesehatan hewan	100	%	1.531.631.889,00	-	%	7.236.575	-	%	7.236.575	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	27	04	2.01			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penjaminan kesehatan hewan	3.000,00	%	818.187.804,00	425,00	%	7.236.575	425,00	%	7.236.575	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
3	27	04	2.02			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Olahan Produk Peternakan Pangan dan Non Pangan	100,00	%	636.581.929,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	27	04	2.03			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya operasional pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas, jumlah pelayanan kesehatan hewan	2.500,00	%	76.862.156,00	3,00	%	-	3,00	%	-	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	27	05				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan wilayah yang terkendali dari bencana pertanian	100	%	106.654.693,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	27	05	2.01			Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100,00	%	106.654.693,00	5,00	%	-	5,00	%	-	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	27	07				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian	100	%	1.408.495.288,00	-	%	125.055.319	-	%	125.055.319	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	27	07	2.01			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100,00	%	1.408.495.288,00	-	%	125.055.319	-	%	125.055.319	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-		-		-	
2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						-		-		-	
2	11	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	25.888.374.514,00	-	%	4.364.197.203	-	%	4.364.197.203	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi	30,00	%	5.906.850,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100,00	%	13.750.739.921,00	25,00	%	2.427.855.205	25,00	%	2.427.855.205	Dinas Lingkungan Hidup

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	11	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan admnistrasi kepegawaian	-	%	1.358.651.500,00	-	%	888.130.000	-	%	888.130.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan administrasi umum	100,00	%	1.525.110.650,00	-	%	48.941.264	-	%	48.941.264	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengelolaan administrasi umum	100,00	%	914.174.357,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang	100,00	%	1.288.313.894,00	25,00	%	177.508.898	25,00	%	177.508.898	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00	%	7.045.477.342,00	16,67	%	870.703.100	16,67	%	870.703.100	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	66	%	942.244.443,00	-	%	2.301.200	-	%	2.301.200	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Prosentase pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan	100,00	%	697.247.981,00	-	%	2.301.200	-	%	2.301.200	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.03			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan	100,00	%	244.996.462,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan Kehati	64	%	15.237.516.723,00	-	%	1.425.851.588	-	%	1.425.851.588	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	2.01			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Luas pengelolaan Kehati	51,56	%	15.237.516.723,00	-	%	1.425.851.588	-	%	1.425.851.588	Dinas Lingkungan Hidup

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	11	05				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	100	%	10.119.809,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	2.01			Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah laporan pengelolaan limbah B3 dari kantor dan oli bekas	5,00	%	10.119.809,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan atau PPLH	12	%	40.413.274,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya kegiatan pembinaan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan	100,00	%	40.413.274,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan kapasitas diklat dan penyuluhan	60	%	382.025.534,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	2.01			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis diklat dan penyuluhan	2,00	%	382.025.534,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan penghargaan lingkungan hidup	60	%	239.022.656,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Lingkungan Hidup

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	11	09	2.01			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan yang diberikan	20,00	%	239.022.656,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penanganan pengaduan	60	%	26.291.500,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Prosentase pengaduan yang ditangani	100,00	%	26.291.500,00	-	%	-	-	%	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	99	%	18.931.446.866,00	-	%	2.326.812.825	-	%	2.326.812.825	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01			Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tereduksi	#####	%	18.931.446.866,00	-	%	2.326.812.825	-	%	2.326.812.825	Dinas Lingkungan Hidup
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-		-		-	
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						-		-		-	
2	12	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	12.963.021.314,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		#N/A	%	179.785.495,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	
2	12	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	#N/A	%	8.831.403.944,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	12	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi Kepegawaian perangkat daerah	#N/A	%	154.718.000,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkta Daerah	#N/A	%	1.139.432.382,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	#N/A	%	432.512.093,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	#N/A	%	1.509.480.908,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	#N/A	%	715.688.492,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan KTP	100	%	802.567.415,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.01			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase terlaksananya kegiatan pendaftaran kependudukan	#N/A	%	802.567.415,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03				PROGRAM PENCATATAN SIPIl	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran ; Rasio bayi berakte kelahiran ; Rasio pasangan berakte nikah	100	%	1.528.016.226,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	2.01			Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	#N/A	%	1.528.016.226,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan inforamsi Adminduk	100	%	1.436.092.741,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.01			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database	#N/A	%	76.185.180,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
							Kependudukan										
2	12	04	2.03			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	#N/A	%	1.359.907.561,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase penyampaian data profil kependudukan	100	%	4.089.320,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	2.01			Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	#N/A	%	4.089.320,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-		-		-	
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						-		-		-	
2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	19.010.636.882,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja daerah yang tersusun	#N/A	%	30.358.235,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	#N/A	%	9.171.979.269,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	#N/A	%	2.455.351.584,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	#N/A	%	2.255.829.558,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	#N/A	%	613.623.925,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Perhubungan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	15	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	#N/A	%	3.061.287.952,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	#N/A	%	1.422.206.359,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Perhubungan
2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100	%	19.929.979.329,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.01			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	#N/A	%	670.225.035,00	#N/A	%	#N/A	#N/A		#N/A	
2	15	02	2.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	cakupan prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	#N/A	%	17.547.677.570,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.04			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	cakupan pengelolaan fasilitas parkir	#N/A	%	498.728.941,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	cakupan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor	#N/A	%	450.682.558,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	cakupan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	#N/A	%	753.575.225,00	#N/A	%	#N/A	#N/A	%	#N/A	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.09			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang/dan atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan angkutan umum		%	9.090.000,00		%	-	-	%	-	Dinas Perhubungan
2	15	03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	cakupan pengelolaan pelayaran	100	%	248.284.950,00	#N/A	%	-	#N/A	%	-	Dinas Perhubungan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	15	03	2.09			Penetapan Tarif Angkutan Penyebrangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pasa Lintas Penyebrangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Tarif Angkutan Penyebrangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	#N/A	%	29.050.000,00	#N/A	%	-	#N/A		-	
2	15	03	2.12			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	cakupan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	#N/A	%	219.234.950,00	#N/A	%	-	#N/A	%	-	Dinas Perhubungan
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-		-		-	
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						-		-		-	
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	16.209.433.670	25	%	5.117.741.668	25,0	%	5.117.741.668	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	73.643.340	1,00	%	31.962.074	1,00	%	31.962.074	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	11.517.439.546	3,00	%	3.421.650.743	3,00	%	3.421.650.743	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	134.081.945	-	%	-	-	%	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	1.269.105.450	3,00	%	312.238.479	3,00	%	312.238.479	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	16	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.128.600.000	12,00	-	973.500.000	12,00		973.500.000	
2	16	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	1.377.583.170	3,00	%	319.442.872	3,00	%	319.442.872	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	708.980.219	3,00	%	58.947.500	3,00	%	58.947.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	47,90	%	7.612.510.520	-	%	382.305.443	-	%	382.305.443	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai STRAKOM dan SOP yang telah ditetapkan		%	7.612.510.520	-	%	382.305.443	-	%	382.305.443	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	38,00	%	13.648.916.622	-	%	322.119.306	-	%	322.119.306	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ruang publik yang memiliki akses internet		%	13.648.916.622	-	%	322.119.306	-	%	322.119.306	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										-	
2	20	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100		177.505.368	25,00	-	44.319.600	25,00		44.319.600	
2	20	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			177.505.368	3,00	-	44.319.600	3,00		44.319.600	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	20	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	%	217.912.198	-	%	12.060.620	-	%	12.060.620	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	2.01			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi		%	217.912.198	-	%	12.060.620	-	%	12.060.620	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										-	
2	21	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	77,52	%	550.567.500	-	%	21.068.300	-	%	21.068.300	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	2.01			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota		%	550.567.500	-	%	21.068.300	-	%	21.068.300	Dinas Komunikasi dan Informatika
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-		-		-	
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						-		-		-	
2	17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100		37.383.906.211	-		8.225.490.753	-	-	8.225.490.753	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyampaian laporan kinerja OPD			504.647	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKP D Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKP D Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	17	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan			15.005.757.763	-		4.604.782.578	-	-	4.604.782.578	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Kepegawaian DKUKMP			3.697.486.937	-		67.800.000	-	-	67.800.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			3.911.450.918	-		254.237.408	-	-	254.237.408	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			75.630.000	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan DKUKMP			13.517.523.700	-		3.012.051.267	-	-	3.012.051.267	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DKUKMP			1.175.552.246	-		286.619.500	-	-	286.619.500	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	02				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan KSP/USP yang mempunyai izin usaha simpan pinjam	20		19.952.116	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	17	02	2.01			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota			9.965.838	-		-	-			
2	17	02	2.02			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Pembukaan kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan Dalam Daerah kabupaten/Kota			9.986.278	-		-	-			
2	17	03				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koprasi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian	9		23.550.741	-		-	-			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	03	2.01			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam			23.550.741	-		-	-			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	04				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	8		511.253.632	-		-	-			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	17	04	2.01			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dilakukan penilaian			511.253.632	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase kapasitas SDM koperasi	19		816.627.210	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	05	2.01			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentasi pengurus dan pengawas koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			816.627.210	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	06				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	8		2.664.000	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	06	2.01			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase KSP USP yang menyalurkan dana pinjaman			2.664.000	-		-	-	-	-	
2	17	07				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjalin kemitraan usaha	0		5.534.432.160	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	07	2.01			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase usaha mikro yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemilik kepentingan			5.534.432.160	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	1		3.757.890.499	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
2	17	08	2.01			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Prosentase capaian atas peningkatan asset dan omset pelaku usaha mikro			3.757.890.499	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										-	
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											-
3	30	02				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perusahaan yang terdaftar dan memenuhi regulasi perijinan	38		45.100.211			-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	02	2.07			Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Presentase SKA yang diterbitkan dengan jumlah permohonan SKA yang masuk			45.100.211	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase penataan sarana distribusi perdagangan	100		3.430.297.395	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	03	2.01			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola			2.283.199.195	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	03	2.02			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang mengikuti pembinaan			1.147.098.200	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
3	30	04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan informasi dan barang kebutuhan pokok/barang penting	100		503.001.856	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	04	2.01			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting			78.022.000	-		-	-		-	
3	30	04	2.02			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jenis komoditi bahan pokok dan barang penting yang dipantau stabilitasnya			424.979.856	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	05				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor migas dan non migas	1		566.893.260	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	05	2.01			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)			566.893.260	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	06				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penerapan standarisasi dan perlindungan konsumen	64		191.848.836	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
3	30	06	2.01			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan pengawasan alat UTTP			191.848.836	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								-		-	
3	30	07				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk dalam negeri yang difasilitasi dalam promosi dan pemasaran	100		611.830.816	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
3	30	07	2.01			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk yang difasilitasi pemasaran produk			611.830.816	-		-	-		-	
3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pesentase IKM yang menerapkan sistem managemen produk	1		5.571.159.446	-		1.276.787.100	-	-	1.276.787.100	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
3	31	02	2.01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri			5.571.159.446	-		1.276.787.100	-	-	1.276.787.100	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
3	31	03				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki izin usaha	2		119.778.581	-		4.503.600	-	-	4.503.600	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
3	31	03	2.01			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang memiliki izin Industri			119.778.581	-		4.503.600	-	-	4.503.600	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
3	31	04				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINAS	1		48.371.976	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
3	31	04	2.01			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri yang memanfaatkan SIINas			48.371.976	-		-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								-		-	
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								-		-	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								-		-	
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								-		-	
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	12.416.610.969	-	%	#REF!	-	%	#REF!	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.612.988	-	-	-	-		-	
2	18	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		Dokumen	8.774.521.255	3	Dokumen	1.650.009.113	3	Dokumen	1.650.009.113	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian		Dokumen	121.005.000		Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum		Dokumen	663.003.774		Dokumen	82.094.180	-	Dokumen	82.094.180	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang		%	2.367.933.952	5	%	114.020.417	4,82	%	114.020.417	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang		Unit	486.534.000	6	Unit	71.088.500	6	Unit	71.088.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKP D Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											I							
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	
																		Pintu
2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi	4.375	%	769.163.060	-	%	29.547.345	-	%	29.547.345		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	2.01			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumah dokumen rancangan peraturan perundang-undangan yang tersusun		Dokumen	77.979.535	-	Dokumen	4.602.400	-	Dokumen	4.602.400		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	2.02			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi yang dibuat		Dokumen	691.183.525		Dokumen	24.944.945	-	Dokumen	24.944.945		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor	2	Investor	1.907.916.273	-	Investor	59.675.800	-	Investor	59.675.800		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	2.01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		Dokumen	1.907.916.273	-	Dokumen	59.675.800	-	Dokumen	59.675.800		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM	89		506.451.304	-	-	39.169.074	-	-	39.169.074		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	18	04	2.01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan		izin	506.451.304		izin	39.169.074	-	izin	39.169.074	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Aturan Penanaman Modal	50	%	821.308.525	7	%	54.869.750	6,68	%	54.869.750	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		usaha	821.308.525		usaha	54.869.750	-	usaha	54.869.750	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data perizinan	100	%	882.140.021	-	%	379.166.362	-	%	379.166.362	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	2.01			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemenuhan permintaan data perizinan dan non perizinan		izin	882.140.021	140	izin	379.166.362	140,00	izin	379.166.362	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-		-		-	
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						-		-		-	
2	19	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan daerah	100	%	19.686.139.479	-	%	4.421.289.334	-	%	4.421.289.334	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	19	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen OPD		Dokumen	20.995.620	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan		%	9.220.969.024	0,30	%	2.775.060.320	0,30	%	2.775.060.320	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Perangkat Daerah yang Terpenuhi		Bulan	274.140.000	1,00	Bulan	24.457.232	1	Bulan	24.457.232	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Untuk Menunjang Pelayanan Perangkat Daerah		Bulan	4.249.358.304	3,00	Bulan	99.359.308	3	Bulan	99.359.308	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Sarana dan Prasarana OPD Untuk Menunjang Pelayanan Perangkat Daerah		Bulan	5.092.068.024	6,00	Bulan	1.111.448.474	6	Bulan	1.111.448.474	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang yang dipelihara Oleh Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Bulan	828.608.507	29,00	Bulan	410.964.000	29	Bulan	410.964.000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase pembinaan dan pengembangan kapasitas daya saing organisasi kepemudaan (OKP)	100	%	6.220.725.078	-	%	957.552.365	-	%	957.552.365	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	02	2.01			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemuda yang Berprestasi		Orang	5.472.583.768	-	Orang	952.837.865	-	Orang	952.837.865	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										-	
3	26	02				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase objek daya tarik wisata yang representatif	80	%	15.959.235.108	-	%	20.780.240	-	%	20.780.240	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	26	02	2.02			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan Strategis yang d kelola oleh kab / kota		ODTW	13.776.177.056	1,00	ODTW	-	1	ODTW	-	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	26	02	2.03			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi yang Dikelola Kabupaten / Kota		ODTW	2.183.058.052	50,00	ODTW	20.780.240	50	ODTW	20.780.240	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	26	03				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	388.660	orang	2.488.425.628	-	orang	87.596.692	-	orang	87.596.692	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	26	03	2.01			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan		Kunjungan	2.488.425.628	-	Kunjungan	87.596.692	-	Kunjungan	87.596.692	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	26	04				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan dan perlindungan pelaku ekonomi kreatif	1	%	60.725.000	-	%	-	-	%	-	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	26	04	2.02			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kratif		dokumen	60.725.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	26	05				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Sumber daya pariwisata yang di kembangkan	60	%	1.961.067.363	-	%	1.293.355.693	-	%	1.293.355.693	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	26	05	2.01			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang di tingkatkan kapasitasnya		Orang	1.961.067.363	132,00	Orang	1.293.355.693	132	Orang	1.293.355.693	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						-		-		-	
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						-		-		-	
2	23	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	15.027.175.052	-	%	3.873.649.433	-	%	3.873.649.433	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	gaji dan tunjangan ASN yang disediakan		%	9.159.867.396	-	%	2.651.072.745	-	%	2.651.072.745	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah paket pakaian dinas		%	565.342.000	-	%	310.119.000	-	%	310.119.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		%	1.799.083.227	-	%	213.827.968	-	%	213.827.968	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah paket mebel yang disediakan		%	65.532.605	-	%	-	-	%	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		%	2.901.215.312	-	%	634.138.120	-	%	634.138.120	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		%	536.134.512	-	%	64.491.600	-	%	64.491.600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pemustaka perpusda	42.350	Orang	7.585.421.298	-	Orang	194.203.137	-	Orang	194.203.137	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi		Layanan	2.418.648.025	-	Layanan	139.559.137	-	Layanan	139.559.137	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKP D Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKP D Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	23	02	2.02			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah duta baca tingkat daerah kab/kota yang dipilih dan didukung kegiatannya		Orang	5.166.773.273	-	Orang	54.644.000	-	Orang	54.644.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										-	
2	24	02				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik	100	%	1.940.787.361	-	%	66.614.000	-	%	66.614.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota		Berkas	366.546.328	-	Berkas	66.614.000	-	Berkas	66.614.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.02			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis		Arsip	371.679.530	-	Arsip	-	-	Arsip	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.03			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lumbago kearsipan daerah kabupaten/kota		Pengguna	1.202.561.503	-	Pengguna	-	-	Pengguna	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	50	%	101.536.339	-	%	-	-	%	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	2.01			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan		Berkas	17.478.673	-	Berkas	-	-	Berkas	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	2.03			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	jumlah arsip yang dilakukan pendataan penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat daerah		Daftar	69.610.000	-	Daftar	-	-	Daftar	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	24	03	2.04			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan		Arsip	14.447.666	-	Arsip	-	-	Arsip	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	04				PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Daftar arsip dan SOP arsip	20	%	41.548.939	-	%	-	-	%	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	04	2.01			Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	jumlah daftar Arsip hasil penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan Arsip yang bersifat tertutup		SOP	41.548.939	-	SOP	-	-	SOP	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						-		-		-	
4	01					SEKRETARIAT DAERAH						-		-		-	
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	87	%	93.046.886.175,00	-	%	27.057.014.163	-	%	27.057.014.163	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan	5,00	%	588.955.758	1,00	%	35.502.299	1,00	%	35.502.299	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	128,00	%	28.222.372.457	-	%	9.902.447.402	-	%	9.902.447.402	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	1.250,00	%	1.724.416.000	-	%	53.263.490	-	%	53.263.490	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	250,00	%	14.239.490.689,00	-	%	2.355.375.596	-	%	2.355.375.596	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	25,00	%	5.662.768.153	-	%	3.492.890.000	-	%	3.492.890.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40,00	%	28.268.829.866,00	-	%	8.617.095.691	-	%	8.617.095.691	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	300,00	%	4.834.630.437,00	-	%	1.025.410.940	-	%	1.025.410.940	Sekretariat Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
4	01	01	2.11			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH/WKDH yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	2,00	%	1.131.129.094,00	-	%	257.328.272	-	%	257.328.272	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	49,00	%	2.971.777.024,00	-	%	156.657.008	-	%	156.657.008	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13			Penataan Organisasi	Jumlah kegiatan penataan organisasi	13,00	%	906.329.119,00	-	%	79.682.436	-	%	79.682.436	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	885,00	%	4.496.187.578,00	-	%	1.081.361.029	-	%	1.081.361.029	Sekretariat Daerah
4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan ; Persentase implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100	%	53.863.115.981,00	-	%	8.775.555.523	-	%	8.775.555.523	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01			Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Tata Pemerintahan	6,00	%	2.276.734.493,00	-	%	178.986.778	-	%	178.986.778	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	25,00	%	48.133.312.367,00	-	%	8.168.427.902	-	%	8.168.427.902	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kebijakan prodak hukum yang diharmonisasi	50,00	%	2.621.988.001,00	-	%	204.095.845	-	%	204.095.845	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.04			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerja sama daerah	50,00	%	831.081.120,00	-	%	224.044.998	-	%	224.044.998	Sekretariat Daerah
4	01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomian ; Presentase implementasi kebijakan bidang pembangunan	100	%	4.200.278.714,00	-	%	1.479.854.034	-	%	1.479.854.034	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan dan dilaksanakan	3,00	%	456.459.313,00	-	%	119.084.791	-	%	119.084.791	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Implementasi Program Prioritas Pembangunan	16,00	%	540.436.250,00	-	%	9.675.400	-	%	9.675.400	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa	20,00	%	2.903.466.731,00	-	%	1.299.842.466	-	%	1.299.842.466	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Penyusunan dan Pemantauan Kebijakan dibidang SDA	15,00	%	299.916.420,00	-	%	51.251.377	-	%	51.251.377	Sekretariat Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						-		-		-	
4	02					SEKRETARIAT DPRD						-		-		-	
4	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	62.291.617.773	-	%	9.218.943.407	-	%	9.218.943.407	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu		%	223.835.665,00	-	%	-	-	%	-	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah		%	7.555.302.504	-	%	1.783.959.181	-	%	1.783.959.181	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian		%	2.711.974.500,00	-	%	410.555.262	-	%	410.555.262	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran		%	13.015.876.143	-	%	1.021.360.292	-	%	1.021.360.292	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah		%	1.803.677.800	-	%	-	-	%	-	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran		%	10.762.835.986	-	%	1.411.584.040	-	%	1.411.584.040	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		%	5.216.946.264	-	%	222.090.065	-	%	222.090.065	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tingkat pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		%	17.952.168.242	-	%	4.280.934.567	-	%	4.280.934.567	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16			Layanan Administrasi DPRD	Terpenuhinya layanan administrasi DPRD		%	3.049.000.669	-	%	88.460.000	-	%	88.460.000	Sekretariat DPRD
4	02	02				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan layanan tugas fungsi anggaran	100	%	29.917.398.780	-	%	2.474.259.600	-	%	2.474.259.600	Sekretariat DPRD

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
4	02	02	2.01			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD		%	1.491.908.980	-	%	-	-	%	-	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran yang dibahas		%	492.460.000	-	%	-	-	%	-	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terpenuhinya fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		%	195.680.000	-	%	-	-	%	-	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04			Peningkatan Kapasitas DPRD	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas DPRD		%	12.302.792.000	-	%	159.000.000	-	%	159.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terpenuhinya fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat		%	2.129.681.800	-	%	-	-	%	-	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.06			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD		%	3.330.000	-	%	-	-	%	-	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.07			Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terpenuhinya fasilitasi pembahasan kerja sama daerah		%	22.946.000	-	%	-	-	%	-	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08			Fasilitasi Tugas DPRD	Terpenuhinya tugas DPRD yang difasilitasi		%	13.278.600.000	-	%	2.315.259.600	-	%	2.315.259.600	Sekretariat DPRD
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						-		-		-	
5	01					PERENCANAAN						-		-		-	
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	14.336.964.143,00	25,00	%	2.747.743.273	25,00	%	2.747.743.273	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan adm keuangan daerah	179,00	%	9.619.297.118	100,00	%	1.745.465.518	100	%	1.745.465.518	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	1,00	%	478.204.000	-	%	-	-	%	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
5	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum yang disediakan	6,00	%	2.551.546.467,00	25,00	%	728.577.749	25	%	728.577.749	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	2,00	%	153.728.022,00	50,00	%	67.270.000	50	%	67.270.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	2,00	%	749.768.496,00	25,00	%	96.578.766	25	%	96.578.766	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	120,00	%	784.420.040,00	25,00	%	109.851.240	25	%	109.851.240	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	86	%	3.988.372.165,00	21,50	%	308.403.199	21,50	%	308.403.199	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	15,00	%	1.847.300.233,00	1,00	%	241.004.399	1	%	241.004.399	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.02			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi	#####	%	207.793.941,00	-	%	25.428.000	-	%	25.428.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5	01	02	2.03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen yang dievaluasi	25,00	%	1.933.277.991,00	-	%	41.970.800	-	%	41.970.800	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	94	%	3.177.865.028,00	-	%	85.944.862	-	%	85.944.862	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	2,00	%	353.585.670,00	-	%	27.453.462	-	%	27.453.462	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	2,00	%	867.220.725,00	-	%	22.821.400	-	%	22.821.400	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5	01	03	2.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	10,00	%	1.957.058.633,00	-	%	35.670.000	-	%	35.670.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5	05					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						-		-		-	
5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan ; Persentase keberlanjutan inovasi daerah	79	%	3.301.430.117,00	19,64	%	19.650.960	19,64		19.650.960	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5	05	02	2.01			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Bidang kelitbangan yang dilaksanakan	20,00	%	2.211.690.719,00	-	%	19.650.960	-		19.650.960	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5	05	02	2.03			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian dan Rekomendasi bidang ekonomi dan Pembangunan	-	%	386.543.000,00	-	%	-	-		-	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5	05	02	2.04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah	750,00	%	703.196.398,00	-	%	-	-		-	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						-		-		-	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
5	02					KEUANGAN						-		-		-	
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	17.301.161.493,00	8,30	%	2.022.645.054	8,30	%	2.022.645.054	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	25,00	%	8.673.654,00	-	%	-	-	%	-	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	84,00	%	13.296.627.607,00	8,33	%	1.357.407.849	8,33	%	1.357.407.849	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100,00	%	111.233.000,00	-	%	-	-	%	-	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan	100,00	%	789.645.845,00	-	%	165.764.415	-	%	165.764.415	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Mebelair	100,00	%	1.973.029,00	-	%	-	-	%	-	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan	100,00	%	2.356.176.858,00	8,33	%	439.990.890	8,33	%	439.990.890	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan	100,00	%	736.831.500,00	8,33	%	59.481.900	8,33	%	59.481.900	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi PAD terhadap APBD	15	%	3.130.210.850,00	-	%	63.471.787	-	%	63.471.787	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Bulan	100,00	%	3.130.210.850,00	-	%	63.471.787	-	%	63.471.787	Badan Pendapatan Daerah
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						-		-		-	
5	02					KEUANGAN						-		-		-	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (BPKAD)	100	%	21.748.485.281	25,00	%	3.663.483.023	25,00	%	3.663.483.023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai dengan tahapan dan waktu		%	22.917.390	25,00	%	-	25,00	%	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat Daerah		%	10.997.151.052	25,00	%	2.269.092.726	25,00	%	2.269.092.726	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat Daerah		%	3.177.950	25,00	%	-	25,00	%	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian		%	2.154.273.759	25,00	%	412.436.458	25,00	%	412.436.458	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran		%	3.794.448.086	25,00	%	366.972.046	25,00	%	366.972.046	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah		%	254.087.690	25,00	%	-	25,00	%	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran		%	3.069.505.304	25,00	%	521.722.693	25,00	%	521.722.693	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah dalam kondisi baik		%	1.452.924.050	25,00	%	93.259.100	25,00	%	93.259.100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat kesesuaian tahapan penyusunan APBD	100	%	14.963.829.938	1,00	%	882.359.559	1,00	%	882.359.559	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen Penyusunan APBD yang tepat Waktu		%	4.229.715.487	2,00	%	347.398.479	2	%	347.398.479	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
5	02	02	2.02			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Penatausahaan Keuangan		%	1.192.355.523	31,00	%	23.711.628	31	%	23.711.628	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan		%	2.042.780.536	31,00	%	199.560.053	31	%	199.560.053	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.04			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah		%	6.837.548.753	-	%	90.000.000	-	%	90.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.05			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah		%	661.429.639	-	%	221.689.399	-	%	221.689.399	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kesesuaian data rincian BMD dengan Aktiva Tetap di neraca Pemerintah Kota	100	%	2.810.922.069	100,00	%	203.436.651	100,00	%	203.436.651	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan BMD baik pada lingkup pengguna barang maupun pengelola barang		%	2.810.922.069	31,00	%	203.436.651	31	%	203.436.651	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						-		-		-	
5	03					KEPEGAWAIAN						-		-		-	
5	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	18.259.880.715	100	%	3.339.561.848	100,00	%	3.339.561.848	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan		Dokumen	23.714.000	100	Dokumen	-	100	Dokumen	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
5	03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan		Orang/Bulan	11.115.278.113	100	Orang/Bulan	2.165.168.446	100	Orang/Bulan	2.165.168.446	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian		Orang	592.501.920	100	Orang	189.997.359	100	Orang	189.997.359	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum		Layanan	1.273.050.200	100	Layanan	208.998.179	100	Layanan	208.998.179	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah			4.140.815.691	100	-	671.380.000	100,00		671.380.000	
5	03	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Jenis	389.616.689	100	Jenis	46.535.964	100	Jenis	46.535.964	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara		Jenis	724.904.102	1	Jenis	57.481.900	1	Jenis	57.481.900	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Dimensi Disiplin ; Indeks Dimensi Kinerja ; Indeks Dimensi Kualifikasi	15	%	3.295.822.424	-	%	273.417.019	-	%	273.417.019	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN		Layanan	575.013.502	3	Layanan	20.918.639	3	Layanan	20.918.639	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02			Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah layanan promosi dan mutasi ASN		Layanan	994.853.761	3	Layanan	202.819.880	3	Layanan	202.819.880	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKP D Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
5	03	02	2.03			Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi		Orang	708.894.400	2	Orang	49.678.500	2	Orang	49.678.500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya		Dokumen	1.017.060.761	5	Dokumen	-	5,00	Dokumen	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								-		-	
5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kompetensi minimal 20 JP per tahun	37	%	5.247.652.051	20	%	1.236.010.076	19,97	%	1.236.010.076	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	2.01			Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis		Orang	3.672.604.051	10	Orang	1.009.635.376	10	Orang	1.009.635.376	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	2.02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah pegawai yang mengikuti sertifikasi dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		Orang	1.575.048.000	1	Orang	226.374.700	1	Orang	226.374.700	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						-		-		-	
6	01					INSPEKTORAT DAERAH						-		-		-	
6	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	19.437.844.355	25,00	%	4.440.865.267	25,00		4.440.865.267	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN		%	12.523.336.648	3,00	%	2.689.430.278	3,00		2.689.430.278	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		%	3.253.197.362	58,00	%	649.900.707	58,00		649.900.707	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan Administrasi umum yang dilaksanakan		%	1.524.437.269	3,00	%	229.334.212	3,00		229.334.212	Inspektorat Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
6	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang penunjang pengawasan		%	1.390.433.168	25,00	%	728.015.000	25,00		728.015.000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang kegiatan		%	227.035.908	4,00	%	30.717.400	4,00		30.717.400	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara dengan baik		%	519.404.000	20,00	%	113.467.670	20,00		113.467.670	Inspektorat Daerah
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	cakupan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbasis risiko	75	%	1.765.526.200	25,00	%	150.820.835	25,00		150.820.835	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah penyelesaian pembinaan dan pengawasan internal perangkat daerah		Laporan	1.647.808.200	10,00	Laporan	146.808.835	10		146.808.835	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.02			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kasus yang telah selesai ditindaklanjuti		Kasus	117.718.000	3,00	Kasus	4.012.000	3		4.012.000	Inspektorat Daerah
6	01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kebijakan pembinaan dan pengawasan yang telah ditetapkan ; Persentase Perangkat daerah yang telah dilakukan pendampingan	100	%	1.123.803.558	25,00	%	22.026.460	25,00		22.026.460	Inspektorat Daerah
6	01	03	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan pembinaan dan pengawasan		Kebijakan	52.980.816	1,00	Kebijakan	-	1		-	Inspektorat Daerah
6	01	03	2.02			Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan pendampingan dan asistensi pembinaan dan pengawasan		Kegiatan	1.070.822.742	7,00	Kegiatan	22.026.460	7		22.026.460	Inspektorat Daerah
7						UNSUR KEWILAYAHAN						-		-		-	
7	01					KECAMATAN						-		-		-	
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	47.681.518.270	32,69	%	-	32,69	%	-	Kecamatan Bontang Utara

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administarsi Keuangan		Orang	23.933.217.430	227,00	Orang	7.824.813.756	227,00	Orang	7.824.813.756	Kecamatan Bontang Utara
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaiaan		Orang	2.638.150.531	19,80	Orang	-	19,80	Orang	-	Kecamatan Bontang Utara
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum		Layanan	8.535.350.623	40,88	Layanan	-	41	Layanan	-	Kecamatan Bontang Utara
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	2.190.939.635	18,57	%	-	18,57	%	-	Kecamatan Bontang Utara
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis	8.163.323.447	26,59	Jenis	-	27	Jenis	-	Kecamatan Bontang Utara
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara		Jenis	2.220.536.604	7,15	Jenis	-	7	Jenis	-	Kecamatan Bontang Utara
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan ; Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	97	%	3.718.113.091	60,52	%	-	60,52	%	-	Kecamatan Bontang Utara
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Subjek Koordinasi		Koordinasi	667.854.118	5,97	Koordinasi	-	6	Koordinasi	-	Kecamatan Bontang Utara
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan		Urusan	2.944.221.973	74,07	Urusan	-	74	Urusan	-	Kecamatan Bontang Utara
7	01	02	2.03			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi		kali	106.037.000	27,82	kali	-	28	kali	-	Kecamatan Bontang Utara

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPDPada Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPDPada Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100	%	48.470.033.839	22,77	%	-	22,77	%	-	Kecamatan Bontang Utara
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan		Unsur	25.885.239.379	4,84	Unsur	-	5	Unsur	-	Kecamatan Bontang Utara
7	01	03	2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga	21.948.632.130	22,77	Lembaga	-	23	Lembaga	-	Kecamatan Bontang Utara
7	01	03	2.06			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga		Keluarga	636.162.330	-	Keluarga	-	-	Keluarga	-	Kecamatan Bontang Utara
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	100	%	#N/A	49,45	%	-	49,45	%	-	Kecamatan Bontang Utara
7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lembaga yang diberdayakan		Lembaga	#N/A	2,57	Lembaga	-	3	Lembaga	-	Kecamatan Bontang Utara
7	01	04	2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan		Kegiatan	150.000.000	49,45	Kegiatan	-	49	Kegiatan	-	Kecamatan Bontang Utara
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara)	100	%	996.752.613	-	%	-	-	%	-	Kecamatan Bontang Utara
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum		Kegiatan	996.752.613	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	Kecamatan Bontang Utara
7						UNSUR KEWILAYAHAN						-		-		-	
7	01					KECAMATAN						-		-		-	
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	46.060.567.003	-	%	11.859.368.115	-	%	11.859.368.115	Kecamatan Bontang Selatan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan		Orang	22.509.956.985	-	Orang	7.688.373.188	-	Orang	7.688.373.188	Kecamatan Bontang Selatan
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian		Orang	2.009.072.239	-	Orang	296.450.000	-	Orang	296.450.000	Kecamatan Bontang Selatan
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum		Layanan	9.618.295.382	-	Layanan	1.981.558.873	-	Layanan	1.981.558.873	Kecamatan Bontang Selatan
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah		Jenis	2.645.020.700	-	Jenis	-	-	Jenis	-	Kecamatan Bontang Selatan
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis	7.053.001.634	-	Jenis	1.808.175.214	-	Jenis	1.808.175.214	Kecamatan Bontang Selatan
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara		Jenis	2.225.220.063	-	Jenis	84.810.840	-	Jenis	84.810.840	Kecamatan Bontang Selatan
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang selatan)	97	%	9.142.581.104	-	%	2.214.004.138	-	%	2.214.004.138	Kecamatan Bontang Selatan
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Subjek Koordinasi		Subjek	1.329.748.594	-	Subjek	352.132.000	-	Subjek	352.132.000	Kecamatan Bontang Selatan
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Urusan	7.797.958.510	-	Urusan	1.861.872.138	-	Urusan	1.861.872.138	Kecamatan Bontang Selatan
7	01	02	2.03			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah objek koordinasi		Objek	14.874.000	-	Objek	-	-	Objek	-	Kecamatan Bontang Selatan
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	%	#N/A	-	%	2.210.188.159	-	%	2.210.188.159	Kecamatan Bontang Selatan
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kompenen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan		Unsur	24.428.937.392	-	Unsur	830.422.483	-	Unsur	830.422.483	Kecamatan Bontang Selatan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
7	01	03	2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga	#N/A	-	Lembaga	1.351.867.601	-	Lembaga	1.351.867.601	Kecamatan Bontang Selatan
7	01	03	2.06			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan	764.813.155	-	Kelurahan	27.898.075	-	Kelurahan	27.898.075	Kecamatan Bontang Selatan
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang selatan)	100	%	203.769.120	-	%	34.000.000	-	%	34.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilakukan		Kegiatan	144.000.000	-	Kegiatan	34.000.000	-	Kegiatan	34.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
7	01	04	2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan		Perda/Perkada	59.769.120	-	Perda/Perkada	-	-	Perda/Perkada	-	Kecamatan Bontang Selatan
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100	%	2.120.002.500	-	%	236.208.800	-	%	236.208.800	Kecamatan Bontang Selatan
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Kegiatan	2.120.002.500	-	Kegiatan	236.208.800	-	Kegiatan	236.208.800	Kecamatan Bontang Selatan
7						UNSUR KEWILAYAHAN						-		-		-	
7	01					KECAMATAN						-		-		-	
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	24.877.198.586	-	%	6.676.947.059	-	%	6.676.947.059	Kecamatan Bontang Barat
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kegiatan	13.471.027.918	1,00	Kegiatan	4.196.333.859	1	Kegiatan	4.196.333.859	Kecamatan Bontang Barat
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kegiatan	1.711.692.000	10,00	Kegiatan	105.365.479	10	Kegiatan	105.365.479	Kecamatan Bontang Barat

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kegiatan	2.933.084.413	10,00	Kegiatan	760.216.864	10	Kegiatan	760.216.864	Kecamatan Bontang Barat
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kegiatan	78.803.924	10,00	Kegiatan	52.000.000	10	Kegiatan	52.000.000	Kecamatan Bontang Barat
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan	5.483.899.974	10,00	Kegiatan	1.433.737.757	10	Kegiatan	1.433.737.757	Kecamatan Bontang Barat
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan	1.198.690.357	10,00	Kegiatan	129.293.100	10	Kegiatan	129.293.100	Kecamatan Bontang Barat
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan ; Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	97	%	2.766.189.386	10,00	%	1.424.844.928	10,00	%	1.424.844.928	Kecamatan Bontang Barat
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Kegiatan	661.523.018	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	Kecamatan Bontang Barat
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintah Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Kegiatan	1.991.561.368	10,00	Kegiatan	1.391.431.544	10	Kegiatan	1.391.431.544	Kecamatan Bontang Barat
7	01	02	2.03			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Kegiatan	113.105.000	10,00	Kegiatan	33.413.384	10	Kegiatan	33.413.384	Kecamatan Bontang Barat
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100	%	18.655.936.420	10,00	%	1.134.563.858	10,00	%	1.134.563.858	Kecamatan Bontang Barat
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kegiatan	7.571.269.791	-	Kegiatan	177.782.480	-	Kegiatan	177.782.480	Kecamatan Bontang Barat

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
7	01	03	2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Kegiatan	11.058.682.231	10,00	Kegiatan	956.781.378	10	Kegiatan	956.781.378	Kecamatan Bontang Barat
7	01	03	2.06			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Kegiatan	25.984.398	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	Kecamatan Bontang Barat
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang barat)	100	%	356.146.848	10,00	%	24.830.000	10,00	%	24.830.000	Kecamatan Bontang Barat
7	01	04	2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Kegiatan	356.146.848	10,00	Kegiatan	24.830.000	10	Kegiatan	24.830.000	Kecamatan Bontang Barat
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang barat)	100	%	200.522.938	-	%	24.682.500	-	%	24.682.500	Kecamatan Bontang Barat
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum		Kegiatan	200.522.938	-	Kegiatan	24.682.500	-	Kegiatan	24.682.500	Kecamatan Bontang Barat
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						-		-		-	
8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						-		-		-	
8	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	9.545.829.479	-	%	2.215.828.986	-	%	2.215.828.986	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		laporan	32.493.526	-	laporan	-	-	laporan	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah tenaga adm keuangan PD yang terbayarkan		Orang/Bulan	6.580.302.091	23,00	Orang/Bulan	1.638.694.427	23	Orang/Bulan	1.638.694.427	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
8	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pegawai yang mendapat layanan adm. Kepegawaian Daerah		Orang	90.000.000	-	Orang	9.000.000	-	Orang	9.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis adm.umum yang disediakan		Jenis	1.360.242.341	-	Jenis	228.443.359	-	Jenis	228.443.359	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemd		Unit	280.289.699	-	Unit	123.552.000	-	Unit	123.552.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		Jenis	899.214.822	-	Jenis	216.139.200	-	Jenis	216.139.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara		Unit	303.287.000	-	Unit	-	-	Unit	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	presentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	63	%	8.727.026.151	-	%	3.142.806.260	-	%	3.142.806.260	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi		Orang	8.727.026.151	-	Orang	3.142.806.260	-	Orang	3.142.806.260	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	72	%	14.377.688.016	-	%	4.895.957.000	-	%	4.895.957.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
8	01	03	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Eriak Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepal Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Orang	14.377.688.016	4,00	Orang	4.895.957.000	4	Orang	4.895.957.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase terhadap Pembinaan LSM, Ormas dan OKP	86	%	4.895.837.383	-	%	921.761.840	-	%	921.761.840	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing didaerah.		laporan	4.895.837.383	-	laporan	921.761.840	-	laporan	921.761.840	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	93	%	561.013.662	-	%	-	-	%	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I						
								K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
8	01	05	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi Pencegahan dan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat kepercayaan di daerah.		Orang	561.013.662	-	Orang	-	-	Orang	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Peresentase penanganan konflik	100	%	2.428.634.926	-	%	44.652.041	-	%	44.652.041	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kebijakan	2.428.634.926	-	Kebijakan	44.652.041	-	Kebijakan	44.652.041	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2.2 Evaluasi pelaksanaan program RPJMD Kota Bontang sampai dengan tahun 2023

Dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD agar lebih efektif dan efisien maka perlu ditetapkan sejumlah strategi dan sasaran yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama lima tahun yang akan datang. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan pembangunan tahun 2023 dalam periode pembangunan jangka menengah 2021-2026 merupakan tahun kedua pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026. Sebagai perencanaan pembangunan tahun pertama RPJMD tahun 2021-2026, RKPD Kota Bontang tahun 2022 akan ditetapkan mendahului penetapan Peraturan Daerah RPJMD Kota Bontang periode tahun 2021-2026. Namun demikian sesuai dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dijelaskan bahwa disamping mengacu pada RPJPD, mengacu juga pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka merumuskan prioritas pembangunan daerah tahun 2023, telah dilakukan penyesuaian dengan arah kebijakan dan program prioritas kepala daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rancangan Awal RPJMD tahun 2021-2026.

Terdapat 8 (delapan) sasaran daerah yang tertuang di dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026 yang dijabarkan ke dalam program-program utama sasaran daerah. Keberhasilan sasaran daerah tidak terlepas dari keberhasilan program-program yang mendukung ketercapaian sasaran daerah tersebut. Dengan demikian pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026 tergantung dari pencapaian program-program daerah tersebut. Berikut penjelasan indikator tujuan dan sasaran daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2023:

1. Tujuan 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Harmoni, Bersih, Adil, Amanah Dan Bertanggung Jawab

Pada tujuan 1 (satu) terdapat 1 (satu) indikator yakni Indeks Kepemimpinan Daerah yang belum tersedia nilai hasil pengukurannya. Hal ini terkait dengan belum adanya hasil pengukuran resmi yang telah ditetapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, oleh karena itu pencapaian indikator ini hingga tahun 2023 belum dapat di ukur. Tujuan 1 (satu) ini memiliki 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator sasaran yaitu:

1) Sasaran 1: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif

Sasaran strategis ini merupakan bagian dari upaya mendukung tercapainya MISI PERTAMA sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021-2026 yaitu Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan. Adapun capaian kinerja Pemerintah Kota Bontang ditahun 2023 pada sasaran satu sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 101 Capaian Indikator Sasaran 1 Tahun 2023

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian
Misi 1: Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi, kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan										
T1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, amanah dan bertanggung jawab	Indeks Kepemimpinan Daerah					79	N/A	0	Perlu Upaya Keras
		S.1	Meningknya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks reformasi birokrasi	BB(68,41)	BB (71,21)	100%	Tercapai		
				Nilai LPPD	Tinggi (3,90)	Sedang (3,379)	86,64%	Akan Tercapai		
				Opini BPK	WTP	WTP	100%	Tercapai		

Sumber : Bapperida Kota Bontang, 2024 (hasil analisa)

Penjelasan terhadap capaian indikator pada Sasaran I adalah sebagai berikut:

a) Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2023 berhasil memperoleh nilai 71,21 (BB) yang terdiri dari nilai RB General 62,98 dan nilai RB Tematik 8,23. Dari hasil evaluasi bahwa kedua komponen tersebut masih memerlukan peningkatan dan langkah tindak lanjut hasil dari rekomendasi yang telah diberikan. Namun secara keseluruhan komponen menghasilkan IRB dengan kualifikasi BB telah melampaui targaet yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang meraih indeks 65,38. Jadi jika dibandingkan dengan target pada RPJMD 2021-2026, capaian IRB ditahun 2023 telah berada diatas target, yaitu sebesar 2,8 poin. Bahkan capaian ini telah melebihi target ditahun 2024.

b. Nilai LPPD

Nilai LPPD merupakan hasil evaluasi LPPD yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:100.2.1.7-6646 tahun 2023 tentang hasil EPPD secara nasional tahun 2022, maka Pemerintah Kota Bontang menempati urutan ke-21 dari 93 pemerintah kota yang dinilai. Capaian LPPD Pemerintah Kota Bontang jika dibandingkan dengan pemerintah Kabupaten/Kota serta capaian LPPD Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan capaian tertinggi ke 2 (dua) dari 10 Kabupaten/Kota yang ada. Namun masih berada dibawah capaian Provinsi Kalimantan Timur (3,5178) dengan gap yang cukup kecil sekitar 0,14 poin.

c. Opini BPK

Berdasarkan LHP BPK RI Nomor:1717/LHP/XIX.SMD/5/2023 tanggal 4 Mei 2023 bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bontang tahun anggaran 2022 mendapatkan opini WTP. Perolehan ini adalah ke 9 (sembilan) kali Opini WTP diterima oleh Pemerintah Kota Bontang

2) Sasaran 2: Meningkatkan kondusifitas wilayah

Kondusifitas wilayah merupakan sasaran kedua dalam upaya mewujudkan misi Kota Bontang yang HARMONI melalaui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan. Sasaran ini memiliki dua indikator yaitu jumlah konflik dan persentase penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum. Adapun capaian dua indikator tersebut ditahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 102 Capaian Indikator Sasaran 2 Tahun 2023

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian
Misi 1: Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi, kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan									
T1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, amanah dan bertanggung jawab	Indeks Kepemimpinan Daerah				79	N/A	0	Perlu Upaya Keras
					Jumlah konflik	8	7	100%	Tercapai
			S.2	Meningkatnya Kondusifitas wilayah	Persetase penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum	100%	100%	100%	Tercapai

Sumber : Bapperida Kota Bontang, 2024 (hasil analisa)

Penjelasan terhadap capaian indikator pada Sasaran 2 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Konflik
Tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) konflik yang terjadi dari 8 (delapan) target jumlah konflik yang akan terjadi. Sehingga capaian atas indikator ini adalah sebesar 100%. Walau capaian telah mencapai 100% tetap perlu upaya deteksi dini dan pencegahan dini terhadap potensi keamanan dan ketertiban umum pada lapisan masyarakat. Untuk perlu adanya upaya meningkatkan efektifitas koordinasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah, instansi vertikal dan unsur terkait, serta mengoptimalkan kinerja dan peran forum-forum kemitraan sebagai upaya preventif dalam mengatasi timbulnya potensi konflik di masyarakat.
- b. Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum
Pemerintah Kota Bontang menetapkan indikator persentase penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum sebagai salah satu alat ukur keberhasilan dalam menjaga kondusifitas wilayah. Pada tahun 2023 capaian indikator ini telah terealisasi sebesar 100%. Keberhasila terhadap capaian dari indikator ini dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain adanya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersamaan dan keharmonisan kehidupan sosial bermasyarakat, pelaksanaan monitoring dan patroli wilayah secara rutin di15 kelurahan serta adanya patroli gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, Polres, Dishub serta Perangkat Daerah lain yang terkait.

2. Tujuan 2: Mewujudkan Pembangunan Perkotaan Yang Layak Huni, Cerdas Dan Berwawasan Lingkungan

Pada tujuan 2 (dua) ini merupakan upaya pencapaian misi Kota Bontang yang kedua yaitu Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas, dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya dan infrastruk serta pelestarian lingkungan hidup. Tujuan 2 (dua) ini terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

- 1) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Yang Maju Tangguh
Ketercapaian sasaran ini diukur menggunakan indikator Indeks Kualitas Perkotaan. Pada tahun 2023 indeks ini belum mencapai target yang telah ditetapkan, dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 103 Capaian Indikator Sasaran 3 Tahun 2023

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian
Misi 2: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup										
T2	Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)					66,02	65,49	99,19%	Akan Tercapai
			S.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh	Indeks kualitas perkotaan	66,16	64,16	96,98%	Akan Tercapai	

Sumber : Bapperida Kota Bontang, 2024 (hasil analisa)

Indikator Sasaran 3 adalah Indeks Kualitas Perkotaan. Indeks Kualitas Perkotaan diukur melalui 2 komponen, yaitu Indeks kualitas infrastruktur yang diukur melalui melalui 10 parameter dan Indeks Ketahanan Daerah yang diukur melalui 71 indikator kapasitas daerah dalam 7 prioritas penanggulangan bencana yang disusun oleh BNPB. Hasil pengukuran kedua indeks ini, pada tahun 2023 diperoleh indeks kualitas perkotaan dengan nilai 64,16 yang merupakan rata-rata dari indeks infrastruktur dan indeks ketahanan daerah. Salah satu penyebab belum maksimalnya capaian ini antara lain karena belum optimalnya pendataan rumah yang terlayani air minum, belum optimalnya pemanfaatan tempat pengolahan sampah, kompleksnya permasalahan banjir di hulu maupun hilir yang diindikasikan dengan masih terjadinya banjir lokal, banjir rob dan banjir kiriman.

2) **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang Yang Lestari**

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam satu wilayah. IKLH Kota Bontang dihitung dengan mengabungkan nilai komposit tersebut dan mendapatkan nilai 66,81 dari target 65,87 dengan capaian 100%. Capaian IKLH dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 104 Capaian Indikator Sasaran 4 Tahun 2023

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian
Misi 2: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup										
T2	Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)					66,02	65,49	99,19%	Akan Tercapai
			S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,87	66,81	100%	Tercapai	

3. **Tujuan 3: Mewujudkan Inklusivitas Dan Keseimbangan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Ekonomi Lokal Dan Keragaman Sosial Budaya Masyarakat**

Pada indikator tujuan 3 adalah indeks gini. Gini ratio Kota Bontang Tahun 2023 menunjukkan angka sebesar 0,299 berada dibawah Kabupaten Kutai Barat sebesar 0,277. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh BPS, perekonomian Kota Bontang tahun 2023 berdasarkan PDRB sebesar Rp.68,11 triliun, selebihnya Rp.44,10

triliun adalah kontribusi dari sektor non migas. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang pada tahun 2023 mencapai 4,16% dan sebesar 4,41% adalah laju pertumbuhan ekonomi non migas Kota Bontang. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian di tahun 2023 untuk indikator ini masih di bawah target yang ditetapkan. Realisasi sebesar 5,36% dengan tingkat capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi non migas sebesar 82%.

Tabel 2. 105 Capaian Indikator Sasaran 5 Tahun 2023

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian
Misi 2: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup										
T3	Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat	Indeks gini					0,3	0,299	100%	Tercapai
			S.5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Non Migas	Laju Pertumbuhan ekonomi ekonomi Non migas	5,36	4,41	82%	Akan Tercapai	

4. Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Sejahtera

Pada tujuan 4 (empat) terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Bontang secara umum menunjukkan peningkatan dalam priode 6 tahun terakhir, hal ini dapat dilihat pada nilai IPM tahun 2019 sebesar 79,86 meningkat menjadi 81,63 pada tahun 2023. Capaian IPM tahun 2023 berada diatas IPM Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 78,20. Nilai IPM Kota Bontang merupakan tertinggi ketiga di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kota Samarinda sebesar 82,61 dan Kota Balikpapan sebesar 82,03. Pada tujuan 3 (tiga) memiliki 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator sasaran yaitu:

1) Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Berkualitas

Peningkatan mutu layanan bidang pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang penting dalam rangka peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada sasaran ini terdiri dari 3 indikator sasaran yaitu Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Usia Harapan Hidup. Indikator ini meruapakan alat ukur dibidang pendidikan dan dibidang kesehatan.

Tabel 2. 106 Capaian Indikator Sasaran 5 Tahun 2023

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian
Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia										
T4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					81	81,56	100%	Tercapai
			S.6	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13,42	13,43	100%	Tercapai	
					Rata-rata lama sekolah	10,98	10,92	99,45%	Akan Tercapai	
					Usia harapan hidup	74,51	74,81	100%	Tercapai	

Sumber : Bapperida Kota Bontang, 2024 (hasil analisa)

Penjelasan terhadap capaian indikator pada Sasaran 6 adalah sebagai berikut:

- a. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik bahwa angka HLS Kota Bontang pada tahun 2023 adalah 13,43. Angka tersebut menggambarkan bahwa anak-anak Kota Bontang memiliki harapan menempuh pendidikan selama 13 tahun atau hingga diploma I. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran tahun 2023 untuk Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) telah memenuhi target. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
- b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Berdasarkan data dari BPS bahwa RLS Kota Bontang tahun 2023 mencapai angka 10,92. Angka tersebut menggambarkan bahwa rata-rata penduduk Kota Bontang yang berusia 25 tahun keatas di tahun 2023 telah menyelesaikan pendidikan formalnya selama 10,92 tahun atau setara dengan kelas 11 sekolah menengah. Capaian sasaran ini masih dibawah target yaitu sebesar 10,98 dengan tingkat capaian indikator sebesar 99,45% atau kurang 0,06%. Informasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini
- c. Usia Harapan Hidup
Merujuk pada data yang dipublikasikan oleh BPS bahwa UHH Kota Bontang pada tahun 2023 adalah sebesar 74,81. Angka tersebut menggambarkan bahwa rata-rata bayi yang lahir dan hidup di Kota Bontang pada tahun 2023 usia harapan hidupnya adalah mencapai 74,81 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa target UHH telah melampaui target, dari target yang ditetapkan sebesar 74,73, dengan tingkat capaian sebesar 100%. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

2) **Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing**

Pada sasaran ini terdapat satu indikator sasaran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Menurut hasil data yang dipublikasikan, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bontang pada tahun 2023 adalah sebesar 7,74. Angka tersebut menggambarkan bahwa 7,74 persen angkatan kerja atau penduduk dengan usia kerja yang tidak sekolah dan mengurus rumah tangga di Kota Bontang belum mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 2023 ini untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka telah melampaui target yang ditetapkan, dari target sebesar 8,70 dengan tingkat capain sebesar 100%, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 107 Capaian Indikator Sasaran 9 Tahun 2023

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian
Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia											
T4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					81	81,56	100%	Tercapai	
			S.7	Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	8,70	7,74	100%	Tercapai		

3) **Meningkatnya pemberdayaan sosial**

Dari tahun 2022 sampai tahun 2023 tingkat kemiskinan Kota Bontang relatif mengalami penurunan, sebesar 0,43 persen poin menjadi 4,11. Namun hal ini belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 4,03. Namun penurunan ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk di Kota Bontang yang hidup di atas garis

kemiskinan. Penduduk yang sebelumnya di bawah kemiskinan yang kemudian karena ekonominya membaik maka terangkat ke atas garis kemiskinan pada periode ini.

Tabel 2. 108 Capaian Indikator Sasaran 9 Tahun 2023

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Status Capaian
Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia									
T4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				81	81,56	100%	Tercapai
			S.8	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Angka kemiskinan	4,03	4,11	99,05%	Akan Tercapai

2.2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan gambaran umum dan capaian kinerja Kota Bontang, terdapat beberapa permasalahan pembangunan, yaitu :

1. Pembangunan ekonomi inklusif belum terlaksana dengan baik. perlu ditingkatkan dalam rangka memperbaiki ketimpangan yang terjadi di Kota Bontang, dengan permasalahan yang ditemukan sebagai berikut:
 - a. sektor pariwisata belum berperan dalam meningkatkan sektor lain, seperti perhotelan, transportasi, perdagangan dan lain-lain;
 - b. belum maksimalnya fasilitasi pengembangan ekraf;
 - c. kemudahan perizinan dan berusaha belum terlaksana dengan baik;
 - d. masih rendahnya koperasi sehat disebabkan oleh SDM pengelola koperasi masih terbatas
 - e. belum optimalnya fasilitasi pemenuhan rekomendasi untuk izin usaha koperasi.
 - f. belum optimalnya fasilitasi usaha mikro menjadi wirausaha baru yang disebabkan oleh belum adanya pemetaan data potensi dan pengembangann usaha mikro;
 - g. belum optimalnya pembinaan dan pengembangan UMKM dari produksi hingga pemasaran termasuk digitalisasi produk, pangamsan dan promosi produk.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan karena:
 - a. tingginya angka stunting di Kota Bontang, jauh di atas angka stunting Nasional dan Provinsi
 - b. adanya kebijakan penurunan kemiskinan ekstrim dari Pemerintah Pusat menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan di Kota Bontang.
 - c. tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka, yang disebabkan oleh rendahnya kompetensi tenaga kerja lokal, sehingga tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar yang memiliki kompetensi lebih dan telah bersertifikasi.
3. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang masih kurang optimal, yang ditandai dengan Nilai Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang selama beberapa tahun ini cenderung mengalami stagnansi.
4. Kurang optimalnya penataan infrastruktur dan lingkungan yang disebabkan oleh beberapa permasalahan, yaitu:
 - a. belum optimalnya kualitas dan penataan infrastruktur kota meliputi layanan air minum, air limbah domestik, jalan dan transportasi perkotaan serta bangunan gedung pemerintah;
 - b. belum optimalnya penataan kawasan kumuh; dan

- c. belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hid

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah Kota Bontang Tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan pembiayaan pembangunan yang direncanakan pada RKPD Kota Bontang tahun 2025. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang arah kebijakan perekonomian Kota Bontang untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi Kota Bontang menjadi **“Kota Bontang yang Hebat dan Beradab”** yang kemudian dirumuskan dalam prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang akan datang.

Sedangkan kerangka keuangan daerah akan memberikan gambaran mengenai kerangka pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah untuk melaksanakan prioritas program dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional dalam RKP 2025

RKP Tahun 2025 merupakan fondasi awal guna mewujudkan agenda-agenda transformasi dan menghubungkan transisi estafet pembangunan antara RPJPN dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2045). Sebagai fondasi awal, maka RKPD tahun 2025 menjadi sangat strategis karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan agenda-agenda transformasi sebagaimana yang tertuang di dalam RPJPN 2025-2045. Untuk itu, *“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”* menjadi tema RKPD Tahun 2025. Tema pembangunan ini merupakan penguatan dalam pembentukan fondasi transformasi guna mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk mendorong pencapaian sasaran pembangunan, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

Adapun arah kebijakan yang ditekankan pada RKP Tahun 2025 seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Rancangan Awal RKP tahun 2024; Bappenas

Gambar 3. 1 Tema dan Penekanan RKP Tahun 2025

Pembangunan pada tahun 2025 yang akan datang yang ditekankan pada 3 prioritas di atas diharapkan akan memenuhi sasaran pembangunan sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Diperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan *Gross National Income per kapita (Atlas Method)* menjadi US\$5.500-5520 atau bertahan pada kategori *upper-middle income countries* dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas tahun 2045.

Tabel 3. 1 Sasaran Ekonomi Makro tahun 2025

No	Indikator	Sasaran 2025
1	Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% ¹ , yof); Akhir Periode	1,5-3,5
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	15.000-15.400
3	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	149,5-153,7
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,1-6,1
5	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,4)-(0,2)
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	19,3-19,6
7	Kontribusi PDB Pariwisata	4,6
8	Nilai Devisa Pariwisata (miliar US\$)	22,10
9	Penerimaan perpajakan (% PDB)	11,20-12,00
10	Keseimbangan Primer (%PDB)	0,00-0,00
11	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,45)-2,80)
12	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	38,78-39,30
13	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,5-7,8
14	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.868,2-1.905,6
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	805,5-842,2

Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2025

Untuk mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia emas 2045, maka Kebijakan Fiskal tahun 2025 difokuskan pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*well-being*), serta mendorong pemerataan antar daerah. Instrumen fiskal akan diarahkan pada upaya optimalisasi Pendapatan Negara (*collecting more*), peningkatan kualitas Belanja Negara (*spending better*), serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang dikelola secara *prudent* dan kredibel.

Pendapatan Negara dan Hibah ditargetkan mencapai 13,70-15,00 persen Produk Domestik Bruto yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar 11,20-12,00 persen Produk Domestik Bruto dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 2,50-3,00 persen Produk Domestik Bruto. Optimalisasi Pendapatan Negara diarahkan pada upaya perbaikan administrasi dan pemungutan perpajakan yang lebih efektif sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peningkatan pendapatan khususnya pajak daerah juga menjadi arah kebijakan fiskal nasional untuk dilaksanakan di tingkat daerah, diselaraskan dengan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah didukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Pada tahun 2025, Belanja Negara ditargetkan mencapai 16,15-17,80 persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 11,96-13,35 persen Produk Domestik Bruto dan Transfer ke Daerah sebesar 4,19-4,45 persen Produk Domestik Bruto. Peningkatan Kualitas Belanja Negara (*Spending Better*) dilakukan dengan mengarahkan komposisi belanja supaya lebih produktif untuk mendukung prioritas pembangunan dalam rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. Fokus kebijakan Belanja Negara diarahkan pada:

- (a) peningkatan mutu pendidikan;
- (b) penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas, hunian layak, lingkungan bersih dan sehat;
- (c) percepatan reformasi subsidi dan perlindungan sosial tepat sasaran;
- (d) penataan kelembagaan serta regulasi untuk penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
- (e) percepatan dan pemerataan konektivitas di seluruh wilayah;
- (f) penguatan kualitas belanja Transfer ke Daerah untuk mendorong produktivitas dan berorientasi pada outcome (*spending better*), serta menguatkan skema earmarking Transfer ke Daerah terutama Dana Alokasi Khusus Fisik; serta
- (g) penguatan sinergi dan harmonisasi Transfer ke Daerah dengan Belanja Pusat.

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 diarahkan mendorong produktivitas dengan memberikan ruang fiskal yang cukup besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dimana Defisit Anggaran ditargetkan mencapai (2,45)-(2,80) persen Produk Domestik Bruto, dan belanja investasi below the line sebesar 1 persen Produk Domestik Bruto.

Strategi Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengingat tahun ini merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2025-2029 menuju pencapaian sasaran Indonesia Emas 2045. Untuk itu, penyusunan RKP Tahun 2025 diutamakan untuk pendanaan kegiatan pada tahap pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 dan proyek yang berlanjut, khususnya terkait pelayanan dasar dan memastikan penyelesaian proyek yang telah berjalan. Di samping itu, ruang fiskal juga perlu disediakan untuk program yang akan berjalan pada pemerintahan selanjutnya. Dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan strategi guna mewujudkan belanja negara yang lebih berkualitas dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi. Belanja pemerintah dilakukan tidak hanya mempertimbangkan secara cermat kewajaran dan efisiensi biaya di tengah ketersediaan anggaran yang terbatas, tetapi juga memastikan kebermanfaatan output dalam menyelesaikan masalah pembangunan, khususnya yang terkait dengan arah kebijakan RKP Tahun 2025.

Kebijakan Transfer ke Daerah pada tahun 2025 secara umum diarahkan untuk mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan Transfer ke Daerah, sebagai berikut

- (1) mendukung arah kebijakan RKP Tahun 2025 yaitu i) sumber daya manusia berdaya saing dan produktif; ii) infrastruktur untuk peningkatan produktivitas; dan iii) pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan;
- (2) mendukung penerapan kerangka pikir Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) yang berfokus pada transformasi ekonomi dan sosial dengan tiga pilar yaitu *promoting growth*, pemerataan ekonomi, dan penguatan wellbeing;
- (3) mengarahkan penggunaan Transfer ke Daerah untuk mendukung penguatan fondasi transformasi;
- (4) menerapkan matching program antara kegiatan yang didanai Transfer ke Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan.

Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh daerah adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi, Akselerasi Konvergensi Antardaerah dan Penguatan *Well-Being*, menjadi fokus kebijakan perlu menjadi perhatian bersama dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah untuk pencapaian visi Indonesia Maju 2045.
2. Sinergisitas kebijakan fiskal pusat dan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan penganggaran diperlukan agar alokasi sumber daya dalam pencapaian tujuan pembangunan lebih efisien.
3. Daerah dalam menyusun KUA PPAS 2025 agar memperhatikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal dalam KEM PPKF 2025. KEM PPKF Regional merupakan inisiatif baru disusun untuk menjadi *guideline* bagi penyusunan KUA PPAS pada tahun 2025.
4. APBD harus terus diperkuat sehingga ruang fiskal daerah meningkat untuk mendorong peningkatan belanja produktif. Adapun strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut :
 - Optimalisasi PAD melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dengan memanfaatkan digitalisasi.
 - Daerah perlu segera mempersiapkan perangkat regulasi dan penguatan sinergi pemungutan Opsen PKB dan BBNKB antara Provinsi dan Kab/Kota

- Penguatan kualitas belanja daerah melalui kebijakan *mandatory spending*
- Daerah perlu segera mendorong efisiensi belanja pegawai maksimal 30% dan meningkatkan belanja infrastruktur minimal 40% dalam waktu 5 tahun
- Perluasan akses terhadap alternatif pembiayaan untuk akselerasi pembangunan
- Daerah perlu mulai memanfaatkan alternatif pembiayaan seperti Pinjaman Daerah, Obligasi dan Sukuk Daerah, serta KPBU

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Arah kebijakan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2025 diarahkan untuk dapat mempercepat terjadinya transformasi ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berdampak positif pada pengurangan kesenjangan antar wilayah. Untuk itu tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah **“Optimalisasi Diversifikasi Ekonomi Didukung Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”**, yang menekankan pada optimalisasi diversifikasi ekonomi, peningkatan SDM dan daya saing infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, maka pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur diharapkan dapat terus tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur diharapkan akan berada pada angka 5,50-6,50 persen, dengan PDRB Per Kapita diharapkan dapat mencapai Rp280juta dengan tingkat inflasi rata-rata 3 persen dan investasi non migas dan batubara mencapai Rp37,14triliun rupiah.

Untuk mencapai target ekonomi makro daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2025, Provinsi Kalimantan Timur menetapkan arah kebijakan ekonomi makro sebagai berikut:

- a. menuju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara mencapai 9,50-10,0 persen melalui:
 - 1) penguatan kinerja industri pengolahan dengan terus mendorong produktivitas industri eksisting serta mendorong masuknya investasi baru;
 - 2) peningkatan produktivitas hasil produksi pertanian melalui intensitas pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan ekstensifikasi perkebunan;
 - 3) mendorong peningkatan peran sektor konstruksi, jasa dan perdagangan, transportasi, akomodasi makan minum serta pariwisata dengan menangkap peluang dari hadirnya IKN;
 - 4) peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian.
- b. Mendorong Inklusifitas Ekonomi dengan Meningkatkan dampak pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan nilai tambah produk unggulan, mendorong pertumbuhan III-22 sektor padat karya, serta menyiapkan SDM yang berkompeten untuk bersaing di pasar kerja;
- c. Menjaga Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah mencapai 6 persen, melalui :
 - 1). menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah sebagai superhub ekonomi IKN;

- 2). mengendalikan tingkat inflasi untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga;
- 3). Meningkatkan kualitas belanja pemerintah dengan meningkatkan kualitas belanja publik;
- 4). Meningkatkan *net* ekspor perdagangan antar wilayah terutama pada komoditi non pertambangan.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi pada RKPD Kota Bontang Tahun 2024

Seiring dengan tren kinerja perekonomian nasional dan provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan perbaikan pada tahun 2021 pasca pandemi COVID-19, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Bontang juga kembali menunjukkan peningkatan dengan laju pertumbuhan mencapai 4,16 persen. Realisasi laju pertumbuhan ini menjadi yang tertinggi selama periode 2019-2023. Meskipun realisasi laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang masih di bawah laju pertumbuhan nasional yang mencapai 5,05 persen dan laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang mencapai 6,22 persen pada tahun 2023, tetapi nilai PDRB Kota Bontang pada tahun 2023 menempati peringkat kedua di Kalimantan Timur yaitu mencapai Rp366,46 juta, jauh di atas PDRB per kapita Kalimantan Timur yang mencapai Rp215,76 juta dan PDB Nasional yang mencapai Rp74,96 juta.

Dari distribusi PDRB Kota Bontang sebagaimana pada table 2..... dapat dilihat bahwa sektor industri pengolahan memberikan distribusi yang paling besar dalam pembentukan PDRB Kota Bontang. Peran yang sangat dominan ini menyebabkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang sangat dipengaruhi oleh tren pertumbuhan sektor tersebut.

Pada tahun 2025, merupakan tahun startegis dalam pembangunan di Kota Bontang. Selain karena tahun 2025 menjadi pondasi transformasi dalam pelaksanaan RPJPD Kota Bontang tahun 2025-2045, juga menjadi tahun transisi dalam pelaksanaan RPJPD tahun 2005-2025 ke RPJPD tahun 2025-2045, transisi pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 ke RPJMD 2025-2029.

Untuk itu kebijakan ekonomi makro Kota Bontang diarahkan pada **“peningkatan daya saing investasi, pariwisata, dan UMKM melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup”**. Untuk mendukung hal tersebut, maka pada tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi ditarget 3,5-4,5 persen dengan PDRB perkapita ditargetkan Rp386,46juta. Sektor industri pengolahan masih menjadi pendorong utama. Selain pada industri pengolahan migas dan petrokimia, peluang pada industri pengolahan CPO diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bontang. Di sisi lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang diharapkan akan naik menjadi 6,00 persen, maka pengembangan UMKM dan pariwisata diharapkan dapat meningkat dan akan berdampak terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 7,35 persen. Pada tahun 2025, diharapkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang akan mampu menurunkan Tingkat Kemiskinan menjadi 3,80% dan kesenjangan masyarakat diharapkan akan turun ke angka 0,291. D Dalam rangka peningkatan daya saing sumber daya manusia, maka diharapkan IPM Kota Bontang akan naik menjadi 82,00.

Ada pun arah kebijakan ekonomi Bontang pada tahun 2025 akan berfokus pada:

1. pengembangan dan peningkatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui:

- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup;
- c. diversifikasi industri yang berorientasi pada ekonomi hijau; dan
- d. pengembangan pariwisata berbasis pada potensi lokal;
2. peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui:
 - a. peningkatan kualitas pendidikan;
 - b. peningkatan kualitas kesehatan;
 - c. percepatan penurunan stunting; dan
 - d. peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi calon tenaga kerja;
3. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. percepatan penurunan kemiskinan;
 - b. peningkatan Sistem Jaminan Sosial; dan
 - c. peningkatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan.
4. pembangunan infrastruktur yang produktif, melalui:

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

3.1.4.1 Tantangan

Diperkirakan perekonomian masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dinamika ekonomi global, nasional maupun lokal yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Beragam tantangan tersebut antara lain:

- a. penurunan produksi industri pengolahan migas dan turunnya yang disebabkan oleh berkurangnya sumber pasokan gas alam ke Kota Bontang;
- b. kebijakan ekonomi hijau yang mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang rendah karbon dan ramah lingkungan;
- c. belum berkembangnya sektor ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang;
- d. ketergantungan Kota Bontang terhadap pengolahan migas yang belum mendorong terhadap berkembangnya sektor jasa dan perdagangan di Kota Bontang;

3.1.4.2 Peluang

Ekonomi Kota Bontang tahun 2024 dan 2025 diperkirakan akan tumbuh positif meskipun dalam keterbatasan. Beberapa peluang yang akan mendukung perkembangan ekonomi makro di Kota Bontang adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Ibu Kota Negara, diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan meningkatkan ekonomi di Kota Bontang sebagai daerah penyangga;
- b. Arah kebijakan pembangunan Kalimantan Timur terhadap Bontang yang mendorong inklusi industri eksisting dalam rangka membuka peluang lapangan kerja, yang diiringi dengan peningkatan daya saing SDM tenaga kerja, serta memperkuat peran sektor jasa dan perdagangan;
- c. transformasi industri pengolahan gas alam yang diharapkan mampu meningkatkan produksi dan peningkatan devisa negara;
- d. penemuan cadangan gas baru dari sumur eksplorasi North Ganai sebesar 5,3 TCF dengan kandungan kondensat diperkirakan mencapai 380 juta barel yang diharapkan dapat menjaga kelangsungan industri pengolahan gas alam di Kota Bontang dan industri lainnya yang menggunakan bahan baku gas alam; dan

- e. peluang pengembangan pariwisata di Kota Bontang terutama wisata bahari yang menjadi keunggulan di Kota Bontang.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor penting dan strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, berbagai kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran memerlukan dukungan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Semakin besar kapasitas keuangan daerah, maka sesungguhnya akan semakin banyak pilihan prioritas pembangunan yang dapat dilaksanakan sesuai urusan pemerintahan yang diemban. Namun demikian, perencanaan pembangunan daerah pada umumnya selalu dihadapkan pada situasi dimana kebutuhan pembangunan melampaui kemampuan keuangan daerah yang dapat dihimpun. Oleh sebab itulah diperlukan penyusunan perencanaan pembangunan agar kemampuan keuangan daerah yang terbatas dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah di Kota Bontang pada tahun 2023 secara umum diarahkan:

1. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan tahun 2024 yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (*sustained*), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
2. Kebijakan belanja pada APBD Kota Bontang digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program prioritas sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2025 secara efektif dan efisien.
3. Kebijakan pembiayaan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah.

3.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, Pendanaan Transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah, serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan

lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dihitung dengan memperhatikan realisasi dan perkembangan pendapatan pada 3 tahun terakhir, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Pendapatan Transfer, berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). DBH berasal dari hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing komponen bagi hasil termasuk dalam penambahan komponen pendapatan yang bersumber dari DBH Sawit dan Dana Bagi Hasil (DBH)
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dihitung dengan memperkirakan pendapatan yang bersumber dari hibah dan penerimaan atas keuntungan bersih perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus yang beroperasi di wilayah Kota Bontang.

Sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal, strategi Pemerintah Kota Bontang untuk semakin meningkatkan kemandirian pendanaan pembangunan ditempuh dengan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal tersebut menjadi upaya yang terus dilakukan mengingat masih sangat besarnya ketergantungan fiskal daerah dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Optimalisasi PAD dilakukan utamanya dengan meningkatkan perbaikan dan inovasi layanan perpajakan dan retribusi daerah. Disamping itu, pembaruan sejumlah kebijakan perpajakan dan retribusi daerah juga terus diupayakan agar potensi sumber-sumber PAD semakin optimal dalam menopang peningkatan pendapatan daerah.

Kebijakan umum dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah yang ditempuh antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
 - a. Implementasi Peraturan Daerah Nomor... tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi;
 - b. Melakukan kajian terhap potensi pendapatan asli daerah yang belum optimal
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas dan pengembangan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
 - d. Pembenahan manajemen penerimaan PAD terutama fokus pada pembenahan data wajib pajak dan objek pajak, kemudahan pembayaran pajak, peningkatan SDM terutama pemeriksa pajak dan appraisal/penilai objek pajak;
 - e. Meningkatkan potensi penerimaan PBB dan BPHTB melalui pendataan ulang objek pajak dan penilaian nilai NJOP;
 - f. Optimalisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai kewenangan yang diatur di dalamnya;
 - g. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah;

3. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil laba deviden terutama dari PDAM, Perusda AUJ, dan PT BME, serta Bank KaltimTara;
4. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah (Pemerintah Provinsi).
5. Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, terutama melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2021-2025
ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 3. 2 Realisasi, Penetapan dan Proporsi Pendapatan Kota Bontang Tahun 2021-2024

Nomor	Uraian	Realisasi Tahun 2021		Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023		Penetapan Tahun 2024	
		Keuangan (Rp)	%	Keuangan (Rp)	%	Keuangan (Rp)	%	Keuangan (Rp)	%
1	2		3	3	4	4	5	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.204.838.869.291,47	100,00	1.798.007.384.220,54	100,00	2.160.860.136.071,00	100,00	2.379.581.074.122,00	100,00
4,1	Pendapatan Asli Daerah	245.901.865.622,19	20,41	231.351.605.844,18	12,87	208.097.914.195,00	9,63	245.000.000.000,00	10,30
04.01.01	Hasil Pajak Daerah	116.883.388.141,45	9,70	134.539.080.196,35	7,48	106.779.690.000,00	4,94	146.845.288.166,00	6,17
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	2.937.297.589,01	0,24	3.959.818.810,90	0,22	2.768.551.925,00	0,13	86.497.854.568,00	3,64
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.747.614.686,87	0,23	3.847.655.621,23	0,21	3.591.431.779,00	0,17	4.075.813.311,00	0,17
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	123.333.565.204,86	10,24	89.005.051.215,70	4,95	94.958.240.491,00	4,39	7.581.043.955,00	0,32
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	935.722.089.535,00	77,66	1.511.309.158.077,95	84,05	1.945.735.481.305,00	90,04	2.124.425.955.595,00	89,28
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	785.213.265.680,00	83,92	1.300.948.692.401,95	86,08	1.617.733.662.285,00	83,14	1.752.568.485.595,00	82,50
	- Dana Perimbangan	741.098.831.680,00	94,38	1.284.743.086.401,95	98,75	1.606.955.363.285,00	99,33	-	0,00
	- Dana Insentif Daerah	44.114.434.000,00	3,66	16.205.606.000,00	0,90	10.778.299.000,00	0,50	-	0,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	150.508.823.855,00	12,49	210.360.465.676,00	11,70	328.001.819.020,00	15,18	371.857.470.000,00	15,63
4,3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.214.914.134,28	1,93	55.346.620.298,41	3,08	7.026.740.571,00	0,33	10.155.118.527,00	0,43
04.03.01	Pendapatan hibah	1.684.146.824,19	0,14	2.451.187.971,22	0,14	1.500.000.000,00	0,07	1.684.139.648,00	0,07
04.03.03	Dana Darurat	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
04.03.04	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	21.530.767.310,09	1,79	52.895.432.327,19	2,94	5.526.740.571,00	0,26	8.470.978.879,00	0,36

Sumber: Bapelitbang dan BPKAD Kota Bontang tahun 2023 LRA 2020-2021 (BPKAD Kota Bontang) Target 2024 Bapenda, BPKAD, Bapelitbang (Analisis

Gambaran 3.2 di atas menggambarkan masih sangat tingginya tingkat ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah terhadap dana transfer yang sekaligus mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang rendah. Ketergantungan ini harus secara bertahap diturunkan agar pengembangan sektor-sektor ekonomi daerah dapat lebih optimal. Proporsi yang sangat besar Pendapatan Trasfer dalam struktur pendapatan daerah menunjukkan celah fiskal (*fiscal gap*) yang lebar antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Jika situasi ini berlanjut akan menyebabkan pelaksanaan pembangunan menjadi tidak stabil sesuai dengan kebijakan dan kapasitas pemerintah dalam pengalokasian dana transfer ke daerah

Memperhatikan realisasi pendapatan dan penetapan pendapatan tahun 2021-2024, maka pendapatan daerah pada RKPD tahun 2025 diproyeksikan sebagaimana table di bawah ini:

Tabel 3. 3 Proyeksi dan Proporsi Pendapatan RKPD Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	PROYEKSI RKPD 2025	
		Target	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.250.002.842.314,50	100,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	395.633.991.969,00	17,58
4.1.01	Pajak Daerah	233.502.841.595,00	10,38
4.1.02	Retribusi Daerah	139.336.794.194,00	6,19
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan	5.678.822.425,00	0,25
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.115.533.755,00	0,76
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	70.000.000,00	0,02
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	881.462.568,00	0,04
4.1.04.05	Jasa Giro	14.755.603.327,00	0,66
4.1.04.11	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	490.790.000,00	0,02
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.500.000,00	0,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	66.177.860,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	600.000.000,00	0,03
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	150.000.000,00	0,01
4.2	Pendapatan Transfer	1.797.870.284.000,50	79,91
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.618.802.323.000,50	71,95
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.608.024.024.000,50	71,47
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10.778.299.000,00	0,48
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	179.067.961.000,00	7,96
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	179.067.961.000,00	7,96
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	0,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	56.498.566.345,00	2,51
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	56.498.566.345,00	2,51
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP	8.485.265.977,00	0,38
4.3.03.03	Pendapatan Bagi hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	48.013.300.368,00	2,13
6	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	200.000.000.000,00	8,89

Sumber: BPKAD dan Bapenda Kota Bontang; 2024

3.2.2 Belanja Wajib dan Mengikat Daerah

Belanja yang bersifat wajib dan mengikat merupakan salah satu belanja prioritas di dalam analisis proyeksi belanja. Hal ini dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau wajib dibayarkan dalam satu tahun anggaran. Belanja wajib merupakan belanja untuk digunakan untuk menjamin kelangsungan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Sedangkan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan rutin dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan.

Tabel 3. 4 Pengeluaran Wajib dan Mengika5 Kota Bontang Tahun 2024

NO	URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT	TAHUN 2025 (Rp)
A.	BELANJA OPERASI	962.343.326.629
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	744.741.656.443
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	19.402.804.387
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.386.437.844
4	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	22.437.411.755
5	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	13.639.131.200
6	BLUD	132.000.000.000
7	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	735.885.000
8	Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000

Sumber; BPKAD dan Bapperida (Hasil analisis); 2024

Adapun penjelasan terhadap masing-masing komponen belanja mengikat yang menjadi dasar analisis perhitungan adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Pegawai yakni belanja Gaji, Tunjangan dan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) yang diberikan kepada seluruh ASN (PNS dan PPPK);
- b) Belanja Gaji, Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Walikota dan Wakil Walikota, dianggap belanja mengikat karena merupakan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan DPRD yang harus dibayarkan (seperti belanja pegawai dan tunjangan serta biaya operasional);
- c) Belanja operasional wajib kantor, dianggap belanja mengikat karena menjadi pembiayaan rutin untuk penyelenggaraan kegiatan perkantoran selama satu tahun, seperti air, listrik, telepon, internet, dan pajak kendaraan;

- d) BLUD, dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas digunakan untuk operasional masing-masing BLUD;
- e) Bantuan Keuangan/Hibah kepada Partai Politik, dianggap Belanja mengikat karena telah diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018;
- f) Belanja Tidak Terduga, dianggap belanja mengikat karena pengalokasiannya bersifat rutin dan dibutuhkan sebagai antisipasi kondisi darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi di daerah;

3.2.3. Belanja Daerah

Belanja daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Analisis proyeksi belanja daerah perlu dilakukan guna mendapatkan gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kota Bontang tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi, realisasi belanja tahun-tahun sebelumnya dan kerangka prioritas pembangunan dalam RPJMD dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2021-2026.

Perencanaan Belanja Daerah dalam RKPD tahun 2025 secara umum diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran daerah. Oleh karena itu kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2025 sepenuhnya diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta secara bersamaan mendukung prioritas dan kebijakan pembangunan nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dalam RKP tahun 2025 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Realisasi dan proporsi belanja daerah pada tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 5 Realisasi, Penetapan dan Proporsi Belanja Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021		Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023		Penetapan Tahun 2024		Proyeksi Pada RKPD 2025	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
II	BELANJA DAERAH	1.313.584.747.975,00	100,00	1.444.578.830.579,71	100,00	2.557.272.667.551,00	100,00	2.865.317.411.456,00	100,00	2.450.002.842.315,00	100,00
1	Belanja Operasi	1.135.950.145.791,00	86,48	1.191.545.901.239,71	82,48	1.810.638.123.607,00	70,80	1.875.645.227.283,00	65,46	1.897.029.788.953,00	77,43
	Belanja Pegawai	582.342.264.961,00	44,33	548.463.610.192,11	37,97	718.560.112.835,00	28,10	777.282.110.479,00	27,13	816.210.974.235	33,31
	Belanja Barang dan Jasa	533.418.586.673,00	40,61	600.544.251.142,60	41,57	962.762.650.715,00	37,65	1.010.681.967.507,00	35,27	1.035.414.484.738	42,26
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Hibah	20.189.294.157,00	1,54	39.655.249.905,00	2,75	127.635.760.057,00	4,99	86.681.149.297,00	3,03	44.104.329.980	1,80
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	2.882.790.000,00	0,20	1.679.600.000,00	0,07	1.000.000.000,00	0,03	1.300.000.000	0,05
2	Belanja Modal	170.833.945.579,00	13,01	250.247.642.640,00	17,32	692.437.791.129,00	27,08	958.172.184.173,00	33,44	546.473.053.362,00	22,30
	Belanja Tanah	-	-	2.387.756.800,00	0,17	1.520.000.000,00	0,06	37.482.902.000,00	1,31	1.000.000.000	0,04
	Belanja Peralatan dan Mesin	41.136.861.923,00	3,13	86.743.381.712,00	6,00	255.449.581.197,00	9,99	159.873.267.822,00	5,58	58.978.326.157	2,41
	Belanja Gedung dan Bangunan	53.104.046.206,00	4,04	57.127.100.859,00	3,95	126.433.809.595,00	4,94	263.057.796.196,00	9,18	105.494.727.205	4,31
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.230.227.537,00	5,19	101.770.176.243,00	7,04	304.012.237.330,00	11,89	493.182.459.698,00	17,21	380.000.000.000	15,51
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.794.029.913,00	0,14	1.475.251.236,00	0,10	2.940.973.807,00	0,12	3.019.236.985,00	0,11	500.000.000	0,02
	Belanja Aset Lainnya	6.568.780.000,00	0,50	743.975.790,00	0,05	2.081.189.200,00	0,08	1.556.521.472,00	0,05	500.000.000	0,02
3	Belanja Tidak Terduga	6.800.656.605,00	0,52	2.472.539.660,00	0,17	29.196.752.815,00	1,14	6.500.000.000,00	0,23	6.500.000.000,00	0,27
	Belanja Tidak Terduga	6.800.656.605,00	0,52	2.472.539.660,00	0,17	29.196.752.815,00	1,14	6.500.000.000,00	0,23	6.500.000.000	0,27
4	Transfer	-	-	312.747.040,00	0,02	25.000.000.000,00	0,98	25.000.000.000,00	0,87	0,00	-
	Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan	-	-	312.747.040,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	25.000.000.000,00	0,98	25.000.000.000,00	0,87	-	-
	JUMLAH	1.313.584.747.975,00	100,00	1.444.578.830.579,71	100,00	2.557.272.667.551,00	100,00	2.865.317.411.456,00	100,00	2.450.002.842.315,00	100,00

Sumber BPKAD dan Bapperida 2024 hasil analisis

Berdasarkan kebijakan dan asumsi ini, perencanaan belanja daerah dalam RKPD tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Proyeksi dan Proporsi Belanja pada RKPD Kota Bontang Tahun 2025

No	Uraian	Proyeksi RKPD 2025	
		(Rp)	%
II	BELANJA DAERAH	2.450.002.842.315,00	100,00
1	Belanja Operasi	1.897.029.788.953,00	77,43
	Belanja Pegawai	816.210.974.235,00	33,31
	Belanja Barang dan Jasa	1.035.414.484.738,00	42,26
	Belanja Bunga	-	-
	Belanja Subsidi	-	-
	Belanja Hibah	44.104.329.980,00	1,80
	Belanja Bantuan Sosial	1.300.000.000,00	0,05
2	Belanja Modal	546.473.053.362,00	22,30
	Belanja Tanah	1.000.000.000,00	0,04
	Belanja Peralatan dan Mesin	58.978.326.157,00	2,41
	Belanja Gedung dan Bangunan	105.494.727.205,00	4,31
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	380.000.000.000,00	15,51
	Belanja Aset Tetap Lainnya	500.000.000,00	0,02
	Belanja Aset Lainnya	500.000.000,00	0,02
3	Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000,00	0,27
	Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000,00	0,27
4	Transfer	-	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	-	0,00
	Bantuan Keuangan	-	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan	-	0,00
	JUMLAH	2.450.002.842.315,00	100,00

Sumber: BPKAD dan Bapperida; 2024 (hasil analisa)

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2021-2023 dan penetapan pembiayaan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2023 dan Penetapan Pembiayaan Tahun 2024

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Penetapan Tahun 2024
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan	262.626.959.210,64	109.459.093.624,00	396.412.531.480,00	485.736.337.334,00
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	262.626.959.210,64	109.459.093.624,00	396.412.531.480,00	485.736.337.334,00
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	-	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
Pembiayaan Netto	262.626.959.210,64	89.459.093.624,00	371.412.531.480,00	460.736.337.334,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	109.459.093.624,13	396.412.531.480,00	485.736.337.334,00	605.260.697.136,10

Sumber : Bapelitbang Kota Bontang dan BPKAD Kota Bontang tahun 2

Pada tahun 2025, penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar. Rp 200.000.000.000,00 yang bersumber dari penghematan belanja pada tahun 2024. Proyeksi pembiayaan pada tahun 2025 sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 8 Proyeksi Pembiayaan dalam RKPD Tahun 2025

URAIAN	PROYEKSI RKPD 2025
PEMBIAYAAN DAERAH	
Penerimaan Pembiayaan	605.260.697.136,10
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	605.260.697.136,10
Pencairan Dana Cadangan	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
Pengeluaran Pembiayaan	-
Pembentukan Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal Daerah	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
Pembiayaan Netto	605.260.697.136,10
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	200.000.000.000,00

Sumber: BPKAD Kota Bontang; 2023

3.2.4 Proyeksi Kapasitas Fiskal Tahun 2024

Dengan mengacu pada proyeksi Pendapatan Daerah, Proyeksi Belanja Daerah dan Proyeksi Pembiayaan Daerah, selanjutnya dapat diproyeksikan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai pembangunan daerah. Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperhitungkan dengan mengurangi Total Penerimaan Daerah dengan Belanja Wajib dan Mengikat yakni proyeksi kebutuhan Belanja Pegawai dan pengeluaran pembiayaan melalui pos penyertaan modal pemerintah. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah tersebut selanjutnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan tahun 2025. Adapun kapasitas fiskal dalam RKPD tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 9 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	PROYEKSI RKPD TAHUN 2025
	Penerimaan Daerah	2.080.661.674.692,00
1	Penerimaan Pendapatan	2.250.002.842.314,50
2	Penerimaan kembali Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-
3	Sisa lebih riil perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA)	200.000.000.000,00
	<i>Dikurangi :</i>	
	Belanja Wajib dan Mengikat	962.343.326.629,00
1	Belanja Pegawai	962.343.326.629,00
2	Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan Modal	-
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.118.318.348.063,00

Sumber: Bapelitbang Kota Bontang tahun 2023

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi	Target
						2023	2025
1		2	3	4	5	6	7
			berkualitas	lama sekolah			
				Usia harapan hidup	Tahun	74,81	74,85*
		S.7	Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,74	7,35*
		S.8	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Angka Kemiskinan	Persen	4,11	3,8*

*) Dilakukan penyesuaian target dari RPJMD karena sudah tercapai pada tahun 2023 sesuai hasil Rakortekbang RKP Tahun 2025.

**) Dilakukan penyesuaian target karena adanya kesepakatan rapat kerja mengenai target IKLH oleh Ditjen PPKL tahun

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Pembangunan Kota Bontang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Bontang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Penyusunan RKP Tahun 2025 disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik serta atas bawah dan bawah atas. RKP tahun 2025 disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

4.2.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Dalam penyusunan RKP Kota Bontang tahun 2025, harus terdapat pula penyelarasan dengan dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2025. Tema RKP tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Adapun arah kebijakan yang ditekankan pada RKP Tahun 2025 seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Rancangan Awal RKP tahun 2024; Bappenas
Gambar 4. 1 Tema dan Penekanan RKP Tahun 2025

- Pembangunan Nasional pada tahun 2025 yang akan datang diarahkan pada pelaksanaan beberapa prioritas nasional. Adapun Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
- Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
 - Prioritas 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
 - Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
 - Prioritas 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
 - Prioritas 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
 - Prioritas 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Prioritas 7 : Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun yang menjadi isu strategis pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. Isu strategis transformasi sosial
 - Kesehatan untuk semua
 - Pendidikan berkualitas yang merata
 - Perlindungan sosial yang adaptif
2. Isu strategis transformasi ekonomi
 - Produktivitas ekonomi dan inovasi daerah
 - Elastisitas perkotaan terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi rendah
 - Perlunya percepatan transisi energi untuk menjaga daya saing ekonomi
 - Perlunya percepatan transformasi digital untuk menunjang produktivitas ekonomi
3. Isu strategis transformasi tata Kelola
 - Integritas partai politik
 - Sistem penggajian tunggal
 - Kualitas regulasi
 - Sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan
 - Transformasi dan digitalisasi pelayanan public
 - Manajemen talenta
 - Integrasi proses bisnis
4. Isu strategis transformasi ketahanan sosial, budaya dan ekologi
 - Isu agama
 - Isu budaya
 - Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
 - Kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati
 - Energi
 - Pangan

Adapun arah kebijakan dalam mewujudkan pencapaian tema RKP 2025 adalah sebagai berikut:

1. SDM Berkualitas: SDM berdaya saing dan produktif
Transformasi Sosial
 - Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun
 - Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan
 - Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan
 - Stunting
 - Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif
 - Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
 - Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual sistem
 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
 - Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)
2. Infrastruktur Berkualitas: Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas

Transformasi Ekonomi

- Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
 - Penguatan infrastruktur digital • Pengembangan infrastruktur transisi energi
 - Percepatan infrastruktur IKN Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
 - Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan: Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan
- Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
 - Pengembangan skema graduasi bansos
 - Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya
 - Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
 - Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
 - Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
 - Peningkatan produksi industri pengolahan
 - Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
 - Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi
- Target sasaran pembangunan nasional pada RKP tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Sasaran Pembangunan RKP 2025

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Realisasi 2023	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,3 – 5,6
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,32 ^{a)}	4,5 – 5,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,36 ^{b)}	7,0 – 8,0
4	Rasio Gini (Indeks)	0,388 ^{b)}	0,379 – 0,382
5	Indeks Pembangunan Manusia	0,53	0,56
6	Penurunan Emisi GRK (%)	34,09 ^{c)}	38,6

Keterangan: a) Agustus, b) Maret, c) Angka Sementara per Oktober

4.2.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalimantan Timur Tahun 2025

Selain RKP Nasional, RKPD Kota Bontang juga menyelaraskan dengan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2025. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun kedua dari RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 guna mewujudkan konsistensi dan kesinambungan rencana pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan hasil analisa terhadap arah kebijakan RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, isu strategis serta permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan tahun 2025,

maka tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah “Optimalisasi Diversifikasi Ekonomi Didukung Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”. Tema RKPD tahun 2025 merupakan upaya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui diversifikasi ekonomi merujuk pada pengembangan beragam sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu, sehingga ekonomi menjadi lebih dinamis dan tangguh terhadap fluktuasi pasar. Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci dalam menjalankan strategi ini, melibatkan investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan tenaga kerja yang adaptif terhadap teknologi baru. SDM yang terampil dan terdidik dapat lebih efektif berkontribusi dalam sektor-sektor ekonomi yang lebih maju dan berbasis pengetahuan. Kemudian dengan dukungan infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang berdaya saing memainkan peran krusial dalam mendukung diversifikasi ekonomi. Infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi, telekomunikasi, dan energi, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberhasilan berbagai sektor ekonomi. Keberlanjutan infrastruktur ini dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memudahkan mobilitas barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor yang berpotensi tinggi. Dengan mengintegrasikan diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan pembangunan infrastruktur yang berdaya saing, suatu wilayah dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang seimbang dan berkesinambungan, memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi.

Prioritas Pembangunan pada RKPD merupakan Prioritas Pembangunan yang bersifat Tematik yang ditujukan pada pencapaian sasaran utama pada tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, dimana RKPD ini juga perlu memperhatikan upaya pencapaian tujuan pembangunan pada RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan. Dengan memahami isu strategis dan permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur serta memperhatikan tema pembangunan daerah tahun 2025, maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri;
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya;
4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar;
5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik;
8. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN.

4.2.3 Pokok-pokok pikiran DPRD

Dalam menyusun RKPD Kota Bontang, DPRD memberikan saran dan pendapatnya berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diperoleh berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat

sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. Pokok-pokok pikiran disampaikan kepada Walikota Bontang pada saat Musrenbang RKPD Tahun 2025 dan di-input ke dalam tautan <https://sipd.ri.kemendagri.go.id> sebanyak 214 usulan. Usulan tersebut disampaikan dengan mempedomani Kamus Usulan yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Bontang berdasarkan prioritas pembangunan dan program prioritas di tahun 2025.

Adapun rincian usulan DPRD yang disampaikan melalui menu aspirasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Jumlah usulan Aspirasi Berdasarkan Anggota DPRD

No	Nama Anggota DPRD	Jumlah Usulan
1	Andi Faizal Sofyan Hasdam	63
2	Agus Haris, Sh	23
3	Junaidi	22
4	Drs. H. Nursalam	15
5	Drs. H. Suharno	9
6	Faisal	15
7	H. Rustam, Se,Mm	6
8	Maming, Sh,Mm	9
9	Muhammad Irfan, St	8
10	Ridwan, Se	17
11	Sitti Yara	16
12	Yassier Arafat, S.Sos	11
Jumlah		214

Tabel 4. 4 Status Input Aspirasi Berdasarkan Perangkat Daerah Pelaksana

No	Nama Anggota DPRD	Jumlah Usulan
1	Dinas Pendidikan	2
2	Dinas Kesehatan	5
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	7
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	43
4	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1
5	Dinas Ketenagakerjaan	8
6	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	4
8	Dinas Lingkungan Hidup	4
9	Dinas Perhubungan	3
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	15
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	18
12	Sekretariat Daerah	23
13	Sekretariat DPRD	5
14	Kecamatan Bontang Utara	39
15	Kecamatan Bontang Selatan	36
16	Kecamatan Bontang Barat	1

	Jumlah	214

Tabel 4. 5 Fokus Kebijakan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Bontang Tahun 2025

Fokus Arahan Kebijakan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Telaah
A. Bidang ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan, Sosial dan Budaya: 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Peningkatan dukungan terhadap kesejahteraan aparatur. 3. Peningkatan dukungan kapasitas aparatur. 4. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kelurahan. 5. Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan. 6. Pemerataan akses pelayanan kesehatan yang bermutu 7. Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja. 8. Peningkatan kualitas bantuan dan perlindungan sosial masyarakat miskin. 9. Peningkatan dukungan kegiatan keagamaan dan kebudayaan.	Perbaikan tata kelola pemerintahan difokuskan pada peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu Pendidikan yang merata. Sedangkan pemerataan akses kesehatan pelayanan kesehatan bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan baik dan paripurna. Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin diarahkan penurunan angka kemiskinan.
B. Bidang Ekonomi. 1. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin. 2. Peningkatan pelatihan tenaga terampil dan kewirausahaan. 3. Peningkatan produktivitas industri kecil, mikro dan koperasi. 4. Penguatan sektor-sektor maritime dan kerakyatan. 5. Peningkatan SDM keahlian bidang industri maritime. 6. Peningkatan dukungan bagi kelompok tani dan nelayan. emberian bantuan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah.	Pembangunan Kota Bontang diarahkan pada peningkatan perekonomian Kota Bontang yang diarahkan pada: 1. Pengembangan UMKM 2. Pengembangan Pariwisata 3. Menciptakan iklim yang ramah investasi

Fokus Arah Kebijakan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Telaah
C. Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup; 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur dasar dalam penanggulangan banjir. 2. Pembangunan infrastruktur jaringan jalan dan saluran drainase lingkungan. 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH. 4. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin. 5. Peningkatan pengelolaan persampahan berbasis partisipasi masyarakat	Dukungan program dan kegiatan bidang prasarana pengembangan wilayah dan lingkungan hidup diarahkan pada: 1. Penanggulangan banjir difokuskan pada perbaikan dan pengembangan sistem drainase perkotaan, penataan aliran sungai dan bantaran sungai, serta penyediaan infrastruktur pengendali banjir berupa persiapan lahan pembangunan polder. 2. Pembangunan infrastruktur jaringan jalan dan drainase lingkungan dilakukan melalui rehabilitasi dan pengembangan jaringan jalan dan drainase lingkungan yang diutamakan pada area terdampak banjir. 3. Pengelolaan RTH diarahkan pada pemeliharaan dan penataan RTH seluas ± 1 ha. 4. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin dilakukan dengan pembangunan rumah tidak layak huni. 5. Pengelolaan persampahan berbasis masyarakat dilakukan dengan pembangunan TPS-3R dan pengembangan bank sampah.

4.2.4 Prioritas Pembangunan Kota Bontang Tahun 2024

Pembangunan Kota Bontang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Bontang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik serta atas bawah dan bawah atas. RKPD tahun 2025 disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Adapun tema RKPD Kota Bontang tahun 2025 adalah **“Penguatan daya saing investasi, pariwisata dan UMKM melalui peningkatan kualitas SDM dan infrasturktur serta pelestarian lingkungan hidup”**.

Memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang terjadi, maka prioritas RKPD Kota Bontang tahun 2025 yang bersifat tematik dalam rangka percepatan pencapaian sasaran utama pada RKPD 2025 dengan memperhatikan upaya pencapaian tujuan akhir pembangunan jangka menengah pada RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026. Adapaun prioritas pembangunan pada RKPD Kota Bontang tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

- Prioritas Daerah 1 : Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM.
- Prioritas Daerah 2 : Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas.
- Prioritas Daerah 3 : Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastuktur dasar.
- Prioritas Daerah 4 : Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Program Prioritas Daerah sebagaimana di atas merupakan fokus pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025 yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya indikator kinerja tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026. Adapun target indikator tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan pada RKPD Kota Bontang sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan dan Arah Kebijakan pada RKPD Kota Bontang Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, amanah, dan bertanggung jawab	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (indeks)	Sasaran 1: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)	Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	a. Penguatan akuntabilitas kinerja (keuangan, asset, pendapatam, perencanaan, litbang, arsip, statistik) b. Peningkatan penataan system manajemen SDM c. Penguatan pengawasan d. Peningkatan pelayanan publik yang prima
			Nilai LPPD		
			Opini BPK		
		Sasaran 2: Meningkatnya kondusifitas wilayah	Jumlah Konflik (kasus) Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Persen)	Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	a. Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan. b. Peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban berbasis pada masyarakat
Tujuan 2: Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL) (indeks)	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh	Indeks Kualitas Perkotaan (Indeks)	Menguatkan upaya penanggulangan banjir dan bencana lainnya	Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.
				Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan lainnya	Peningkatan pelayanan penanganan kebakaran
Tujuan 3: Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat	Indeks Gini (indeks)	Sasaran 5: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Non Migas	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas (Persen)	1. Menguatkan pemberdayaan usaha mikro dan ekonomi kreatif	a. Peningkatan pembinaan usaha kecil dan koperasi yang kompetitif dan bertumbuh kembang. b. Pembangunan kawasan sentra industri yang terintegrasi dengan pusat-pusat perdagangan.
				2. Mengembangkan pariwisata berbasis potensi local dan keragaman budaya	Pengembangan promosi dan citra pariwisata yang inklusif
Tujuan 5: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)	Sasaran 6: Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang merata	a. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar kelayakan. b. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar kompetensi. c. Pemantapan pengelolaan pendidikan berbasis sekolah. d. Peningkatan fasilitasi pendidikan karakter dan fasilitasi pendidikan lanjut bagi masyarakat melalui

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				2. Pengembangan budaya literasi masyarakat	pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu atau siswa berprestasi. a. Peningkatan budaya baca masyarakat dan kualitas layanan perpustakaan. b. Peningkatan budaya baca masyarakat dan kualitas layanan perpustakaan.
			Usia Harapan Hidup	Penguatan akses dan mutu kesehatan yang merata	a. Peningkatkan kualitas jaminan kesehatan (<i>universal coverage</i>) bagi seluruh penduduk di semua usia. b. Peningkatan layanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. c. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan sesuai standar kompetensi d. Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
		Sasaran 7: Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	1. Memperkuat kerja sama pelatihan, pemagangan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja; 2. Meningkatkan jaringan dan layanan penempatan tenaga kerja 3. Mengembangkan entrepreneurship dan ekonomi kreatif	a. Peningkatan kualitas data urusan ketenagakerjaan (desain basis data, pengumpulan, update, pemetaan). b. Peningkatan kerjasama dalam pengembangan kualitas dan kapasitas lembaga pelatihan. c. Pembangunan sarana prasarana pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja; a. Penyusunan kerja sama dalam pengembangan kualitas dan kapasitas Lembaga pelatihan b. Peningkatan layanan penempatan kerja; Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan;
		Sasaran 8: Meningkatnya pemberdayaan sosial	Angka Kemiskinan (persen)	1. Memperkuat sinkronisasi penanggulangan kemiskinan;	a. Peningkatan kualitas data kemiskinan; b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat tidak mampu; c. Pemetaan program pengurangan kemiskinan menggunakan 1 basis data;
				Meningkatkan jaminan dan rehabilitasi sosial masyarakat	Peningkatan kualitas layanan jaminan & rehabilitasi sosial masyarakat.

Tujuan, sasaran, startegi dan arah kebijakan sebagaimana di atas dijabarkan ke dalam program prioritas pembangunan yang merupakan pendukung dari pelaksanaan prioritas pembangunan daerah pada RKPD Kota Bontang Tahun 2025 yang akan datang, sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 7 Program Prioritas Pembangunan dalam RKPD Kota Bontang Tahun 2025

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Dukungan Terhadap Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
Tujuan 1: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, amanah, dan bertanggung jawab	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Indeks	82,00		PD 4
Sasaran 1: Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Indek Reformasi Birokrasi	Predikat	BB (72,41)		PD 4
	Nilai LPPD	Predikat	Tinggi (4,10)		
	Opini BPK	Predikat	WTP		
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persen	86,00	Bapelitbang	PD 4
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	Persen	94,00		PD 4
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	Persen	78,57		PD 4
	Persentase keberlanjutan inovasi daerah	Persen	91,17		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	PD 4
Program Pengelolaan Arsip	persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik	Persen	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PD 4
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	Persen	50,00		PD 4
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Daftar arsip dan SOP arsip	Persen	20,00		PD 4

Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kesesuaian tahapan penyusunan APBD	persen	100,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PD 4
	Jumlah Perangkat Daerah yang menyajikan laporan keuangan dengan baik	Perangkat Daerah	18,00		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kesesuaian data rincian BMD dengan Aktiva Tetap di neraca Pemerintah Kota	Persen	100,00		PD 4
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	Persen	15,41	Badan Pendapatan Daerah	PD 4
Program Kepegawaian Daerah	Indeks Dimensi Kualifikasi	Indeks	15,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	PD 4
	Indeks Dimensi Kinerja	Indeks	25,00		
	Indeks Dimensi Disiplin	Indeks	4,00		PD 4
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Dimensi Kompetensi	Indeks	37,00		
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan pengawasan penyelenggaraa n urusan pemerintahan daerah berbasis risiko	Persen	75,00	Inspektorat Daerah	PD 4
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Kebijakan yang telah selesai dirumuskan;	Persen	100,00		PD 4
	Perangkat daerah dengan kinerja RB baik	Persen	85,00		
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Tingkat	77,52	Dinas Komunikasi dan Informatika	PD 4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Perangkat Daerah	Persen	B (87,00)	Sekretariat Daerah	PD 4
	Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	Persen	100,00		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	97,00	Kecamatan Bontang Selatan	PD 4
	Cakupan tugas penyelenggaraa n pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	97,00		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan koordinasi penyelenggaraa n pemerintah umum	Persen	100,00		PD 4
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	97,00	Kecamatan Bontang Utara	PD 4
	Cakupan tugas penyelenggaraa n pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	97,00		

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan koordinasi penyelenggaraa n pemerintah umum	Persen	100,00		PD 4
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	97,00	Kecamatan Bontang Barat	PD 4
	Cakupan tugas penyelenggaraa n pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	97,00		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan koordinasi penyelenggaraa n pemerintah umum	Persen	100,00		PD 4
Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk berKTP per satuan Penduduk	Persen	0,99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PD 4
	Cakupan penerbitan KTP	Persen	99,00		
Program Pencatatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	0,96		PD 4
	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	0,73		
	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	96,00		
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan	Persen	100,00	Sekretariat Daerah	PD 4
	Persentase implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Persen	100,00		
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomian	Persen	100,00		PD 4
	Presentase implementasi kebijakan bidang pembangunan	Persen	100,00		
Sasaran 2 : Meningkatnya Kondusifitas wilayah	Jumlah Konflik	Kasus	7		
	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Keteriban Umum	Persen	100,00		
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	PD 4
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	80,00		
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	Persen	100,00	Kecamatan Bontang Selatan	PD 4
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	Persen	100,00	Kecamatan Bontang Utara	PD 4

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	Persen	100,00	Kecamatan Bontang Barat	PD 4
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	62,5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PD 4
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik	Persen	72,00		PD 4
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Persen	86,00		PD 4
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Peningkatan pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	93,00		PD 4
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik	Persen	100,00		PD 4
Tujuan 2,; Terwujudnya pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)	Indeks	71,78		PD 3
Sasaran 3: Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh	Indeks Kualitas Perkotaan	Indeks	76,61		PD 3
Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yg ditangani	Persen	72,06	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PD 3
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Fasilitasi Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota	Persen	25,00		PD 3
	Persentase fasiltasi penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Persen	33,5		
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	Persen	2,59		PD 3
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase kapasitas unit air tanah/air baku	Persen	87,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD 3
	Persentase kapasitas aliran sungai	Persen	93,02		

	Persentase daya tampung danau/folder/kolam retensi	Persen	87,36		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum layak	Persen	83,99		PD 3
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	96,5		PD 3
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	Persen	0,99	Dinas Lingkungan Hidup	PD 3
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA / TPS-3R/TPS	Persen	62,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD 3
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Persen	93,02		PD 3
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	90,02		PD 3
	Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	Persen	92,82		PD 3
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase sempadan sungai yang tertata	Persen	15,46		PD 3
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	persen	93,22	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PD 3
	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	persen	93,58		PD 3
	Persentase Pengelolaan TPU	persen	66,00		PD 3
Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang memperoleh layanan kebencanaan	Persen	100,00	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	PD 3
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraa n lalu lintas dan angkutan jalan	persen	100,00	Dinas Perhubungan	PD 3
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase meningkatnya keselamatan pelayaran kapal angkutan penyebrangan	persen	100,00		PD 3

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PD 3
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yg memenuhi persyaratan teknis	Persen	70,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD 3
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,38		
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan atau PPLH	Persen	12,00	Dinas Lingkungan Hidup	PD 3
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persen	66,00		PD 3
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan penghargaan lingkungan hidup	Persen	60,00		PD 3
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Persen	100,00		PD 3
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan penanganan kasus	Persen	60,00		PD 3
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan kapasitas diklat dan penyuluhan	Persen	60,00		PD 3
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan Kehati	Persen	64,31		PD 3
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian tata ruang	Persen	89,2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD 3
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	Persen	30,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PD 3
Tujuan 3: Terwujudnya inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat	Indeks Gini	Persen	0,291		PD 2

Sasaran 5: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Non Migas	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	Persen	6		PD 2
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase penataan sarana distribusi perdagangan	Persen	100,00	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	PD 2
	Persentase pembinaan terhadap pengelola pasar	Persen	18,00		
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase penerapan standardisasi dan perlindungan konsumen	Persen	64,00		PD 2
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perusahaan yang terdaftar	Persen	37,5		PD 2
	Persentase eksportir yang aktif menggunakan SKA	Persen	100,00		
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk dalam negeri yang difasilitasi dalam promosi dan pemasaran	Persen	100,00		
Program Pengembangan Ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor migas dan non migas	Persen	0,5		PD 2
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase IKM yang memiliki izin usaha	Persen	2,00		PD 2
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan Industri kecil menengah	Persen	1,00		
	Pesentase IKM yang menerapkan sistem manajemen produk	Persen	1,52		
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persen	0,34	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	PD 2
	Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang bermitra dg pasar rental modern	Persen	1,38		
Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	Persen	0,5		PD 2
	Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan	Persen	2,00		
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan KSP/USP yang mempunyai izin usaha simpan pinjam	Persen	19,74		PD 2

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koprasi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian	Persen	8,97		PD 2
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Persen	7,5		
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase kapasitas kelembagaan koperasi	Persen	19,23		
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase objek daya tarik wisata yang representatif	Persen	80,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	PD 2
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengembangan dan perlindungan pelaku ekonomi kreatif	Persen	0,5	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	PD 2
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	Orang	388.660	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pelestarian budaya	Persen	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PD 2
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase peningkatan penyelenggaraa n kegiatan kesenian	Persen	100,00		
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	20.905	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	PD 2
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	3300		
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	Persen	29,00		PD 2
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian	Persen	100,00	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	PD 2
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian	Persen	80,00		PD 2
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentse pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan	Persen	100,00		PD 2
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan wilayah pengendalian kesehatan hewan	Persen	100,00	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	PD 2

	Persentase ketersediaan produk pangan dan non pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh Halal (ASUH)	Persen	36,00		
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan wilayah yang terkendali dari bencana pertanian	Persen	100,00	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	PD 2
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi	Milyar Rp	4.375	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	PD 2
Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Jumlah Investor	Investor	2		PD 2
Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai IKM	Nilai	89,3		
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Aturan Penanaman Modal	Persentase	50,00		PD 2
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase luas APL yang diberikan izin penguasaan	Persen	75,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PD 2
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	Persen	75,00		PD 2
Program Penatagunaan Tanah	Persentase penyediaan tanah untuk fasilitas publik	Persen	10,00		
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomian	Persen	100,00	Sekretariat Daerah	PD 2
	Presentase implementasi kebijakan bidang pembangunan	Persen	100,00		
Tujuan 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	82,00		PD 1
Sasaran 6: Meningkatkan akses layanan Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,66		PD 1
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,1		
	Usia harapan hidup	Tahun	74,85		
Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD (Paket setara SD)	Persen	104,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PD 1
	APK SMP (Paket setara SMP)	Persen	103,46		
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Persen	78,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PD 1
	Rasio guru/murid	Persen	86,02persen		

Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Pendidikan dasar, PAUD dan non formal yang memiliki ijin	Persen	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PD 1
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan	Persen	100,00	Sekretariat Daerah	
	Persentase implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Persen	100,00		
Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pemustaka perpustakaan	orang/ perpustakaan	42,350 Org dan 37 perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu	Per 100 ribu kelahiran hidup	95,00		
	Cakupan kepesertaan JKN	Persen	100,00		
	Ketersediaan obat esensial (persen)	Persen	100,00		
	Angka kematian bayi per 1000 ribu kelahiran hidup	Per 1000 kelahiran hidup	11,00		
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana Produksi Obat, Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Berizin	Persen	100,00	Dinas Kesehatan	PD 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga Kesehatan berizin (Dinkes RSUD)	Persen	100,00		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	Persen	45,00		
Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	1,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	PD 1
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rasio Akseptor KB	Persen	71,00		PD 1

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase pemberdayaan kelompok kegiatan bangga kencana	Persen	77,00		PD 1
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	Nilai	89,00	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	PD 1
	Ketersediaan Energi dan Protein	Poin			PD 1
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita	persen	100,00		
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	persen	100,00		
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase ketersediaan informasi dan barang kebutuhan pokok/barang penting	Persen	100,00	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	PD 1
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase pembinaan dan pengembangan kapasitas daya saing organisasi kepemudaan (OKP)	Persen	100,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	PD 1
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlit yang berprestasi	Persen	46,67		PD 1
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Persen	100,00		PD 1
Program Perlindungan Perempuan	Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Persen	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	PD 1
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga	Persen	60,00		PD 1
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Nindya		PD 1
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persen	100,00		
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan data gender dan anak terpadu	Persen	100,00		
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	47,8		PD 1
	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	Persen	0,45		PD 1
Sasaran 7 : Meningkatnya tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,35		

Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	Persen	81,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD 1
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase produktifitas tenaga kerja	Persen	100,00	Dinas Tenaga Kerja	
	Persentase pencari kerja yang dilatih	Persen	4,82		
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	20,5		PD 1
Program Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha pekerja setahun	Persen	5,32		
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Presentase Sumber daya pariwisata yang di kembangkan	Persen	60,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
	Presentase Sumber daya Ekraf yang di kembangkan	Persen	66,00		
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persen	0,34	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	PD 1
	Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang bermitra dg pasar rental modern	Persen	1,38		
Sasaran 8 : Meningkatnya pemberdayaan sosial	Angka Kemiskinan	Indeks	3,8		PD 1
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Persen	100,00	Dinas Sosia dan Pemberdayaan Masyarakattl	PD 1
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Persen	100,00		
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100,00		PD 1
	Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)	Persen	100,00		
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LKK dan LAK yang aktif	Persen	100,00	Dinas Sosia dan Pemberdayaan Masyarakattl	PD 1
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat,	Persen	100,00	Kecamatan Bontang Selatan	PD 1

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat,	Persen	100,00	Kecamatan Bontang Utara	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat,	Persen	100,00	Kecamatan Bontang Barat	

Selain program prioritas sebagaimana di atas, maka Pemerintah Kota Bontang juga melaksanakan Program Unggulan Kepala Daerah yang diarahkan pada 4 (empat) tema, yaitu;

1. Program Unggulan Bontang KITA (Kolaborasikan Ide Satukan Aksi), yang dimaksudkan untuk mempromosikan kebijakan pembangunan kolaboratif untuk memperkuat kerjasama dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat yang dilandasi oleh semangat dan rasa memiliki terhadap Kota Bontang. Program Unggulan Bontang KITA dijabarkan ke dalam beberapa program unggulan, yaitu:
 - a. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan, yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan *dedicated*, yaitu:
 - 1) Pemantapan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
 - 2) peningkatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan;
 - 3) Peningkatan pelayanan publik;
 - b. Program Kompak (Kolaborasi Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat), diarahkan untuk mengkolaborasikan program pemerintah dengan *stakeholders* dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dari perusahaan kepada masyarakat sekitar;
 - c. Program ASN Unggulan; diterjemahkan ke dalam beberapa program *dedicated*, yaitu:
 - 1) Beasiswa bagi ASN;
 - 2) peningkatan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun.
 - d. Program Stimulan RT, diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan dengan focus pada upaya pemberdayaan sosial, ekonomi dan lingkungan yang bersifat produktif guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. Program Bontang Bebas Kuota (Bontang Bebas Wifi), diarahkan untuk memberikan akses internet kepada masyarakat di ruang publik.
2. Program Unggulan Bontang BARU (Bersih, Asri, Lestari dan Maju), merupakan program untuk mewujudkan wajah baru Kota Bontang yang Lebih Hebat yakni Kota Bontang Lebih Bersih, Lebih Asri, Lebih Lestari dan Lebih Maju Kotanya menuju Kota Berkelanjutan yang nyaman, cerdas dan layak huni. Program Unggulan Bontang BARU dijabarkan ke dalam beberapa program unggulan, yaitu:
 - a. Program Pengendalian Banjir; yang dilaksanakan melalui beberapa program *dedicated*, yaitu:
 - 1). Kerjasama penanganan banjir antar daerah dalam penanganan daerah hulu, antara lain: pembangunan Bendali Suka Rahmat, dan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat untuk mengoptimalkan fungsi Waduk Kanaan.
 - 2). Revitalisasai Waduk Kanaan;
 - 3). Normalisasi sungai-sungai di Kota Bontang;
 - 4). Normalisasi dan optimalisasi sitem drainase perkotaan;
 - 5). Penataan bantaran sungai;
 - 6). Pembangunan 3 polder pengendalian banjir.
 - b. Program Penataan Sarana dan Prasarana Kota Berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan *dedicated*, yaitu:
 - 1). Peningkatan dan penataan ruang terbuka hijau;
 - 2). Pelayanan sanitasi dan air bersih;
 - 3). Pembangunan jalan alternatif/jalan lingkar.

3. Program Unggulan Bontang Bangkit, memiliki makna “Bangkit dan Maju Ekonominya” yang bertujuan untuk lebih membangkitkan dan memajukan perekonomian Kota Bontang. Program Unggulan Bontang Bangkit dijabarkan ke dalam beberapa program unggulan, yaitu:
 - a. Program Peningkatan Investasi, yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan *dedicated* yaitu:
 - 1) Pembangunan mall pelayanan publik;
 - 2) Pengembangan pelayanan melalui Anjungan Pelayanan Mandiri;
 - 3) Pengembangan;
 - b. Program Pengembangan Pariwisata dan Budaya, yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan *dedicated*, yaitu:
 - 1) Penataan objek-objek pariwisata;
 - 2) Penyelenggaraan festival seni dan budaya;
 - 3) Merevitalisasi cagar budaya;
 - 4) Pengembangan Kawasan seni dan budaya.
 - c. Program Pengembangan UMKM, yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan *dedicated*, yaitu:
 - 1) Pengembangan dan penguatan UMKM;
 - 2) Moratorium pemberian izin took modern (waralaba);
 - 3) Pengembangan usaha perikanan; pertanian dan peternakan;
 - 4) Pengembangan 1 RT 1 Kelompok Usaha berupa usaha ekonomi, ekonomi kreatif atau urban farming.
4. Program Unggulan Bontang Unggul, bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang unggul, SDM yang unggul dan masyarakat yang sejahtera. Program Unggulan Bontang Unggul diterjemahkan ke dalam beberapa program unggulan sebagai berikut:
 - a. Program Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan *dedicated*, yaitu:
 - 1) Standarisasi sarana dan prasarana pendidikan;
 - 2) Pemberian perlengkapan belajar bagi siswa SD sampai SLTP;
 - 3) Penyediaan 500 beasiswa stimulant/penuh bagi siswa dan mahasiswa;
 - 4) Peningkatan 2 event kompetisi/lomba olahraga prestasi dan rekreasi bagi siswa;
 - 5) Pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat;
 - 6) Bantuan biaya iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat peserta kelas III non PBI;
 - 7) Pembangunan Emergency Call (Call Center 112);
 - 8) Pelayanan dokter kunjung bagi pasien jompo dan miskin;
 - 9) Penguatan kemitraan pemerintah dengan RS Swasta dalam pelayanan Kesehatan;
 - 10) Peningkatan kompetensi bagi calon tenaga kerja;
 - 11) Peningkatan kompetensi bagi keluarga miskin;
 - 12) Pembangunan Rumah Kreasi Milenial sebagai sarana pengembangan kreasi bagi pemuda;
 - 13) Peningkatan dukungan pelaksanaan kegiatan keagamaan; dan
 - 14) Pembangunan Kawasan pusat pengembangan keagamaan.
 - b. Program Bantuan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan *dedicated*, yaitu:
 - 1) Perluasan cakupan dan ragam bantuan pangan;
 - 2) Pengembangan kelompok usaha masyarakat bagi 100 kelompok keluarga miskin;
 - 3) Bantuan makanan siap santap untuk lansia miskin tanpa keluarga.

4.2.5 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Bontang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

Penentuan Prioritas Daerah sebagaimana di atas juga dilakukan dengan memperhatikan Prioritas pembangunan pada Ranwal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan prioritas pada Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Nasional Tahun 2025. Adapun persandingan antara RKPD Kota Bontang Tahun 2025, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025 terlihat sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 8 Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Bontang Tahun 2025

Lingkup	LPE (%)	IPM/IMM (angka)	Kemiskinan (%)	TPT (%)	Gini Ratio (angka)
Kota Bontang	3,5-4,5	82,00	3,8	7,35	0,291
Prov. Kaltim	5,6-6,4	78,60	5,67	5,14	0,310
Nasional	5,3 -5,6	0,56	4,5-5,0	7,0-8,0	0,379-0,382

Pada tabel persandingan di atas, dapat dilihat bahwa target LPE Kota Bontang berada di bawah target Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan target nasional. Akan tetapi trendnya selalu mengalami peningkatan. Sedangkan untuk IPM, angka kemiskinan, dan Gini Rasio masih sejalan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan target prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025.

Berikut ini kami tampilkan keselarasan Prioritas Daerah dalam RKPD Kota Bontang tahun 2025 dengan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur dalam Ranwal RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 dan Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2025.

Tabel 4. 9 Keselarasan Prioritas Pembangunan pada RKPD Kota Bontang Tahun 2025, dengan Prioritas Pembangunan pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Nasional RKP Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Kota Bontang	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Nasional
Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Yang Berdaya Saing Dan Sejahtera	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
	Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas Kesehatan masyarakat lainnya;	
	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem;	Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
Penguatan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Berbasis pada Ekonomi Lokal Dan Keragaman Sosial Budaya Masyarakat.	Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan;	Penguatan Daya Saing Usaha

Prioritas Pembangunan Kota Bontang	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Nasional
Penataan Infrastruktur Perkotaan dan lingkungan hidup Yang Mendorong Daya Saing Daerah.	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;	Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
		Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik; dan	Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dalam RKPD Kota Bontang tahun 2025 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Kota Bontang tahun 2025 beserta perencanaannya yang mengimplemantasikan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Bontang secara sinergis. Sinergi pembangunan dilaksanakan sesuai dengan fokus/tema pembangunan yang ditetapkan. Melalui tema pembangunan tahun 2025, yaitu “Penguatan Daya Saing Investasi, Pariwisata Dan UMKM Melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur serta Pelestarian Lingkungan Hidup”, Kota Bontang berharap bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dapat tumbuh lebih tinggi terutama pada sektor non migas yang pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk merealisasikan fokus/tema pembangunan yang telah ditetapkan ini, dirumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job*. Program dan kegiatan prioritas daerah ini merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Bontang. Pelaksanaan program dan kegiatan ini melibatkan *stakeholders* yang terkait sebagai bentuk harmonisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan dapat menunjukkan capaian kinerja pada setiap prioritas daerah, maka dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Kota Bontang harus memberikan arahan dalam penentuan program dan kegiatan yang tepat. Apabila capaian kinerja suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak memberikan *outcome* yang positif, maka pada periode berikutnya harus dilakukan evaluasi serta kajian ulang atas perencanaan program dan kegiatan tersebut yang tidak tepat sasaran.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan di dalam RKPD Kota Bontang tahun 2025 merupakan penjabaran pada program prioritas dalam dokumen RPJPM Kota Bontang tahun 2021-2026 sehingga dapat mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan di dalam RPJMD tersebut. Selanjutnya RKPD Kota Bontang tahun 2025 ini, juga menjadi arah kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah berikut kerangka pendanaannya untuk membiayai semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

5.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Penyusunan kerangka pendanaan pada Rancangan RKPD Kota Bontang Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan realisasi belanja perangkat daerah tahun 2023 dan rencana belanja yang ditetapkan pada APBD Tahun 2024. Berdasarkan pendekatan tersebut, rencana belanja perangkat daerah dalam RKPD tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 2.450.002.842.315,- dengan rincian pagu indikatif per Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Nama OPD	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	422.051.124.353
2	Dinas Kesehatan	142.529.141.151
3	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada	230.628.086.333
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	512.835.648.418
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	77.002.674.433
6	Satuan Polisi Pamong Praja	17.397.438.095
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.767.943.513
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	38.688.567.940
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	27.494.179.211
10	Dinas Ketenagakerjaan	24.108.883.153
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	22.127.756.413
12	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian	35.559.150.603
13	Dinas Lingkungan Hidup	75.878.662.005
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.003.344.869
15	Dinas Perhubungan	39.803.647.125
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	43.479.161.678
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	47.003.920.715
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.740.145.054
19	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	74.360.268.236
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19.546.657.672
21	Sekretariat Daerah	134.540.280.476
22	Sekretariat DPRD	68.795.754.920
23	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	27.053.797.956
24	Badan Pendapatan Daerah	28.601.869.078
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	33.808.551.658
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.052.188.274
27	Inspektorat Daerah	25.125.803.332
28	Kecamatan Bontang Utara	76.523.727.039
29	Kecamatan Bontang Selatan	75.758.707.741
30	Kecamatan Bontang Barat	37.146.151.534
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.589.609.337
	Total Belanja Dalam RKPD Tahun 2025	2.450.002.842.315,00

5.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Data dan informasi Rencana Kerja Perangkat Daerah pada telah di-input melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah melalui tautan <https://sipd.ri.kemendagri.go.id>. Adapun rincian program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut ini.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	749.370.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD										
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	5.268.002.237,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	1.750.411.891,00	
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.099.090.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	-	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160 Orang	3.635.546.950,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	850.854.375,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	210.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	220.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	313.365.287,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	564.057.516,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum	1 Laporan	9.793.944.306,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	3.575.996.163,00		
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	231.525.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	243.101.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	689.328.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	180.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	216.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.454.098,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	90.531.147,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	1.500.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	239.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	25.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.512.500,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	-	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	35.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	4 Laporan	12.041.696.590,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	974.532.867,00		
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	45.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	24.656.056,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	800.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	630.965.676,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	303.724.890,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	318.911.135,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	20.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud												
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	258.280.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (Paket Setara SMP) APK SD (Paket Setara SD) APK PAUD	103.86 Persen 104.65 Persen 85.91 Persen	139.212.227.448,00						33.671.088.040,00			
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	56 Satuan Pendidikan	54.986.482.477,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.542.373.162,00			
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah												
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1.253.604.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah												
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	736.298.450,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah												
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	600.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah												
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	495.150.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa												
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	349.077.540,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar												
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6840 Orang	8.379.236.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.328.795.904,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar												
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	72 Orang	297.214.438,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	163.577.258,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah												
						Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	30 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar												
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	25 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar												
						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	57 Orang	50.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan												
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	5.000.042,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							0	1 0	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi											
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik											
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	17.500.494.500,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru											
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18 Ruang	14.964.583.706,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	98.982.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	250.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah										
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	7.667.593.264,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1.000.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama										
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3600 Peserta Didik	2.708.600.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.788.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa										
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	600 Peserta Didik	250.669.433,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	275.736.432,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4204 Orang	5.118.354.780,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.535.618.061,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	58 Orang	2.437.809.766,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah										
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	30 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama										
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	20 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	587.871.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik												
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	9.420.959.100,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik												
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	30.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah satuan PAUD yang dikelola	149 Satuan Pendidikan	21.744.592.436,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.426.860.385,00			
	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD												
							Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	1.499.999.147,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD												
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3667 Peserta Didik	1.449.337.384,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD												
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	7670 Orang	8.513.090.808,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.852.860.385,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD												
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	58 Orang	200.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	374.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12		13	14	15	16
							0	1 0	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik											
							0	1 0	100.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah											
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	799.955.800,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	25 Orang	200.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	18 Peserta Didik	6.805.919.998,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan											
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	182.080.516,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	200.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	437.310.749,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Murid	50.88 Siswa per guru	830.187.548,00						1.800.000.000,00			
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85.14 Persen	830.187.548,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan pendidikan Dasar, PAUD, dan PNF	1.800.000.000,00			
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	209.999.872,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan pendidikan Dasar, PAUD, dan PNF	900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	620.187.676,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Satuan pendidikan Dasar, PAUD, dan PNF	900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidikan dasar, PAUD dan non formal yang memiliki izin	100 Persen	418.258.242,00						90.000.000,00			
	1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin operasional lembaga pendidikan dasar yang terbit	1 Dokumen	20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	20.000.000,00			
	1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat												
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat												
							Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	-	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin Operasional Satuan PAUD PNF yang terbit	7 Dokumen	398.258.242,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	-	70.000.000,00			
	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat												
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	7 Dokumen	74.900.174,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	-	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	7 Dokumen	73.414.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	146 Dokumen	249.944.068,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	-	40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.500.000.000,00						3.150.000.000,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			10.500.000.000,00						3.150.000.000,00	
6	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian budaya	100 %	8.600.000.000,00						2.950.000.000,00	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan masyarakat Kota Bontang yang dikelola	2 Kebudayaan	1.225.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat Pelaku Kebudayaan dalam Daerah	100.000.000,00	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan										
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek	900.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat Pelaku Kebudayaan dalam Daerah	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan										
						Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	10 Orang	325.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat Pelaku Kebudayaan dalam Daerah	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan	25 kesenian	1.050.000.000,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	900.000.000,00	
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya										
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	1.000.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan										
						Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10 Sertifikat	50.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	348.799.720,00						212.474.563,20	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	348.799.720,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	212.474.563,20	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar										
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SDN 004 BONTANG UTARA
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar										
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	571 Peserta Didik	343.799.720,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	212.474.563,20	SDN 004 BONTANG UTARA
						SDN 005 Bontang Utara			373.400.000,00						235.518.632,80	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			373.400.000,00						235.518.632,80	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			373.400.000,00						235.518.632,80	
12	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	373.400.000,00						235.518.632,80	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	373.400.000,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	235.518.632,80	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar										
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SDN 005 BONTANG UTARA
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar										
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	611 Peserta Didik	368.400.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	235.518.632,80	SDN 005 BONTANG UTARA
						SDN 006 Bontang Utara			229.400.000,00						142.380.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			229.400.000,00						142.380.000,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			229.400.000,00						142.380.000,00	
13	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	229.400.000,00						142.380.000,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	229.400.000,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	142.380.000,00	

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	577 Peserta Didik	348.599.894,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	227.838.795,20	SDN 008 BONTANG UTARA	
						SDN 009 Bontang Utara			221.248.347,00						163.839.450,40		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			221.248.347,00						163.839.450,40		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			221.248.347,00						163.839.450,40		
16	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN -		-	221.248.347,00						163.839.450,40		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	221.248.347,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	163.839.450,40		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SDN 009 BONTANG UTARA	
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar											
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	413 Peserta Didik	216.248.347,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	163.839.450,40	SDN 009 BONTANG UTARA	
						SDN 010 Bontang Utara			301.395.211,00						166.716.515,20		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			301.395.211,00						166.716.515,20		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			301.395.211,00						166.716.515,20		
17	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN -		-	301.395.211,00						166.716.515,20		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	301.395.211,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	166.716.515,20		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SDN 010 BONTANG UTARA	
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar											
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	499 Peserta Didik	296.395.211,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	166.716.515,20	SDN 010 BONTANG UTARA	
						SDN 011 Bontang Utara			232.502.460,00						102.383.572,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			232.502.460,00						102.383.572,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			232.502.460,00						102.383.572,00		
18	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	232.502.460,00						102.383.572,00		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	232.502.460,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	102.383.572,00		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SDN 011 BONTANG UTARA	
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar											
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	60 Peserta Didik	227.502.460,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	102.383.572,00	SDN 011 BONTANG UTARA	
						SDN 001 Bontang Selatan			285.200.000,00						198.791.787,20		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			285.200.000,00						198.791.787,20		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			285.200.000,00						198.791.787,20		
19	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	285.200.000,00						198.791.787,20		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	285.200.000,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	198.791.787,20		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SDN 001 BONTANG SELATAN	
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar											
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	466 Peserta Didik	280.200.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	198.791.787,20	SDN 001 BONTANG SELATAN	
						SDN 002 Bontang Selatan			347.598.229,00						237.567.549,60		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			347.598.229,00						237.567.549,60		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			347.598.229,00						237.567.549,60		
20	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	347.598.229,00						237.567.549,60		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	347.598.229,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	237.567.549,60		

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	374 Peserta Didik	224.400.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	-	148.468.744,80	SDN 004 BONTANG SELATAN
						SDN 005 Bontang Selatan			213.200.000,00						150.993.093,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			213.200.000,00						150.993.093,60	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			213.200.000,00						150.993.093,60	
23	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	213.200.000,00						150.993.093,60	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	213.200.000,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	150.993.093,60	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar										
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00		Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SDN 005 BONTANG SELATAN
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar										
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	346 Peserta Didik	208.200.000,00		Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Pantai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	150.993.093,60	SDN 005 BONTANG SELATAN
						SDN 006 Bontang Selatan			253.900.000,00						180.395.765,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			253.900.000,00						180.395.765,60	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			253.900.000,00						180.395.765,60	
24	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	253.900.000,00						180.395.765,60	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	253.900.000,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	180.395.765,60	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar										
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00		Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SDN 006 BONTANG SELATAN
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar										
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	414 Peserta Didik	248.900.000,00		Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	180.395.765,60	SDN 006 BONTANG SELATAN
						SDN 007 Bontang Selatan			152.600.000,00						101.987.917,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			152.600.000,00						101.987.917,60	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			152.600.000,00						101.987.917,60	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
25	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	152.600.000,00						101.987.917,60		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	152.600.000,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	101.987.917,60		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SDN 007 BONTANG SELATAN	
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar											
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	247 Peserta Didik	147.600.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	101.987.917,60	SDN 007 BONTANG SELATAN	
						SDN 009 Bontang Selatan			319.399.835,00						214.637.771,20		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			319.399.835,00						214.637.771,20		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			319.399.835,00						214.637.771,20		
26	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	319.399.835,00						214.637.771,20		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	319.399.835,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	214.637.771,20		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SDN 009 BONTANG SELATAN	
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar											
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	520 Peserta Didik	314.399.835,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	214.637.771,20	SDN 009 BONTANG SELATAN	
						SDN 010 Bontang Selatan			225.798.595,00						151.039.556,80		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			225.798.595,00						151.039.556,80		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			225.798.595,00						151.039.556,80		
27	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	225.798.595,00						151.039.556,80		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	225.798.595,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	151.039.556,80		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar												
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SDN 010 BONTANG SELATAN		
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar												
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	364 Peserta Didik	220.798.595,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Pantai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	151.039.556,80	SDN 010 BONTANG SELATAN		
						SDN 011 Bontang Selatan			248.549.768,00									
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			248.549.768,00									
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			248.549.768,00									
28	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	248.549.768,00						179.199.768,00			
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	248.549.768,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	179.199.768,00			
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar												
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SDN 011 BONTANG SELATAN		
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar												
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	426 Peserta Didik	243.549.768,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	-	179.199.768,00	SDN 011 BONTANG SELATAN		
						SDN 012 Bontang Selatan			252.797.480,00									
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			252.797.480,00									
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			252.797.480,00									
29	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	252.797.480,00						166.399.808,00			
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	252.797.480,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	166.399.808,00			
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar												
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SDN 012 BONTANG SELATAN		
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	408 Peserta Didik	247.797.480,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	166.399.808,00	SDN 012 BONTANG SELATAN	
						SDN 013 Bontang Selatan			244.900.000,00						162.395.470,40		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			244.900.000,00						162.395.470,40		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			244.900.000,00						162.395.470,40		
30	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	244.900.000,00						162.395.470,40		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	244.900.000,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	162.395.470,40		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SDN 013 BONTANG SELATAN	
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar											
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	396 Peserta Didik	239.900.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	162.395.470,40	SDN 013 BONTANG SELATAN	
						SDN 014 Bontang Selatan			162.500.000,00						47.981.156,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			162.500.000,00						47.981.156,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			162.500.000,00						47.981.156,00		
31	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	162.500.000,00						47.981.156,00		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	162.500.000,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	-	47.981.156,00		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	-	0,00	SDN 014 BONTANG SELATAN	
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar											
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	56 Peserta Didik	157.500.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	47.981.156,00	SDN 014 BONTANG SELATAN	
						SDN 015 Bontang Selatan			54.000.003,00						31.972.196,80		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			54.000.003,00						31.972.196,80		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			54.000.003,00						31.972.196,80		
32	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	54.000.003,00						31.972.196,80		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	54.000.003,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	31.972.196,80		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SDN 015 BONTANG SELATAN		
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar											
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15 Peserta Didik	49.000.003,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	31.972.196,80	SDN 015 BONTANG SELATAN		
						SDN 016 Bontang Selatan								81.573.440,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								127.496.390,00			
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								127.496.390,00			
33	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	127.496.390,00						81.573.440,00		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	127.496.390,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	81.573.440,00		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SDN 016 BONTANG SELATAN		
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar											
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	33 Peserta Didik	122.496.390,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	81.573.440,00	SDN 016 BONTANG SELATAN		
						SDN 001 Bontang Barat								212.592.107,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								212.592.107,00			
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								212.592.107,00			
34	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	212.592.107,00						143.998.434,40		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	212.592.107,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	143.998.434,40		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SDN 001 BONTANG BARAT	
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar											
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	350 Peserta Didik	207.592.107,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	143.998.434,40	SDN 001 BONTANG BARAT	
						SDN 002 Bontang Barat			147.343.115,00						99.969.877,60		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			147.343.115,00						99.969.877,60		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			147.343.115,00						99.969.877,60		
35	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	147.343.115,00						99.969.877,60		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	147.343.115,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	99.969.877,60		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SDN 002 BONTANG BARAT	
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar											
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	216 Peserta Didik	142.343.115,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	99.969.877,60	SDN 002 BONTANG BARAT	
						SDN 003 Bontang Barat			153.391.974,00						148.391.974,40		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			153.391.974,00						148.391.974,40		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			153.391.974,00						148.391.974,40		
36	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	153.391.974,00						148.391.974,40		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	153.391.974,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	148.391.974,40		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SDN 003 BONTANG BARAT	
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	359 Peserta Didik	148.391.974,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	148.391.974,40	SDN 003 BONTANG BARAT	
						SDN 004 Bontang Barat			412.998.188,00						271.359.828,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			412.998.188,00						271.359.828,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			412.998.188,00						271.359.828,00		
37	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	412.998.188,00						271.359.828,00		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	412.998.188,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	271.359.828,00		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SDN 004 BONTANG BARAT	
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar											
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	678 Peserta Didik	407.998.188,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	271.359.828,00	SDN 004 BONTANG BARAT	
						SMPN 1 Bontang			662.750.000,00						447.828.598,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			662.750.000,00						447.828.598,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			662.750.000,00						447.828.598,00		
38	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	662.750.000,00						447.828.598,00		
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	662.750.000,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	447.828.598,00		
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama											
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	874 Peserta Didik	657.750.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	447.828.598,00	SMPN 1 BONTANG	
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											
							0	1 0	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	-	0,00	SMPN 1 BONTANG	
						SMPN 2 Bontang			610.999.535,00						483.199.268,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			610.999.535,00						483.199.268,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			610.999.535,00						483.199.268,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
39	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	610.999.535,00						483.199.268,00		
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	610.999.535,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	483.199.268,00		
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama											
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	806 Peserta Didik	605.999.535,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	483.199.268,00	SMPN 2 BONTANG	
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SMPN 2 BONTANG	
						SMPN 3 Bontang										358.399.480,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										358.399.480,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										358.399.480,00	
40	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	422.199.692,00						358.399.480,00		
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	422.199.692,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	358.399.480,00		
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama											
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	593 Peserta Didik	417.199.692,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	358.399.480,00	SMPN 3 BONTANG	
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SMPN 3 BONTANG	
						SMPN 4 Bontang										319.999.041,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										319.999.041,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										319.999.041,00	
41	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	417.100.000,00						319.999.041,00		
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	417.100.000,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	319.999.041,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama										
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	544 Peserta Didik	412.100.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	319.999.041,00	SMPN 4 BONTANG
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama										
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SMPN 4 BONTANG
						SMPN 5 Bontang			444.600.000,00						367.996.750,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			444.600.000,00						367.996.750,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			444.600.000,00						367.996.750,00	
42	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	444.600.000,00						367.996.750,00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	444.600.000,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	367.996.750,00	
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama										
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	628 Peserta Didik	439.600.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	367.996.750,00	SMPN 5 BONTANG
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama										
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SMPN 5 BONTANG
						SMPN 6 Bontang			206.592.712,00						156.733.560,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			206.592.712,00						156.733.560,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			206.592.712,00						156.733.560,00	
43	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	206.592.712,00						156.733.560,00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	206.592.712,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	156.733.560,00	
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama										
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	284 Peserta Didik	201.592.712,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	156.733.560,00	SMPN 6 BONTANG
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12		13	14	15	16
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		0,00	SMPN 6 BONTANG
						SMPN 7 Bontang			284.995.035,00							243.187.510,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			284.995.035,00							243.187.510,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			284.995.035,00							243.187.510,00	
44	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	284.995.035,00							243.187.510,00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	284.995.035,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		243.187.510,00	
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama											
						Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		401 Peserta Didik	279.995.035,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		243.187.510,00	SMPN 7 BONTANG
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		0,00	SMPN 7 BONTANG
						SMPN 8 Bontang			298.200.000,00							220.787.315,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			298.200.000,00							220.787.315,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			298.200.000,00							220.787.315,00	
45	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	298.200.000,00							220.787.315,00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	298.200.000,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		220.787.315,00	
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama											
						Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		415 Peserta Didik	293.200.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		220.787.315,00	SMPN 8 BONTANG
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		0,00	SMPN 8 BONTANG
						SMPN 9 Bontang			226.227.268,00							185.399.741,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			226.227.268,00							185.399.741,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		226.227.268,00							185.399.741,00		
46	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	226.227.268,00							185.399.741,00		
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	226.227.268,00				-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	185.399.741,00		
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama											
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	318 Peserta Didik	221.227.268,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	185.399.741,00	SMPN 9 BONTANG	
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SMPN 9 BONTANG	
						TK NEGERI 1 BONTANG				113.764.888,00						108.764.888,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				113.764.888,00						108.764.888,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				113.764.888,00						108.764.888,00	
47	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	113.764.888,00							108.764.888,00		
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	113.764.888,00				-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	108.764.888,00		
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD											
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	204 Peserta Didik	108.764.888,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	108.764.888,00	TK NEGERI 1 BONTANG	
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD											
							0	1 0	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	TK NEGERI 1 BONTANG	
						TK NEGERI 2 BONTANG				35.374.874,00						30.374.874,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				35.374.874,00						30.374.874,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				35.374.874,00						30.374.874,00	
48	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	35.374.874,00							30.374.874,00		
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	35.374.874,00				-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	-	30.374.874,00		
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	47 Peserta Didik	30.374.874,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	-	30.374.874,00	TK NEGERI 2 BONTANG	
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD											
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	TK NEGERI 2 BONTANG	
						TK NEGERI 3 BONTANG			24.252.000,00						19.252.000,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			24.252.000,00						19.252.000,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			24.252.000,00						19.252.000,00		
49	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	24.252.000,00						19.252.000,00		
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	24.252.000,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	19.252.000,00		
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD											
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	60 Peserta Didik	19.252.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	19.252.000,00	TK NEGERI 3 BONTANG	
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD											
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	TK NEGERI 3 BONTANG	
						Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bontang			505.000.000,00						0,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			505.000.000,00						0,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			505.000.000,00						0,00		
50	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	505.000.000,00						0,00		
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	505.000.000,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00		
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) BONTANG	
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional				Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1343 Peserta Didik	500.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	0,00	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) BONTANG
	J U M L A H							422.051.124.353,00						224.667.059.703,40		

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						Dinas Kesehatan		138.329.113.808,00							185.182.635.477,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		138.329.113.808,00							185.182.635.477,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		138.329.113.808,00							185.182.635.477,00			
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	91 persen	100.383.768.862,00						127.436.637.977,00			
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 laporan	72.557.520,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	778.980.000,00			
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.984.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	692.120.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	9.984.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	29.369.520,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	53.240.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	23.220.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	26.620.000,00	DINAS KESEHATAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	3 laporan	83.587.989.292,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja 9.Penguatan akses dan mutu kesehatan yang merata	Masyarakat	51.208.840.000,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	608 Orang/bulan	83.518.639.485,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja 9.Penguatan akses dan mutu kesehatan yang merata	Masyarakat	51.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	49.620.273,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	186.340.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	14.763.639,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.965.895,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	12.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 laporan	19.677.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	30.000.000,00	
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	19.677.100,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 laporan	14.868.320,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	15.000.000,00		
	1	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah											
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	14.868.320,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	1 laporan	707.073.160,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	370.000.000,00		
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	19.610.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	602.150.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	85.313.160,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum	1 laporan	4.865.168.020,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	7.325.946.000,00		
	1	02	01	2.06	0001	Penvediaan Komponen Instalasi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	82.054.520,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	133.100.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	3.296.268.967,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	266.200.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	65 Paket	289.785.311,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	3.100.596,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	14.641.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	30.432.500,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	1.068.310.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	6.462.005.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	95.216.126,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	120.000.000,00	DINAS KESEHATAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 laporan	237.889.598,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	346.410.000,00		
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	95.225.184,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	146.410.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	142.664.414,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang	12 bulan	8.995.079.920,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	65.446.332.662,00		
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.950.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	7.320.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	655.600.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	439.230.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.334.529.920,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja 9.Penguatan akses dan mutu kesehatan yang merata	Masyarakat	64.999.782.162,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	489.618.800,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	0,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas												
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	549.949.700,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan												
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	345 Unit	1.499.987.965,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	12.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi												
							Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	400 Unit	249.786.450,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	439.230.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan												
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	328 Paket	2.499.867.750,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	3.061.300.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga												
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1000 Keluarga	100.379.989,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	146.410.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Prevalensi balita Gizi Kurus Prevalensi Hipertensi Prevalensi HIV	10 rasio 172 rasio 11 persen 25 persen 0,16 persen	29.574.824.584,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	38.208.950.000,00			
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3400 Orang	229.732.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	133.100.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin												
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3200 Orang	230.544.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	133.100.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir												
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	229.981.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	133.100.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita												
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15000 Orang	229.980.653,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	133.100.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar												
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19000 Orang	149.999.939,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	133.100.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif												
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	125000 Orang	229.999.941,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	133.100.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut												
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9000 Orang	229.998.092,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	133.100.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12000 Orang	229.999.744,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	133.100.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus												
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4000 Orang	229.999.960,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	133.100.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat												
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	150 Orang	109.999.777,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	133.100.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis												
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3590 Orang	299.999.758,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	133.100.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV												
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5351 Orang	229.999.901,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	133.100.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	79.920.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	133.100.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	149.774.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	399.300.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	200.035.277,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	99.970.032,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	299.999.690,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	299.912.303,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	79.997.328,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	242.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	99.932.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	299.999.714,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	399.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	199.999.940,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terbangunya Sistem informasi kesehatan daerah (SikDa) terpadu	100 persen	199.066.328,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	250.000.000,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6 Dokumen	199.066.328,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi	100 persen	309.410.575,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	519.615.000,00	
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya										
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	4 Unit	109.240.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan										
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	6 Unit	99.969.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	100.201.575,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	219.615.000,00	DINAS KESEHATAN
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan berizin	100 persen	1.013.796.668,00						1.483.012.500,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan berizin	100 persen	14.999.625,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	36.602.500,00	
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	14.999.625,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	36.602.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi) Jumlah Rumah Sakit dengan SDM sesuai Standar	6 FKTP 5 RS	249.460.043,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	246.410.000,00	
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar										
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	30 Orang	100.460.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan										
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	149.000.043,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	146.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan Pendidikan Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar	40 orang 100 persen	749.337.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	1.200.000.000,00	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	40 Orang	749.337.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi obat, sarana distribusi obat dan makanan yg berizin	100 persen	459.220.437,00						652.190.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
															Rencana Tahun 2024			
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana distribusi obat yang berizin yang memenuhi ketentuan	100 persen	129.983.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	146.410.000,00			
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	129.983.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	146.410.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana produksi makanan yang berizin yang memenuhi ketentuan	100 persen	129.999.612,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	271.524.000,00			
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	129.999.612,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	271.524.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan sesuai standar (jasa boga, RM, DAM, Sentra Makanan Jajanan, kantin, makanan jajanan	74 persen	129.951.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	146.410.000,00			
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	129.951.900,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	146.410.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan sesuai standar	99 persen	69.285.925,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	87.846.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta	Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	69.285.925,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	87.846.000,00	DINAS KESEHATAN
5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	55 persen	999.435.700,00						785.290.000,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pedoman/ regulasi/ rekomendasi penerapan kebijakan GERMAS	15 buah	499.900.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	139.755.000,00	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat										
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	499.900.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	139.755.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PHBS 5 Tatanan (Rumah tangga, sekolah, institusi kesehatan, tempat kerja, tempat umum)	60 persen	199.536.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	279.510.000,00	
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat										
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		1 Dokumen	199.536.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	279.510.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	60 persen	299.999.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	366.025.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	299.999.700,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	366.025.000,00	DINAS KESEHATAN	
						UPT Puskesmas Bontang Utara 1			549.999.982,00						1.064.800.000,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			549.999.982,00						1.064.800.000,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			549.999.982,00						1.064.800.000,00		
6	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kepesertaan JKN Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	100 persen 10 rasio 172 rasio	549.999.982,00						1.064.800.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kesembuhan TB Insiden Rate DBD Prevalensi Baduta Stunting Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi balita Gizi Kurus Prevalensi Hipertensi Prevalensi HIV	95 persen 200 rasio 17 persen 6 persen 11 persen 25 persen 0,16 persen	549.999.982,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	1.064.800.000,00		
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	549.999.982,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	1.064.800.000,00	UPT PUSKESMAS BONTANG UTARA 1	
						UPT Puskesmas Bontang Utara 2			549.980.010,00						1.064.800.000,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			549.980.010,00						1.064.800.000,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			549.980.010,00						1.064.800.000,00		
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kepesertaan JKN Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	100 persen 10 rasio 172 rasio	549.980.010,00						1.064.800.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kesembuhan TB IR DBD Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi balita gizi kurus Prevalensi balita gizi stunting Prevalensi Hipertensi Prevalensi HIV	95 persen 200 rasio 6 persen 11 persen 17 persen 25 persen 0,16 persen	549.980.010,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	1.064.800.000,00		
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	549.980.010,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	1.064.800.000,00	UPT PUSKESMAS BONTANG UTARA 2	
						UPT Puskesmas Bontang Selatan 1			549.999.964,00						1.064.800.000,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			549.999.964,00						1.064.800.000,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			549.999.964,00						1.064.800.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
8	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kepesertaan JKN Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	100 persen 10 rasio 172 rasio	549.999.964,00						1.064.800.000,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kesembuhan TB IR DBD Prevalensi Baduta Stunting Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi balita Gizi Kurus Prevalensi Hipertensi Prevalensi HIV	95 persen 200 rasio 17 persen 6 persen 11 persen 25 persen 0,16 persen	549.999.964,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	1.064.800.000,00			
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	549.999.964,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	1.064.800.000,00	UPT PUSKESMAS BONTANG SELATAN 1		
						UPT Puskesmas Bontang Selatan 2									1.064.800.000,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									549.999.067,00		1.064.800.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									549.999.067,00		1.064.800.000,00	
9	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	549.999.067,00						1.064.800.000,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	549.999.067,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	1.064.800.000,00			
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	549.999.067,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	1.064.800.000,00	UPT PUSKESMAS BONTANG SELATAN 2		
						UPT Puskesmas Bontang Barat									549.999.735,00		1.064.800.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									549.999.735,00		1.064.800.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									549.999.735,00		1.064.800.000,00	
10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Ketersediaan obat Esensial Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	100 persen 10 rasio 172 rasio	549.999.735,00						1.064.800.000,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kesembuhan TB IR DBD Prevalensi Baduta Stunting Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi balita Gizi Kurus Prevalensi Hipertensi Prevalensi HIV	95 persen 200 rasio 17 persen 6 persen 11 persen 25 persen 0,16 persen	549.999.735,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	1.064.800.000,00			
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	549.999.735,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	1.064.800.000,00	UPT PUSKESMAS BONTANG BARAT
						UPT Puskesmas Bontang Lestari			599.999.453,00						1.064.800.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			599.999.453,00						1.064.800.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			599.999.453,00						1.064.800.000,00	
11	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Ketersediaan obat Esensial Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	100 persen 10 rasio 172 rasio	599.999.453,00						1.064.800.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kesembuhan TB IR DBD Prevalensi Baduta Stunting Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi balita Gizi Kurus Prevalensi Hipertensi Prevalensi HIV	95 persen 200 rasio 17 persen 6 persen 11 persen 25 persen 0,16 persen	599.999.453,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	1.064.800.000,00	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	599.999.453,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	1.064.800.000,00	UPT PUSKESMAS BONTANG LESTARI
						UPT Laboratorium Kesehatan			850.049.132,00						665.500.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			850.049.132,00						665.500.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			850.049.132,00						665.500.000,00	
12	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Ketersediaan obat Esensial Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	100 persen 10 rasio 172 rasio	850.049.132,00						665.500.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kesembuhan TB IR DBD Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi balita Gizi Kurus Prevalensi balita gizi stunting Prevalensi Hipertensi Prevalensi HIV	95 persen 200 rasio 6 persen 11 persen 17 persen 25 persen 0,16 persen	850.049.132,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	665.500.000,00	
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	850.049.132,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat	665.500.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN
						J U M L A H			142.529.141.151,00						192.236.935.477,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada		230.628.086.333,00								130.066.552.987,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		230.628.086.333,00							130.066.552.987,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		230.628.086.333,00							130.066.552.987,00		
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	97.643.215.851,00						80.984.400.000,00		
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	4 dokumen	2.400.192,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	2.400.000,00		
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.400.250,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	1.400.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA	
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	499.971,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA	
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	499.971,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	90.922.686.536,00			-	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	73.000.000.000,00		
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	489 Orang/bulan	90.778.686.536,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	72.191.800.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA	
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	144.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	808.200.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA	
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	1 laporan	149.877.000,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	250.000.000,00		
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	149.877.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	250.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum	1 laporan	287.732.223,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	2.500.000.000,00		
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	165.323.067,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	2.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA	
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.650.156,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	400.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA	
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	99.759.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 laporan	39.877.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	21.000.000,00	
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	39.877.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	21.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sumber daya air, listrik, komunikasi dan Tenaga Kontrak Daerah	12 Bulan	5.772.173.500,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	4.400.000.000,00	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.772.173.500,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	4.400.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aset Barang Milik Daerah terpelihara	12 Bulan	468.469.400,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	811.000.000,00	
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	12.500.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	11.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	33.600.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	210.475.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	400.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	211.894.400,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	350.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan kepesertaan JKN ; Capaian SPM Tingkat Kota ; Prevalensi Baduta Stunting ; Akreditasi RSUD	100 ; 100 ; 10 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;	132.785.034.545,00						48.682.152.987,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP Sesuai standar ; Rasio FKTP per satuan penduduk ; Persentase FKTL Sesuai standar ; Ketersediaan Alat Kesehatan dan obat esensial	100 ; 1:20.000 ; 100 ; 100 persen ; rasio ; persen ; persen	785.034.545,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	682.152.987,00	
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		1 Unit	257.274.400,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	654.152.987,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		1 Unit	5.210.600,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	21.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	3 Unit	522.549.545,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	7.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kesembuhan TB ; Prevalensi HIV ; IR DBD ; Prevalensi Hipertensi ; Prevalensi balita gizi kurang ; Prevalensi balita Gizi kurus ; Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Terakreditasi	95 ; 0.16 ; 200 ; 25 ; 6 ; 10 ; 100 angka ; persen	132.000.000.000,00			-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	48.000.000.000,00		
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit											
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	132.000.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	48.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA	
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan Dengan SDM Sesuai Standar (Jumlah, Jenis dan Kompetensinya)	100 persen	149.877.000,00						350.000.000,00		
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan SDMK mendapatkan pengembangan kompetensi	100 persen	149.877.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	350.000.000,00		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	15 Orang	149.877.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	350.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA	
4	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	100 persen	49.958.937,00						50.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PHBS 5 Tatanan (Rumah tangga sekolah institusi kesehatan tempat kerja tempat umum)	100 persen	49.958.937,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	50.000.000,00		
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat											
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		1 Dokumen	49.958.937,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA	
	J U M L A H								230.628.086.333,00							130.066.552.987,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTAKOTA BONTANG
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024			
												Nasional	Daerah				Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		512.835.648.418,00								452.326.776.537,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		512.835.648.418,00							452.326.776.537,00			
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		512.835.648.418,00							452.326.776.537,00			
1	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	33.084.107.592,00						29.636.776.537,00			
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Aparatur	100 %	64.322.510,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah DPUPR	50.000.000,00			
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	64.322.510,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah DPUPR	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Aparatur	100 %	22.199.311.215,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	ASN DPUPR	22.902.884.369,00			
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/bulan	22.196.813.207,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	ASN DPUPR	22.899.884.369,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.498.008,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	ASN DPUPR	3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024			
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Aparatur	100 persen	769.968.154,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai DPUPR	900.000.000,00			
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	399.291.592,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai DPUPR	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	270.677.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pegawai DPUPR	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	99.999.562,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai DPUPR	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Aparatur	100 persen	1.239.864.612,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah DPUPR	1.860.000.000,00			
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.356.903,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah DPUPR	10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	286.110.359,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah DPUPR	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	30.801.215,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah DPUPR	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	80.594.330,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah DPUPR	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	581.853.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah DPUPR	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	350 Dokumen	251.148.805,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah DPUPR	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100 persen	6.210.439.067,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Barang Milik Daerah DPUPR	700.000.000,00			
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	27 Laporan	1.342.756.956,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Perangkat Daerah DPUPR	1.561.892.168,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	936.357.078,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Barang Milik Daerah DPUPR	950.000.000,00			
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan											Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	701.834.678,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Barang Milik Daerah DPUPR	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	234.522.400,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Barang Milik Daerah DPUPR	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
2	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kapasitas aliran sungai Persentase kapasitas unit embung/ penampung air/sumur air tanah/air baku Persentase daya tampung danau/folder/kolam retensi	70 % 87 % 89,59 %	253.810.039.400,00						224.600.000.000,00			
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang turap dan tanggul yang telah dibangun/ panjang keseluruhan sungai	1233 meter	253.810.039.400,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat terdampak banjir	224.600.000.000,00			
	1	03	02	2.01	0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,1 KM	212.945.849.760,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat terdampak banjir	100.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai										
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	12 Dokumen	954.635.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat terdampak banjir	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1	03	02	2.01	0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi										
							Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	3 Unit	24.000.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat terdampak banjir	100.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1	03	02	2.01	0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir										
							Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 Unit	285.400.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat terdampak banjir	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	293.454.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat terdampak banjir	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
3	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum layak	84,8 %	38.439.164.380,00						21.100.000.000,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah untuk rumah tangga	0 SR	38.439.164.380,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat yang belum terlayani SR air minum	21.100.000.000,00	
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)										
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	111.818.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat yang belum terlayani SR air minum	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan										
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	25 Liter/Detik	29.986.260.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat yang belum terlayani SR air minum	15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)										
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	267.506.380,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat yang belum terlayani SR air minum	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan										
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	25 SR	8.073.580.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat yang belum terlayani SR air minum	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
4	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	4.964.115.085,00						4.000.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	15 Dokumen	1.907.475.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat terdampak banjir	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
7	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-	72.367.668.937,00						3.950.000.000,00	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yg memenuhi persyaratan teknis	77,05 %	72.367.668.937,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah	3.950.000.000,00	
	1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	2 Bangunan Gedung	570.769.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	4 Bangunan Gedung	4.956.055.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	66.140.843.575,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung										
							Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	75 Orang	62.465.006,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50 Dokumen	637.535.432,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Perangkat Daerah	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
8	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase sempadan sungai yang tertata	18,46 %	256.201.800,00						600.000.000,00	
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Panjang sempadan sungai yang tertata	50 meter	256.201.800,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat di Sempadan Sungai	600.000.000,00	
	1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan										
							Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	28.180.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat di Sempadan Sungai	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya										
							Jumlah Bangunan dan lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	228.021.800,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat di Sempadan Sungai	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
9	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	50.534.037.625,00						138.650.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0.3 KM	17.255.351.739,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat Pengguna Jalan	20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan												
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.8 KM	227.999.316,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat Pengguna Jalan	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	1	03	10	2.01	0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa												
							Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	0.7 KM	200.017.808,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat Pengguna Jalan	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan												
							Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	227.999.316,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat Pengguna Jalan	550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024			
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0.7 KM	1.992.650.720,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat Pengguna Jalan	2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
10	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-	771.270.000,00						1.610.000.000,00			
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Data Tenaga Kerja Yang Bersertifikat	1719 tenaga kerja	248.777.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pekerja Konstruksi	560.000.000,00			
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis												
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	198.777.500,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pekerja Konstruksi	360.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis												
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	10 Orang	50.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pekerja Konstruksi	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Badan Usaha Yang Berizin	250 Badan Usaha	120.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat Jasa Konstruksi	300.000.000,00			

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	129.988.280,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah DPUPR	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1	03	12	2.02	0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang										
							Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	50 Orang	50.001.220,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah DPUPR	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1	03	12	2.02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota										
							Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	691.228.012,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah DPUPR	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang										
							Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	58.890.153,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah DPUPR	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan	100 PKKPR	284.963.410,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah DPUPR	480.000.000,00	
	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	100 Layanan	179.998.773,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah DPUPR	180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang										
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	104.964.637,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah DPUPR	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi atau pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang	5 Rekomedasi	210.029.727,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah DPUPR	500.000.000,00	
	1	03	12	2.04	0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang										
							Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	5 Kasus	49.913.543,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah DPUPR	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK										
							Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	30.067.780,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah DPUPR	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024			
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	100.007.604,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah DPUPR	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	1	03	12	2.04	0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan												
							Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen	30.040.800,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah DPUPR	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA		
	J U M L A H								512.835.648.418,00							452.326.776.537,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	877.903.200,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Perangkat Daerah	916.611.130,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 persen	1.173.357.204,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Perangkat Daerah	1.193.414.014,00		
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	74 Unit	892.667.204,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Perangkat Daerah	893.414.014,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	280.690.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
2	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	34 persen 45.5 persen	1.640.511.700,00						2.700.000.000,00		
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis data rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi rumah program pemerintah	4 dokumen	470.611.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat Yang Terdampak Bencana atau Relokasi	400.000.000,00		
	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan											
							Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	133.736.200,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat Yang Terdampak Bencana atau Relokasi	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	1 Rumah Tangga	23.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat Yang Terdampak Bencana atau Relokasi	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota										
							Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Unit Rumah	786.260.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat Yang Terdampak Bencana atau Relokasi	800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yg ditangani	97.3 persen	9.659.488.300,00						175.000.000,00	
	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah rekomendasi izin pembangunan & pengembangan kawasan permukiman yg diterbitkan	1 dokumen	200.495.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat	175.000.000,00	
	1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman										
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	200.495.700,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat	175.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2 dokumen	2.778.088.602,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh	0,00	
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP										
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	995.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh										
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1.782.918.602,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	44.900.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Pemerintah,Masyarakat, dan Badan Hukum	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah	100 persen	155.268.000,00						300.000.000,00	
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	155.268.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Masyarakat dan Badan Hukum Yang Terdampak Program Pembangunan Pemerintah	300.000.000,00	
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	155.268.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Masyarakat dan Badan Hukum Yang Terdampak Program Pembangunan Pemerintah	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
8	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	50 persen	472.868.440,00						665.000.000,00	
	2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	100 persen	472.868.440,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Pemerintah,Masyarakat, dan Badan Hukum	665.000.000,00	
	2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	472.868.440,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Pemerintah,Masyarakat, dan Badan Hukum	665.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
9	2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase penyediaan tanah untuk masyarakat	100 persen	56.296.000,00						100.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah fasilitas penerbitan izin membuka tanah	3 lokasi	56.296.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Pemerintah,Masyarakat, dan Badan Hukum	100.000.000,00	
	2	10	09	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah										
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	56.296.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Pemerintah,Masyarakat, dan Badan Hukum	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
10	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penyediaan tanah untuk fasilitas publik	10 persen	394.204.660,00						430.000.000,00	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Peta Zona Nilai Tanah	1 dokumen	394.204.660,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Pemerintah,Masyarakat, dan Badan Hukum	430.000.000,00	
	2	10	10	2.01	0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota										
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	394.204.660,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Pemerintah,Masyarakat, dan Badan Hukum	430.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
						UPT RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA									4.279.679.200,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									4.279.679.200,00	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									4.279.679.200,00	
11	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	34 persen 45.5 persen	6.172.679.200,00						4.279.679.200,00	
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah RT, KK & jiwa penghuni rumah susun umum & rumah khusus yg dibina	406 jiwa	6.172.679.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat Penghuni Rusunawa	4.279.679.200,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	5.769.679.200,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat Penghuni Rusunawa	4.279.679.200,00	UPT RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4 Dokumen	403.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat Penghuni Rusunawa	0,00	UPT RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
	J U M L A H								77.002.674.433,00						37.139.990.053,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKOTA BONTANG
TAHUN 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						Satuan Polisi Pamong Praja			17.397.438.095,00						19.879.000.000,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.397.438.095,00						19.879.000.000,00		
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			17.397.438.095,00						19.879.000.000,00		
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 Persen	16.350.500.395,00						18.375.000.000,00		
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.825.824,00			-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Satpol PP	1.800.000,00		
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	608.608,00	Kota Bontang, Bontang Utara , Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Satpol PP	600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	608.608,00	Kota Bontang, Bontang Utara , Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Satpol PP	600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	608.608,00	Kota Bontang, Bontang Utara , Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Satpol PP	600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	9.019.336.148,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Aparatur Sipil Negara Satpol PP	10.501.200.000,00		
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	9.018.118.932,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Aparatur Sipil Negara Satpol PP	10.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	608.608,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Aparatur Sipil Negara Satpol PP	600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	608.608,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Aparatur Sipil Negara Satpol PP	600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	246.080.342,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Pegawai Satpol PP	290.000.000,00			
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	173.345.342,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Pegawai Satpol PP	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	72.735.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Pegawai Satpol PP	90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.579.210.044,00			-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Pegawai Satpol PP	1.315.000.000,00		
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.757.380,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Pegawai Satpol PP	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	380.961.579,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Pegawai Satpol PP	400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	52.429.167,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Pegawai Satpol PP	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	53.540.918,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Pegawai Satpol PP	60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan	1.081.521.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Pegawai Satpol PP	800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	4.347.463.720,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Satpol PP	5.215.000.000,00		
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Satpol PP	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	267.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Satpol PP	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	83 Laporan	4.068.463.720,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Satpol PP	5.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1.156.584.317,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Barang Milik Daerah Satpol PP	1.052.000.000,00			
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	1.091.104.317,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Barang Milik Daerah Satpol PP	1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	34.160.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Barang Milik Daerah Satpol PP	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	44 Unit	31.320.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Barang Milik Daerah Satpol PP	22.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
2	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan ; Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100;100 Persen	1.046.937.700,00						1.504.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Daerah	100 Persen	641.187.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bontang	990.000.000,00	
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia										
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	31 Orang	181.648.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bontang	250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional										
							Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	6 Orang	99.102.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bontang	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan										
							Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	4 Orang	118.608.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bontang	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas										
							Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	3 Orang	46.551.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bontang	60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan										
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	300 laporan	140.840.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bontang	250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa										
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 Laporan	48.100.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bontang	70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah										
							Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	6.338.900,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kota Bontang	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 Persen	384.374.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Masyarakat Kota Bontang	430.000.000,00			
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	52.756.700,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Masyarakat Kota Bontang	60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah												
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	270.834.800,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Masyarakat Kota Bontang	300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	22 Laporan	60.783.300,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Masyarakat Kota Bontang	70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100 Persen	21.375.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS)	84.000.000,00			
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS												
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	21.375.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS)	84.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	J U M L A H								17.397.438.095,00							19.879.000.000,00		

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah			15.767.943.513,00						14.245.873.897,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15.767.943.513,00						14.245.873.897,00		
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			15.767.943.513,00						14.245.873.897,00		
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	12.116.261.773,00						8.969.379.321,00		
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100 persen	4.733.055,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	135.429.250,00		
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.733.055,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	135.429.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100 Persen	7.945.145.891,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.114.000.000,00		
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	7.945.145.891,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.114.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100 persen	1.108.287.589,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	678.324.691,00		
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.696.068,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.402.271,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	127.132.249,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43.923.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.466.910,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	188.890.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	170.860.470,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	277.152.820,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.156.639.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.047.352.204,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.158.434.000,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54 Unit	984.462.204,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.083.434.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	62.890.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang memperoleh layanan kebencanaan	100 persen	3.651.681.740,00						5.276.494.576,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 persen	210.361.262,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67.300.000,00	
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)										
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	380 Orang	210.361.262,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	15 persen	2.529.224.300,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.221.475.243,00	
	1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota										
							Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	73.486.330,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	903.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota										
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	350.660.786,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	366.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota										
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	150 Orang	384.413.047,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	10 Kawasan	175.860.608,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	872.925.243,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota										
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	52 Orang	804.544.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota										
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	153.927.800,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	366.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota										
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	548.591.729,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota										
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	15 Kawasan	37.740.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	175.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	576.970.328,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.344.000.000,00	
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota										

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATANKOTA BONTANG
TAHUN 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		38.688.567.940,00							35.323.258.572,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		38.688.567.940,00							35.323.258.572,00			
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		38.688.567.940,00							35.323.258.572,00			
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		31.611.941.341,00						31.613.322.250,00			
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		101.849.634,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	90.000.000,00			
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.923.230,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	30.086.246,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	61.840.158,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	70.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		19.598.313.677,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4.Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan lainnya	-	20.149.079.170,00			
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	282.336.076,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	340.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	182.064.283,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	909.718.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	800.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	774.172.612,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	21.500.000,00	
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	752.400.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	1.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	21.772.612,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.595.727.452,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	7.660.500.000,00			
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9.500.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	9.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	341.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4.Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan lainnya	-	341.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	143 Laporan	7.245.227.452,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4.Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan lainnya	-	7.310.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.745.470.300,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4.Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan lainnya	-	1.671.958.180,00			
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	1.377.640.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4.Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan lainnya	-	1.441.958.180,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1	05	01	2.09	0002	Penvediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	49.600.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4.Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan lainnya	-	100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	156.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	80.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	162.230.300,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-	7.076.626.599,00						3.709.936.322,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.904.786.249,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	3.289.936.322,00	
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	99.940,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	100.275.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	938.501.404,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	950.661.322,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	672.310.388,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	675.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	17.225.810,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	162.783.256,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	244.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran												
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	30 Orang	589.222.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	600.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)												
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	15 Desa/Kelurahan	96.266,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri												
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit	524.547.185,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	600.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-	111.272.490,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	40.000.000,00	
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran										
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	19.970.180,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran										
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	91.302.310,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	4.060.567.860,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	380.000.000,00	
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat										
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	750 Orang	700.258.125,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran										
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 Desa/Kelurahan	3.125.734.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	1 Dokumen	234.575.735,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	130.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	J U M L A H								38.688.567.940,00								35.323.258.572,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		27.494.179.211,00								24.307.426.805,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		25.801.272.873,00								23.622.426.805,00		
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		25.801.272.873,00								23.622.426.805,00		
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	17.604.882.890,00						17.480.926.805,00			
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	2 Dokumen	59.852.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai DSPM	80.000.000,00			
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	29.852.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai DSPM	45.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Pegawai DSPM	35.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang	11.554.948.288,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	12.287.362.833,00			
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	26.231.250,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	55.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat											
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	22.749.939,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	40.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak											
							Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	16.999.900,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	25.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	16.998.956,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	25.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	13.581.750,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	25.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	12.999.300,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	25.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	26.044.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	25.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan											
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	42.196.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	75.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	32.494.417,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	35.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak										
							Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	19.499.860,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	17.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	19.490.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	21.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	19.493.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	21.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga										
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	42.886.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	38.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan										
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	38.992.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	35.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	12 Dokumen	38.999.809,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	35.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial ; Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)	100,00 ; 100,00 persen	2.166.032.753,00						795.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Keluarga	2.166.032.753,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)	795.000.000,00		
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	47102 Orang	123.039.155,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)	280.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1291 Keluarga	120.362.643,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)	230.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga											
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Keluarga	1.303.790.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)	165.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat											
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	618.840.955,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)	120.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	100,00 persen	879.036.573,00						658.000.000,00		
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	554.129.751,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	438.000.000,00		
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan											
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	299.948.899,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	38.690.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Lembaga	438.128.834,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Unit	45.444.202,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	300.068.751,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan	170.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	350.740.693,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6 Dokumen	519.833.858,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan	340.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	J U M L A H								27.494.179.211,00							24.307.426.805,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KETENAGAKERJAANKOTA BONTANG
TAHUN 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						Dinas Ketenagakerjaan		24.108.883.153,00								24.440.205.581,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		24.108.883.153,00							24.440.205.581,00			
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		24.108.883.153,00							24.440.205.581,00			
1	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	11.000.508.633,00						11.425.205.581,00			
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100 persen	129.919.681,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang	50.000.000,00			
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	129.919.681,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang	50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN		
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100 persen	7.910.095.378,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	ASN Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang	8.400.000.000,00			
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	7.910.095.378,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2.Menguatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kerukunan dan mencegah konflik sosial	ASN Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang	8.400.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN		
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100 persen	66.286.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang	65.000.000,00			
	2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	599.998.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat daerah	600.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN		
	2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	49.289.313,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat daerah	49.291.233,00	DINAS KETENAGAKERJAAN		
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100 persen	99.040.480,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat daerah	100.000.000,00			
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	99.040.480,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat daerah	100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN		
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100 persen	1.746.568.872,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat daerah	1.746.614.348,00			
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat daerah	4.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN		
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Perangkat daerah	66.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN		
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.676.568.872,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Perangkat daerah	1.676.614.348,00	DINAS KETENAGAKERJAAN		
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 persen	253.713.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	BMD Dinas Ketenagakerjaan	269.600.000,00			
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan												
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	234.213.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	BMD Dinas Ketenagakerjaan	250.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN		
	2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	19.500.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Dinas Ketenagakerjaan	19.600.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN		
2	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase produktifitas tenaga kerja ; Persentase pencari kerja yang dilatih	1,10 ; 5,37 persen	4.445.036.281,00						4.375.000.000,00			
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi pada Tahun n	100 persen	4.049.991.278,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	pencari kerja	4.000.000.000,00			
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	497 Orang	4.049.991.278,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	pencari kerja	4.000.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	100 persen	320.070.401,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	300.000.000,00	
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	23 Lembaga	320.070.401,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	300.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhi Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	74.974.602,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	perusahaan/tenaga kerja	75.000.000,00	
	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	74.974.602,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	perusahaan/tenaga kerja	75.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
3	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	22 persen	628.518.908,00						675.000.000,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja/pencari kerja yang mendapat pelayanan antar kerja di kabupaten/kota	100 persen	279.060.185,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	pencari kerja/tenaga kerja	325.000.000,00	
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja										
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	200 Orang	99.228.963,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	pencari kerja/tenaga kerja	125.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja										
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	250 Orang	79.833.255,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	pencari kerja/tenaga kerja	100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 Perkara	9.984.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	perusahaan/tenaga kerja/pekerja rentan	120.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	205.599.762,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	perusahaan/tenaga kerja/pekerja rentan	200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja											
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	34782 Orang	7.069.384.614,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja 13.Meningkatkan jaringan dan layanan penempatan tenaga kerja	perusahaan/tenaga kerja/pekerja rentan	7.100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	J U M L A H								24.108.883.153,00							24.440.205.581,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024			
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		21.154.174.471,00								16.959.488.106,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		21.154.174.471,00							16.959.488.106,00			
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		17.388.572.609,00							14.722.367.733,00			
1	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Layanan Kantor	100 Persen	14.204.961.868,00						12.587.517.433,00			
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.873.506,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	penyelenggaraan urusan pemerintahan dan layanan kantor	1.971.285,00			
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	1.873.506,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	penyelenggaraan urusan pemerintahan dan layanan kantor	1.971.285,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan PPPK DP3AKB	43 Orang	10.555.121.130,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	9.500.000.000,00			
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	10.555.121.130,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	9.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.133.928.240,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Layanan Kantor	1.306.805.688,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana penunjang di DP3AKB	100 Persen	1.161.382.564,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Layanan Kantor	820.000.000,00	
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	971.162.564,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Layanan Kantor	800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	45.420.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Layanan Kantor	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	144.800.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Layanan Kantor	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024			
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Gender Pada Belanja Langsung APBD Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0,499 Persen 47,85 Persen	1.182.363.471,00						719.300.300,00			
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi yang responsif Gender di Lembaga Pemerintah dan Swasta	10 Organisasi	262.061.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Meningkatnya akses pemberdayaan yang responsif gender	219.300.300,00			
	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG												
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	262.061.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Meningkatnya akses pemberdayaan yang responsif gender	219.300.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Yang responsif Gender di Lembaga Pemerintah dan Swasta	10 organisasi	920.302.471,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Meningkatnya akses pemberdayaan yang responsif gender kota Bontang	500.000.000,00			
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi												
							Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Organisasi	920.302.471,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Meningkatnya akses pemberdayaan yang responsif gender kota Bontang	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
3	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	100 Persen	399.197.868,00						356.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024			
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	399.197.868,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Perempuan terlapor yang mengalami kekerasan	356.000.000,00			
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	155.464.015,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Perempuan terlapor yang mengalami kekerasan	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Perangkat Daerah	243.733.853,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Perempuan terlapor yang mengalami kekerasan	56.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
4	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga	100 Persen	329.991.098,00						100.000.000,00			
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender	100 Persen	329.991.098,00			-	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	100.000.000,00			
	2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	60 Layanan	329.991.098,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
5	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan data gender dan anak terpadu	100 Persen	99.988.495,00						66.550.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak	100 Persen	99.988.495,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Data Gender dan anak	66.550.000,00	
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	99.988.495,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Data Gender dan anak	66.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
6	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat Kota Layak Anak	Utama Predikat	598.913.572,00						401.000.000,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha yang telah mendapatkan pelembagaan PHA	45 Lembaga	598.913.572,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Kota Bontang yang Layak Anak	401.000.000,00	
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	45 Organisasi	378.142.254,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Kota Bontang yang Layak Anak	341.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Dokumen	220.771.318,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Kota Bontang yang Layak Anak	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															Perencana Tahun 2024	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	65 Orang	214.018.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Akseptor	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)										
							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	195.205.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Akseptor	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan terdistribusinya Alat, Obat Kontrasepsi dan Pelayanan KB	100 Persen	731.818.757,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Akseptor	445.907.473,00	
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB										
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	27.535.169,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Akseptor	20.907.473,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi										
							Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	20 Orang	398.080.255,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Akseptor	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	237.052.754,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Akseptor	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria										
							Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	120 Orang	47.745.324,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Akseptor	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan										
							Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	75 Orang	21.405.255,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Akseptor	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	jumlah kesertaan organisasi masyarakat dalam Program Bangsa Kencana	25 Persen	233.969.122,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Akseptor	200.000.000,00	
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas										
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15 Kampung	233.969.122,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Akseptor	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
10	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Tersedianya kelompok Tribina dan UPPKS yang dibina dan dibentuk	79 Persen	979.852.537,00						822.400.000,00			
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya kelompok Tribina dan UPPKS yang dibina dan dibentuk	100 Persen	585.445.121,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Kelompok Kegiatan Bangsa Kencana	471.000.000,00			
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)												
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	124.899.112,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Kelompok Kegiatan Bangsa Kencana	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))												
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	214.124.957,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Kelompok Kegiatan Bangsa Kencana	115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))												
							Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	241 Orang	152.460.567,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Kelompok Kegiatan Bangsa Kencana	162.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2 Laporan	93.960.485,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Kelompok Kegiatan Bangsa Kencana	94.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya kelompok Tribina dan UPPKS yang dibina dan dibentuk	100 Persen	394.407.416,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Kelompok Kegiatan Bangsa Kencana	351.400.000,00	
	2	14	04	2.02	0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Organisasi	103.646.790,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Kelompok Kegiatan Bangsa Kencana	134.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
						Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 Laporan	188.360.964,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Kelompok Kegiatan Bangsa Kencana	115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja										
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	4 Laporan	102.399.662,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Kelompok Kegiatan Bangsa Kencana	102.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
						UPT Perlindungan Perempuan dan Anak			973.581.942,00						679.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			973.581.942,00						679.000.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional				Daerah	
1	2				3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		973.581.942,00						679.000.000,00		
11	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap perempuan	100 Persen	653.462.082,00					350.000.000,00		
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	tersedianya layanan UPT PPA	100 Persen	653.462.082,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Perempuan terlapor yang mengalami kekerasan	350.000.000,00	
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota										
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		50 Orang	653.462.082,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Perempuan terlapor yang mengalami kekerasan	350.000.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
12	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 Persen	320.119.860,00						329.000.000,00	
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase penyelesaian kasus masuk	100 Persen	320.119.860,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	329.000.000,00	
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		60 Orang	320.119.860,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	329.000.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	J U M L A H							22.127.756.413,00						17.638.488.106,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	287.846.838,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	49.995.930,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	87.833.905,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	87.834.153,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1.716.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	1.716.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	28.368.858,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	4.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan	980.690.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	4.985.032,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	125.059.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	723.849.000,00	
	2	09	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1.210.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	123.849.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	123.849.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.950.180.800,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	2.838.500.736,00	
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17.400.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	13.720.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08	0002	Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	5 Laporan	300.514.661,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Dinas Terkait dan Masyarakat	158.514.661,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN		
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Ton	289.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Dinas dan Masyarakat	577.798.242,00			
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	289.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Dinas dan Masyarakat	577.798.242,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN		
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Tingkat Konsumsi Energi (%TKE) dan Protein (%TKP) terhadap target 2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari WNPG tahun 2012 Persentase Tingkat Konsumsi Energi (%TKE) dan Protein (%TKP) terhadap target 2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari WNPG tahun 2012	2150 Kkal/kap/hari 57 Gram/kap/hari	1.450.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Dinas Terkait dan Masyarakat	908.368.294,00			
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun												
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 Dokumen	350.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Dinas Terkait dan Masyarakat	392.447.280,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN		
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal												
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	7 Laporan	1.100.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Dinas Terkait dan Masyarakat	515.921.014,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita	100 Persen	181.500.000,00						199.650.000,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	3 Dokumen	181.500.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Dinas dan Instansi Terkait	199.650.000,00	
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan										
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	3 Dokumen	181.500.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Dinas dan Instansi Terkait	199.650.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
4	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	100 Persen	267.746.715,00						277.900.821,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fungsi Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	100 Persen	267.746.715,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Dinas terkait dan Masyarakat	277.900.821,00	
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 Dokumen	267.746.715,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Dinas terkait dan Masyarakat	277.900.821,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			5.821.700.095,00						4.985.500.000,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			3.131.000.000,00						2.000.000.000,00	
5	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	21511 Ton	1.050.000.000,00						650.000.000,00	
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan yang Dibina	10 Kelompok	1.050.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Nelayan Skala Kecil	650.000.000,00	
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024			
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	900.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Nelayan Skala Kecil	375.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN		
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil												
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	14 Kelompok	150.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Nelayan Skala Kecil	275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN		
6	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	3450 Ton	750.000.000,00						1.050.000.000,00			
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang dibina	12 Kelompok	200.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Pembudidaya Ikan	300.000.000,00			
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan												
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	15 Kelompok	200.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Pembudidaya Ikan	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN		
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang Disediakan	17 Jenis	550.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Pembudidaya Ikan	750.000.000,00			
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Pembudidaya Ikan	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	300.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Pembudidaya Ikan	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN		
	3	25	04	2.04	0010	Pembiinan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembiinan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	200 Unit	150.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Pembudidaya Ikan	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN		
7	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	33 Persen	1.331.000.000,00						300.000.000,00			
	3	25	06	2.02		Pembiinan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Sektor Perikanan	10 Unit Usaha	100.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	125.000.000,00			
	3	25	06	2.02	0002	Pembiinan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko												
						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	10 Unit Usaha	100.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN		
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	33 Persen	1.231.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	175.000.000,00			
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024		
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1000 Ton	926.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	14 Pelaku Usaha	305.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									2.985.500.000,00		
8	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana pertanian	100 Persen	971.880.441,00						1.400.000.000,00		
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100 Persen	479.999.515,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Tani dan Masyarakat	800.000.000,00		
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi											
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	99.999.652,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Tani dan Masyarakat	500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian											
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	379.999.863,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Tani dan Masyarakat	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok	20 Kelompok	200.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Peternak	300.000.000,00	
	3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak										
							Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	2 Laporan	200.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Peternak	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penambahan jumlah populasi ternak di kelompok	500 Ekor	291.880.926,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Tani/Ternak	300.000.000,00	
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain										
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	500 Ekor	291.880.926,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Tani/Ternak	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
9	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan	100 Persen	199.999.896,00						150.000.000,00	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian dan peternakan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100 Persen	199.999.896,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Dinas dan Masyarakat	150.000.000,00	
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	149.737.403,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Masyarakat	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
11	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan wilayah yang terkendali dari bencana pertanian	100 Persen	181.500.000,00						199.650.000,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100 Persen	181.500.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Tani	199.650.000,00	
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan										
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	33 Ha	181.500.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Tani	199.650.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
12	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian	100 Persen	804.000.000,00						465.850.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100 Persen	804.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Tani dan Masyarakat Tani	465.850.000,00	
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa										
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Unit	700.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Tani dan Masyarakat Tani	365.850.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024		
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	10 Unit	104.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 10.Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan masyarakat	Kelompok Tani dan Masyarakat Tani	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	
						UPT Tempat Pelelangan Ikan			252.200.000,00						225.000.000,00		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			252.200.000,00						225.000.000,00		
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			252.200.000,00						225.000.000,00		
13	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	21511 Ton	252.200.000,00						225.000.000,00		
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100 Persen	252.200.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 10.Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan masyarakat	Masyarakat Nelayan	225.000.000,00		
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)											
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5000 Layanan	252.200.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 10.Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan masyarakat	Masyarakat Nelayan	225.000.000,00	UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN	
						UPT Rumah Potong Hewan			199.960.000,00						150.000.000,00		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			199.960.000,00						150.000.000,00		
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			199.960.000,00						150.000.000,00		
14	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan	100 Persen	199.960.000,00						150.000.000,00		
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian dan peternakan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100 Persen	199.960.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 10.Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan masyarakat	Masyarakat	150.000.000,00		
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan											
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	199.960.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 10.Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan masyarakat	Masyarakat	150.000.000,00	UPT RUMAH POTONG HEWAN	
						UPT Balai Benih Ikan			399.999.655,00						350.000.000,00		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			399.999.655,00						350.000.000,00		
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			399.999.655,00						350.000.000,00		
15	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	3450 Ton	399.999.655,00						350.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024			
												Nasional	Daerah				Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Operasional Balai Benih Ikan	12 Bulan	399.999.655,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 10.Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan masyarakat	Kelompok Pembudidaya Ikan	350.000.000,00			
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil												
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	12 Kelompok	399.999.655,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 10.Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan masyarakat	Kelompok Pembudidaya Ikan	350.000.000,00	UPT BALAI BENIH IKAN		
	J U M L A H								35.559.150.603,00								34.660.677.909,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	9.500.344.429,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	9.190.602.858,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	9.923.230,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	1.350.690,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	624.502,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	1.349.700,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	624.502,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	1.349.700,00	DINAS PERHUBUNGAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	161.398.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	199.702.890,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.105.435.920,00			-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	829.237.952,00			
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.625.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	6.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	490.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	564.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	54 Laporan	2.602.810.920,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	258.737.952,00	DINAS PERHUBUNGAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Unit	1.141.520.692,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar..	Meningkatnya sarana prasarana keselamatan lalu lintas yang terpasang dan berfungsi dengan baik	3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan												
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	2.598.750.617,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar..	Meningkatnya sarana prasarana keselamatan lalu lintas yang terpasang dan berfungsi dengan baik	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan												
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	68 Unit	5.503.286.078,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar..	Meningkatnya sarana prasarana keselamatan lalu lintas yang terpasang dan berfungsi dengan baik	4.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	229.136.202,00			-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar..	-	125.000.000,00			
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota												
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	229.136.202,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar..	-	125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	169.852.000,00			-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar..	-	597.500.000,00	
	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	50.094.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar..	-	105.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	25.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar..	-	192.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	6 Unit	94.758.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar..	-	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	66.514.235,00			-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar..	-	185.000.000,00	
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	48.084.760,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar..	-	170.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	18.429.475,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar..	-	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-	115.685.362,00			-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	50.000.000,00		
	2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum											
							Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	9 Laporan	115.685.362,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	116.429.475,00			-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	100.000.000,00		
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	116.429.475,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
3	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	4.999.473.000,00						0,00		
	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	4.999.473.000,00			-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	0,00		
	2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal											
							Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1 Unit	4.999.473.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
J U M L A H									39.803.647.125,00							22.410.935.537,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	62.690.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	10.228.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	92.028.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	828.681.417,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	1.158.531.479,00		
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.745.972,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	5.747.116,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	134.722.039,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	416.241.786,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.455.857,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	36.460.697,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	81.454.549,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	94.992.880,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	570.303.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	605.089.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	32.910.293,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	298.773.997,00	
	2	12	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	680.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	227.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	28.567.772,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	65.718.204,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.662.521,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	6.055.793,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	5.833.720,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat	6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	J U M L A H								15.003.344.869,00							17.888.326.576,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Dinas Komunikasi dan Informatika		43.479.161.678,00							53.429.322.901,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		43.479.161.678,00							53.429.322.901,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		41.151.322.958,00							50.923.388.759,00	
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	14.195.154.324,00						15.823.437.010,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	104.755.192,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	115.230.711,00	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	104.755.192,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	115.230.711,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	11.455.355.181,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	12.601.100.395,00	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	11.416.645.461,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	12.558.287.395,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	20.197.360,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	22.213.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	500.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	2.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	31 Laporan	1.109.719.040,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	1.215.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	378.814.790,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	592.342.989,00			
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	33.856.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	37.241.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	258.273.990,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	284.101.389,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	37.964.800,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	5.324.972.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	5.857.469.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten												
							Jumlah Konten Informasi Publik	24 Konten	224.993.960,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	264.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik												
							Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	1 Orang	29.762.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	32.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	45 persen 83,87 persen	20.636.515.021,00						22.607.482.549,00			
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik Persentase ruang publik yang memiliki akses internet	83,87 Persen 100 Persen 80 Persen	20.636.515.021,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	22.607.482.549,00			
	2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional												
							Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi	2.088.554.752,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	17.419.545.320,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda												
							Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2 Laporan	2.312.890.658,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	2.512.937.229,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	27.203.584,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	29.923.942,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral										
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	131.034.035,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	140.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia										
							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	283.840.035,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	294.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar										
							Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	81.160.240,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	89.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			1.687.318.826,00						1.824.000.000,00	
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	85,27 tingkat	1.687.318.826,00						1.824.000.000,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	1.687.318.826,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	1.824.000.000,00	
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	495.562.309,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	523.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024			
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.572.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Aparatur	2.572.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11.624.348.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Aparatur	10.923.523.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DKUKMP	12 Bulan	817.326.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Aparatur	1.038.644.211,00			
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	758.646.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Aparatur	763.644.211,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	57.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Aparatur	75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Aparatur	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
2	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan KSP/USP yang mempunyai izin usaha simpan pinjam	19,74 persen	10.980.713,00						10.980.750,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024			
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan pemenuhan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	100 %	10.980.713,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Koperasi	10.980.750,00			
	2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	10.980.713,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Koperasi	10.980.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koprasi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian Persentase koprasi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian	100 Persen 8,97 persen	29.157.307,00						29.157.669,00			
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	100 %	29.157.307,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Koperasi	29.157.669,00			
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 Unit Usaha	29.157.307,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Koperasi	29.157.669,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
4	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	7,50 %	15.233.583,00						15.233.960,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024			
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dilakukan penilaian	30 %	15.233.583,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Koperasi	15.233.960,00			
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota												
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	15.233.583,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Koperasi	15.233.960,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
5	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase kapasitas kelembagaan koperas	19,23 %	585.365.181,00						185.365.522,00			
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Pengurus dan Pengawas Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	76.92 %	585.365.181,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Koperasi	185.365.522,00			
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi												
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang	585.365.181,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Koperasi	185.365.522,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
6	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang bermitra dg pasar rental modern Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1,72 % 52,01 %	6.289.853.092,00						3.790.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
															Rencana Tahun 2024			
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	3003 Unit Usaha	99.999.897,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	UMKM	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan												
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	20 Orang	5.604.853.868,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	UMKM	3.105.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
7	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	0,50 %	19.999.942,00						20.000.000,00			
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Prosentase capaian atas peningkatan asset dan omset pelaku usaha mikro	5 %	19.999.942,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	UMKM	20.000.000,00			
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi												
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5 Unit Usaha	19.999.942,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	UMKM	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										3.062.033.530,00		
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										2.486.408.530,00		
8	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perusahaan yang terdaftar dan memenuhi regulasi perijinan	34,78 %	104.984.525,00						105.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	1.087.496.409,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Sarana Dan Prasarana Pasar	687.608.530,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan												
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	99.996.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Sarana Dan Prasarana Pasar	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang mengikuti pembinaan	20 Orang	1.299.637.921,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Sarana Dan Prasarana Pasar	100.000.000,00			
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10 Dokumen	1.299.637.921,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Sarana Dan Prasarana Pasar	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
10	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan informasi dan barang kebutuhan pokok/barang penting	100 %	494.852.303,00						495.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	900 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Pemangku UTTP dan Masyarakat	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal												
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	60 Orang	270.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Pemangku UTTP dan Masyarakat	120.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
13	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk dalam negeri yang difasilitasi dalam promosi dan pemasaran	100 %	249.579.424,00						250.000.000,00			
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/ Kota	10 UMKM	249.579.424,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	UMKM	250.000.000,00			
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota												
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	249.579.424,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	UMKM	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									575.625.000,00			
14	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pesentase IKM yang menerapkan sistem managemen produk	1.87 %	530.599.342,00						330.625.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	530.599.342,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	IKM	330.625.000,00		
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	120.624.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	IKM	120.625.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	241.699.524,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	IKM	41.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	41.699.819,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	IKM	41.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	101.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	IKM	101.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	4.994.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	IKM	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota										
							- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen	19.981.419,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	IKM	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
15	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki izin usaha	3 %	139.998.738,00						140.000.000,00	
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang memenuhi persyaratan perizinan	3 %	139.998.738,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	IKM	140.000.000,00	
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota										
							-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	69.998.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	IKM	70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	151.514.247,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK	196.968.521,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	727.372.966,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga PPPK dan Tenaga Kontrak Daerah	995.372.000,00	
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	186.998.920,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga PPPK dan Tenaga Kontrak Daerah	243.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	39.999.070,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga PPPK dan Tenaga Kontrak Daerah	52.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	50.122.569,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga PPPK dan Tenaga Kontrak Daerah	80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
															Rencana Tahun 2024			
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.520.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga PPPK dan Tenaga Kontrak Daerah	2.772.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	397.827.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga PPPK dan Tenaga Kontrak Daerah	552.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	49.905.407,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga PPPK dan Tenaga Kontrak Daerah	65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yag tersedia	1 unit	25.090.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	ASN, PPPK dan TKD DPMPTSP	37.500.000,00			
	2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	25.090.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	ASN, PPPK dan TKD DPMPTSP	37.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024			
												Nasional	Daerah				Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	376.714.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga PPPK dan Tenaga Kontrak Daerah Perangkat Daerah	398.097.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	86.610.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga PPPK dan Tenaga Kontrak Daerah Perangkat Daerah	90.940.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	2,529 Triliyun	620.418.513,00						455.000.000,00			
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Laporan	215.181.300,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Pelaku Usaha dan Perusahaan	260.000.000,00			
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal												
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	190.181.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Pelaku Usaha dan Perusahaan	195.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024		
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	72.773.980,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	DPMPTSP, Bapperida Kota Bontang dan Penyedia Jasa/Konsultan	32.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor PMDN dan PMA	2 Investor	620.603.959,00						650.143.942,00		
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kota Bontang	2 dokumen	620.603.959,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Masyarakat, Pelaku Usaha dan Perusahaan	650.143.942,00		
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	520.125.395,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Masyarakat, Pelaku Usaha dan Perusahaan	506.922.442,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota											
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	100.478.564,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Masyarakat, Pelaku Usaha dan Perusahaan	143.221.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90.30 point	1.203.882.022,00						977.995.765,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	300 pelaku usaha	1.203.882.022,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Masyarakat dan Pelaku Usaha	977.995.765,00		
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah											
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	16.889.630,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Masyarakat dan Pelaku Usaha	21.957.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik											
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	717.202.720,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Masyarakat dan Pelaku Usaha	671.957.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko											
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 Pelaku Usaha	109.883.050,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Masyarakat dan Pelaku Usaha	141.581.765,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	10 Kegiatan Usaha	359.906.622,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Masyarakat dan Pelaku Usaha	142.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Aturan Penanaman Modal	55 persen	212.123.658,00						218.545.400,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya	10 Kegiatan Usaha	212.123.658,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Masyarakat, Pelaku Usaha dan Perusahaan	218.545.400,00	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya										
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	73.590.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Masyarakat, Pelaku Usaha dan Perusahaan	75.797.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha										
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	93.533.658,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Masyarakat, Pelaku Usaha dan Perusahaan	96.397.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal										
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	5 Kegiatan Usaha	45.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Masyarakat, Pelaku Usaha dan Perusahaan	46.350.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA BONTANG
TAHUN 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024		
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						Dinas Lingkungan Hidup		75.878.662.005,00								58.109.424.897,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		75.878.662.005,00							58.109.424.897,00		
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		75.878.662.005,00							58.109.424.897,00		
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	37.698.412.116,00						25.898.700.000,00		
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Hasil Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Persentase Dukungan Terhadap Capaian Program	6 Jenis 15 persen	6.588.139,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	7.000.000,00		
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.051.790,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	1.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.462.646,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.073.703,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Kota Bontang	2.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	13.744.163.174,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	14.008.700.000,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/bulan	13.736.626.823,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	14.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	525.895,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	-	700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	2.010.456,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	-	2.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024		
												Nasional	Daerah				Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.500.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	-	8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	99.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.284.513.894,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	-	1.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	8.487.564.489,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	-	7.108.000.000,00		
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	8.380.524.489,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	-	6.970.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	-	48.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	69.040.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	-	90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	500.000.000,00						0,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket	397.818.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Kota Bontang	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota													
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	303.392.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Dukungan Terhadap Pencapaian Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Prosentase Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	20 persen 97 %	166.436.335,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	-	180.000.000,00			
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi													
							Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Dokumen Kegiatan	166.436.335,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	-	180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
4	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan Pengelolaan Kehati	85 %	13.321.522.931,00						12.875.000.000,00			
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Pengelolaan Kehati	50,56 Ha	13.321.522.931,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	12.875.000.000,00			
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	49,56 Ha	12.246.201.139,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	12.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati										
							Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2 Orang	295.126.253,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3 Unit	665.904.720,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	460.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya										
							Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	114.290.819,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-	15.655.616,00						14.684.000,00	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-	12.661.712,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	14.684.000,00	
	2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
							Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1.013.904,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3										
							Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	11.647.808,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	12.684.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.993.904,00			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	0,00	
	2	11	05	2.02	0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota										
							jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	3 Usaha	2.993.904,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat Ketaatan Usaha / Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan atau PPLH	96 %	3.490.000,00						4.000.000,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Diklat dan Penyuluhan	2 Jenis	3.490.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	-	4.000.000,00	
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup										
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 Badan Usaha	3.490.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	-	4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Kapasitas Diklat dan Penyuluhan	80 %	463.293.703,00						505.000.000,00	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Diklat dan Penyuluhan	2 Jenis	463.293.703,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	505.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup												
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	14.990.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	16.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup												
							Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	75 Orang	115.658.703,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	126.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat												
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	332.645.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	363.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
8	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Perhargaan Lingkungan hidup	100	410.023.778,00						411.040.897,00			
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan yang diberikan	4 Jenis	410.023.778,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	411.040.897,00			
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup												
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	410.023.778,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	411.040.897,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
9	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Pengaduan	100 %	56.354.405,00						65.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dukungan Pencapaian Penanganan Kasus	100 persen	56.354.405,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	65.000.000,00		
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota											
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 Pengaduan	31.363.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota											
							Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Perkara	24.991.405,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
10	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Persentase Penanganan	29 % 71 %	22.229.477.616,00						17.028.000.000,00		
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Dukungan Pengelolaan Sampah	100 persen	22.229.477.616,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	17.028.000.000,00		
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan											
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	16 Kelompok	498.575.240,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	19 Unit	2.581.107.749,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Kota Bontang	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan										
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	15.834 Ton	13.331.337.925,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	15.690.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah										
							Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	5000 Ton	98.310.625,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Kota Bontang	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah										
							Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	1 Unit	2.046.914.172,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Kota Bontang	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan										
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	5000 Ton	341.732.233,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Kota Bontang	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah										
							Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	2.301.597.500,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kota Bontang	185.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATAKOTA BONTANG
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		74.360.268.236,00							55.030.000.000,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		54.276.600.337,00							42.230.000.000,00			
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		54.276.600.337,00							42.230.000.000,00			
1	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan daerah	100 %	23.000.190.306,00						18.430.000.000,00			
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen OPD	4 Dokumen	135.019.350,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Penyeusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi DISPOPAP Kota Bontang	70.000.000,00			
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	117.589.875,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Penyeusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi DISPOPAP Kota Bontang	50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA		
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	17.429.475,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Penyeusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi DISPOPAP Kota Bontang	20.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA		
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan keuangan	100 Persen	10.599.050.332,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	ASN dan PPPK	9.510.000.000,00			
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	10.593.791.382,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	ASN dan PPPK	9.500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	138.203.916,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah DISPOPAREKRAF	100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	52.433.180,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah DISPOPAREKRAF	50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	57.009.415,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Perangkat Daerah DISPOPAREKRAF	100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	38.581.745,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah DISPOPAREKRAF	50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	780.256.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah DISPOPAREKRAF	650.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	27.268.640,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah DISPOPAREKRAF	50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan pengadaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	5 Unit	2.281.956.929,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD DISPOPAREKRAF	1.150.000.000,00	
	2	19	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	378.290.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD DISPOPAREKRAF	1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	200 Unit	156.551.400,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD DISPOPAREKRAF	100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 Unit	1.747.115.529,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD DISPOPAREKRAF	50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	150.320.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang	200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA		
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang	200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA		
2	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase pembinaan dan pengembangan kapasitas daya saing organisasi kepemudaan (OKP)	100 Persen	2.759.026.252,00						3.450.000.000,00			
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Yang Berprestasi	90 Orang	2.746.660.252,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pemuda Yang Berprestasi	2.650.000.000,00			
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota												
							Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	148.820.688,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pemuda Yang Berprestasi	500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA		
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota												
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	77 Orang	749.542.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Pemuda Yang Berprestasi	500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA		
	2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda												
							Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	100 Orang	599.976.564,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pemuda Yang Berprestasi	300.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA		
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota												
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	3 Kegiatan	643.355.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pemuda Yang Berprestasi	500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA		
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota												
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	70 Orang	600.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pemuda Yang Berprestasi	650.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	11.946.860.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Organisasi	6.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah penyelenggaraan olahraga rekreasi yang di kembangkan	6 Kegiatan	147.793.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pelaku Olahraga Masyarakat	150.000.000,00		
	2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan											
							Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	140.393.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pelaku Olahraga Masyarakat	75.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	
	2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	7.400.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pelaku Olahraga Masyarakat	75.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	
4	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	100 Persen	1.098.635.000,00						2.200.000.000,00		
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota gudep di kota bontang yang aktif	2840 Orang	1.098.635.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pembinaan Pramuka	2.200.000.000,00		
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah											
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1.001.910.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pembinaan Pramuka	2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah											
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	96.725.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pembinaan Pramuka	200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									12.800.000.000,00		
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									12.800.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju			
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah	1 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Ekonomi Kreatif	200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA		
	3	26	04	2.02	0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah												
							Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	- Dokumen	10.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Ekonomi Kreatif	100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA		
	3	26	04	2.02	0017	Pendukungn Pemasaran Ekonomi Kreatif												
							Jumlah terlaksanakanya pendukungn pemasaran ekonomi kreatif	1 Promosi	102.579.470,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Ekonomi Kreatif	150.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA		
	3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif												
							Jumlh Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Laporan	10.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Ekonomi Kreatif	50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA		
	3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual												
							Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	20 Produk	94.541.425,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Ekonomi Kreatif	100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA		
8	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber daya Ekraf yang di kembangkan	88 %	4.329.281.568,00						7.400.000.000,00			
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang di tingkatkan Kapasitasnya	489 Orang	3.714.779.568,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Pelaku SDM Pariwisata dan Ekraf	6.700.000.000,00			
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif												

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANKOTA BONTANG
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024		
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		19.546.657.672,00							5.496.567.275,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		19.546.657.672,00							5.496.567.275,00		
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		18.281.300.610,00							5.466.567.275,00		
1	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	15.459.667.994,00						5.466.567.275,00		
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	47 Orang	10.069.408.362,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5.466.567.275,00		
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	10.069.408.362,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5.466.567.275,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	148.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang	0,00		
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	70.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	78.500.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	865.364.925,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang	0,00	
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.977.621,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	308.018.339,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	24.190.035,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	39.976.532,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	33.044.398,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	426.158.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 Persen	553.104.870,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang	0,00	
	2	23	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	531.056.728,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	22.048.142,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100 Persen	3.075.217.280,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang	0,00	
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.910.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	739.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	24 Orang	219.434.067,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah dan Masyarakat	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat										
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	100 Lokus	58.088.824,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah dan Masyarakat	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									30.000.000,00	
3	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik	100 persen	1.080.531.854,00						0,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip dinamis	5 perangkat daerah	327.708.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	0,00	
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis										
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	5 Berkas	162.750.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis										
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1 Berkas	82.458.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	82.500.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-		164.986.408,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		0,00			
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis												
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Arsip	164.986.408,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang di input pada sistem	2 Berkas	587.837.446,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	0,00			
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN												
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	197.837.446,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	390.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
4	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase berkas arsip yang dilindungi dan diselamatkan	70 persen	84.859.326,00						30.000.000,00			
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bawah Retensi 10 Tahun	100 Berkas	29.979.536,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	0,00			
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)				
												Nasional	Daerah						
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	100 Berkas	29.979.536,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah penyelamatan arsip pada Perangkat Daerah	100 Berkas	29.938.082,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	30.000.000,00				
	2	24	03	2.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Daftar	24.980.082,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
	2	24	03	2.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Arsip	4.958.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis hasil alih media Kabupaten/Kota yang diautentikasi	1 Arsip	24.941.708,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	0,00				
	2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip													
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	3 Arsip	24.941.708,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
5	2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Pengguna perizinan arsip yang bersifat tertutup	1 Laporan	99.965.882,00						0,00				

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						Sekretariat Daerah			134.540.280.476,00							119.109.982.898,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			134.540.280.476,00						119.109.982.898,00			
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			134.540.280.476,00						119.109.982.898,00			
1	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	100 Persen	81.459.445.318,00						74.348.138.501,00			
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan	5 Laporan	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	148.500.000,00			
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	100.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	148.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	140 Orang	35.897.140.455,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Sekretariat Daerah	22.478.090.749,00			
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang/bulan	35.897.140.455,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Sekretariat Daerah	22.478.090.749,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	200 Orang	1.295.440.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	267.000.000,00			
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	117.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	1.280.440.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	50 Layanan	4.297.228.714,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	7.514.847.037,00	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	120.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	500.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	1.550.618.323,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	178.498.194,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	203.498.194,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)				
												Nasional	Daerah						
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	98.898.020,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	120.898.020,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.06	0008														
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	357.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.06	0009														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.042.832.500,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	5.099.832.500,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	15 Jenis	56.796.175,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	407.500.000,00				
	4	01	01	2.07	0002														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.07	0005														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	59 Unit	46.796.175,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	257.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	94 Unit	1.828.758.537,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Sekretariat Daerah	1.722.967.131,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	700.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	1.603.820.582,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	1.283.334.416,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH/WKDH yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	2 Orang	1.075.930.094,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Sekretariat Daerah	1.307.100.785,00	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan	852.039.094,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Sekretariat Daerah	1.048.265.235,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	180.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	208.835.550,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	43.891.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	49 Jenis	2.096.375.716,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	3.519.810.927,00			
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah												
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	1.048.187.858,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	1.919.597.251,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah												
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	1.048.187.858,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	1.600.213.676,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah kegiatan Kegiatan penataan organisasi	13 Kegiatan	1.300.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	803.196.709,00			
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan												
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	400.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	210.124.736,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Tata Pemerintahan	1 Kebijakan	1.338.397.187,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	2.163.864.990,00			
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan												
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	400.698.074,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	420.426.939,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	705.657.660,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	1.295.153.697,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah												
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	232.041.453,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	448.284.354,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5 Kebijakan	46.577.653.021,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Sekretariat Daerah	37.901.500.203,00			
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual												
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	41.154.862.625,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Sekretariat Daerah	31.201.226.914,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	12 Dokumen	734.658.267,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	595.320.243,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat										
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	12 Dokumen	4.688.132.129,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Sekretariat Daerah	6.104.953.046,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kebijakan prodak hukum yang ditetapkan	49 Kebijakan	1.479.838.956,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	2.041.058.805,00	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah										
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	33 Dokumen	700.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	492.049.078,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum										
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	600.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	1.357.082.044,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan										
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	49 Dokumen	179.838.956,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	191.927.683,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerja sama daerah	10 MOU	1.550.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	994.213.623,00		
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri											
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	7 Dokumen	1.400.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	564.518.060,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	10 Laporan	150.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	429.695.563,00	SEKRETARIAT DAERAH	
3	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase peningkatan implementasi kebijakan bidang perekonomian; Persentase peningkatan implementasi kebijakan bidang pembangunan	100 Persen	2.134.945.994,00						1.661.206.776,00		
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan dan dilaksanakan	3 Kebijakan	425.249.840,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	480.470.021,00		
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	104.140.240,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	102.440.240,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil											
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	139.879.200,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	142.349.200,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	3 Dokumen	181.230.400,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	235.680.581,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Implementasi Program Pembangunan	160 Program Prioritas	827.521.620,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	387.464.717,00			
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan												
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	579.100.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	134.300.596,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan												
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	126.582.399,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	128.843.900,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan												
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	121.839.221,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	124.320.221,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa	4 Layanan	513.288.258,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	465.115.762,00			
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	183.120.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah	136.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
								J U M L A H	134.540.280.476,00							119.109.982.898,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	10.653.964.880,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Sekretariat DPRD	8.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	12.358.808,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	2.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.578.808,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	9.901.808,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	2.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	392.952.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	1.010.000.000,00			
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	195.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	129 Orang	190.952.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	43 Orang	7.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	4.708.703.178,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	10.600.000.000,00			
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.619.595,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	499.974.255,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	109.667.750,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	40.450.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	520.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.417.152.779,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Sekretariat DPRD	8.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 Persen	1.545.501.421,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Sekretariat DPRD	3.925.000.000,00			
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan												
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	136.510.733,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Sekretariat DPRD	275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	959.782.688,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Sekretariat DPRD	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	102.850.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	56.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	290.358.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tingkat Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen	18.604.730.468,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Sekretariat DPRD	19.235.000.000,00	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD										
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	18.177.261.293,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Sekretariat DPRD	18.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	343.750.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	83.719.175,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD	100 Persen	2.198.961.644,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	2.195.000.000,00		
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	993.904,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	954.500.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD											
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	1.243.467.740,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat DPRD	1.550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
2	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Layanan Tugas Fungsi Anggaran	100 Persen	20.200.184.465,00						22.008.250.000,00		
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 Persen	934.413.190,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	1.602.750.000,00		
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	92.500.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	310.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	221.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan												
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	14.800.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan												
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	595.013.190,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	1.015.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD												
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	11.100.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	12.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Dibahas	100 Persen	495.822.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	510.000.000,00			
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS												
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	90.683.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	30.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	32.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian												
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	30.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	32.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam												
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	30.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	32.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	7.030.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	7.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	7.030.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	7.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Terpenuhinya Kebutuhan Peningkatan Kapasitas DPRD	100 Persen	4.481.775.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	1.990.000.000,00			
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.050.065.275,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	3.150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 Persen	3.330.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	3.500.000,00	
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD										
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	3.330.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	3.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terpenuhinya Fasilitasi Pembahasan Kerja Sama Daerah	100 Persen	20.321.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	24.500.000,00	
	4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah										
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	15.141.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	19.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi										
							Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	5.180.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	5.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Terpenuhinya Tugas DPRD yang Difasilitasi	100 Persen	11.001.348.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	14.500.000.000,00			
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD												
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		1 Dokumen	11.001.348.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Anggota DPRD	14.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	J U M L A H							68.795.754.920,00							78.927.600.000,00			

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		27.053.797.956,00								17.793.374.677,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		27.053.797.956,00							17.793.374.677,00		
	5	01				PERENCANAAN		23.826.525.845,00							14.026.192.634,00		
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	14.792.156.789,00						11.928.198.040,00		
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan adm keuangan daerah	42 Pegawai	10.440.112.933,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Dearah	8.000.000.000,00		
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	10.440.112.933,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Dearah	8.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 persen	714.783.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Dearah	230.000.000,00		
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	224.280.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Dearah	180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	490.503.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Dearah	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.588.398.872,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Dearah	1.200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	378.290.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Dearah	500.000.000,00			
	5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	378.290.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Dearah	500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	561.007.680,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Dearah	740.500.000,00			
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Dearah	12.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	551.007.680,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Dearah	728.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 Persen	537.344.455,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Dearah	507.698.040,00			

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	236.661.250,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Dearah	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan												
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	300 Usulan	7.696.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Dearah	9.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	2.939.897.680,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Dearah	450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Informasi yang digunakan dalam Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	1.091.214.740,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	162.042.000,00			
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah												
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	96 Dokumen	179.510.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah												
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	30 Orang	700.998.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	24.567.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	210.706.740,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	82.475.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di Evaluasi	5 Dokumen	1.563.088.375,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	187.294.000,00	
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota										
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	1.004.473.855,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	87.856.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah										
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	558.614.520,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	99.438.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	94 persen	2.958.974.011,00						1.004.584.594,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	2 dokumen	563.834.890,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	157.931.000,00	
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	55.152.395,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	23.397.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13 Laporan	22.454.502,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	23.397.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan												
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	22.432.251,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	23.397.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan												
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	111.747.195,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	17.548.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	2 Dokumen	32.790.502,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	17.548.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia												
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	33.840.753,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	17.548.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia												
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	33.610.502,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	17.548.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	350.071.087,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah dan Masyarakat	386.543.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi yang Disusun	5 Laporan	918.507.773,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah dan Masyarakat	491.999.043,00			
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi												
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah dan Masyarakat	8.172.043,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi												
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	130.679.780,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah dan Masyarakat	58.493.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif												
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	624.999.314,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah dan Masyarakat	290.464.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan												
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	22.375.780,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah dan Masyarakat	12.870.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual												
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	120.452.899,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Perangkat Daerah dan Masyarakat	122.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Daerah			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				J U M L A H	27.053.797.956,00						17.793.374.677,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	14.195.040,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah	14.426.403,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	14 Dokumen	18.384.526.851,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah	11.933.212.388,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	18.308.270.491,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah	11.845.818.791,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	71.463.040,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah	82.390.182,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.793.320,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah	5.003.415,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100 %	303.424.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah	116.649.869,00	
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	303.424.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah	116.649.869,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan	12 Bulan	1.658.716.218,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	-	944.720.658,00	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.287.325,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	-	24.301.414,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	197.088.328,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	-	237.420.610,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.403.240,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	-	82.960.536,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	186.867.993,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	-	85.518.148,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.694.332,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	-	10.150.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1.165.375.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	-	504.369.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Mebelair	3 item	43.326.542,00			-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah	28.788.420,00	
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	43.326.542,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah	28.788.420,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.539.401.440,00			-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah	2.372.386.024,00	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah	8.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah	377.266.588,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	46 Laporan	2.229.401.440,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah	1.987.119.436,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan	12 Bulan	770.625.000,00			-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah	407.767.178,00	
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	678.705.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah	359.465.371,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	91.920.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah	48.301.807,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD	100 Persen	4.870.927.099,00						3.051.332.436,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	4.870.927.099,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Pendapatan Asli Daerah	3.051.332.436,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	117.489.038,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Pendapatan Asli Daerah	200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
								J U M L A H	28.601.869.078,00							18.888.460.849,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	10.469.758.941,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	10.264.789.402,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan												
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42 Dokumen	50.020.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	721.874.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.355.880,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	5.288.975,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.687.056,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	5.198.175,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan Barang Milik Daerah	100 Persen	3.311.760,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	3.177.950,00			
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.311.760,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	3.177.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)				
												Nasional	Daerah						
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	1.000.687.408,00			Memperkuat Stabilitas pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	2.154.273.759,00				
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	115.754.408,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	251.511.759,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	778.918.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	1.685.082.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	106.015.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	217.680.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	2.602.531.351,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	3.794.448.086,00				
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	90.751.235,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	80.728.586,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	462.479.027,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	443.601.309,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	26.114.240,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	99.904.592,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	287.721.393,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	296.729.231,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	105.435.906,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	158.550.885,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	37.400.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	34.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.430.722.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	2.285.776.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	161.907.550,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	395.157.483,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	166.702.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	254.087.690,00		
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	39.877.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	96.524.773,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	30.479.737,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	13.627.006,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	203.607.953,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16.673.671,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	120 Dokumen	41.054.551,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	292.839.326,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah												
							Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	34.506.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya												
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	262.182.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	77.167.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank												
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	93.000.704,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	109.890.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas												
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	33.656.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	21.852.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait												
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	50 Dokumen	392.415.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	412.509.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang menyampaikan laporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar	31 OPD	1.640.573.229,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	2.042.780.536,00		
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	3 Laporan	26.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	36.702.276,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban											
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	250.339.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	346.060.164,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran											
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	96.524.940,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	178.172.008,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah											
							JMLah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	42.627.424,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	49.301.038,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota											
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	175.454.800,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	186.225.980,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	140 Orang	685.865.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	706.061.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	J U M L A H								33.808.551.658,00							39.322.111.334,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKOTA BONTANG
TAHUN 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			21.052.188.274,00						22.271.473.535,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			21.052.188.274,00						22.271.473.535,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN			18.541.496.514,00						18.897.481.731,00	
1	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	14.388.685.512,00						13.897.481.731,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.472.856,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	BKPSDM Kota Bontang	4.000.000,00	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.333.904,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	BKPSDM Kota Bontang	2.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.138.952,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	BKPSDM Kota Bontang	2.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	11.941.803.713,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	ASN dan Pereangkat Daerah BKPSDM Kota Bontang	11.202.000.000,00	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	11.939.668.761,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	ASN dan Pereangkat Daerah BKPSDM Kota Bontang	11.200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	121.879.932,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pegawai BKPSDM Kota Bontang	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	69.999.653,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pegawai BKPSDM Kota Bontang	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	128.066.902,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pegawai BKPSDM Kota Bontang	130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	330.514.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pegawai BKPSDM Kota Bontang	324.176.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 persen	455.719.054,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	BKPSDM	500.000.000,00		
	5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	281.029.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	BKPSDM	400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	25.065.698,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	BKPSDM	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	213 Orang	1.102.181.760,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	ASN Pemerintah Kota Bontang	782.618.112,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Pegawai	5 kegiatan	1.408.510.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	ASN Pemerintah Kota Bontang	2.591.373.692,00	
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan										
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1.408.510.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	ASN Pemerintah Kota Bontang	2.591.373.692,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							J U M L A H		21.052.188.274,00						22.271.473.535,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024		
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						Inspektorat Daerah			25.125.803.332,00						21.746.221.474,00		
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			25.125.803.332,00						21.746.221.474,00		
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			25.125.803.332,00						21.746.221.474,00		
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	21.680.975.815,00						19.500.656.279,00		
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100 Persen	12.772.665.714,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Pegawai Inspektorat Daerah	13.000.000.000,00		
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	12.772.665.714,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Pegawai Inspektorat Daerah	13.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	3.537.417.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Inspektorat Daerah	3.050.000.000,00		
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	58.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Inspektorat Daerah	50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang	3.479.417.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Inspektorat Daerah	3.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.534.980.544,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	1.250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	188.642.417,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	2.560.685.367,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	1.010.681.054,00			
	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	913.598.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	110.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	294.134.210,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	1.177.601.160,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	500.681.054,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024			
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit	175.351.997,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100 Persen	196.654.920,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	233.120.000,00			
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.500.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	4.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Inspektorat Daerah	46.620.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Laporan	43.705.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	99.449.920,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Inspektorat Daerah	147.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	99.960.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	45.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP										
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	199.920.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Kasus yang Telah Selesai Ditindaklanjuti	5 Kasus	142.962.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah, BUMD, Instansi Terkait	123.599.520,00	
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	142.962.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah, BUMD, Instansi Terkait	123.599.520,00	INSPEKTORAT DAERAH
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kebijakan pembinaan dan pengawasan yang telah ditetapkan ; Persentase Perangkat daerah yang telah dilakukan pendampingan	100,00 ; 100,00 persen	2.016.325.517,00						1.249.902.395,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan pembinaan dan pengawasan	1 Kebijakan	50.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	69.902.395,00	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan										
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	50.360.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	69.902.395,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan pendampingan dan asistensi pembinaan dan pengawasan	6 Kegiatan	1.965.965.517,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	1.180.000.000,00			
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah												
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	31 perangkat daerah	728.745.750,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	510.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi												
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31 perangkat daerah	242.234.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi												
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	16 Kegiatan	994.985.767,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah	520.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH		
						J U M L A H		25.125.803.332,00							21.746.221.474,00			

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BONTANG UTARAKOTA BONTANG
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Kecamatan Bontang Utara			36.979.122.188,00						42.314.066.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			36.979.122.188,00						42.314.066.000,00	
	7	01				KECAMATAN			36.979.122.188,00						42.314.066.000,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	35.735.713.308,00						40.831.066.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	23.660.540,00			-	-	-	51.500.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.112.725,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.500.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	22.547.815,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	25.441.149.748,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	30.051.500.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	242 Orang/bulan	25.416.308.591,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-	30.000.000.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	23.810.856,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	1.030.301,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.500.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.001.071.036,00			-	-	-	1.131.420.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	747.793.036,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	850.000.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	253.278.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	281.420.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	809.314.794,00			-	-	-	711.880.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.151.505,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5.200.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	300.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	310.000.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	32.288.890,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	28.000.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	104.768.323,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	67.000.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.469.076,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.680.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	346.637.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	300.000.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	585.193.770,00			-	-	-	848.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	50.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	104.000.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	206.060.200,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	207.000.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	257.012.500,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	464.000.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	72.121.070,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	73.000.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.603.385.120,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	7.519.610.000,00	

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	42.727.090,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	60.000.000,00		
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	42.727.090,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	60.000.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA	
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	33.375.000,00						50.000.000,00		
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	33.375.000,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	50.000.000,00		
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	33.375.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	50.000.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA	
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	444.491.204,00						567.000.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	444.491.204,00			-	-	-	567.000.000,00		
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	411.116.204,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500.000.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	180 Orang	33.375.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	67.000.000,00	KECAMATAN BONTANG UTARA	
						Kelurahan Guntung								5.712.073.244,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								5.712.073.244,00			
	7	01				KECAMATAN								5.712.073.244,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	519.955.484,00						1.074.955.484,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	30.000.000,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	200.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	10.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	150.000.000,00	KELURAHAN GUNTUNG
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	20.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	50.000.000,00	KELURAHAN GUNTUNG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	242.384.234,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	434.384.234,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	100.000.000,00	KELURAHAN GUNTUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	100.000.000,00	KELURAHAN GUNTUNG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	34.384.234,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	34.384.234,00	KELURAHAN GUNTUNG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	118.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	200.000.000,00	KELURAHAN GUNTUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	45.000.000,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	90.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	35.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	40.000.000,00	KELURAHAN LOKTUAN
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	10.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	50.000.000,00	KELURAHAN LOKTUAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	634.447.839,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	730.714.000,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	70.180.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	50.000.000,00	KELURAHAN LOKTUAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	45.000.000,00	KELURAHAN LOKTUAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	188.826.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	185.714.000,00	KELURAHAN LOKTUAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	335.441.839,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	450.000.000,00	KELURAHAN LOKTUAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	771.000.000,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	200.000.000,00	

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	10 Lembaga Kemasyarakatan	1.678.150.936,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.613.851.032,00	KELURAHAN LOKTUAN
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	3.062.411.044,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3.300.000.000,00	KELURAHAN LOKTUAN
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	165.049.700,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	5.000.000,00	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	12 Keluarga	165.049.700,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	5.000.000,00	KELURAHAN LOKTUAN
12	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	249.468.992,00						300.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	249.468.992,00			-	-	-	300.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	249.468.992,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	300.000.000,00	KELURAHAN LOKTUAN
13	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	20.000.000,00						100.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	20.000.000,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	100.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12 Orang	20.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	100.000.000,00	KELURAHAN LOKTUAN
						Kelurahan Gunung Elai			8.772.529.532,00						7.715.101.653,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			8.772.529.532,00						7.715.101.653,00	
	7	01				KECAMATAN			8.772.529.532,00						7.715.101.653,00	
14	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	517.891.072,00						1.391.612.238,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024		
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	9.150.000,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	250.000.000,00		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	4.200.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	100.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG ELAI	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	4.950.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	150.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG ELAI	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	343.394.607,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	659.840.000,00		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	70.971.506,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	150.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG ELAI	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	26.943.598,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	200.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG ELAI	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	159.840.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	159.840.000,00	KELURAHAN GUNUNG ELAI	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	85.639.503,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	150.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG ELAI	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.054.700,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	150.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.054.700,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	150.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG ELAI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	95.100.000,00			-	-	-	92.607.895,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	77.100.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	74.607.895,00	KELURAHAN GUNUNG ELAI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri dan pemenuhan kebutuhan IKN Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	18.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG ELAI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	65.191.765,00			-	-	-	239.164.343,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	51.904.344,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	89.164.343,00	KELURAHAN GUNUNG ELAI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	12.180.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	50.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG ELAI
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.107.421,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	100.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG ELAI
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	8.200.162.476,00						5.716.527.415,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.879.999.196,00			-	-	-	855.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	14.454.770,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	15.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG ELAI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3.350.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	310.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG ELAI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	5.006.992,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	50.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG ELAI	
						Kelurahan Bontang Baru			7.144.507.349,00						5.719.400.675,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			7.144.507.349,00						5.719.400.675,00		
	7	01				KECAMATAN			7.144.507.349,00						5.719.400.675,00		
18	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	544.766.674,00						1.326.164.200,00		
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	45.329.958,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	100.000.000,00		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	27.664.979,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	50.000.000,00	KELURAHAN BONTANG BARU	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	17.664.979,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	50.000.000,00	KELURAHAN BONTANG BARU	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	206.888.937,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	483.894.000,00		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	27.664.979,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	30.000.000,00	KELURAHAN BONTANG BARU	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	150.000.000,00	KELURAHAN BONTANG BARU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	103.894.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	103.894.000,00	KELURAHAN BONTANG BARU
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	65.329.958,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	200.000.000,00	KELURAHAN BONTANG BARU
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	27.664.979,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	200.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	27.664.979,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	200.000.000,00	KELURAHAN BONTANG BARU
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	134.700.000,00			-	-	-	184.700.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	134.700.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	184.700.000,00	KELURAHAN BONTANG BARU
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	130.182.800,00			-	-	-	357.570.200,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	130.182.800,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	357.570.200,00	KELURAHAN BONTANG BARU
19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	6.079.566.704,00						3.743.236.475,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.216.788.757,00			-	-	-	824.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	13.869.001,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	14.000.000,00	KELURAHAN BONTANG BARU
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2.687.375.330,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	310.000.000,00	KELURAHAN BONTANG BARU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	515.544.426,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	-	-	500.000.000,00	KELURAHAN BONTANG BARU
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	2.706.432.800,00			-	-	-	2.719.236.475,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasvarakatan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	942.432.800,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	919.236.475,00	KELURAHAN BONTANG BARU	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	1.764.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.800.000.000,00	KELURAHAN BONTANG BARU	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	156.345.147,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	200.000.000,00		
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat											
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	300 Keluarga	156.345.147,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	200.000.000,00	KELURAHAN BONTANG BARU	
20	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	502.508.992,00						600.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	502.508.992,00			-	-	-	600.000.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	502.508.992,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	600.000.000,00	KELURAHAN BONTANG BARU	
21	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	17.664.979,00						50.000.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	17.664.979,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	50.000.000,00		
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	56 Orang	17.664.979,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	50.000.000,00	KELURAHAN BONTANG BARU	
						Kelurahan Api-Api								5.376.417.382,00		7.073.780.343,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								5.376.417.382,00		7.073.780.343,00	
	7	01				KECAMATAN								5.376.417.382,00		7.073.780.343,00	
22	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	602.220.610,00						1.168.893.400,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.344.104,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	160.000.000,00		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	844.104,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	10.000.000,00	KELURAHAN API-API	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	4.500.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	150.000.000,00	KELURAHAN API-API	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	405.068.506,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	745.908.000,00		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	78.816.244,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	150.000.000,00	KELURAHAN API-API	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	49.720.262,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	200.000.000,00	KELURAHAN API-API	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	145.908.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	145.908.000,00	KELURAHAN API-API	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	130.624.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	250.000.000,00	KELURAHAN API-API	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	680.000,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	5.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	680.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	5.000.000,00	KELURAHAN API-API		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	64.250.000,00			-	-	-	65.650.000,00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	64.250.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	65.650.000,00	KELURAHAN API-API		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	126.878.000,00			-	-	-	192.335.400,00			
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	105.278.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	142.335.400,00	KELURAHAN API-API		
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	21.600.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	50.000.000,00	KELURAHAN API-API		
23	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.722.224.772,00						5.158.086.168,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	633.272.000,00			-	-	-	767.000.000,00			
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	17.800.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	17.000.000,00	KELURAHAN API-API		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	500.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	600.000.000,00	KELURAHAN API-API		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	115.472.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	150.000.000,00	KELURAHAN API-API		
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	4.004.952.772,00			-	-	-	4.291.086.168,00			
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan												
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	1.441.952.772,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.591.086.168,00	KELURAHAN API-API		
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat												
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	2.563.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2.700.000.000,00	KELURAHAN API-API		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	84.000.000,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	100.000.000,00		
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat											
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	15 Keluarga	84.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	100.000.000,00	KELURAHAN API-API	
24	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	49.472.000,00						696.800.775,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	49.472.000,00			-	-	-	696.800.775,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	49.472.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	696.800.775,00	KELURAHAN API-API	
25	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	2.500.000,00						50.000.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	2.500.000,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	50.000.000,00		
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15 Orang	2.500.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	50.000.000,00	KELURAHAN API-API	
						Kelurahan Bontang Kuala										4.813.266.183,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN										4.813.266.183,00	
	7	01				KECAMATAN										4.813.266.183,00	
26	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	494.736.468,00						939.683.840,00		
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	54.614.058,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	100.000.000,00		

[illegible]

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	681.452.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	641.966.000,00	KELURAHAN BONTANG KUALA	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	1.260.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.500.000.000,00	KELURAHAN BONTANG KUALA	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	56.765.077,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	100.000.000,00		
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat											
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	15 Keluarga	56.765.077,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	100.000.000,00	KELURAHAN BONTANG KUALA	
28	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	49.468.992,00						66.616.343,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	49.468.992,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	66.616.343,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	49.468.992,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	66.616.343,00	KELURAHAN BONTANG KUALA	
29	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	10.210.000,00						15.000.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	10.210.000,00			-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	15.000.000,00		
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12 Orang	10.210.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	15.000.000,00	KELURAHAN BONTANG KUALA	
	J U M L A H								76.523.727.039,00							80.702.984.380,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BONTANG SELATANKOTA BONTANG
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024		
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						Kecamatan Bontang Selatan			35.441.631.007,00						36.218.058.780,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			35.441.631.007,00						36.218.058.780,00		
	7	01				KECAMATAN			35.441.631.007,00						36.218.058.780,00		
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	32.597.487.960,00						33.231.708.581,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	201 Orang	24.466.660.037,00			Memperkuat Stabilitas pemerintahan daerah yang Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	ASN Kecamatan Bontang Selatan	24.711.326.637,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/bulan	24.466.660.037,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	ASN Kecamatan Bontang Selatan	24.711.326.637,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	48.000.000,00			Memperkuat Stabilitas pemerintahan daerah yang Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kecamatan Bontang Selatan	50.400.000,00		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kecamatan Bontang Selatan	31.500.000,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	18.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kecamatan Bontang Selatan	18.900.000,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	625.004.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kecamatan Bontang Selatan	656.254.830,00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kecamatan Bontang Selatan	21.000.000,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	150.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kecamatan Bontang Selatan	157.500.000,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kecamatan Bontang Selatan	36.750.000,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	58.679.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kecamatan Bontang Selatan	61.612.950,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN		
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	11.325.600,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kecamatan Bontang Selatan	11.891.880,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	408.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bontang Selatan	408.000.000,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.253.233.752,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kecamatan Bontang Selatan	6.565.895.439,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 Persen	695.145.571,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kecamatan Bontang Selatan	733.315.475,00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	174.915.900,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kecamatan Bontang Selatan	187.074.500,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	10.229.671,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kecamatan Bontang Selatan	10.740.975,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN		
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	450.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kecamatan Bontang Selatan	472.500.000,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN		
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	60.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kecamatan Bontang Selatan	63.000.000,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN	
2	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	98 Persen	1.199.143.047,00					1.259.100.199,00		
	7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Subjek Koordinasi	2 Subjek	843.543.047,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	885.720.199,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	763.543.047,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	801.720.199,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	80.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	84.000.000,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN	
	7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Urusan	1 Kegiatan 2 Urusan	340.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	357.630.000,00	
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	50.600.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	53.130.000,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024		
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	160.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	168.000.000,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	130.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	136.500.000,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN	
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Objek Koordinasi	6 Objek	15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kecamatan dan Kelurahan	15.750.000,00		
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum											
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kecamatan dan Kelurahan	15.750.000,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN	
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	1.150.000.000,00						1.207.500.000,00		
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	1.150.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Bontang Selatan	1.207.500.000,00		
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	1.150.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Bontang Selatan	1.207.500.000,00	KECAMATAN BONTANG SELATAN	
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100 undefined	50.000.000,00						52.500.000,00		

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Satimpo	47.250.000,00	KELURAHAN SATIMPO
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	18.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Satimpo	18.900.000,00	KELURAHAN SATIMPO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	493.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Satimpo	518.490.000,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	75.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Satimpo	78.750.000,00	KELURAHAN SATIMPO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Satimpo	15.750.000,00	KELURAHAN SATIMPO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Satimpo	42.000.000,00	KELURAHAN SATIMPO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	88.800.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Satimpo	93.240.000,00	KELURAHAN SATIMPO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	275.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Satimpo	288.750.000,00	KELURAHAN SATIMPO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Satimpo	10.500.000,00	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Satimpo	10.500.000,00	KELURAHAN SATIMPO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa layanan Umum Perkantoran	100 Persen	139.933.448,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Satimpo	146.930.120,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	139.933.448,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Satimpo	146.930.120,00	KELURAHAN SATIMPO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															Rencana Tahun 2024	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 Persen	185.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Satimpo	204.424.883,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	135.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Satimpo	151.924.883,00	KELURAHAN SATIMPO
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Satimpo	52.500.000,00	KELURAHAN SATIMPO
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	5.089.996.000,00						5.268.320.800,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Komponen Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kelurahan	12 Unsur	2.755.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Satimpo	2.892.750.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Satimpo	42.000.000,00	KELURAHAN SATIMPO
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2.545.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Satimpo	2.672.250.000,00	KELURAHAN SATIMPO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masvarakat di Kelurahan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	170.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Satimpo	178.500.000,00	KELURAHAN SATIMPO
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	2.283.496.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Satimpo	2.321.495.800,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	759.996.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Satimpo	797.995.800,00	KELURAHAN SATIMPO
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25 Laporan	1.523.500.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Satimpo	1.523.500.000,00	KELURAHAN SATIMPO
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	6 Kelurahan	51.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Satimpo	54.075.000,00	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	475 Keluarga	51.500.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Satimpo	54.075.000,00	KELURAHAN SATIMPO
8	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100 Persen	24.000.000,00						25.200.000,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024 Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	24.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Satimpo	25.200.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Satimpo	25.200.000,00	KELURAHAN SATIMPO	
9	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100 Persen	380.000.000,00						399.000.000,00	
	7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan	2 Kegiatan	380.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Satimpo	399.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	380.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Satimpo	399.000.000,00	KELURAHAN SATIMPO	
							Kelurahan Tanjung Laut			7.199.829.418,00						6.088.795.771,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN			7.199.829.418,00						6.088.795.771,00	
	7	01					KECAMATAN			7.199.829.418,00						6.088.795.771,00	
10	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	917.235.498,00						973.272.155,00	
	7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	63.000.000,00			Memperkuat Stabilitas pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Tanjung Laut	66.150.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	134.976.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Tanjung Laut	141.724.800,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	275.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Tanjung Laut	288.750.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Tanjung Laut	10.500.000,00	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Tanjung Laut	10.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa layanan Umum Perkantoran	100 Persen	94.133.448,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Kelurahan Tanjung Laut	98.840.120,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94.133.448,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Memantapkan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani	Kelurahan Tanjung Laut	98.840.120,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	490.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut	514.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	3.608.593.920,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut	3.670.823.616,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	1.244.593.920,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut	1.306.823.616,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	38 Laporan	2.364.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut	2.364.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	6 Kelurahan	30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut	31.500.000,00	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	600 Keluarga	30.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut	31.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT
12	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100 Persen	24.000.000,00						25.200.000,00	

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Bontang Lestari	47.250.000,00	KELURAHAN BONTANG LESTARI
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	18.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Bontang Lestari	18.900.000,00	KELURAHAN BONTANG LESTARI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	462.488.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Bontang Lestari	485.612.400,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	70.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Bontang Lestari	73.500.000,00	KELURAHAN BONTANG LESTARI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Bontang Lestari	15.750.000,00	KELURAHAN BONTANG LESTARI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Bontang Lestari	36.750.000,00	KELURAHAN BONTANG LESTARI
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	67.488.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Bontang Lestari	70.862.400,00	KELURAHAN BONTANG LESTARI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	275.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Bontang Lestari	288.750.000,00	KELURAHAN BONTANG LESTARI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Bontang Lestari	10.500.000,00	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Bontang Lestari	10.500.000,00	KELURAHAN BONTANG LESTARI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa layanan Umum Perkantoran	100 Persen	86.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Bontang Lestari	90.405.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	86.100.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Bontang Lestari	90.405.000,00	KELURAHAN BONTANG LESTARI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	undefined undefined	177.432.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Bontang Lestari	196.479.375,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	127.432.850,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Bontang Lestari	143.979.375,00	KELURAHAN BONTANG LESTARI
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Bontang Lestari	52.500.000,00	KELURAHAN BONTANG LESTARI
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	4.411.996.960,00						4.458.746.808,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Komponen Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kelurahan	100 Persen	2.515.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari	2.524.750.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari	42.000.000,00	KELURAHAN BONTANG LESTARI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2.320.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari	2.320.000.000,00	KELURAHAN BONTANG LESTARI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masvarakat di Kelurahan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	155.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari	162.750.000,00	KELURAHAN BONTANG LESTARI
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	1.856.996.960,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari	1.891.996.808,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	699.996.960,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari	734.996.808,00	KELURAHAN BONTANG LESTARI
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	19 Laporan	1.157.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari	1.157.000.000,00	KELURAHAN BONTANG LESTARI
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	6 Kelurahan	40.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari	42.000.000,00	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	350 Keluarga	40.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari	42.000.000,00	KELURAHAN BONTANG LESTARI
16	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100 Persen	24.000.000,00						25.200.000,00	

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Tanjung Laut Indah	47.250.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	18.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Tanjung Laut Indah	18.900.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	532.216.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Tanjung Laut Indah	558.826.800,00		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	78.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Tanjung Laut Indah	81.900.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Tanjung Laut Indah	15.750.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	47.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Tanjung Laut Indah	49.350.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	117.216.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Tanjung Laut Indah	123.076.800,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	275.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Tanjung Laut Indah	288.750.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Tanjung Laut Indah	10.500.000,00	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Tanjung Laut Indah	10.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa layanan Umum Perkantoran	100 Persen	105.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Tanjung Laut Indah	110.355.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	105.100.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Tanjung Laut Indah	110.355.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024			
												Nasional	Daerah				Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 Persen	193.597.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Tanjung Laut Indah	213.452.415,00			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	143.597.650,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Tanjung Laut Indah	160.952.415,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH		
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Tanjung Laut Indah	52.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH		
19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	5.648.794.720,00						4.352.034.456,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Komponen Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kelurahan	12 Unsur	2.485.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah	1.131.000.000,00			
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah	42.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2.265.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah	900.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masvarakat di Kelurahan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	180.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah	189.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	3.103.794.720,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah	3.158.034.456,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	1.084.794.720,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah	1.139.034.456,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	33 Laporan	2.019.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah	2.019.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	6 Kelurahan	60.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah	63.000.000,00	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	585 Keluarga	60.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah	63.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH
20	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100 Persen	24.000.000,00						25.200.000,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024 Pagu Indikatif (Rp)	
													Nasional	Daerah			
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	24.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Tanjung Laut Indah	25.200.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Tanjung Laut Indah	25.200.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH	
21	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100 Persen	30.000.000,00						31.500.000,00	
	7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan	2 Kegiatan	30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Tanjung Laut Indah	31.500.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	30.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Tanjung Laut Indah	31.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH	
							Kelurahan Berbas Tengah			8.155.247.528,00						8.338.968.627,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN			8.155.247.528,00						8.338.968.627,00	
	7	01					KECAMATAN			8.155.247.528,00						8.338.968.627,00	
22	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.103.357.448,00						1.168.700.203,00	
	7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	63.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Berbas Tengah	66.150.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Berbas Tengah	47.250.000,00	KELURAHAN BERBAS TENGAH
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	18.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Berbas Tengah	18.900.000,00	KELURAHAN BERBAS TENGAH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	645.224.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Berbas Tengah	677.485.200,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	85.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Berbas Tengah	89.250.000,00	KELURAHAN BERBAS TENGAH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Berbas Tengah	15.750.000,00	KELURAHAN BERBAS TENGAH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Berbas Tengah	52.500.000,00	KELURAHAN BERBAS TENGAH
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	220.224.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Berbas Tengah	231.235.200,00	KELURAHAN BERBAS TENGAH
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	275.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Berbas Tengah	288.750.000,00	KELURAHAN BERBAS TENGAH
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Berbas Tengah	10.500.000,00	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Berbas Tengah	10.500.000,00	KELURAHAN BERBAS TENGAH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa layanan Umum Perkantoran	100 Persen	170.133.448,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Berbas Tengah	178.640.120,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	170.133.448,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Berbas Tengah	178.640.120,00	KELURAHAN BERBAS TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	215.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah	225.750.000,00	KELURAHAN BERBAS TENGAH
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	5.651.813.280,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah	5.746.922.784,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	1.902.190.080,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah	1.997.299.584,00	KELURAHAN BERBAS TENGAH
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	62 Laporan	3.749.623.200,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah	3.749.623.200,00	KELURAHAN BERBAS TENGAH
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	6 Kelurahan	156.376.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah	164.195.640,00	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	878 Keluarga	156.376.800,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah	164.195.640,00	KELURAHAN BERBAS TENGAH
24	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100 Persen	24.000.000,00						25.200.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	24.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Berbas Tengah	25.200.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Berbas Tengah	25.200.000,00	KELURAHAN BERBAS TENGAH
25	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100 Persen	30.000.000,00						31.500.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan	2 Kegiatan	30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Berbas Tengah	31.500.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	30.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Berbas Tengah	31.500.000,00	KELURAHAN BERBAS TENGAH
						Kelurahan Berbas Pantai			6.104.544.160,00						4.147.940.251,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			6.104.544.160,00						4.147.940.251,00	
	7	01				KECAMATAN			6.104.544.160,00						4.147.940.251,00	
26	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	918.848.000,00						974.965.283,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	63.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Berbas Pantai	66.150.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	85.248.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Pantai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Berbas Pantai	89.510.400,00	KELURAHAN BERBAS PANTAI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	275.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Pantai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Kelurahan Berbas Pantai	288.750.000,00	KELURAHAN BERBAS PANTAI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Berbas Pantai	10.500.000,00	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Pantai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Kelurahan Berbas Pantai	10.500.000,00	KELURAHAN BERBAS PANTAI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa layanan Umum Perkantoran	100 Persen	93.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Berbas Pantai	97.965.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	93.300.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Pantai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Berbas Pantai	97.965.000,00	KELURAHAN BERBAS PANTAI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	160.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Pantai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarrakat Kelurahan Berbas Pantai	168.000.000,00	KELURAHAN BERBAS PANTAI
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	2.304.416.160,00			Memperkuat Stabilitas pemerintahan daerah yang Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai	2.346.865.968,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	848.996.160,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Pantai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai	891.445.968,00	KELURAHAN BERBAS PANTAI
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	24 Laporan	1.455.420.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Pantai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai	1.455.420.000,00	KELURAHAN BERBAS PANTAI
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	6 Kelurahan	56.580.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai	59.409.000,00	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	400 Keluarga	56.580.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Pantai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai	59.409.000,00	KELURAHAN BERBAS PANTAI
28	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100 Persen	24.000.000,00						25.200.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	24.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Berbas Pantai	25.200.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Pantai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kelurahan Berbas Pantai	25.200.000,00	KELURAHAN BERBAS PANTAI
29	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100 Persen	130.000.000,00						31.500.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan	2 Kegiatan	130.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Keluarahen Berbas Pantai	31.500.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	130.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Pantai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Keluarahen Berbas Pantai	31.500.000,00	KELURAHAN BERBAS PANTAI
	J U M L A H								75.758.707.741,00							
															72.165.391.486,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	59.699.965,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	60.000.000,00	KECAMATAN BONTANG BARAT
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	874.426,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	1.000.000,00	KECAMATAN BONTANG BARAT
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	874.726,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	1.000.000,00	KECAMATAN BONTANG BARAT
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	106.042.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	114.600.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	25.210.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	26.200.000,00	KECAMATAN BONTANG BARAT
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	80.832.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	88.400.000,00	KECAMATAN BONTANG BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	273.585.855,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	284.700.000,00	KECAMATAN BONTANG BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	85.512.092,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	93.600.000,00	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	34.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	37.000.000,00	KECAMATAN BONTANG BARAT
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	51.512.092,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	56.600.000,00	KECAMATAN BONTANG BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.041.729.520,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	5.103.553.256,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	366.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	450.000.000,00	KECAMATAN BONTANG BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	4.675.729.520,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	4.653.553.256,00	KECAMATAN BONTANG BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	264.718.458,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	320.241.600,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	211.016.758,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	260.000.000,00	KECAMATAN BONTANG BARAT
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	9.350.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	9.400.000,00	KECAMATAN BONTANG BARAT
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	11.821.700,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	15.000.000,00	KECAMATAN BONTANG BARAT
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	32.530.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	35.841.600,00	KECAMATAN BONTANG BARAT
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	581.291.191,00						583.900.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	303.878.029,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	105.000.000,00	KECAMATAN BONTANG BARAT
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	725.656.589,00						50.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	725.656.589,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	50.000.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	725.656.589,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	50.000.000,00	KECAMATAN BONTANG BARAT	
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	27.750.589,00						30.500.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	27.750.589,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	30.500.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	27.750.589,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	30.500.000,00	KECAMATAN BONTANG BARAT	
						Kelurahan Kanaan									2.360.557.790,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									2.360.557.790,00	
	7	01				KECAMATAN									2.360.557.790,00	
6	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	665.726.820,00						708.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															Rencana Tahun 2024	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	127.517.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	135.000.000,00	KELURAHAN KANAAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	47.570.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	51.000.000,00	KELURAHAN KANAAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.671.340,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	12.000.000,00	KELURAHAN KANAAN
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.292.471.888,00						1.607.057.790,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	2.086.840.847,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	421.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	14.563.847,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	16.000.000,00	KELURAHAN KANAAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2.000.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	330.000.000,00	KELURAHAN KANAAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masvarakat di Kelurahan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															Rencana Tahun 2024	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	72.277.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	75.000.000,00	KELURAHAN KANAAN
	7		01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	1.180.834.164,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	1.186.057.790,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	435.213.600,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	450.000.000,00	KELURAHAN KANAAN
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	745.620.564,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	736.057.790,00	KELURAHAN KANAAN
	7	01	03	2.06			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	24.796.877,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	0,00	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	29 Keluarga	24.796.877,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	0,00	KELURAHAN KANAAN
8	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	73.468.992,00						28.000.000,00	

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	30.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	33.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG TELIHAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	510.469.336,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	431.500.000,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	130.303.011,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	135.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG TELIHAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.330.415,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	5.500.000,00	KELURAHAN GUNUNG TELIHAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	36.370.834,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	39.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG TELIHAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	173.853.302,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	120.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG TELIHAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	167.611.774,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	132.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG TELIHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024 Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	102.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	115.000.000,00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	102.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	115.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG TELIHAN		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	125.118.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	150.000.000,00			
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	104.398.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	125.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG TELIHAN		
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	20.720.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	25.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG TELIHAN		
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.554.713.077,00						3.478.144.474,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	604.404.779,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	538.000.000,00			
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	16.587.111,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	18.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG TELIHAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	400.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	330.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG TELIHAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 Pokmas / Ormas	187.817.668,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	190.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG TELIHAN
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	2.947.284.298,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publiik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	2.940.144.474,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.057.284.300,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	1.100.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG TELIHAN
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1.889.999.998,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	1.840.144.474,00	KELURAHAN GUNUNG TELIHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	3.024.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	0,00	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	39 Keluarga	3.024.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	0,00	KELURAHAN GUNUNG TELIHAN
12	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	73.324.250,00						28.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	73.324.250,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	28.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	73.324.250,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	28.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG TELIHAN
13	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	21.037.528,00						23.300.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	21.037.528,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	23.300.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	21.037.528,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	23.300.000,00	KELURAHAN GUNUNG TELIHAN
						Kelurahan Belimbing								6.182.045.606,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								6.182.045.606,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024			
												Nasional	Daerah				Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	7	01				KECAMATAN			6.711.296.367,00						6.182.045.606,00			
14	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	836.492.763,00						703.000.000,00			
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	30.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	33.000.000,00			
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	30.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	33.000.000,00	KELURAHAN BELIMBING		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	557.807.471,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	396.000.000,00			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	90.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	100.000.000,00	KELURAHAN BELIMBING		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	6.000.000,00	KELURAHAN BELIMBING		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	27.453.471,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	30.000.000,00	KELURAHAN BELIMBING		
	7	01	01	2.06	0006	Penvediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	210.528.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	135.000.000,00	KELURAHAN BELIMBING		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	227.826.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	125.000.000,00	KELURAHAN BELIMBING		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	14.999.792,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	17.000.000,00			
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	14.999.792,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	17.000.000,00	KELURAHAN BELIMBING		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	59.500.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	65.000.000,00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59.500.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	65.000.000,00	KELURAHAN BELIMBING		

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Rencana Tahun 2024	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	650.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	330.000.000,00	KELURAHAN BELIMBING
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	293.651.515,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	300.000.000,00	KELURAHAN BELIMBING
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	4.523.718.074,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	4.778.245.606,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.608.157.800,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	1.650.000.000,00	KELURAHAN BELIMBING
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	2.915.560.274,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	3.128.245.606,00	KELURAHAN BELIMBING
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	294.933.652,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	0,00	
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	294.933.652,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	0,00	KELURAHAN BELIMBING		
16	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	73.468.992,00						28.000.000,00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	73.468.992,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	28.000.000,00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	73.468.992,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	28.000.000,00	KELURAHAN BELIMBING		
17	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	23.346.576,00						25.600.000,00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	23.346.576,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	25.600.000,00			
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun												
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	23.346.576,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	25.600.000,00	KELURAHAN BELIMBING		
							J U M L A H	37.146.151.534,00								35.012.542.726,00		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIKKOTA BONTANG
TAHUN 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	563.054.026,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan	343.170.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	20.225.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan	22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	21.900.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan	63.295.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	63 persen	9.648.476.008,00						545.000.000,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah pelaksanaan kebijakan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah pelaksanaan kebijakan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2049 Orang 7 Kebijakan 7 Pelaksanaan Kebijakan	9.648.476.008,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	545.000.000,00	
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang	6.692.018.887,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	105.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	256 Orang	2.956.457.121,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Kota Bontang	440.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pembangunan daerah yang disusun dalam rangka pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan dan selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, secara keseluruhan harus secara terintegrasi, bersinergi dan relevan untuk pencapaian indikator kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam lingkup perencanaan pembangunan Kota Bontang, keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota merupakan ukuran keberhasilan utama seluruh agenda pembangunan yang disusun dan direncanakan setiap tahunnya.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik outcome ataupun output pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan mapun pra kondisi pembangunan dapat dianalisa melalui pencapaian target indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator kinerja daerah ini selanjutnya dirumuskan kedalam indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (IKD) yang terdiri dari Indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK). Adapun indikator kinerja utama (IKU) penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bontang yang digunakan sebagai ukuran utama pencapaian kinerja pembangunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat dilihat pada bab ini.

Pada sub bab ini memuat beberapa indikator kinerja yang menjadi komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan pada tahun 2025. Rincian masing-masing indikator kinerja disajikan sebagai berikut:

6.1 Indikator Kinerja Pembangunan

Indikator kinerja pembangunan Kota Bontang menggambarkan kinerja Pemeirntah Kota Bontang yang bersifat makro. Indikator kinerja makro menggambarkan keberhasilan pemerintah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan. Target Indikator Makro Pembangunan Kota Bontang tahun 2025 pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. 1 Target Indikator Makro Pembangunan Kota Bontang Tahun 2025

No.	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (angka)	81,20	81,56	82	81,83
2	Angka Kemiskinan (%)	4,03	4,11	3,8	3,75
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,20	7,74	7,35	7,20
4	Pertumbuhan Ekonomi Migas (%)	2,50	5,36	3,5 – 4,5	6,5
5	PDRB Per Kapita (juta Rupiah)	329,54	366,46	347,76	369,09
6	Indeks Gini (angka)	0,320	0,299	0,291	0,300

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang juga dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan *outcome* dari aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

Akuntabilitas kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang terkait berhasil atau tidaknya pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dalam hal akuntabilitas kinerja Kota Bontang adalah antara Wali Kota Bontang dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Republik Indonesia. Perwujudan akuntabilitas kinerja tersebut melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bontang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bontang dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi. Dasar Perjanjian Kinerja tersebut mengacu pada hasil analisis antara target dalam dokumen RPJMD 2021- 2026 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Akuntabilitas kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah dapat dinilai berdasarkan hasil capaian dari nilai AKIP yang diukur atas hasil evaluasi dari 5 (lima) komponen yang dinilai yaitu; 1) Komponen Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Internal; dan 5) Capaian Kinerja. Secara rinci Indikator Kinerja Utama Kota Bontang adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 2 Kinerja Utama Kota Bontang Tahun 2025

No.	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026
	Indikator Tujuan:				
1	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	79	NA	85	89
2	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan	66,02	65,49	71,78	73,45
3	Indeks Gini	0,300	0,299	0,291	0,3
4	Indeks Pembangunan Manusia	81	81,56	82	81,83
	Indikator Sasaran:				

No.	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Akhir Periode Tahun 2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (68,41)	BB (71,21)	BB (72,41)	BB (74,41)
2	Nilai LPPD	Tinggi (3,90)	Sedang (3,379)	Tinggi (4,10)	Tinggi (4,20)
3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Jumlah Konflik	8	7	7	6
5	Persentase Penyelesaian Gangguan	100%	100%	100 %	100 %
6	Indeks Kualitas Perkotaan	66,16	64,16	76,61	79,41
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,81	66,81	73,38**	67,49
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	5,36	4,41	3,5 % – 4,5 %	6,5
9	Angka Harapan Lama Sekolah	13,42	13,43	13,66	13,78
10	Rata-Rata Lama Sekolah	10,98	10,92	11,1	11,17
11	Usia Harapan Hidup	74,51	74,81	74,85	74,65
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,70	7,74	7,35	7,2
13	Angka Kemiskinan	4,03	4,11	3,8	3,75

6.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang merupakan bagian dari kebijakan pembangunan secara nasional, penyusunan RKPD Kota Bontang Tahun 2025 yang secara keseluruhan merupakan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka kinerja masing-masing urusan perlu ditetapkan target capaiannya. Oleh karena itu dalam rangka perencanaan pembangunan tahun 2025 disusun Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 6. 3 Indikator Kinerja penyelenggaraan Kota Bontang Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Target 2025	Kondisi Akhir RPJMD 2026
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Pertumbuhan PDRB dengan MIGAS	persen	-0,75	63,11*	1,5	2
2	Laju Inflasi	persen	2,7	NA	2,49	2,41
3	Nilai PDRB perkapita dengan MIGAS	juta rp.	329,54	344,56*	348,76	360,09
4	Nilai PDRB perkapita non MIGAS	juta rp.	187,66	122,56*	200,05	206,56
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81	81,56	82	81,83
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,7	7,74	7,35	7,2
7	Angka Kemiskinan	Angka	4,03	4,11	3,8	3,75
8	Indeks Gini	Indeks	0,3	0,299	0,291	0,3
9	Prosentase kriminalitas yang	persen	99,45	7	7	99,75

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Target 2025	Kondisi Akhir RPJMD 2026
	tertangani					
10	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	persen	16,01	10,73	15,85	15,53
11	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	88	89,8	89	90
FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Pendidikan					
1.1	Angka melek huruf	persen	99,52	99,77*	99,68	99,76
1.2	Angka partisipasi kasar					
	SD/MI/Paket A (%)	persen	103,85	103,49	104,65	105,05
	SMP/MTs/Paket B (%)	persen	103,06	105,87	103,86	104,26
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan					
	SD/MI/Paket A	persen	1,76	100	1,8	1,82
	SMP/MTs/Paket B	persen	1,8	100	1,93	2
1.4	Angka Partisipasi Murni					
	SD/MI/Paket A	persen	93,81	98,72	94,6	95
	SMP/MTs/Paket B	persen	82,16	83,62	84,05	85
2	Kesehatan					
2.1	Persentase balita gizi buruk	persen	0,01	0	0	0
3	Ketenagakerjaan					
3.1	Rasio penduduk yang bekerja	rasio	0,97		0,98	0,98
3.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	70,48	56,43	71,96	72,24
FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAAHRAGA						
1	Kebudayaan					
1.1	Jumlah grup kesenian/10000 penduduk	unit per 10rb penduduk	20,11	NA	2,22	2,38
1.2	Jumlah gedung/10000 penduduk	unit per 10rb penduduk	0,14	NA	0,14	0,14
2	Pemuda dan Olahraga					
2.1	Jumlah gedung olahraga/10000 penduduk	unit per 10rb penduduk	0,14	NA	0,14	0,14
ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Pendidikan					
1.1	Pendidikan dasar:					
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	rasio	29,66	31,65	32,58	35,5
	Rasio guru/murid	rasio	517,6	616,74	508,8	500
	Rasio guru/murid per kelas rata- rata	rasio	51,76	61,67	50,88	50
1.2	Fasilitas Pendidikan:					
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	persen	92,94	98,11	95,22	97,5
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	persen	87,38	98,44	92,44	97,5
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):					
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK)	persen	81,07	81,07	85,91	90,75
1.4	Angka Putus Sekolah:					
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	persen	0	0	0	0
	Angka Putus Sekolah	persen	0	0	0	0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Target 2025	Kondisi Akhir RPJMD 2026
	(APS) SMP/MTs					
1.5	Angka Kelulusan:					
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	persen	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	persen	100	100	100	100
1.6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	persen	100	100	100	100
1.7	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	94,5	98,44	95,76	97
1.8	APK SD (Paket setara SD)	persen	103,85	89,31	104,65	105,05
	APK SMP (Paket setara SMP)	persen	103,06	80,62	103,86	104,26
1.9	Persentase Pendidikan dasar, PAUD dan non formal yang memiliki ijin	persen	100	100	100	100
2	Kesehatan					
2.1	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per- satuan penduduk	Rasio	1:16.000	NA	1:16.000	1:16.000
2.2	Cakupan Kepesertaan BPJS	Persen	100	100	100	100
2.3	Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100
2.4	terbangunya Sistem informasi kesehatan daerah (SikDa) terpadu	Persen	100	100	100	100
2.5	Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)	FKTP	6	NA	6	6
2.6	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar	orang	100	NA	150	150
2.7	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan Pendidikan	orang	25	NA	35	40
2.8	Jumlah Rumah Sakit dengan SDM sesuai Standar	RS	5	6	6	6
2.9	Prevalensi balita gizi kurang	persen	7	8,03	6	6
2.10	Prevalensi Baduta Stunting	persen	18	16,22	17	17
2.11	Prevalensi balita Gizi kurus	persen	13	15,67	11	10
2.12	Angka Kematian ibu	Rasio / 100.000 Kelahiran Hidup	200	0 per 100.00 kelahiran hidup	172	161
2.13	Angka Kematian Bayi	Rasio / 1.000 Kelahiran Hidup	11	13,48 Per 1000 kelahiran hidup	10	10
2.14	Cakupan kepesertaan JKN	persen	100	100	100	100
2.15	Ketersediaan obat esensial (%)	persen	100	100	100	100
2.16	SPM RSUD	Persen	122 (80,2%)	79%	136 (89,4%)	144 (94,7%)
2.17	Status Akreditasi RSUD	Status	Paripurna	PARIPUR NA	Paripurna	Paripurna
2.18	Kinerja Keuangan RSUD	Skor	20	21	22	23

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Target 2025	Kondisi Akhir RPJMD 2026
2.19	Persentase tenaga Kesehatan berizin	Persen	100	100	100	100
2.20	Persentase sarana Produksi Obat, Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Berizin	Persen	100	100	100	100
2.22	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS	Persen	40	67	50	55
2.23	Angka kesembuhan TB	Rasio	93	85	95	92
2.24	Prevalensi HIV	persen	0,17	0,2	0,16	0,16
2.25	IR DBD	Rasio/100 ribu Pdd.	230	459	200	200
2.26	Prevalensi Hipertensi	persen	25	3,65*	25	25
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1	Persentase Penduduk Berakses Bersanitasi	%	96	96,02	97	97,5
3.2	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	rasio	98,84	106,22	95,8	92,45
3.3	Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km)	Km	195,34	195,337	195,34	195,34
3.4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (Meter)	Meter	14.765	148,950	16.765	17.765
3.5	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Km	2,68	NA	2,59	2,56
3.6	Persentase Panjang drainase dalam kondisi baik	persen	92,52	94,76	93,52	94
3.7	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	rasio	0,22	0,48	0,32	0,37
3.8	Persentase kapasitas unit air tanah/air baku	Persen	87	79,56	87	90
	Persentase kapasitas aliran sungai	persen	68	70,73	70	71
	Persentase daya tampung danau/folder/kolam retensi	persen	85,13	85,17	89,59	91,82
3.9	Persentase penduduk berakses air minum layak	persen	83,12	85,72	84,8	85,54
3.10	Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS- 3R/TPS	persen	44	41,88	31	24
3.11	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	persen	92,52	94,48	93,52	94
3.12	Persentase bangunan gedung yg memenuhi persyaratan teknis	persen	63,93	54,69*	77,05	81,97
3.13	Persentase Penataan Sempadan sungai	persen	12,46	15,61	18,46	21,46
3.14	Persentase jalan dalam kondisi mantap	persen	90,01	88,46	90,03	90,04
	Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	persen	92,81	94,11	92,83	92,84
3.15	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	persen	79,5	80,42	83	85
3.16	Persentase kesesuaian tata ruang	persen	88,9	94,17	89,6	90
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Target 2025	Kondisi Akhir RPJMD 2026
4.1	Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih	rumah tangga	25.246	7.363	26.496	27.246
4.2	Rumah tangga pengguna listrik	persen	90,48	56,37*	93,49	95
4.3	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	%	2,63	0,79	2,55	2,53
4.4	Persentase Rumah layak Huni	persen	97,24	99,21	97,84	98,14
4.5	Persentase Fasilitas Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	persen	16	100	34	43
	Persentase fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	persen	20,5	44,44	45,5	57,5
4.6	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yg ditangani	persen	40,49	68,42	97,3	100
4.7	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	persen	2,63	2,63	2,55	2,53
4.8	Luas kawasan permukiman kumuh	hektar	50	4,21	30	20
4.9	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	persen	92,8	93,48	93,64	94,06
	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	persen	92,86	93,48	94,3	95,02
	Persentase ketersediaan sarana prasarana TPU	persen	60	60	72	78
5	Perhubungan					
5.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	88.853	74.320*	138.625	163.987
5.2	Rasio Ijin Trayek	rasio	0	0	0	0
5.3	Jumlah uji KIR angkutan umum	angkutan	98	66*	200	300
5.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	buah	8	8	8	9
5.5	Kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	25,73	66*	27,73	28,73
5.6	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) menit	menit	30	25	25	25
5.7	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	Rp.	40.000	40.000*	40.000	40.000
5.8	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	persen	100	100	100	100
5.9	Persentase meningkatnya keselamatan pelayaran kapal angkutan penyebrangan	persen	100	100	100	100
6	Komunikasi dan Informatika					
6.1	Web site milik pemerintah daerah	website	70	1*	80	85
6.2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	persen	95,41	94,57	98,41	99,91
6.3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen	86,2	85,74	95,4	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Target 2025	Kondisi Akhir RPJMD 2026
6.4	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kota	persen	47,89	80	48	48,1
6.5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	34	60	41	45
6.6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	80,64	80,64	83,87	83,87
7	Lingkungan Hidup					
7.1	Jumlah titik pantau kualitas lingkungan (air dan udara)	titik	130	NA	134	136
7.2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	persen	100	100	100	100
7.3	Penegakan hukum lingkungan	persen	100	100	100	100
7.4	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	100	100	100	100
7.5	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	persen	87	85*	96	100
7.6	Cakupan pengelolaan Kehati	persen	64	55	85	100
7.7	Persentase pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	persen	100	100	100	100
7.8	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan atau PPLH	persen	4	4*	4	4
7.9	Cakupan kapasitas diklat dan penyuluhan	persen	40	NA	80	100
7.10	Cakupan penghargaan lingkungan hidup	persen	100	100	100	100
7.11	Cakupan penanganan kasus	persen	100	100	100	100
7.12	Persentase pengelolaan sampah	persen	99	100	100	100
8	Kependudukan dan Catatan Sipil					
8.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	rasio	0,99	0,99	0,99	0,99
8.2	Rasio bayi berakte kelahiran	rasio	0,96	100	0,96	0,96
	Rasio pasangan berakte nikah	rasio	0,72	100	0,74	0,75
	Cakupan kepemilikan akta perceraian	persen	96	100	96	96
8.3	Kepemilikan KTP (%)	persen	99	100	99	99
8.4	Cakupan pengelolaan inforamsi Adminduk	persen	100	100	100	100
8.5	Persentase penyampaian data profil kependudukan	persen	100	100	100	100
9.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
9.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	persen	47,78	98,68	47,85	48

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Target 2025	Kondisi Akhir RPJMD 2026
	pemerintah					
	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	persen	0,412	0,41	0,499	0,549
9.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	persen	5,44	2,54*	5,57	5,67
9.3	Rasio KDRT	rasio	0,04	0,02*	0,03	0,03
9.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	34,3	57,28*	35,5	36,1
9.5	perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	persen	100	100	100	100
9.6	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga	persen	40	NA	80	100
9.7	Cakupan data gender dan anak terpadu	persen	100	100	100	100
9.8	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Nindya	NINDYA	Utama	Utama
9.9	Persentase Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	persen	100	100	100	100
10	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
10.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	2	1	1,9	1,9
10.2	Rasio akseptor KB	persen	70,5	57*	71,5	72
10.3	Cakupan peserta KB aktif	persen	74,65	99,61	77,55	79
10.4	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	1,9	1,28*	2,1	2
10.5	Total Fertility Rate (TFR)	angka	2	2,15*	1,99	1,99
10.6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	14,34	19,38*	13,07	12,44
10.7	Persentase pemberdayaan kelompok kegiatan bangsa kencana	persen	75	100	79	80
11	Sosial					
11.1	Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	sarana	13	5*	14	14
11.2	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	persen	100	100	100	100
11.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	persen	100	100	100	100
11.4	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	persen	100	100	100	100
11.5	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	persen	100	100	100	100
11.6	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persen	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Target 2025	Kondisi Akhir RPJMD 2026
	Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)	persen	100	100	100	100
11.7	Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	persen	100	100	100	100
11.8	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	persen	100	100	100	100
12	Tenaga Kerja					
12.1	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	angka	6,21	2,33	4,43	3,55
12.2	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	20	28,35	21	22
12.3	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	kasus	0	0	0	0
12.4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	4,58	14,13	5,09	5,37
	Persentase produktifitas tenaga kerja	persen	100	100	100	100
12.5	Persetase implementasi kebijakan bidang ketenagakerjaan	persen	70	100	90	100
13	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
13.1	Persentase koperasi aktif	Persen	96,15	85,54*	97,44	97,44
13.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (KSP/USP)	unit	9.210	NA	9.210	9.210
13.3	Pertumbuhan KSP/USP yang mempunyai izin usaha simpan pinjam	persen	19,74	20	19,74	19,74
13.4	Persentase koprasi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian	persen	8,97	47	8,97	8,97
13.5	Persentase jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	persen	7,5	84,34*	7,5	7,5
13.5	Jumlah BPR/LKM (hanya BPR)	unit	4	4*	4	4
13.6	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	Persen	0,5	12,6*	0,5	0,5
	Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan	persen	2	84,34*	2	2
13.7	Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	persen	0,34	NA	0,34	52,01
13.8	Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang bermitra dg pasar rental modern	persen	1,38	NA	1,38	1,72
13.9	Persentase kapasitas kelembagaan koperasi	persen	19,23	51,12	19,23	19,23
13.10	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	persen	7,5	8	7,5	7,5
14	Penanaman Modal					
14.1	Jumlah investor berskala nasional PMDN	investor	100	55*	110	115
14.2	Jumlah investor berskala nasional PMA	investor	11	0*	15	17

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Target 2025	Kondisi Akhir RPJMD 2026
14.3	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN	juta Rp	1.810.205	5.490.938 *	1.995.751	2.095.538
14.4	Nilai Realisasi Investasi	Milyar Rp	4.250,00	#####	4.525,00	4.680,00
14.5	Peningkatan Jumlah Investor	Investor	2	2*	2	2
14.6	Nilai IKM	Nilai	88,31	87,4*	90,3	91,3
14.7	Prosentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Aturan Penanaman Modal	Persen	44,44	87,65	55	57
14.8	Persentase ketersediaan data perizinan	Persen	100	100	100	100
14.4	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA	000 \$	275.386	0*	333.217	366.539
15	Kebudayaan					
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kegiatan	18	8*	25	40
15.2	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	unit	3	3	3	3
15.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	103	103*	103	103
15.4	Persentase pelestarian budaya	persen	100	100	100	100
15.5	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan kesenian	persen	100	100	100	100
15.6	Persentase pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya	persen	100	100	100	100
15.7	Jumlah museum	unit	-	1	1	1
16	Kepemudaan dan Olahraga					
16.1	Jumlah organisasi pemuda	organisasi	65	82*	74	79
16.2	Jumlah organisasi olahraga (Pengkot)	Klub	222	5*	228	231
16.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	20	10*	36	44
16.4	Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	24	5*	42	51
16.5	Presentase pembinaan dan pengembangan kapasitas daya saing organisasi kepemudaan (OKP)	persen	100	100	100	100
16.6	Persentase atlit yang berprestasi	persen	51,82	62,51	70,87	29,06
16.7	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	persen	100	100	100	100
17	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
17.1	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	persen	57	100	93	100
17.2	Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan)	kegiatan	242	65*	355	355
18	Ketahanan Pangan					
18.1	Regulasi ketahanan pangan	regulasi	5		5	5
18.2	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	Nilai	88	99,53	90	90

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Target 2025	Kondisi Akhir RPJMD 2026
	Persentase Ketersediaan energi dan protein perkapita	Persen	100	100	100	100
18.3	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	persen	100	100	100	100
19	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
19.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	kelompok	5	5	5	5
19.2	Persentase LKK dan LAK yang aktif	persen	100	100	100	100
19.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	20	15	15	15
19.4	Jumlah LPM	kelompok	5	5	5	5
19.5	LPM Berprestasi (%)	Persen	1	1	2	2
19.6	PKK aktif (%)	Persen	100	100	100	100
19.7	Posyandu aktif (%)	Persen	100	100	100	100
19.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	3	4	4	4,5
20	Kearsipan					
20.1	persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik	Persen	75	76,67	100	100
20.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kegiatan	48	31*	49	50
20.3	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	persen	13	16,67	50	75
20.4	Daftar arsip dan SOP arsip	persen	20	20	20	20
21	Perpustakaan					
21.1	Jumlah perpustakaan (Daerah, Sekolah, swasta)	unit	239	271*	239	239
21.2	Jumlah pemustaka perpusda	pemustaka	38.500 Org dan 32 perpustakaan	79.462 Orang dan 50 perpustakaan	46.585 Org dan 42 perpustakaan	51.243 Org dan 47 perpustakaan
21.3	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	31.940	51.037*	42.440	52.440
21.4	Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buah	149.853	93.656*	151.053	152.053
22	Pariwisata					
22.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	353.514	346,647	427.320	469.826
22.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan MIGAS	Juta Rp.	379.932	NA	425.064	447.630
22.3	Persentase PAD sektor Pariwisata	persen	2,63	6,9*	2,9	3,05
22.4	Persentase pengembangan dan perlindungan pelaku ekonomi kreatif	persen	0,4	0,4	0,6	0,7
22.5	Presentase Sumber daya pariwisata yang di kembangkan	persen	40	40	80	100
22.6	Presentase Sumber daya Ekraf yang di kembangkan	persen	44	30	88	100
23	Kelautan dan Perikanan					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Target 2025	Kondisi Akhir RPJMD 2026
23.1	Produksi perikanan					
23.1.1	Produksi perikanan tangkap	Ton	20.315,70	21.915,80	21.511,00	22.134,80
23.1.2	Produksi perikanan budidaya	Ton	3.150,00	3.562,23	3450	3.600,00
23.2	Konsumsi ikan	kg	60,49		66,49	69,49
23.3	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	persen	26	22	33	37
24	Perdagangan					
24.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan MIGAS	persen	3,5	NA	3,7	3,8
24.2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tanpa MIGAS	persen	6,4	NA	7,13	7,5
24.3	Ekspor Bersih Perdagangan (Million \$)	juta \$	Meningkat	NA	Meningkat	Meningkat
24.4	Persentase perusahaan yang terdaftar	persen	32,14	NA	42,86	48,21
24.5	Persentase eksportir yang aktif menggunakan SKA	persen	100	NA	100	100
24.6	Persentase penataan sarana distribusi perdagangan	persen	100	NA	100	100
24.7	Persentase pembinaan terhadap pengelola pasar	persen	17	NA	20	21
25	Perindustrian					
25.1	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dengan MIGAS	persen	69,57	78,37	68,25	68,17
25.2	Persentase pertumbuhan Industri kecil menengah	persen	1	N	1	1
25.3	Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen produk	persen	1,18	5,58	1,87	2,21
25.4	Persentase IKM yang memiliki izin usaha	persen	1	0,47	3	4
25.5	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINAS	persen	0,28	0,74	0,83	1,11
26	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
26.1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen	100	100	100	100
26.2	Persentase Penegakan PERDA	persen	100	100	100	100
26.3	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	persen	100	100	100	100
26.4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	80	93,33	90	90
26.5	Persentase warga negara di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang memperoleh layanan kebencanaan	persen	100	100	100	100
26.6	Persentase Capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	persen	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Target 2025	Kondisi Akhir RPJMD 2026
27	Pertanahan					
27.1	Penyelesaian kasus tanah Negara	persen	70	100	90	100
27.2	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan	persen	100	100	100	100
27.3	Persentase penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah	persen	50	100	100	100
27.4	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	persen	10	24,72	40	50
27.5	Persentase penyediaan tanah untuk masyarakat	persen	60	100	90	100
27.6	Persentase kesesuaian Pentagunaan tanah	persen	67	NA	70	72
28	Statistik					
28.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	sistem	1	1	1	1
29	Persandian					
29.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	persen	32,26	NA	83,87	100
29.2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	100	100	100	100
29.3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	100	100	100	100
ASPEK DAYA SAING						
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	985.401	NA	1.065.401	1.085.401
2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Rp	1.664.991	NA	1.724.991	1.754.991
3	Produktivitas total daerah		64,45	NA	66,66	67,79
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	0,0022	0,00136	0,0022	0
2	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	orang	29.026	NA	31.026	32.026
3	Kesesuaian Tata Ruang	persen	88,9	94,17	89,6	90
4	Luas wilayah industri	ha	2.710	2.849	2.710	2.710
5	Luas wilayah banjir	ha	656,76	190,79	389,37	255,68
6	Jenis dan jumlah bank dan cabang	unit	36	36	36	36
7	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	unit	30	30	35	40
5	Lingkungan Hidup					
5.1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	indeks	53,53	NA	53,73	53,8

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Target 2025	Kondisi Akhir RPJMD 2026
5.2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	indeks	86,34	NA	86,54	86,64
5.3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	indeks	49,21	NA	53,43	55,54
6	Komunikas dan Informatika					
6.1	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	%	93,63	100	94,35	94,7
6.2	Proporsi individu yang mengakses internet	%	80	98,67	83	85
Fokus Iklim Berinvestasi						
1	Angka kriminalitas	angka	Menurun	NA	Menurun	Menurun
2	Jumlah demo	kali	1	-	-	-
3	Lama proses perijinan	hari	1	1*	1	1
Fokus Sumber Daya Manusia						
1	Rasio lulusan S1/S2/S3	rasio	0,06	0,06*	0,07	0,07
2	Rasio ketergantungan	rasio	40,74	43,02*	38,44	37,14

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, 2024 (hasil olah)

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2025 merupakan dokumen yang disusun untuk memberikan gambaran kepada seluruh stakeholder pembangunan Kota Bontang tentang arah dan kebijakan pembangunan pemerintah Kota Bontang Tahun 2025. Sesuai dengan pentahapan perencanaan dalam RPJMD Kota Bontang dan secara menyeluruh memperhatikan dinamika isu dan permasalahan pembangunan hingga Tahun 2023, arah kebijakan peningkatan daya saing investasi, pariwisata dan UMKM melalui peningkatan kompetensi SDM, infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup

RKPD Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan dan melakukan sinkronisasi dengan arahan kebijakan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, arahan kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, hasil evaluasi pembangunan sampai dengan triwulan I Tahun 2024, dan pencapaian target RPJMD tahun perencanaan serta penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD. Prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2025, sepenuhnya juga disusun berdasarkan isu dan permasalahan aktual yang dirasakan masyarakat.

Sejalan dengan upaya menggali seluas-luasnya aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan RKPD telah melalui tahapan forum konsultasi publik, forum musrenbang yang melibatkan seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Tahapan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan melalui pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan *top down*, dan pendekatan *bottom up*. Hal ini ditujukan agar semua ruang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah digunakan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Dengan disetujuinya RKPD Kota Bontang Tahun 2025 ini, akan menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Andi Kurnawansah, SH, MH
NIP. 196907152003122009

WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE